



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU  
TAHUN 2023**

*\*palumantapbergerak*



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN RKPD

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA RKPD

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**BAB VII : PENUTUP**

- (2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 1 Juli 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2023

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-9
	1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-10
	1.5. Sistematika Penyusunan .....	I-11
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>II-1</b>
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
	2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-14
	2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana .....	II-16
	2.1.1.4. Demografi .....	II-38
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-43
	2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-44
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-65
	2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-76
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-78
	2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	II-78

2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-107
2.1.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-132
2.1.3.4.	Fokus Layanan Penunjang Urusan.	II-140
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-142
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-142
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-149
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-160
2.1.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-165
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-211
2.2.1	Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (Empat) Tahun 2021.....	II-211
2.2.2	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (Empat) Tahun 2021.....	II-225
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-293
2.3.1	Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah .....	II-293
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-297
2.3.2.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu.....	II-299
2.3.2.2	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu.....	II-305
2.3.2.3	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu .....	II-311
2.3.2.4	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu .....	II-314
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021 .....	III-2

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	III-14
3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global .....	III-16
3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia .....	III-17
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-24
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-25
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-28
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu.	IV-1
4.1.2. Tema Pembangunan .....	IV-4
4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan .....	IV-8
4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan .....	IV-14
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023....	IV-20
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV-20
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	IV-32
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu .....	IV-35
4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu .....	IV-46
4.2.5. Sasaran Pembangunan .....	IV-50
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>VII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021...	II-2
Tabel 2.2	Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu.....	II-4
Tabel 2.3	Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan.....	II-8
Tabel 2.4	Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.5	Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021.....	II-10
Tabel 2.6	Rata-rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2021.....	II-11
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan Kota Palu.....	II-13
Tabel 2.8	Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015.....	II-16
Tabel 2.9	Sejarah dan Jenis Bencana Alam serta Kerusakan yang terjadi di Kota Palu dan Sekitarnya.....	II-18
Tabel 2.10	Potensi Bencana Kota Palu.....	II-19
Tabel 2.11	Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu.....	II-20
Tabel 2.12	Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir di Kota Palu.....	II-22
Tabel 2.13	Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir Bnadang di Kota Palu.....	II-24
Tabel 2.14	Luas Wilayah Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palu .....	II-26
Tabel 2.15	Luas Wilayah Terpapar Bencana Gempa Bumi di Kota Palu..	II-27
Tabel 2.16	Luas Wilayah Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kota Palu	II-29
Tabel 2.17	Luas Wilayah Terpapar Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu.....	II-30
Tabel 2.18	Luas Wilayah Terpapar Bencana Kekeringan di Kota Palu...	II-31
Tabel 2.19	Luas Wilayah Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu	II-33
Tabel 2.20	Luas Wilayah Terpapar Bencana Tsunami di Kota Palu.....	II-34
Tabel 2.21	Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu.....	II-35
Tabel 2.22	Tingkat Kerentanan Bencana di Kota Palu.....	II-36
Tabel 2.23	Tingkat Kapasitas Bencana di Kota Palu.....	II-37

Tabel 2.24	Tingkat Resiko Bencana di Kota Palu.....	II-37
Tabel 2.25	Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga Tahun 2017-2021.....	II-39
Tabel 2.26	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021.....	II-41
Tabel 2.27	Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-43
Tabel 2.28	Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021.....	II-45
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp).....	II-47
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp).....	II-49
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-49
Tabel 2.32	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2017- 2021.....	II-50
Tabel 2.33	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021.....	II-51
Tabel 2.34	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021.....	II-52
Tabel 2.35	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021 .....	II-53
Tabel 2.36	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah).....	II-55
Tabel 2.37	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) 2017-2021.....	II-57
Tabel 2.38	Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....	II-58
Tabel 2.39	Perkembangan Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok	

	Pengeluaran Tahun 2017 -2021.....	II-59
Tabel 2.40	Pemetaan Pendapatan Versi Bank Dunia Untuk Kota Palu..	II-63
Tabel 2.41	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-64
Tabel 2.42	APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....	II-67
Tabel 2.43	Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengan Tahun 2021.....	II-70
Tabel 2.44	AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2017-2021.....	II-72
Tabel 2.45	Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....	II-75
Tabel 2.46	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....	II-77
Tabel 2.47	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2017 – 2021.....	II-79
Tabel 2.48	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (per 1.000 Murid)) Tahun 2017-2021.....	II-81
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-82
Tabel 2.50	Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II-83
Tabel 2.51	Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 – 2020.....	II-84
Tabel 2.52	Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....	II-84
Tabel 2.53	Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%) Tahun 2017 – 2021.....	II-86
Tabel 2.54	Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....	II-88
Tabel 2.55	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 .....	II-89
Tabel 2.56	Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	II-90
Tabel 2.57	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk)Tahun 2017-2021.....	II-91
Tabel 2.58	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	

		II-92
Tabel 2.59	Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-94
Tabel 2.60	Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-95
Tabel 2.61	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021 .....	II-96
Tabel 2.62	Panjang Ruas Jalan Bertrottoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2017-2021.....	II-97
Tabel 2.63	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2020-2021.....	II-99
Tabel 2.64	Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2020.....	II-100
Tabel 2.65	Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2018-2021.....	II-101
Tabel 2.66	Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-107
Tabel 2.67	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020.....	II-107
Tabel 2.68	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-108
Tabel 2.69	Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2021.....	II-109
Tabel 2.70	Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2017-2020.....	II-109
Tabel 2.71	Luas Lahan Bersertifikat (Hektar) di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.72	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-112
Tabel 2.73	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-120
Tabel 2.74	Rasio Izin Trayek di Kota Palu tahun 2017-2021.....	II-121
Tabel 2.75	Jumlah Pelabuhan/Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-122
Tabel 2.76	Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-122
Tabel 2.77	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-124
Tabel 2.78	Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-125

Tabel 2.79	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-126
Tabel 2.80	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2017-2021...	II-126
Tabel 2.81	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu Tahun 2017 s/d 2021.....	II-128
Tabel 2.82	Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 s/d 2021.....	II-128
Tabel 2.83	Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-129
Tabel 2.84	Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-131
Tabel 2.85	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-132
Tabel 2.86	Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-133
Tabel 2.87	Destinasi Wisata di Kota Palu.....	II-134
Tabel 2.88	Persentase Silpa Terhadap APBD Kota Pau Tahun 2016-2020.....	II-141
Tabel 2.89	Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II-141
Tabel 2.90	Persentase Belanja Kesehatan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.91	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2021.....	II-145
Tabel 2.92	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut Kelompok Bukan Mkanan Tahun 2020-2021.....	II-146
Tabel 2.93	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021.....	II-148
Tabel 2.94	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021.....	II-150
Tabel 2.95	Jumlah Penumpangan Bandara Tahun 2017-2021.....	II-151
Tabel 2.96	Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa) Tahun 2017-2021.....	II-152
Tabel 2.97	Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-154
Tabel 2.98	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-154

Tabel 2.99	Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu Tahun 2016-2018.....	II-155
Tabel 2.100	Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-156
Tabel 2.101	Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu Tahun 2017-2021 .....	II-156
Tabel 2.102	Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-157
Tabel 2.103	Penduduk Terlayani Air Minum di Kota PALU Tahun 2017-2021.....	II-158
Tabel 2.104	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2017-2021.....	II-159
Tabel 2.105	Jumlah Rumah Tangga YANG Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2017-2021.....	II-159
Tabel 2.106	Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2014-2018....	II-160
Tabel 2.107	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-161
Tabel 2.108	Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-162
Tabel 2.109	Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2021.....	II-163
Tabel 2.110	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021.....	II-164
Tabel 2.111	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2021.....	II-166
Tabel 2.112	Rasio Ketergantungan Kota Palu.....	II-167
Tabel 2.113	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II-168
Tabel 2.114	Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur Pemerintahan.....	II-211
Tabel 2.115	Rata-rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu.....	II-225
Tabel 2.116	Pencapaian Program OPD Terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu tahun 2021.....	II-228
Tabel 2.117	Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.....	II-299
Tabel 2.118	Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	II-305
Tabel 2.119	Permasalahan Kota Palu berkaitan urusan pemerintahan pilihan.....	II-311
Tabel 2.120	Permasalahan Kota Palu berkaitan urusan pemerintahan	



	penunjang.....	II-314
Tabel 3.1	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah).....	III – 3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....	III –5
Tabel 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2020– 2021.....	III – 7
Tabel 3.4	Perbandingan Garis Kemiskinan (dalam Rp).....	III – 9
Tabel 3.5	<i>Gini Ratio</i> Kota Palu Tahun 2017-2021.....	III –10
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III –13
Tabel 3.7	Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	III –16
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2022, serta Proyeksi Tahun 2023.....	III –36
Tabel 3.9	Realisasi pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023.....	III –40
Tabel 4.1	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2023	IV – 9
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 .....	IV –11
Tabel 4.3	Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....	IV –34
Tabel 4.4	Program Prioritas Pembangunan Kota Palu.....	IV –35
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, Dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026.....	IV –38
Tabel 4.6	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.....	IV –41
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2023 serta PD Penanggung jawab.....	IV –43
Tabel 4.8	Matriks Keterkaitan Arahkan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu.....	IV –47
Tabel 4.9	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2023.....	IV –50
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	V – 2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2023.....	VI – 2

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu .....	II – 3
Gambar 2.2	Peta <i>Class</i> Kelerengan .....	II – 6
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan Kota Palu .....	II – 12
Gambar 2.4	Persentase Kejadian Bencana Kota Palu Tahun 1815-2015.....	II – 17
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Palu.....	II – 21
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Banjir Bnadang di Kota Palu.	II – 23
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Palu.....	II – 25
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Palu....	II – 27
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Palu	II – 28
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu .....	II – 30
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Palu.....	II – 32
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu	II – 33
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu.....	II – 35
Gambar 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021.....	II – 40
Gambar 2.15	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 42
Gambar 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020	

	(Juta Rp).....	II – 47
Gambar 2.17	Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021.....	II – 48
Gambar 2.18	Inflasi Kota Palu Tahun 2017 – 2021 .....	II – 58
Gambar 2.19	PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021.....	II – 60
Gambar 2.20	Angka Gini Rasio Kota Palu Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 62
Gambar 2.21	Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	II – 65
Gambar 2.22	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 66
Gambar 2.23	Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs. Dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2017-2021..	II – 69
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021.....	II – 73
Gambar 2.25	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2017-2021 .....	II – 75
Gambar 2.26	Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen) Tahun 2017 – 2021.....	II – 78
Gambar 2.27	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 86
Gambar 2.28	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2017-2021 .....	II – 102
Gambar 2.29	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu tahun 2017-2021.....	II – 104
Gambar 2.30	Persentase Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2017-2021 .....	II – 105
Gambar 2.31	Rasio Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 .....	II – 105
Gambar 2.32	Rasio Pos Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021.....	II – 106
Gambar 2.33	Penduduk ber KT, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 112
Gambar 2.34	Rasio Penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 113
Gambar 2.35	Rasio Pasangan ber Akte Nikah di Kota Palu	

	Tahun 2017-2021.....	II – 114
Gambar 2.36	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 115
Gambar 2.37	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 116
Gambar 2.38	Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 118
Gambar 2.39	Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II – 119
Gambar 2.40	Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II – 119
Gambar 2.41	Persentase Uji Klr Angkutan Umum di Kota Palu tahun 2017-2020.....	II – 121
Gambar 2.42	Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 123
Gambar 2.43	Tota Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 124
Gambar 2.44	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu Tahun 2016-2020.....	II – 134
Gambar 2.45	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 135
Gambar 2.46	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 136
Gambar 2.47	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu (%) Tahun 2017-2021.....	II – 137
Gambar 2.48	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 138
Gambar 2.49	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017-2021.....	II – 139
Gambar 2.50	Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017-2021.....	II – 140
Gambar 2.51	Rerata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2017-2021.....	II – 144
Gambar 2.51	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2017-2021.....	II – 151

Gambar 2.52	Jumlah Orang yang melalui Terminal.....	II – 153
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2017 – 2021 (dalam Jutaan rupiah).....	III – 4
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2017-2021.....	III – 8
Gambar 3.3	Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2017-2021 (dalam ribu jiwa).....	III – 8
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan Kota Palu .....	III – 9
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017- 2021.....	III – 11
Gambar 3.6	Angka Harapan Hidup .....	III – 11
Gambar 3.7	Dimensi Pendidikan .....	III – 12
Gambar 3.8	Dimensi Daya Beli Masyarakat .....	III – 13
Gambar 3.9	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022.....	III – 17
Gambar 4.1	Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 .....	IV – 6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Penyusunan RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Orientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan,



Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional. Selanjutnya, secara substansi dokumen RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan tahapan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2010 – 2030, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2023 dan RTRW Nasional.

RPJP Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata,

serta Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

Hasil pembangunan yang ingin dicapai pada akhir tahap keempat RPJPD Kota Palu, ialah :

- Setiap wilayah kecamatan telah memiliki Kawasan Pusat Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta tersedianya Fasilitas untuk Kemudahan Pelayanan Publik, tanpa mengabaikan persoalan lingkungan;
- Terciptanya kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui pemahaman nilai - nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan dan nondiskriminasi, meningkatnya kesadaran dan penerapan penegakan hukum, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang didukung profesionalitas aparatur;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, yang mengarah pada perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan relevansi, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa;
- Daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya sektor perdagangan, pariwisata, industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
- Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, Iptek, dan industri;
- Terlaksananya penata kelolaan lembaga ekonomi masyarakat yang mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;

- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi, pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;
- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Kota Palu Tahun 2023 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya enam prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, Perubahan RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja PD, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan

serta implementasi dan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun RKPD Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
- 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
- 16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 23) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan



- Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 24) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
  - 36) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan RKP Tahun 2023;
  - 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
  - 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
  - 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);
  - 40) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
  - 41) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
  - 42) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  - 43) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);
- 44) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Palu Tahun 2019-2020 yang kemudian diperpanjang hingga Tahun 2024, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pelayanan dasar menjadi tujuan dan sasaran pemerintah Kota Palu serta perangkat daerah serta pencapaian target dan sasaran SDG's sebagai prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2023.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

RKPD Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 bertujuan:

- a. Sebagai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
- d. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2023 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.  
Permasalahan Pembangunan Daerah.
  - 2.3.3. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
  - 2.3.4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB VII. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Kota Palu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi. Dalam struktur tata ruang Kota Palu juga ditunjuk sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Secara umum, Kota Palu disebut sebagai kota lima dimensi, sebab berpadunya unsur alami gunung, pantai, lembah, sungai dan bukit dalam satu landskep hamparan yang utuh. Adapun informasi kondisi umum Kota Palu dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi Kota Palu, menggambarkan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Palu.

**2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

**A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km<sup>2</sup> (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km<sup>2</sup> (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tergambar dalam tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1****Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
	Kota Palu	<b>395,06</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2021*

Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa, sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

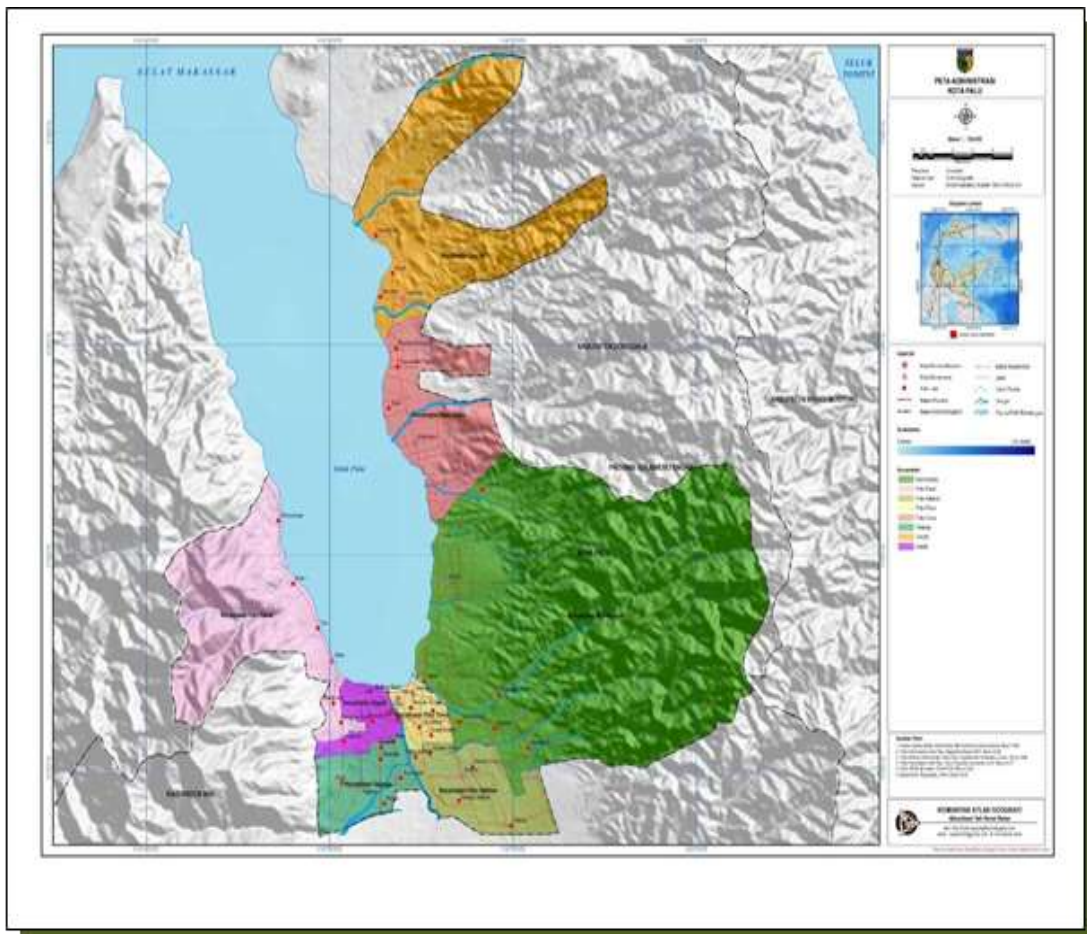
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.



## B. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara  $0^{\circ},36''$  -  $0^{\circ},56''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ},45''$  -  $121^{\circ},1''$  Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.

Berikut letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta administrasi wilayah Kota Palu di bawah ini:



Sumber: RTRW kota palu, 2010-2030

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kota Palu**

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Letak kecamatan dengan sejumlah kelurahannya di Kota Palu menurut posisi pantai dijabarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
<b>Kota Palu</b>		<b>46</b>	<b>17</b>	<b>29</b>

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2021*

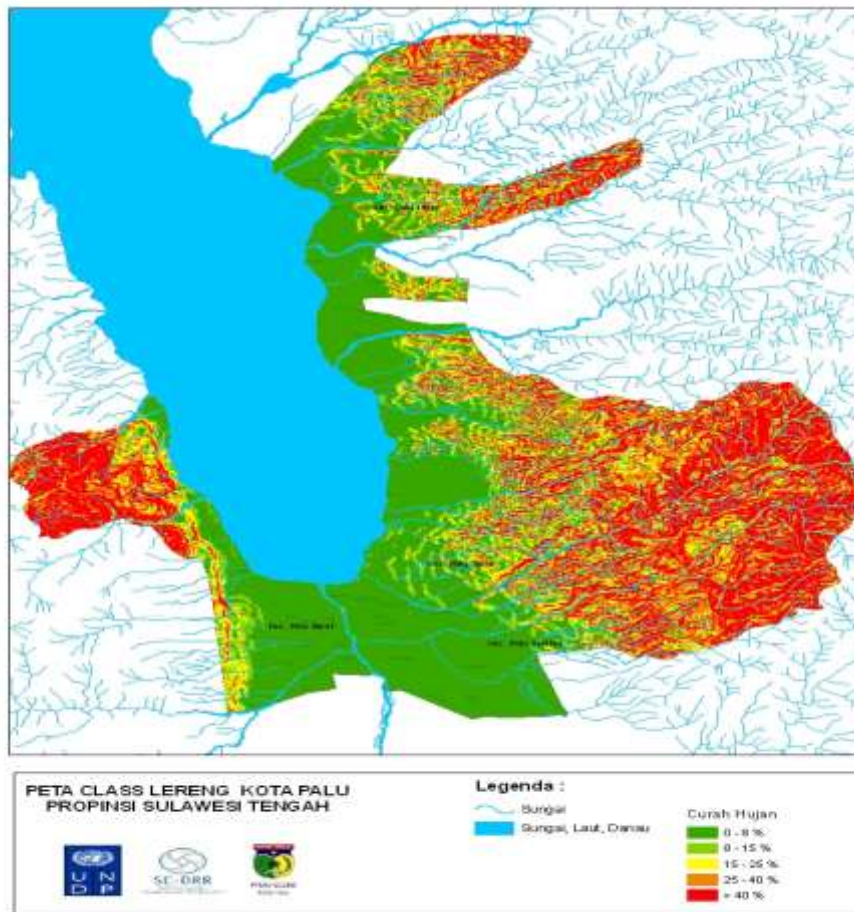
Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa letak Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan berada pada wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Di sisi lain, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli memiliki masing-masing lima kelurahan yang hampir semuanya berada pada pesisir pantai, 4 (empat) kelurahan berada pada pesisir pantai dan 1 (satu) kelurahan berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

### **C. Kondisi Topografi**

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya (*TAHURA*).

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll;
4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri dan Watusampu.



Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2010

**Gambar 2.2.**  
**Peta Class Kelerengan**

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

#### **D. Kondisi Geologi**

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, granit, granodiorit, riolit, quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini;
2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh

struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

### **E. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi**

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.3 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

**Tabel 2.3**  
**Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu**  
**Menurut Kecamatan**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Sungai</b>
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu pada Tahun 2021 adalah 33,5°C terjadi pada bulan Mei. Suhu udara minimum terjadi pada bulan April dan September

yaitu sebesar 22,6°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 28,3°C, dan Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 26,8°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 82,5 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei yaitu 77,6 persen.

Rata-rata suhu udara, dan kelembabannya di Kota Palu Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap bulan di Kota Palu tahun 2021**

Bulan	Suhu Udara			Kelembapan (%)
	Minimum	Maximum	Rata-rata	
<b>Januari</b>	23,6	33	27,8	73,8
<b>Februari</b>	23,3	32,4	27,4	78,1
<b>Maret</b>	22,9	32,5	27,4	77,9
<b>April</b>	22,6	32,2	27,4	79,2
<b>Mei</b>	22,9	33,5	28,3	77,6
<b>Juni</b>	22,8	33,2	27,6	78,2
<b>Juli</b>	23,2	31,7	26,8	81,9
<b>Agustus</b>	23	32,1	26,9	82,5
<b>September</b>	22,6	32,1	26,9	81,6
<b>Oktober</b>	23,1	33	27,9	78,6
<b>November</b>	23,6	32,5	27,8	78,3
<b>Desember</b>	23	32	27,4	78

*Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu, 2022*

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021. Tekanan udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2021 terjadi pada bulan Juni sebesar 1.012,0 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan November sebesar 1009,9 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat nyaris konstan antara 3-5 knots. Angka 5 knots terjadi pada bulan Februari, dan Maret, 4 knots terjadi pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Oktober, November dan Desember sementara 3 knots terjadi pada bulan Juli hingga September Tahun 2021. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari



dua arah mata angin yaitu Utara, dan Timur Laut dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah Timur Laut wilayah Kota Palu.

Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin terbanyak setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021 terlihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan**  
**Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Tekanan Udara (mb)</b>	<b>Kecepatan Angin (knot)</b>	<b>Arah Angin</b>
<b>Januari</b>	1010,0	4	Utara
<b>Pebruari</b>	1011,0	5	Utara
<b>Maret</b>	1010,7	5	Utara
<b>April</b>	1011,4	4	Utara
<b>Mei</b>	1010,4	4	Utara
<b>Juni</b>	1012,0	4	Timur
<b>Juli</b>	1011,3	3	Timur
<b>Agustus</b>	1011,8	3	Timur Laut
<b>September</b>	1011,3	3	Timur Laut
<b>Oktober</b>	1010,8	4	Timur Laut
<b>Nopember</b>	1009,9	4	Timur Laut
<b>Desember</b>	1011,1	4	Timur Laut

*Sumber: BMKG Kota Palu Tahun 2022*

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2021 terjadi pada Bulan Oktober yaitu 155 mm dan Bulan Maret yaitu 129,5 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu 16,2 mm dan bulan Mei yaitu 36,3 mm.

Berikut curah hujan setiap bulan di Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam Tabel 2.6.



**Tabel 2.6**  
**Rata-rata Curah Hujan**  
**setiap bulan di Kota Palu, Tahun 2021**

<b>Bulan</b>	<b>Curah Hujan (mm)</b>
<b>Januari</b>	16,2
<b>Pebruari</b>	45,7
<b>Maret</b>	129,5
<b>April</b>	83
<b>Mei</b>	36,3
<b>Juni</b>	77,4
<b>Juli</b>	125,8
<b>Agustus</b>	122
<b>September</b>	93,2
<b>Oktober</b>	154
<b>Nopember</b>	57,4
<b>Desember</b>	55,8

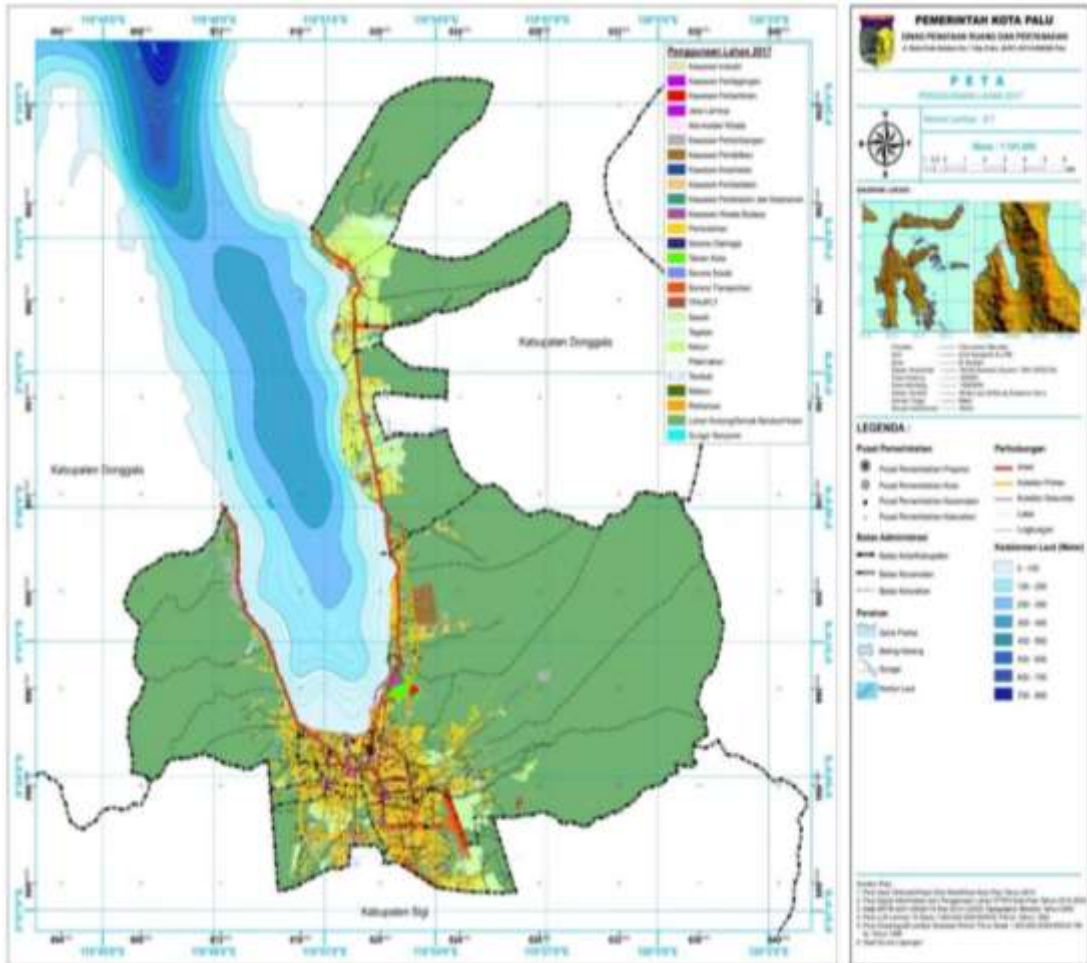
*Sumber: BMKG Kota Palu Tahun 2022*

#### **F. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari permukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (makam, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Guna lahan pada kawasan budi daya Kota Palu didominasi oleh kawasan permukiman seluas 3.975,01 ha atau sebesar 10,06%. Namun secara garis besar penggunaan lahan di Kota Palu

didominasi berupa lahan kosong/semak belukar/hutan seluas 30.839,85 ha atau sebesar 78,06%.



Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

**Gambar 2.3**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Palu**

**Tabel 2.7**  
**Penggunaan Lahan Kota Palu**

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)								Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Mantikulo	Palu Barat	Palu Selatan	Palu Timur	Palu Utara	Tatanga	Ulujadi	Tawaeli		
1	Akomodasi Wisata	2,31	2,56	2,26	7,53	1,72	0,99	4,67		22,04	0,06
2	Permukiman	969,80	397,38	883,85	354,94	274,13	491,67	368,55	234,69	3.975,01	10,06
3	Kawasan Bersejarah		1,82		0,81					2,63	0,01
4	Kawasan Industri	18,93	1,04	4,39	1,31	67,05	1,64	12,69	66,77	173,82	0,44
5	Kawasan Kesehatan	6,93	4,80	1,58	3,11	6,19	0,59	1,63	0,76	25,59	0,06
6	Kawasan Pantai Berhutan Bakau				0,94					0,94	0,00
7	Kawasan Pariwisata					9,60				9,60	0,02
8	Kawasan Pendidikan	226,25	28,47	15,38	29,01	11,41	10,46	5,91	4,12	331,01	0,84
9	Kawasan Perdagangan	78,49	93,27	90,81	102,60	12,15	34,58	5,00	22,00	438,90	1,11
10	Kawasan Peribadatan	7,40	8,75	7,06	4,57	0,76	3,44	1,76	1,34	35,08	0,09
11	Kawasan Perkantoran	50,56	11,65	24,37	55,59	3,78	0,34	1,38	6,08	153,75	0,39
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4,89	0,21	15,23	21,13	4,82	1,11		0,28	47,67	0,12
13	Kawasan Pertambangan	25,82		0,85		24,91	13,51	183,39		248,48	0,63
14	Kebun	43,22		59,16		458,57			784,46	1.345,41	3,40
15	Lahan Kosong/ Semak Belukar/ Hutan	17264	146,18	522,50	6,18	1788,75	766,75	5728,21	4617,28	30.839,85	78,06
16	Lapangan Golf	32,82								32,82	0,08
17	Makam	11,81	3,33	2,38	1,35	1,43	0,62	0,88	0,89	22,69	0,06
18	Pasir Pantai	2,34			2,19	3,52			1,80	9,85	0,02
19	Pelabuhan Kecil								0,11	0,11	0,00
20	Penggaraman Talise	18,63				1,29			0,68	20,60	0,05
21	Pergudangan	16,51				4,64				21,15	0,05
22	Hutan Mangrove					0,32			2,40	2,72	0,01
23	Peternakan			8,22			1,87	0,31		10,40	0,03
24	Reklamasi	6,21	1,82					3,62		11,65	0,03
25	Ruang Kegiatan Sektor Informal	10,76	5,84	0,31	0,33			1,21		18,45	0,05
26	Ruang Terbuka Hijau	82,16	1,25	0,01	8,41		0,15		0,89	92,87	0,24
27	Sarana Olahraga	11,44	2,03	1,92	1,84	5,13	4,26	1,18	5,45	33,25	0,08
28	Sarana Sosial	0,64	3,97	5,81	0,59	0,19			0,17	11,37	0,03
29	Sarana Transportasi	39,77	0,60	101,21		4,48		0,27	35,96	182,29	0,46
30	Sawah	232,58	2,86	183,91		274,45	172,24	9,66	102,53	978,23	2,48
31	Sungai Temporer	67,17	9,71	24,34	11,94	52,14	13,02	15,73	90,87	284,92	0,72
32	Tegalan	1,13							106,37	107,50	0,27
33	TPA/IPLT	14,63								14,63	0,04
34	Jasa Lainnya		0,55		0,13		0,04			0,72	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.247,20</b>	<b>728,09</b>	<b>1.955,55</b>	<b>614,50</b>	<b>3.011,43</b>	<b>1.517,28</b>	<b>6.346,05</b>	<b>6.085,90</b>	<b>39.506,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya Kecamatan Tawaeli di Kota Palu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu.

Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan *New Town* Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Hunatap) di Kelurahan Tondo

dan Talise dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu.

- b. Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
  - c. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako (Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas, dilewati Jalan Lingkar Luar, Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Perimer K2.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Mempunyai Resiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran permukiman eksisting terjadi pemusatan pada bagian tengah, dengan tingkat kepadatan tinggi kemudian menyebar ke kesisi barat dan kesisi timur dengan kepadatan rendah.
  - b. Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan lingkungan lainnya.
  - c. Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada

bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatan permukiman eksisting, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati sesar aktif Palu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4. Lebih jelasnya lihat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Palu memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Dimana kejadian-kejadian bencana tersebut ada yang menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian fisik serta kerusakan lahan yang tidak sedikit. Catatan sejarah kejadian bencana Kota Palu dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

Berdasarkan DIBI, dalam rentang tahun 1815–2015 tercatat 6 (enam) jenis bencana yang pernah terjadi di Kota Palu, yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit dan tanah longsor. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi Kota Palu. Adapun catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Catatan Sejarah Kejadian Bencana di Kota Palu Tahun 1815-2015**

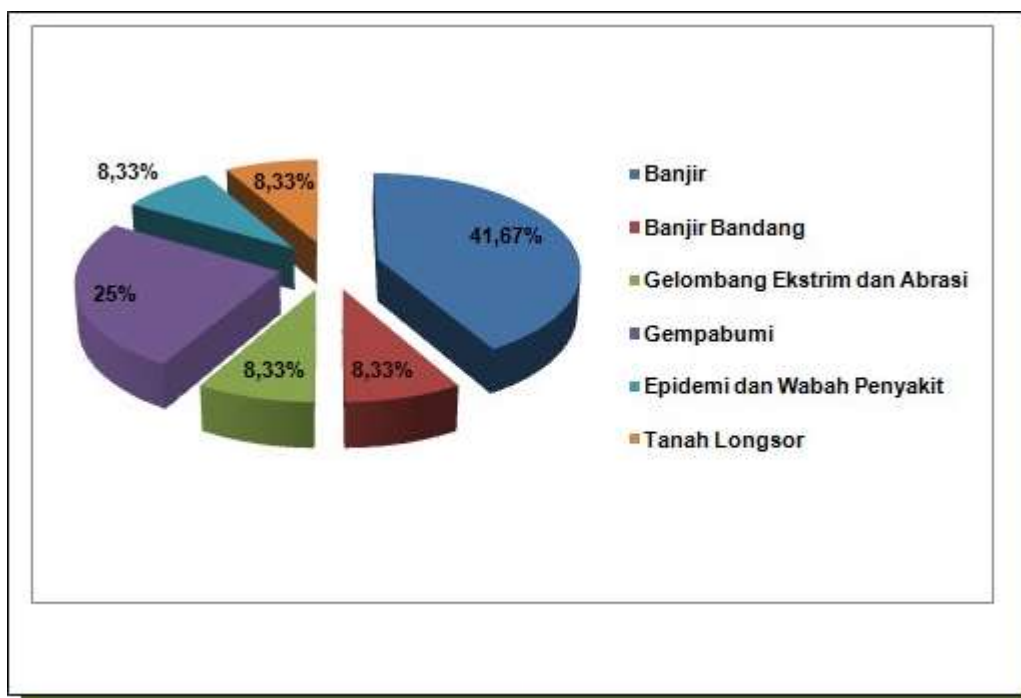
KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN
Banjir	5	3	2.129	5	13.5	11	11	-
Banjir Bandang	1	-	-	-	7.5	-	-	-
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	-	-	34	-	-
Gempabumi	3	-	3	-	13.0	99	-	-
Epidemi dan Wabah Penyakit	1	3	220	-	-	-	-	-
Tanah Longsor	1	1	11	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2.36</b>	<b>5</b>	<b>34.0</b>	<b>1.0</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam rentang tahun 1815–2015 telah terjadi 12 kali kejadian bencana di Kota Palu. Kejadian bencana tersebut meliputi 6 (enam) jenis bencana, dimana bencana yang dominan terjadi adalah bencana banjir dengan 5 (lima) kali kejadian dan diikuti bencana gempa bumi dengan 3 (tiga) kali

kejadian. Kejadian bencana banjir merupakan kejadian yang berdampak signifikan di Kota Palu selain bencana lainnya.

Persentase kejadian bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015 dilihat berdasarkan perbandingan total kejadian dengan jumlah kejadian per bencana. Adapun persentase kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

**Gambar 2.4**  
**Persentase Kejadian Bencana Kota Palu Tahun 1815-2015**

Dari gambar di atas, terlihat bahwa bencana banjir dan gempa bumi mendominasi kejadian bencana di Kota Palu dari tahun 1815–2015, dengan persentase kejadian yaitu 41,67% dan 25%. Sedangkan bencana lainnya masing-masing memiliki persentase 8,33% yaitu bencana banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit serta tanah longsor.

Bencana alam yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 pukul 18:02 adalah gempa bumi dengan Magnitudo 7,4 SR dan tsunami dengan pusat gempa berada sekitar 70 km utara Kota Palu. Mekanisme gempa bumi terjadi akibat strike-slip faulting pada kedalaman 20 km dibagian dalam lempeng mikro Laut Maluku. Bukti geodetik dengan pixel tracking dan gambar InSAR dengan jelas

menunjukkan bahwa terjadi ruptur, termasuk ruptur permukaan yang melalui Kota Palu lebih dari 150 km (USGS 2018).

Selain catatan sejarah kejadian bencana Kota Palu berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, catatan sejarah kebencanaan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu, dapat dilihat pada Tabel 2.9

**Tabel 2.9**  
**Sejarah dan Jenis Bencana Alam serta Kerusakan yang terjadi di Kota Palu dan Sekitarnya**

<b>Waktu</b>	<b>Jenis bencana dan kekuatannya</b>	<b>Keterangan dan Jenis kerusakan</b>
1 des 1927	Tsunami dan gempa kekuatan 6,3 SR	Ketinggian 15 meter menerjang teluk palu
30 jan 1930	Tsunami	Ketinggian 2 meter menerjang donggala
20 mei 1938	Tsunami menerjang parigi, dengan gempa kekuatan 7,6 SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patahan di pulau sulaweu dan sebagian kjalimantan</li> <li>- Menghancurkan ribuan rumah di parigi</li> <li>- Tsunami di toribulu dan parigi</li> </ul>
14 agust 1968	Tsunami, dengan gempa kekuatan 6,0 SR	Tsunami menerjang tambu, sabang kab. Donggala, ketinggian 10 mtr, inundansi 100-300 mtr, menyebabkan 160 org meningeal di mepaga, 40 orang hilang
16 okt 1983	Gempa bumi kekuatan 6.0 SR di toil-toli	Menyebabkan 20 rumah rusak dan 15 rusak berat
1 jan 1996	Tsunami, gempa kekatan 7.0 SR	Tsunami di sojol, ketinggian 4 mtr, lebih dari 350 bangunan rusak
11 okt 1998	Tsunami, gempa kekuatan 6.1	Tsunami ketinggian 15 mtr menghantam Donggala, dengan sedikit kerusakan di Palu
4 mei 2000	Tsunami, dan gempa dengan kekuatan 6,5 SR	Tsunami di Pulau Peleng dan Totikum, ratusan rumah rusak di Luwuk dan Pulau Banggai
15 agus 2002	Tsunami, dengan gempa kekuatan 5,8 SR	Tsunami di teluk tomini, ratusan rumah rusak di Tojo, Sadanda, uwekuli
24 jan 2005	Gempa dengan kekuatan 6,2 SR	Bangunan rusak di palu, juga menyebabkan longsoran di area pegunungan
18 agust 2012	Gempa dengan kekuatan 6,2 SR	Bangunan rusak di Parigi Moutong, Sigi, juga menyebabkan longsoran di area
28 sept 2018	Tsunami, Likuifaksi, Gempa dengan kekuatan 7.4 SR	Untuk kota palu, jumlah yang meninggal 3.182, rumah rusak 55.569, jumlah pengungsi sebanyak 10.720 KK atau 40.137 jiwa

Sumber : BMKG, 2018 (diolah)



Setelah kejadian bencana, maka Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI dan BMKG, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Adapun potensi bencana di Kota Palu berdasarkan DIBI dan metodologi pengkajian risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Potensi Bencana Kota Palu**

POTENSI BENCANA KOTA PALU	
1. BANJIR	6. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
2. BANJIR BANDANG	7. KEKERINGAN
3. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	8. CUACA EKSTRIM
4. GEMPABUMI	9. TSUNAMI
5. TANAH LONGSOR	

*Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2015*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 (sembilan) jenis bencana yang berpotensi mengancam di Kota Palu. Dimana 5 (lima) jenis bencana tersebut pernah terjadi, yaitu bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, serta tanah longsor. Sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tsunami belum pernah terjadi di Kota Palu.

Pengkajian indeks bahaya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di Kota Palu. Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu 0-0,333 : rendah, >0,333-0,666 : sedang dan >0,666-1 : tinggi.

Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu berpedoman pada metodologi bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pengkajian berdasarkan metodologi bahaya tersebut, diperoleh indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu. Untuk penentuan luas wilayah yang terdampak bencana, data luas wilayah menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, sesuai dengan yang dianjurkan oleh BNPB untuk kesamaan proses analisis kajian risiko bencana seluruh wilayah.

Adapun hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu**

NO	JENIS BAHAYA	BAHA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	BANJIR	10.797	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	4.55	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	28.673	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	76	SEDANG
5	GEMPABUMI	38.786	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	25.655	SEDANG
7	KEKERINGAN	38.786	SEDANG
8	TANAH LONGSOR	21.345	TINGGI
9	TSUNAMI	1.73	TINGGI

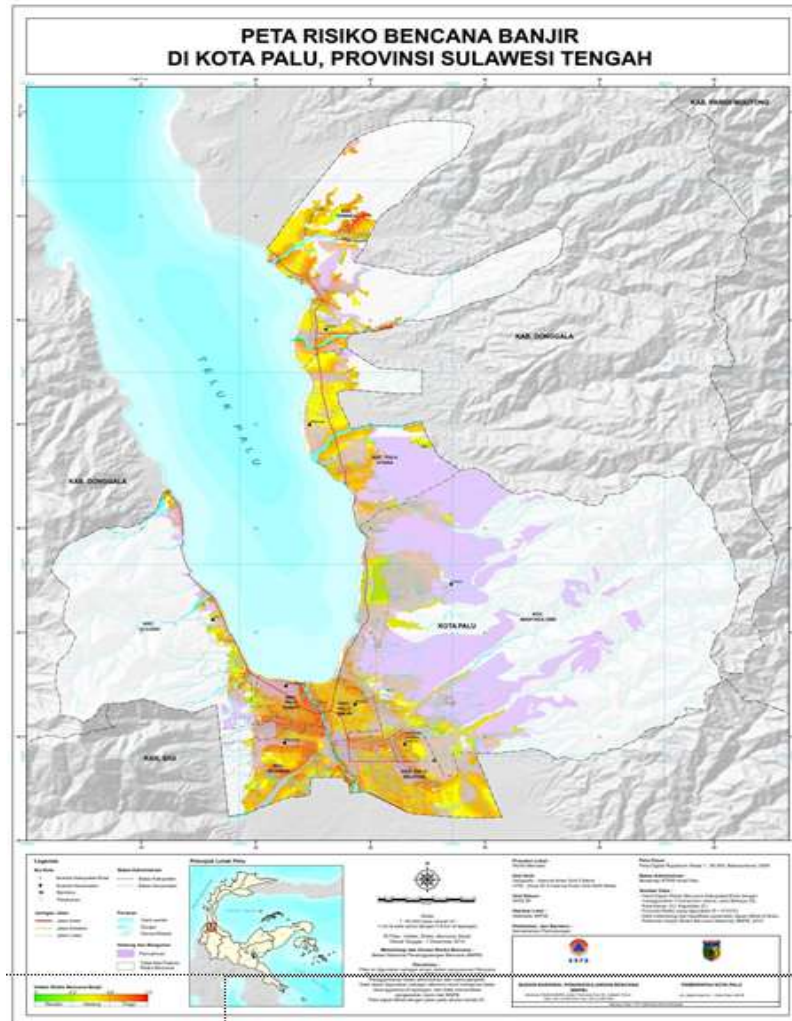
Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa bahaya seluruh potensi bencana di Kota Palu berada pada kelas sedang dan tinggi. Penentuan kelas bahaya Kota Palu diperoleh kelas bahaya maksimal setiap jenis bencana per kecamatan. Hasil kajian pada tabel di atas diperoleh dari rekapitulasi hasil kajian tingkat kecamatan. Adapun hasil kajian bahaya per kecamatan terdampak bencana di Kota Palu dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai atau pecahnya bendungan. Banjir juga dapat terjadi di daerah yang

gersang dengan daya serap tanah terhadap air yang rendah dan jumlah curah hujan melebihi kapasitas serapan air.



**Gambar 2.5**  
**Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya banjir, yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan.

Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana banjir di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya banjir di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir di Kota Palu**

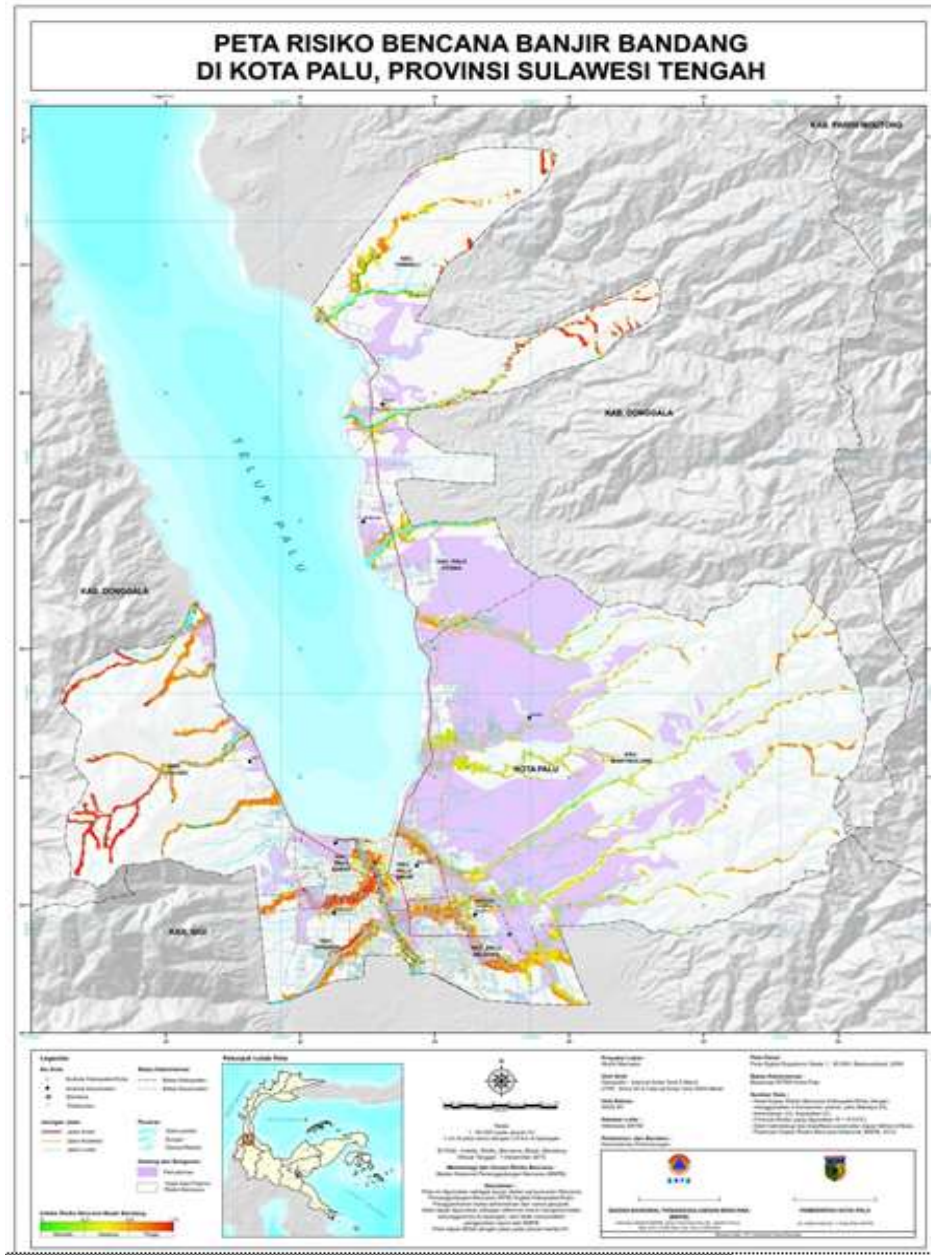
No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	2.772	TINGGI
2	PALU BARAT	627	TINGGI
3	PALU SELATAN	1.938	SEDANG
4	PALU TIMUR	590	SEDANG
5	PALU UTARA	1.541	SEDANG
6	TATANGAN	1.127	TINGGI
7	Taweali	1.657	SEDANG
8	ULUJADI	544	SEDANG
<b>KOTA PALU</b>		<b>10.797</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana banjir di Kota Palu yaitu 10.797 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana banjir di Kota Palu yaitu 2.772 Ha.

## 2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit air yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.



**Gambar 2.6**  
**Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya banjir bandang, yaitu sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi).

Berdasarkan parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana banjir bandang di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya banjir bandang di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Banjir Bandang di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	1.678	TINGGI
2	PALU BARAT	200	TINGGI
3	PALU SELATAN	621	TINGGI
4	PALU TIMUR	145	TINGGI
5	PALU UTARA	248	TINGGI
6	TATANGAN	355	TINGGI
7	TAWEALI	614	TINGGI
8	ULUJADI	696	TINGGI
<b>KOTA PALU</b>		<b>4.558</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

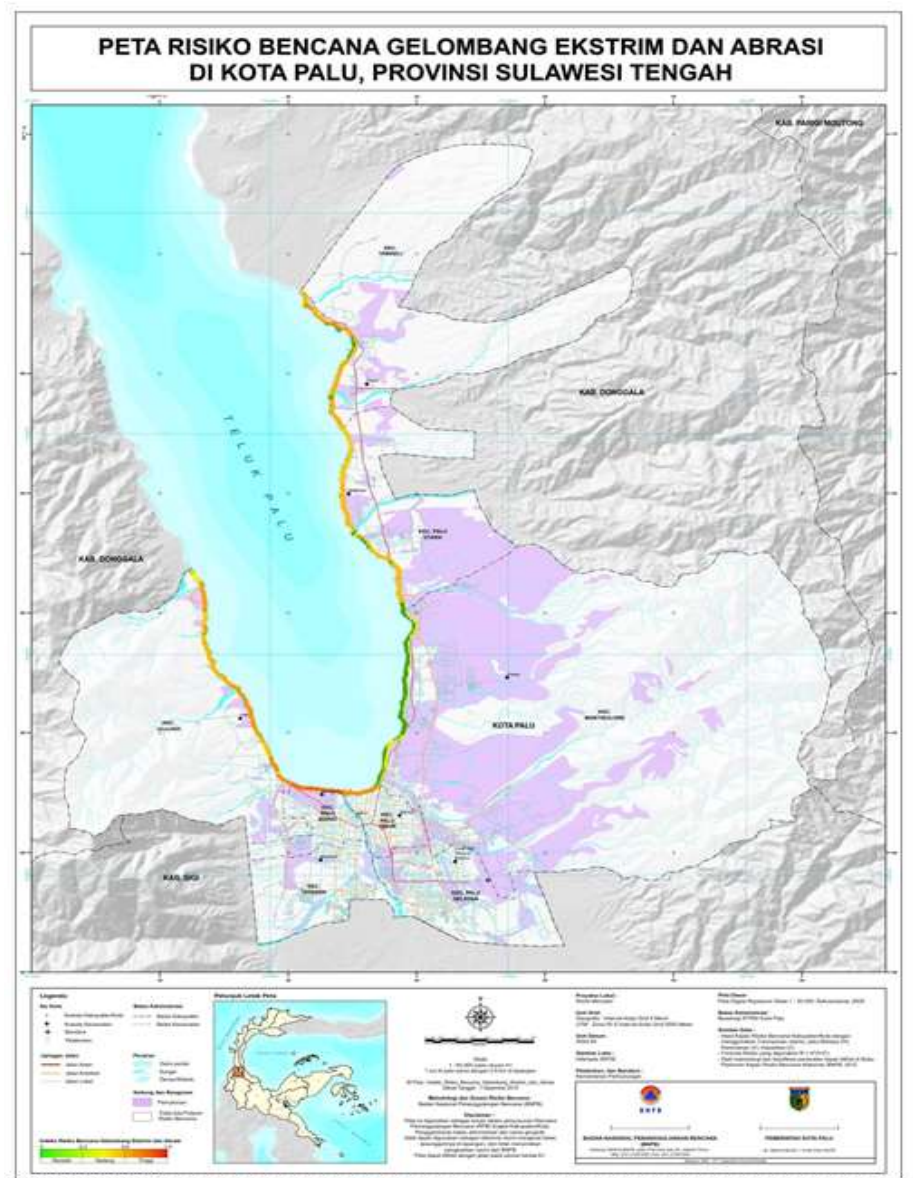
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana banjir bandang di Kota Palu yaitu 4.558 Ha, dengan kelas tinggi, Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana banjir bandang di Kota Palu yaitu 1.678 Ha.

### 3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan grafitasi bulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air. Ombak yang ditimbulkan oleh badai, angin atau mesin motor yang bergerak cepat, menyebabkan erosi pantai, yang bisa dalam bentuk hilangnya endapan dan bebatuan dalam kurun waktu yang lama, atau redistribusi endapan pantai yang hanya sementara. Erosi di satu lokasi bisa mengakibatkan penimbunan di dekatnya. Hasil erosi yang terangkut oleh aliran air dan mengendap disuatu tempat membentuk suatu dataran yang dinamakan dataran alluvial. Dataran aluvial ini biasanya terbentuk pada gisik pantai. Besar kecilnya abrasi di pantai dipengaruhi oleh kekuatan dan kekompakan material, besarnya ombak/ arus air, dan kekuatan gerus dari aliran air di tempat abrasi tersebut.





**Gambar 2.7**  
**Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Palu**

Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, yaitu tinggi gelombang, arus, topologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	166	SEDANG
2	PALU BARAT	41	SEDANG
3	PALU TIMUR	28	SEDANG
4	PALU UTARA	179	SEDANG
5	TAWEALI	152	SEDANG
6	ULUJADI	199	SEDANG
<b>KOTA PALU</b>		<b>764</b>	<b>SEDANG</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu yaitu 764 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Ulujadi merupakan wilayah terluas terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kota Palu yaitu 199 Ha.

#### 4. Gempa Bumi

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempabumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan skala richter (SR). Intensitas atau getarannya diukur dengan skala MMI. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya gempabumi, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, dan intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan parameter bahaya gempabumi tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana gempabumi di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gempabumi di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

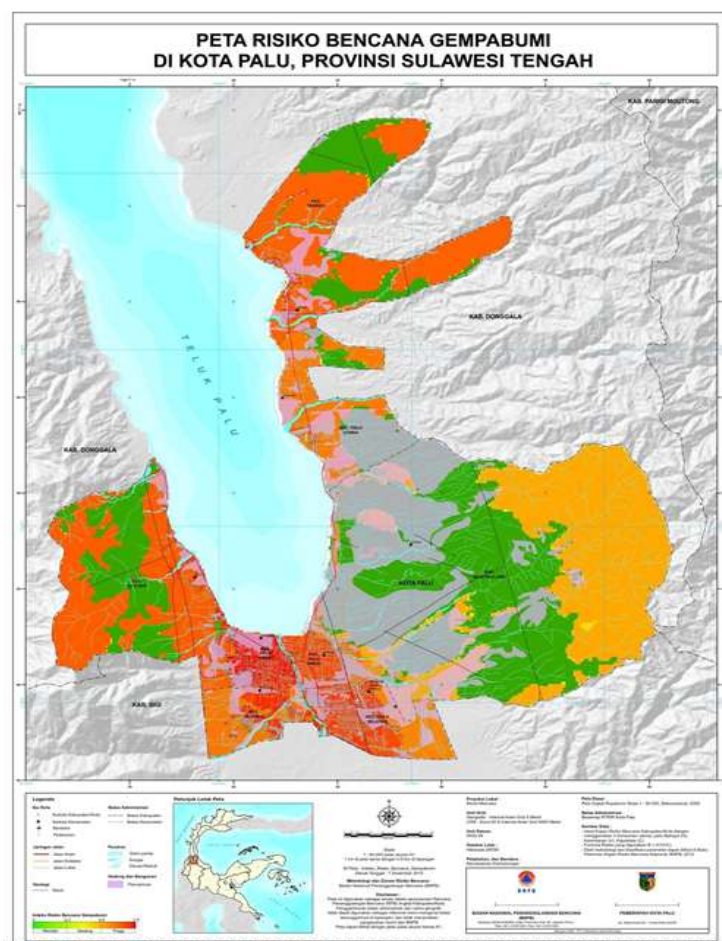


**Tabel 2.15**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Gempa Bumi di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	18.981	TINGGI
2	PALU BARAT	732	TINGGI
3	PALU SELATAN	1.941	TINGGI
4	PALU TIMUR	593	TINGGI
5	PALU UTARA	2.831	TINGGI
6	TATANGAN	1.505	TINGGI
7	TAWREALI	5.904	TINGGI
8	ULUJADI	6.298	TINGGI
<b>KOTA PALU</b>		<b>38.786</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

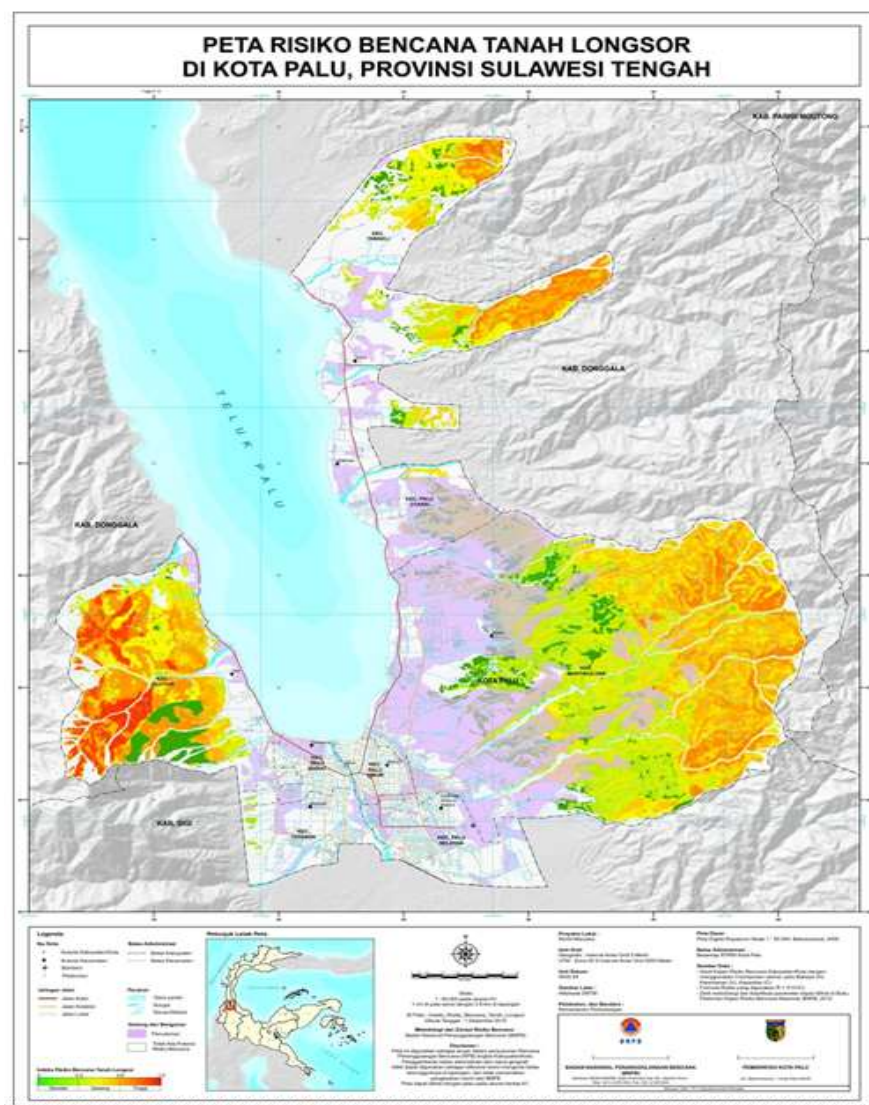
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana gempabumi di Kota Palu yaitu 38.786 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana gempabumi di Kota Palu yaitu 18.981 Ha.



**Gambar 2.8**  
**Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Palu**

## 5. Tanah Longsor

Tanah longsor termasuk dalam bencana yang disebabkan oleh pengaruh geologi. Pengaruh tersebut karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks tanah longsor, yaitu kemiringan lereng (di atas 15%), arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng.



**Gambar 2.9**  
**Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kota Palu**

Berdasarkan parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian

bahaya tanah longsor di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Luas wilayah Terpapar Bencana Tanah Longsor di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	13.499	SEDANG
2	PALU BARAT	13	RENDAH
3	PALU UTARA	779	SEDANG
4	TATANGAN	42	RENDAH
5	TAWEALI	2.741	SEDANG
6	ULUJADI	4.271	TINGGI
<b>KOTA PALU</b>		<b>21.345</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 21.345 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 13.499 Ha.

#### 6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Kejadiannya disebabkan oleh penggunaan api yang tidak terkendali. Dampak dari peristiwa ini terlihat pada perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan, yaitu jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

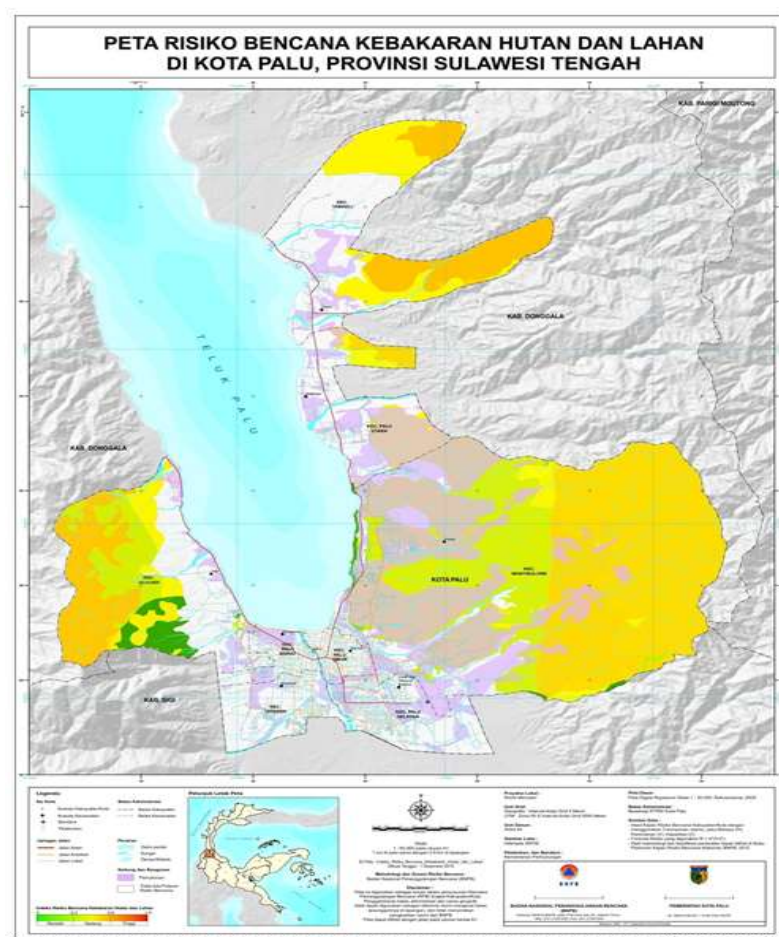
Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya kebakaran hutan dan lahan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	17.068	SEDANG
2	PALU BARAT	4	RENDAH
3	PALU UTARA	1.216	SEDANG
4	TAWREALI	3.213	SEDANG
5	ULUJADI	4.154	SEDANG
<b>KOTA PALU</b>		<b>25.655</b>	<b>SEDANG</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu yaitu 25.655 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Palu yaitu 17.068 Ha.



**Gambar 2.10**  
**Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palu**

## 7. Kekeringan

Kekeringan adalah suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya, hal ini terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan dibawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya kekeringan, yaitu faktor kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi). Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka dapat ditentukan indeks dan kelas bahaya serta luasan daerah terdampak bencana kekeringan di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya kekeringan di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

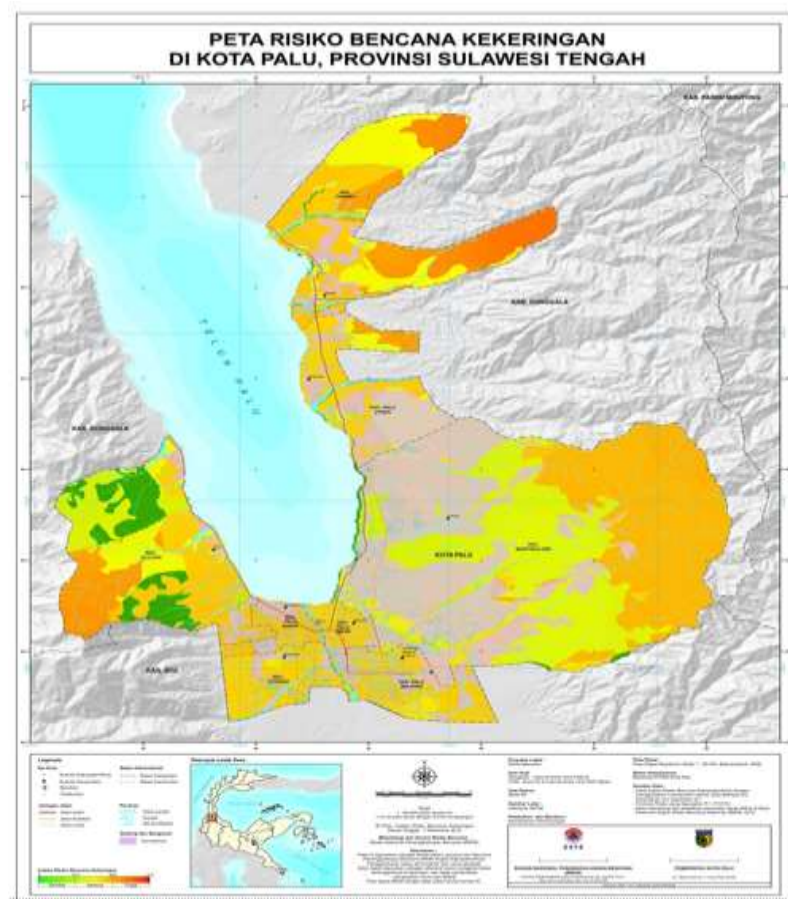
**Tabel 2.18**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Kekeringan di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	18.981	SEDANG
2	PALU BARAT	732	SEDANG
3	PALU SELATAN	1.941	SEDANG
4	PALU TIMUR	593	SEDANG
5	PALU UTARA	2.831	SEDANG
6	TATANGAN	1.505	SEDANG
7	TAWREALI	5.904	SEDANG
8	ULUJADI	6.298	SEDANG
<b>KOTA PALU</b>		<b>38.786</b>	<b>SEDANG</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana kekeringan di Kota Palu yaitu 38.786 Ha, dengan kelas sedang. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana kekeringan di Kota Palu yaitu 18.961 Ha.





**Gambar 2.11**  
**Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Palu**

## 8. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya cuaca ekstrim, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

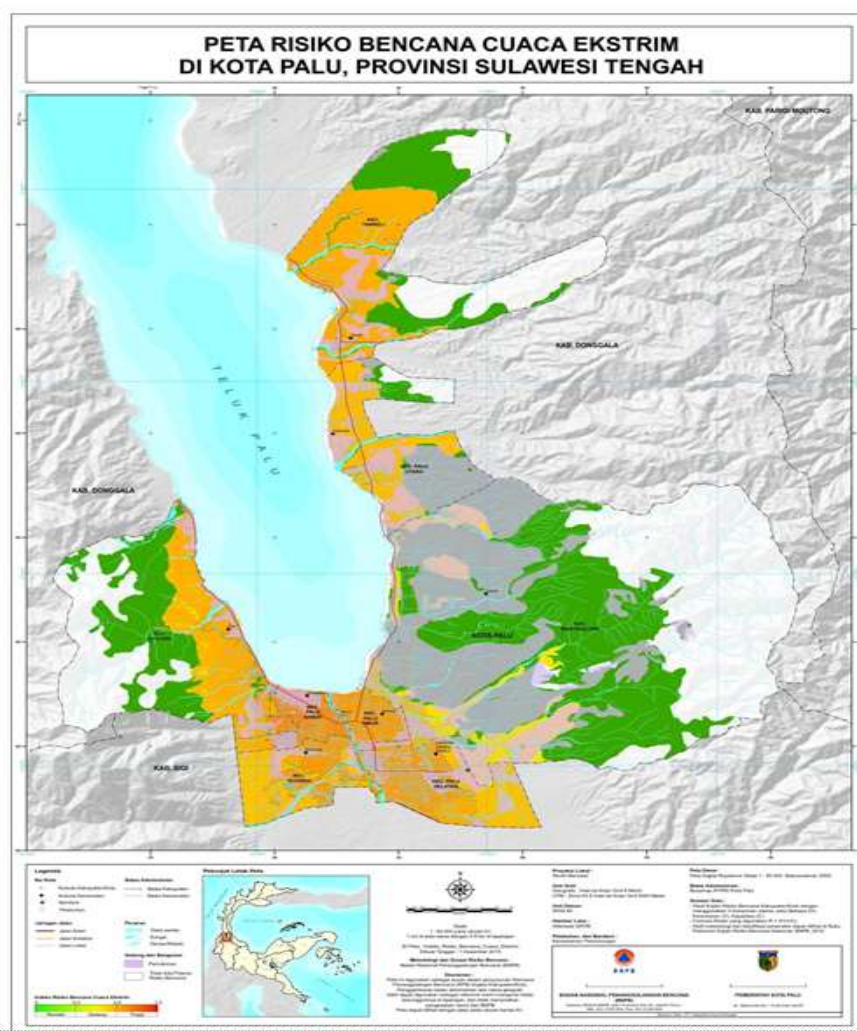
Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana cuaca ekstrim di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya cuaca ekstrim di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAY	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	12.798	TINGGI
2	PALU BARAT	730	TINGGI
3	PALU SELATAN	1.940	TINGGI
4	PALU TIMUR	592	TINGGI
5	PALU UTARA	2.618	TINGGI
6	TATANGAN	1.503	TINGGI
7	TAWALI	4.244	TINGGI
8	ULUJADI	4.249	TINGGI
<b>KOTA PALU</b>		<b>28.673</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 28.673 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Mantikulore merupakan wilayah terluas terdampak bencana tanah longsor di Kota Palu yaitu 12.798 Ha.



**Gambar 2.12**  
**Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Palu**

## 9. Tsunami

Tsunami merupakan bencana yang terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Faktor yang mempengaruhi tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor (landslide) yang terjadi di dasar laut. Penyebab utama dari ketiganya adalah gempa bumi. Parameter yang digunakan dalam menentukan indeks bahaya tsunami, yaitu ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

Berdasarkan parameter bahaya tsunami tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana tsunami di Kota Palu. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya tsunami di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

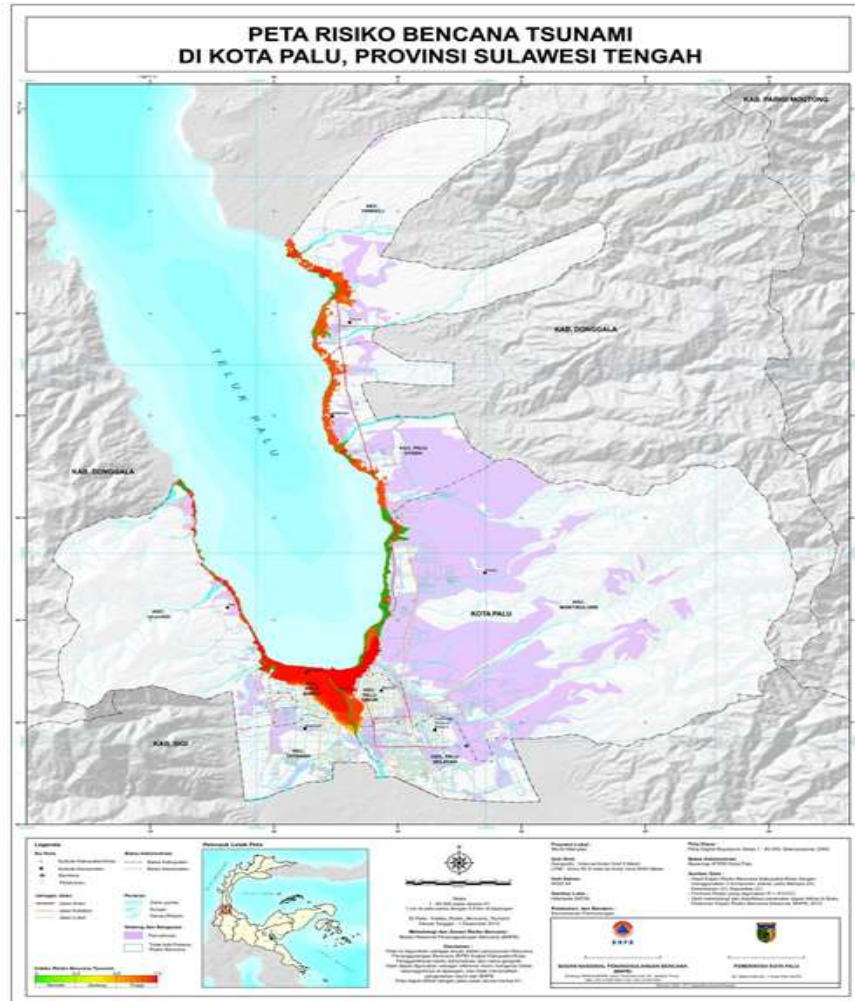
**Tabel 2.20**  
**Luas Wilayah Terpapar Bencana Tsunami di Kota Palu**

No	KECAMATAN	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	MANTIKULORE	290	TINGGI
2	PALU BARAT	362	TINGGI
3	PALU SELATAN	5	RENDAH
4	PALU TIMUR	205	TINGGI
5	PALU UTARA	290	TINGGI
6	TATANGAN	64	TINGGI
7	TAWREALI	319	TINGGI
8	ULUJADI	198	TINGGI
<b>KOTA PALU</b>		<b>1.735</b>	<b>TINGGI</b>

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana tsunami di Kota Palu yaitu 1.735 Ha, dengan kelas tinggi. Kecamatan Palu Barat merupakan wilayah terluas terdampak bencana tsunami di Kota Palu yaitu 362 Ha.





**Gambar 2.13**  
**Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Palu**

Tingkat bahaya untuk setiap potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari nilai indeks bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**Potensi Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kota Palu**

NO	JENIS BAHAYA	TINGKAT BAHAYA
1	BANJIR	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG
5	GEMPABUMI	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG
7	KEKERINGAN	SEDANG
8	TANAH LONGSOR	TINGGI
9	TSUNAMI	TINGGI

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu memiliki tingkat yang bervariasi. Hal ini dilihat dari luasan daerah dan pengelompokan nilai indeks dari potensi bencana tersebut. Seperti halnya bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami memiliki luas wilayah terdampak dengan tingkat bahaya **tinggi**. Sedangkan untuk jenis bencana gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan memiliki luasan bahaya yang tergolong dalam tingkat bahaya **sedang**.

### 1. Tingkat Kerentanan

Tingkatan kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan indeks kerugian. Untuk lebih jelasnya tingkat kerentanan setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi dapat dilihat pada peta kerentanan Kota Palu.

Adapun rekapitulasi tingkat kerentanan untuk setiap jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Tingkat Kerentanan Bencana di Kota Palu**

NO	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3	CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG
4	GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	TINGGI	SEDANG	SEDANG
7	KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
9	TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kerentanan untuk seluruh potensi bencana di Kota Palu berada pada tingkat sedang dan tinggi. Tingkat kerentanan sedang berpotensi terhadap bencana cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Sedangkan untuk potensi bencana lainnya memiliki tingkat kerentanan tinggi.

## 2. Tingkat Kapasitas

Tingkat kapasitas untuk setiap potensi bencana di Kota Palu diperoleh dari penggabungan indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan kelurahan. Untuk melihat tingkat kapasitas setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta kapasitas Kota Palu. Adapun rekapitulasi tingkat kapasitas seluruh potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Tingkat Kapasitas Bencana di Kota Palu**

No	JENIS BENCANA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	TINGKAT KAPASITAS
1	BANJIR	RENDAH	RENDAH	RENDAH
2	BANJIR BANDANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	RENDAH	RENDAH	RENDAH
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
5	GEMPABUMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
7	KEKERINGAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
8	TANAH LONGSOR	RENDAH	RENDAH	RENDAH
9	TSUNAMI	RENDAH	RENDAH	RENDAH

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan kapasitas Kota Palu dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat rendah. Penentuan ini diperoleh dari pembobotan terhadap hasil kapasitas daerah dan kesiapsiagaan kelurahan.

## 3. Tingkat Resiko

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**  
**Tingkat Resiko Bencana di Kota Palu**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	TINGGI	SEDANG	RENDAH	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
7	KEKERINGAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
8	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

*Sumber: Hasil Analisa Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Palu memiliki tingkat risiko yang bervariasi untuk potensi bencana yang ada. Tingkat risiko sedang berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tingkat risiko tinggi berpotensi terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami.

#### **2.1.1.4. Demografi**

##### **A. Perkembangan Jumlah Penduduk**

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2021 mencapai 377.030 jiwa. Penduduk Kota Palu Tahun 2021 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46 (empat puluh enam) Kelurahan, dan 121.290 Rumah Tangga (RT). Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu tertinggi pada Tahun 2018 mencapai 1,71%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran penduduk Kota Palu menurut kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga serta tingkat kepadatan penduduk secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.25.

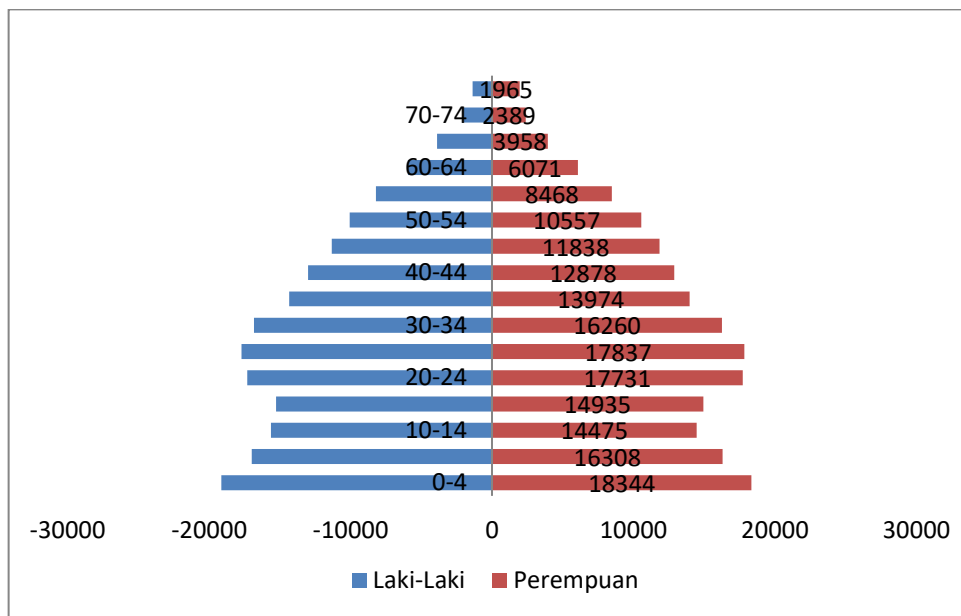
**Tabel 2.25**  
**Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga**  
**Tahun 2017-2021**

Kecamatan	Jumlah/Total			Rata-rata penduduk		Laju Pertumbuhan (%)	
	Penduduk (jiwa)	Kelurahan	Rumah Tangga	PerKelurahan	Per Rumah Tangga		
Palu Barat	46.544	6	16.345	7.739	3	0,43	
Tatanga	53.270	6	16.329	8.763	3	1,51	
Ulujadi	35.536	6	11.040	5.843	2	1,57	
Palu selatan	72.674	5	23.492	14.412	4	1,05	
Palu Timur	43.441	5	15.362	8.664	3	0,48	
Mantikulore	77.949	8	23.949	9.593	2	1,77	
Palu Utara	24.716	5	7.650	4.892	3	1,25	
Tawaeli	22.900	5	7.123	4.514	4	1,67	
KotaPalu	<b>2021</b>	<b>377.030</b>	<b>46</b>	<b>121.290</b>	<b>8.053</b>	<b>3</b>	<b>1,22</b>
	<b>2020</b>	373.218	46	24.669	8.113	3	1,05
	<b>2019</b>	391.383	46	23.895	8.508	3	0,47
	<b>2018</b>	385.619	46	23.978	8.383	3	1,71
	<b>2017</b>	379.782	46	23.628	8.256	3	1,54

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

## B. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 26,76 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 69,10 persen penduduk merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 4,14 persen penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar 2.14 dan Tabel 2.26.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.14**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan**  
**Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021**

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2021**

Kelompok umur	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	19 144	18 344	37 488
5 - 9	16 989	16 308	33 297
10 - 14	15 630	14 475	30 105
15 - 19	15 277	14 935	30 212
20 - 24	17 299	17 731	35 030
25 - 29	17 722	17 837	35 559
30 - 34	16 830	16 260	33 090
35 - 39	14 331	13 974	28 305
40 - 44	13 003	12 878	25 881
45 - 49	11 318	11 838	23 156
50 - 54	10 055	10 557	20 612
55 - 59	8 210	8 468	16 678
60 - 64	5 932	6 071	12 003
65-69	3 891	3 958	7 849
70-74	2 037	2 389	4 426
75+	1 374	1 965	3 339
<b>TOTAL</b>	<b>189.042</b>	<b>187.988</b>	<b>377.030</b>

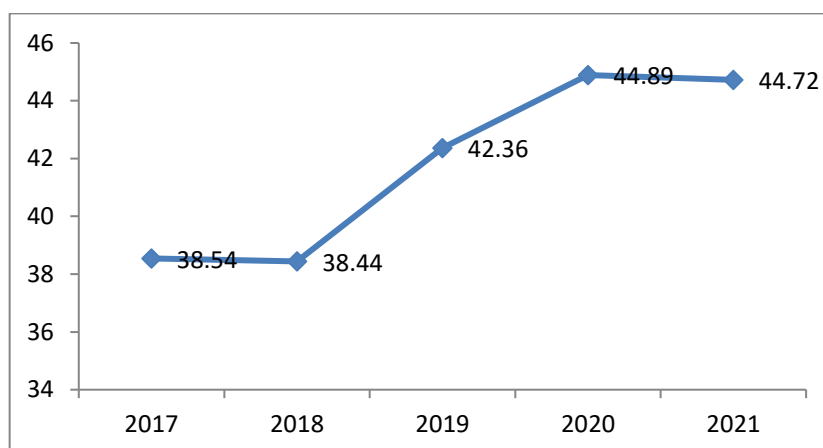
*Sumber Data : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Tabel 2.26 memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk KotaPalu pada Tahun 2021 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 100.890 jiwa atau 26,76 %, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 260.526 jiwa atau 69,10 %, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 15.614 jiwa atau 4,14 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif yang signifikan.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 116.504 jiwa atau 30,90 % dengan penduduk usia produktif sebanyak 260.526 jiwa atau 69,10 %, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada

Tahun 2021 yaitu sebesar 44,72 %, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 45 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi penurunan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kota Palu. Pada Tahun 2017 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar 38,54 yang bermakna terdapat 39 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Pada Tahun 2021 rasio ketergantungan penduduk di Kota Palu meningkat menjadi 44,72 yang bermakna 45 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Palu Tahun 2017- 2021 tertera dalam Gambar 2.15 berikut:



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.15**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu**  
**Tahun 2017- 2021**



### C. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 961 jiwa/km<sup>2</sup> terus menurun hingga mencapai 954 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2021. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.634 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 377 jiwa/km<sup>2</sup>. Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 diuraikan dalam Tabel 2.27.

**Tabel 2.27**  
**Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin	
Palu Barat	8,28	5.621	100,4	
Tatanga	14,95	3.563	102,3	
Ulujadi	40,25	883	104,1	
Palu selatan	27,38	2.654	100,2	
Palu Timur	7,71	5.634	96,3	
Mantikulore	206,8	377	99,0	
Palu Utara	29,94	826	102,3	
Tawaeli	59,75	383	104,7	
<b>Kota Palu</b>	<b>2021</b>	<b>395,06</b>	<b>954</b>	<b>100,6</b>
	2020	395,06	944,71	100,9
	2019	395,06	940	101,43
	2018	395,06	976	101
	2017	395,06	961	101

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### **2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

#### **1). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2020 tumbuh 19,39 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 59,43 %.

Dari sisi produksi (*supply side*) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir digambarkan melalui peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut ini:

**Tabel 2.28**  
**Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu Atas**  
**Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Persen)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)	4,20	4,25	3,89	4,04	3,83
2.	Pertambangan dan Penggalian (B)	6,96	6,39	7,23	6,03	6,07
3.	Industri Pengolahan (C)	7,55	6,87	6,28	6,59	6,49
4.	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	0,29	0,30	0,27	0,29	0,30
6.	Konstruksi (F)	16,00	16,39	18,50	19,39	19,30

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	9,96	10,07	9,93	9,84	10,45
8.	Transportasi dan Pergudangan (H)	9,55	9,89	9,62	6,45	6,57
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	1,15	1,09	0,95	0,87	0,95
10.	Informasi dan Komunikasi (J)	8,59	8,78	9,14	9,97	9,89
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	6,00	5,82	5,19	5,77	5,94
12.	Real Estate (L)	2,53	2,49	2,27	2,39	2,36
13.	Jasa Perusahaan (M,N)	1,17	1,16	1,12	1,14	1,10
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	13,53	14,26	13,77	14,77	14,53
15.	Jasa Pendidikan (P)	8,40	8,05	7,71	7,92	7,57
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	3,01	3,09	3,08	3,45	3,59
17.	Jasa lainnya (R,S,T,U)	0,98	0,96	0,93	0,96	0,93
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Palu Dalam Angka, 2021

Tabel di atas di antaranya memperlihatkan bahwa dominasi pertumbuhan terbesar Tahun 2021 tetap dan terus terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 19,30 %, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran khusus Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,45 %, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,89 %.

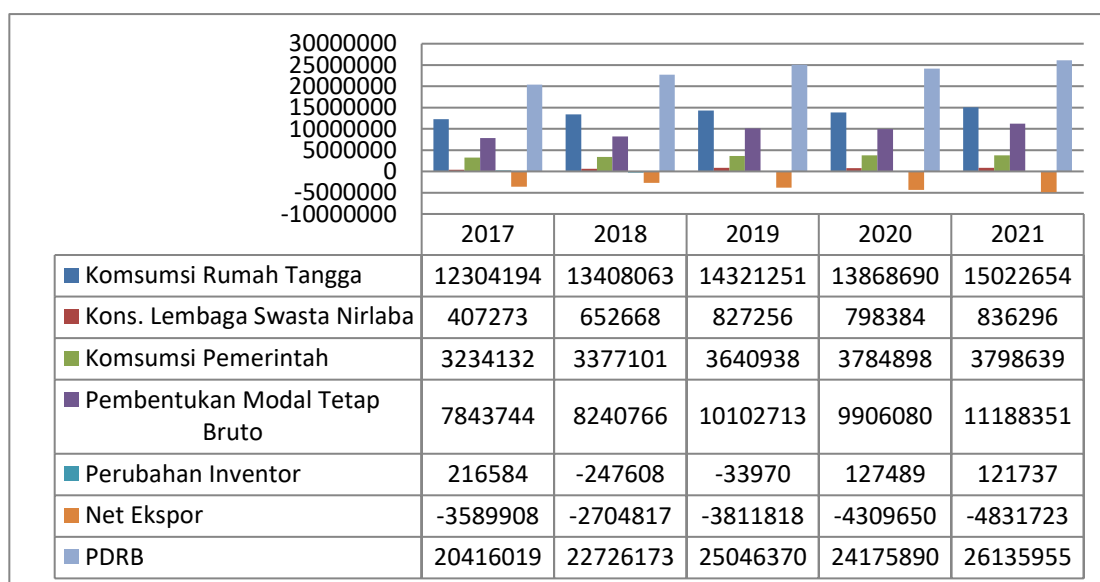
Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2021, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui tabel 2.29 berikut ini:

**Tabel 2.29**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar**  
**Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran**  
**Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2017	2018	2019	2020 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	12 304 194,02	13 408 063,14	14 978 206,90	14 273 237,21	15 022 654,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	407 273,36	652 667,84	905 187,11	798 384,00	836 295,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	3 234 131,74	3 377 100,87	3 589 814,11	3 596 875,28	3 798 639,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	7 843 743,59	8 240 765,75	9 702 713,29	9 531 079,57	11 188 351,33
5. Perubahan Inventori Changes in Inventories	216 584,40	(247 607,64)	(60 491,99)	137 831,81	121 737,30
Net Ekspor Impor Barang dan Jasa/ Net Exports Import of Goods and Services	(3 589 907,99)	(2 704 817,43)	(4 082 370,62)	(4 211 516,81)	(4 831 723,03)
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>20 416 019,12</b>	<b>22 726 172,53</b>	<b>25 033 058,80</b>	<b>24 125 091,06</b>	<b>26 135 954,93</b>

*Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021*

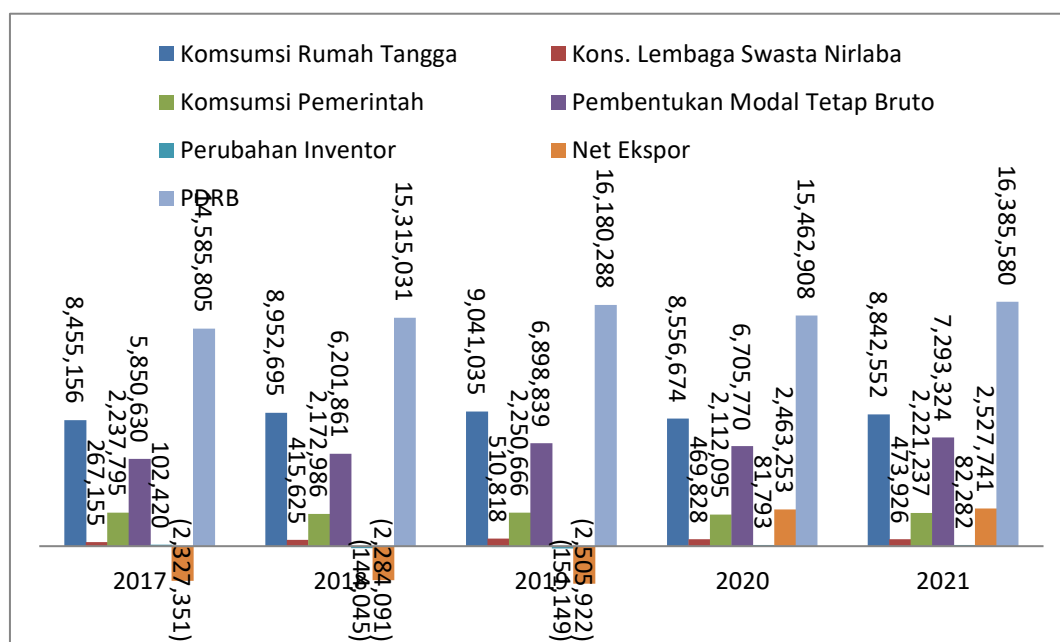
Pada Gambar 2.16 nilai PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 menurut Jenis Pengeluaran menunjukkan nilai fluktuasi khususnya pada 3 (tiga) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 2.306.887 (juta rupiah) di Tahun 2019, kemudian turun sebesar 907.168 (juta rupiah) di Tahun 2020, dan naik lagi sebesar 2.010.064 (juta rupiah) di Tahun 2021.



*Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021*

**Gambar 2.16**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB**  
**Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rp)**

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2017 sampai dengan 2021 secara berturut-turut yaitu 5,53 %; 5,00 %; 5,65 %; -4,43 %; dan 5,97 %. Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang nilai PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut:



Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017-2021

**Gambar 2.17**  
**Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK**  
**Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021**

Gambaran umum nilai PDRB Kota Palu Adas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 865.257 (juta rupiah) Tahun 2019, turun sebesar 717.380 (juta rupiah) Tahun 2020, dan

naik sebesar 922.672 (juta rupiah) Tahun 2021 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.30 berikut ini.

**Tabel 2.30**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2017	2018	2019	2020 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	8 455 155,59	8 952 694,79	9 041 035,22	8 556 674,09	8 842 552,11
2, Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	267 154,99	415 625,34	510 818,48	469 827,83	473 926,32
3, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	2 237 795,45	2 172 985,94	2 250 666,17	2 112 095,51	2 221 236,82
4, Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	5 850 629,83	6 201 861,33	6 898 838,96	6 705 770,17	7 293 324,26
5, Perubahan Inventori Changes in Inventories	102 419,64	(144 045,31)	(15 149,38)	81 793,48	82 281,80
Net Ekspor Impor Barang dan Jasa/ Net Exports Import of Goods and Services	(2 327 350,82)	(2 284 090,88)	(2 505 921,89)	(2 463 253,16)	(2 527 740,82)
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>14 585 804,68</b>	<b>15 315 031,21</b>	<b>16 180 287,56</b>	<b>15 462 907,92</b>	<b>16 385 580,49</b>

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2017 - 2021

Gambaran di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu meningkat dari 5,53 % pada Tahun 2017 menjadi 5,97% pada Tahun 2021.

Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Table 2.31 berikut:

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2017-2021**

Indikator	Tahun (Juta Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp)	20.416.019,1	22.726.172,5	25.033.058,8	24.125.891,1	26.135.950
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	14.585.804,7	15.315.031,2	16.180.288	15.462.908	16.385.580
Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (persen)	5,53	5,00	5,65	(4,43)	5,97
PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ADHB (miliarRp)	20.416.019,1	22.726.172,5	25.033.058,8	24.125.891,1	26.135.950

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021



Tabel 2.31 di atas memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2017-2021 membaik. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran rata-rata tumbuh sebesar 6,54% per tahun, sedangkan PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata tumbuh sebesar 3,05 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 perekonomian Kota Palu tumbuh sebesar 0,65 % menjadi 5,65 % dari tahun sebelumnya 5,00 %, Tahun 2020 turun sebesar 10,08 % dari Tahun 2019 menjadi -4,43 %, Tahun 2021 naik sebesar 10,40 % dari Tahun 2020 menjadi 5,97 %.

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,05 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 2,77 % per tahun, Kabupaten Donggala 1,85 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,13 % per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 11,49 % per tahun.

Tabel 2.32 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.32**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala,**  
**Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2017 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Kab. Donggala</b>	<b>Kab. Parimo</b>	<b>Kab. Sigi</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>
2017	<b>5,53</b>	5,31	5,27	6,13	7,13
2018	<b>5,00</b>	2,56	2,52	3,87	20,56
2019	<b>5,65</b>	4,45	2,21	3,64	8,83
2020	<b>(4,43)</b>	(4,26)	(4,95)	(1,50)	4,86
2021	<b>5,97</b>	4,64	4,72	5,05	11,70

*Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2022*



**Tabel 2.33**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(Miliar Rupiah) Tahun 2017 -2021**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	858,14	964,73	973,76	974,15	1.001,66
B	Pertambangan dan Penggalian	1.421,13	1.452,61	1.809,67	1.454,04	1.587,27
C	Industri Pengolahan	1.540,74	1.561,71	1.571,54	1.588,93	1.695,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,71	30,51	31,28	31,65	33,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,77	68,69	68,15	70,86	77,29
F	Konstruksi	3.267,24	3.724,37	4.631,14	4.679,05	5.045,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.034,44	2.288,52	2.485,64	2.374,67	2.732,33
H	Transportasi dan Pergudangan	1.950,20	2.247,33	2.407,80	1.556,08	1.717,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	234,64	248,51	237,58	210,95	248,75
J	Informasi dan Komunikasi	1.752,79	1.994,36	2.288,77	2.405,36	2.584,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.225,84	1.323,77	1.299,04	1.390,91	1.552,98
L	Real Estate	515,58	565,95	568,69	576,89	616,33
M	Jasa Perusahaan	239,38	263,95	279,26	275,32	288,15
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.761,35	3.240,72	3.447,84	3.563,72	3.796,79
O	Jasa Pendidikan	1.715,51	1.829,13	1.929,05	1.909,81	1.978,53
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	613,73	702,12	771,76	832,90	937,30
Q	Jasa lainnya	200,74	219,10	232,08	230,61	242,23
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>20.416,01</b>	<b>22.726,17</b>	<b>25.033,06</b>	<b>24.125,89</b>	<b>26.135,95</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>20.416,01</b>	<b>22.726,17</b>	<b>25.033,06</b>	<b>24.125,89</b>	<b>26.135,95</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.34**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	644,51	675,92	670,10	659,80	665,49
B	Pertambangan dan Penggalian	1.008,26	1.014,92	1.166,94	923,84	990,32
C	Industri Pengolahan	1.179,48	1.156,39	1.149,78	1.131,20	1.168,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,67	30,78	31,42	31,75	33,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,63	49,11	49,00	48,57	50,92
F	Konstruksi	2.044,27	2.216,30	2.715,28	2.655,14	2.780,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.504,43	1.595,24	1.588,90	1.488,64	1.675,81
H	Transportasi dan Pergudangan	1.357,74	1.446,60	1.420,45	910,37	990,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	160,69	165,82	148,31	127,80	148,08
J	Informasi dan Komunikasi	1.471,41	1.597,99	1.755,68	1.900,37	2.016,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	935,35	942,48	897,41	962,38	1.054,56
L	Real Estate	385,89	400,80	387,98	388,79	402,68
M	Jasa Perusahaan	172,18	179,58	188,65	182,87	187,89
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.904,64	2.055,22	2.138,07	2.169,96	2.273,12
O	Jasa Pendidikan	1.161,31	1.164,40	1.201,43	1.174,43	1.196,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	429,23	470,22	514,52	552,66	591,51
Q	Jasa lainnya	149,14	152,91	156,36	154,34	159,14
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>14.585,80</b>	<b>15.315,03</b>	<b>16.180,29</b>	<b>15.462,91</b>	<b>16.385,58</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>14.585,80</b>	<b>15.315,03</b>	<b>16.180,29</b>	<b>15.462,91</b>	<b>16.385,58</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2022

**Tabel 2.35**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	9.70	5,21	12.42	4,87	0.94	(0,86)	0.04	(1,54)	2.82	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	14.31	10,49	2.21	0,66	24.58	14,98	(19.65)	(20,83)	9.16	7,20
C	Industri Pengolahan	3.97	0,61	1.36	(1,96)	0.63	(0,57)	1.11	(1,62)	6.74	3,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.15	5,67	18.68	7,34	2.52	2,10	1.18	1,04	6.86	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.79	4,01	16.88	1,00	(0.79)	(0,22)	3.98	(0,90)	9.07	4,86
F	Konstruksi	8.90	2,49	13.99	8,42	24.35	22,51	1.03	(2,21)	7.82	4,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.80	4,01	12.49	6,04	8.61	(0,40)	(4.46)	(6,31)	15.06	12,57
H	Transportasi dan Pergudangan	14.32	8,54	15.24	6,54	7.14	(1,81)	(35.37)	(35,91)	10.36	8,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.25	7,47	5.91	3,19	(4.40)	(10,56)	(11.21)	(13,83)	17.92	15,88
J	Informasi dan Komunikasi	11.47	7,76	13.78	8,60	14.76	9,87	5.09	8,24	7.44	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.65	7,00	7.99	0,80	(1.87)	(4,82)	7.07	7,24	11.65	9,58
L	Real Estate	9.39	4,31	9.77	3,87	0.48	(3,20)	1.44	0,21	6.84	3,57
M	Jasa Perusahaan	8.74	5,54	10.26	4,30	5.80	5,05	(1.41)	(3,07)	4.66	2,75
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.15	5,12	17.36	7,91	6.39	4,03	3.36	1,49	6.54	4,75
O	Jasa Pendidikan	9.95	5,72	6.62	0,27	5.46	3,18	(1.00)	(2,25)	3.60	1,84
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.30	11,82	14.40	9,55	9.92	9,42	7.92	7,41	12.53	7,03
Q	Jasa lainnya	9.18	5,13	9.15	2,53	5.92	2,26	(0.63)	(1,29)	5.04	3,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

## **2). Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu pada Tahun 2021 secara konstan berturut-turut: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,88 %); Perdagangan Besar dan Eceran khususnya Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,57 %); Jasa Keuangan dan Asuransi (9,58 %); Transportasi dan Pergudangan (8,84 %); Pertambangan dan Penggalian (7,20 %); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,03 %); Informasi dan Komunikasi (6,11 %); Pengadaan Listrik dan Gas (5,13 %); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86 %); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,75 %).

Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.36 dan 2.37 berikut ini:

**Tabel 2.36**  
**PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	HK/HB	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	HK	644,51	675,92	670,10	659,80	665,49
		HB	858,14	964,73	973,76	974,15	1.001,66
B	Pertambangan dan Penggalian	HK	1.008,26	1.014,92	1.166,94	923,84	990,32
		HB	1.421,13	1.452,61	1.809,67	1.454,04	1.587,27
C	Industri Pengolahan	HK	1.179,48	1.156,39	1.149,78	1.131,20	1.168,59
		HB	1.540,74	1.561,71	1.571,54	1.588,93	1.695,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	HK	28,67	30,78	31,42	31,75	33,38
		HB	25,71	30,51	31,28	31,65	33,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	HK	48,63	49,11	49,00	48,57	50,92
		HB	58,77	68,69	68,15	70,86	77,29
F	Konstruksi	HK	2.044,27	2.216,30	2.715,28	2.655,14	2.780,65
		HB	3.267,24	3.724,37	4.631,14	4.679,05	5.045,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	HK	1.504,43	1.595,24	1.588,90	1.488,64	1.675,81
		HB	2.034,44	2.288,52	2.485,64	2.374,67	2.732,33
H	Transportasi dan Pergudangan	HK	1.357,74	1.446,60	1.420,45	910,37	990,82
		HB	1.950,20	2.247,33	2.407,80	1.556,08	1.717,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	HK	160,69	165,82	148,31	127,80	148,08
		HB	234,64	248,51	237,58	210,95	248,75
J	Informasi dan Komunikasi	HK	1.471,41	1.597,99	1.755,68	1.900,37	2.016,54

No	Lapangan Usaha	HK/HB	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5	6	7	8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	HB	1.752,79	1.994,36	2.288,77	2.405,36	2.584,28
		HK	935,35	942,48	897,41	962,38	1.054,56
L	Real Estate	HB	1.225,84	1.323,77	1.299,04	1.390,91	1.552,98
		HK	385,89	400,80	387,98	388,79	402,68
M	Jasa Perusahaan	HB	515,58	565,95	568,69	576,89	616,33
		HK	172,18	179,58	188,65	182,87	187,89
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	HB	239,38	263,95	279,26	275,32	288,15
		HK	1.904,64	2.055,22	2.138,07	2.169,96	2.273,12
O	Jasa Pendidikan	HB	2.761,35	3.240,72	3.477,84	3.563,72	3.796,79
		HK	1.161,31	1.164,40	1.201,43	1.174,43	1.196,09
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	HB	1.715,51	1.829,13	1.929,05	1.909,81	1.978,53
		HK	429,23	470,22	514,52	552,66	591,51
Q	Jasa lainnya	HB	613,73	702,12	771,76	832,90	937,30
		HK	149,14	152,91	156,36	154,34	159,14
		HB	200,74	219,10	232,08	230,61	242,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		HK	14.585,80	15.315,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		HB	20.416,01	22.726,17	25.033,06	24.125,89	26.135,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		HK	14.585,80	15.31,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		HB	14.585,80	15.315,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58

Sumber : BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Tabel 2.37**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 -2021**

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	9.70	5,21	12.42	4,87	0.94	(0,86)	0.04	(1,54)	2.82	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	14.31	10,49	2.21	0,66	24.58	14,98	(19.65)	(20,83)	9.16	7,20
C	Industri Pengolahan	3.97	0,61	1.36	(1,96)	0.63	(0,57)	1.11	(1,62)	6.74	3,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.15	5,67	18.68	7,34	2.52	2,10	1.18	1,04	6.86	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.79	4,01	16.88	1,00	(0.79)	(0,22)	3.98	(0,90)	9.07	4,86
F	Konstruksi	8.90	2,49	13.99	8,42	24.35	22,51	1.03	(2,21)	7.82	4,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.80	4,01	12.49	6,04	8.61	(0,40)	(4.46)	(6,31)	15.06	12,57
H	Transportasi dan Pergudangan	14.32	8,54	15.24	6,54	7.14	(1,81)	(35.37)	(35,91)	10.36	8,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.25	7,47	5.91	3,19	(4.40)	(10,56)	(11.21)	(13,83)	17.92	15,88
J	Informasi dan Komunikasi	11.47	7,76	13.78	8,60	14.76	9,87	5.09	8,24	7.44	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.65	7,00	7.99	0,80	(1.87)	(4,82)	7.07	7,24	11.65	9,58
L	Real Estate	9.39	4,31	9.77	3,87	0.48	(3,20)	1.44	0,21	6.84	3,57
M	Jasa Perusahaan	8.74	5,54	10.26	4,30	5.80	5,05	(1.41)	(3,07)	4.66	2,75
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.15	5,12	17.36	7,91	6.39	4,03	3.36	1,49	6.54	4,75
O	Jasa Pendidikan	9.95	5,72	6.62	0,27	5.46	3,18	(1.00)	(2,25)	3.60	1,84
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.30	11,82	14.40	9,55	9.92	9,42	7.92	7,41	12.53	7,03
Q	Jasa lainnya	9.18	5,13	9.15	2,53	5.92	2,26	(0.63)	(1,29)	5.04	3,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2022

### 3). Inflasi

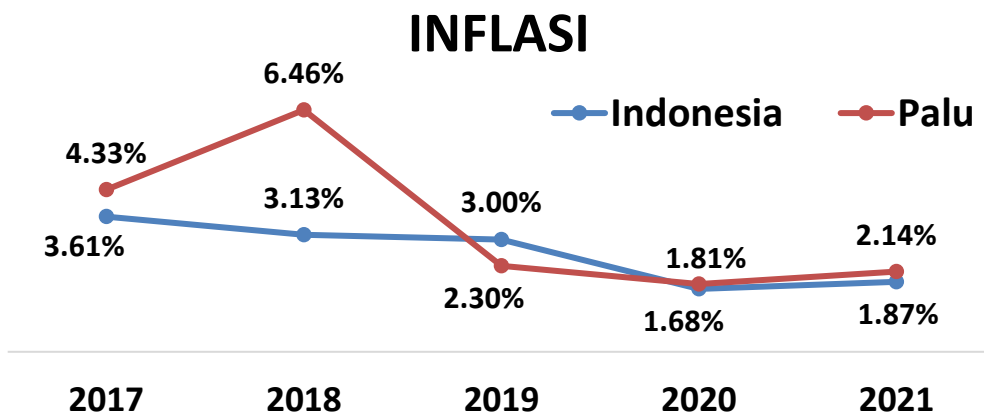
Inflasi Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 1,81 %. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,41 % lebih besar 0,75% dari rata-rata inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,66 %. Rata-rata Inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2017 – 2021 terlihat pada Tabel 2.38 di bawah ini.

**Tabel 2.38**  
**Rata-rata Inflasi Kota Palu (%)**  
**Tahun 2017-2021**

Inflasi	Tahun					Rata-rata Inflasi
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Palu	4,33	6,46	2,30	1,81	2,14	3,41
Indonesia	3,61	3,13	3,00	1,68	1,87	2,66

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022 diolah

Secara grafik Inflasi diperlihatkan dalam gambar inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2017-2021 berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 2.18**  
**Inflasi Kota Palu Tahun 2017-2021**



Penyumbang inflasi terbesar dalam lima tahun terakhir di Kota Palu adalah Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau (0,44%); Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (0,17%); Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar (0,11%) sementara sektor sandang berkontribusi paling kecil sebesar -0,02 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir terlihat dalam Tabel 2.39 sebagai berikut :

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok**  
**Pengeluaran Tahun 2017 – 2021**

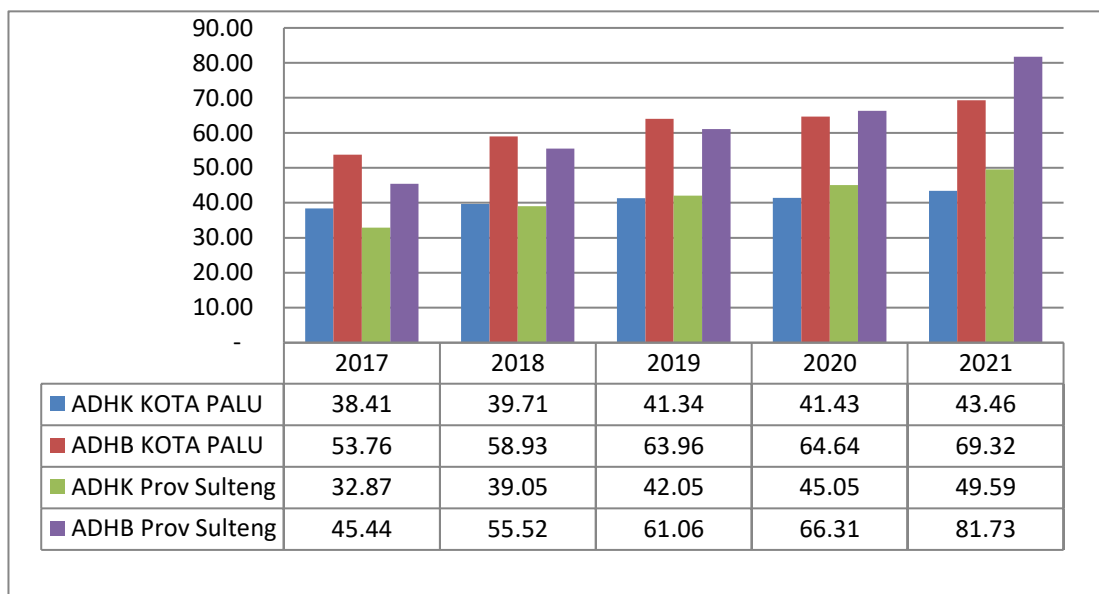
No	Sumber Inflasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Umum	4,33	6,46	2,30	0,15	n/a
2.	Bahan Makan	3,79	6,37	3,60	0,15	0,03
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,96	8,12	3,42	0,4	0,44
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	9,51	4,68	(0,35)	(0,01)	0,11
5.	Sandang	2,09	2,12	5,06	0,81	(0,02)
6.	Kesehatan	3,63	6,21	3,78	0,14	0,01
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	(1,56)	8,01	4,18	0,25	0,02
8.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	3,08	7,69	1,13	(0,27)	0,17

*Sumber: BPS Kota Palu, Tahun 2022*

Pasca Bencana Kota Palu Tahun 2019 penyumbang inflasi terbesar adalah sektor Sandang yaitu sebesar 5,06% sementara penyumbang inflasi terkecil adalah Perumahan, Gas dan Bahan Bakar sebesar -0,35%, namun sebaliknya pada Tahun 2021 sektor Sandang menjadi penyumbang inflasi terkecil sebesar -0,22 % dan sektor Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua sebesar 0,11 % setelah Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan tembakau sebesar 0,44 %.

#### 4). PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB perkapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2017-2021 laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya harga Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022 diolah

**Gambar 2.19**  
**PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**(Juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021**

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

## 5). **Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

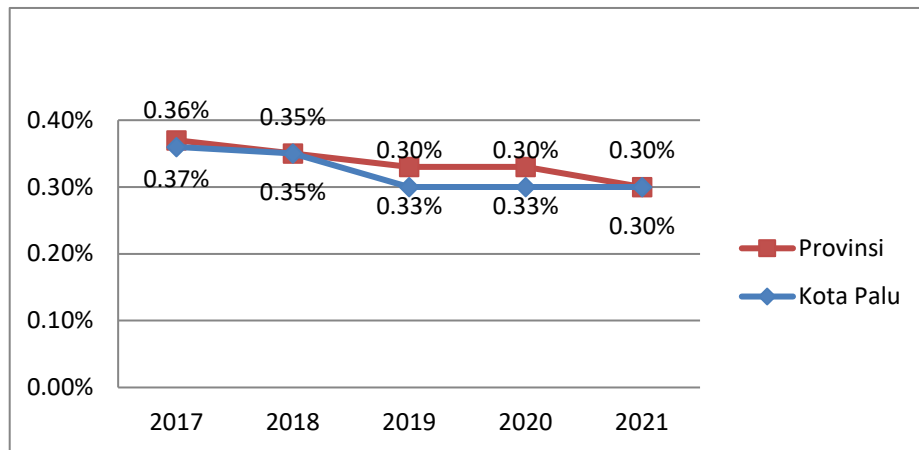
Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio  $< 0,3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara  $0,3 \leq G \leq 0,5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio  $> 0,5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.20**  
**Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,30 % pertahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini rasio yang cenderung menurun di Kota Palu. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

#### **6). Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan

terendah, 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 2.40.

**Tabel 2.40**  
**Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu**

Tahun	Kriteria Bank Dunia (%)		
	40% Bawah	40% Menengah	20% Atas
<b>2016</b>	15,85	38,9	45,25
<b>2017</b>	15,3	39,2	45,5
<b>2018</b>	25	39,4	45,6
<b>2019</b>	29,58	39,7	45,8
<b>2020</b>	16,75	39,8	43,35

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021*

Tabel 2.40 menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

#### **7). Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, mengalami pelambanan penurunan persentase kemiskinannya, lebih disebabkan penanganan kemiskinan, masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu, hal ini menyebabkan berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas, sehingga startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan dapat

dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di kota palu, dari tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.41.

**Tabel. 2.41**  
**Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk miskin (org)	25.500	25.263	26.620	26.890	28.600
2	Persentase orang miskin	6,74	6,01	6,83	6,80	7,17
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)	1,02	0,91	0,99	0,97	0,86
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2) (%)	0,24	0,19	0,22	0,22	0,20
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kemiskinan					
6.1	Garis kemiskinan	473.550	492.085	522.444	559.246	559.246
6.2	Penduduk di bawah garis kemiskinan	25.500	25.263	26.620	26.890	28.600
6.3	Beras untuk penduduk miskin	12.478	12.478	12.478	12.478	12.478
7	Keluarga menurut tingkat kesejahteraan					
7.1	Keluarga pra sejahtera	N/A	13.047	13.026	13.026	13.026
7.2	Keluarga sejahtera tahap 1	N/A	5.867	5.861	5.861	5.861
7.3	Keluarga sejahtera tahap 2	N/A	3.314	3.303	3.303	3.303
7.4	Keluarga sejahtera tahap 3	N/A	2.043	2.040	2.040	2.040
7.5	Keluarga sejahtera tahap 3 plus	N/A	1.784	1.782	1.782	1.782

*Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022, Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021*

Tren penduduk miskin Kota Palu 3 (tiga) tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus mengalami kenaikan secara jumlah penduduk miskin, dan fluktuatif secara persentase kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesenjangan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kota Palu yang belum dibarengi dengan penanganan/penanggulangan kemiskinan secara optimal.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menurun di Tahun 2020 dan 2021, hal ini mengindikasikan

berfungsinya program/ kegiatan yang bersentuhan langsung untuk meringankan beban moril dan tekanan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga secara nyata membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka.

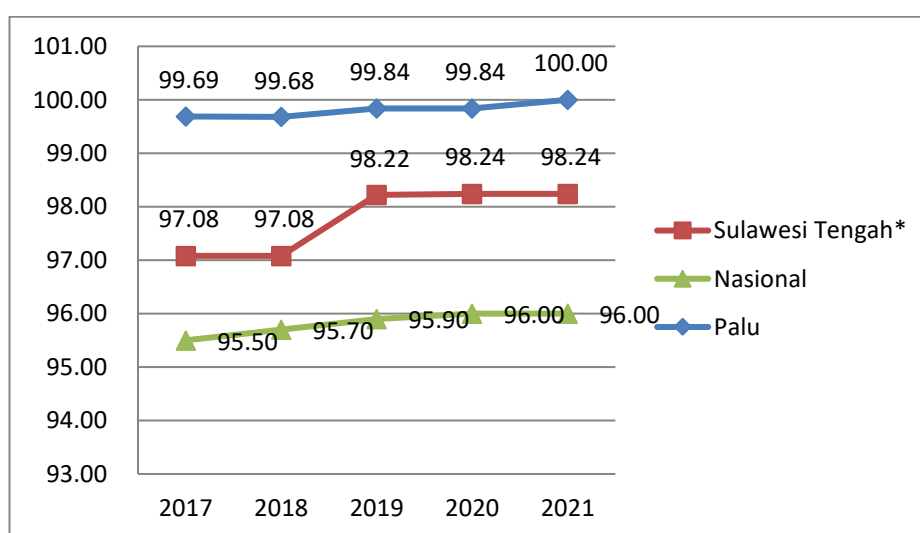
## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 1) Aspek Pendidikan

#### a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Angka tersebut meningkat hingga mencapai angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu mencapai angka yang maksimal jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dan telah berhasil memenuhi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

Gambaran AMH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional tertera pada gambar 2.21 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2022

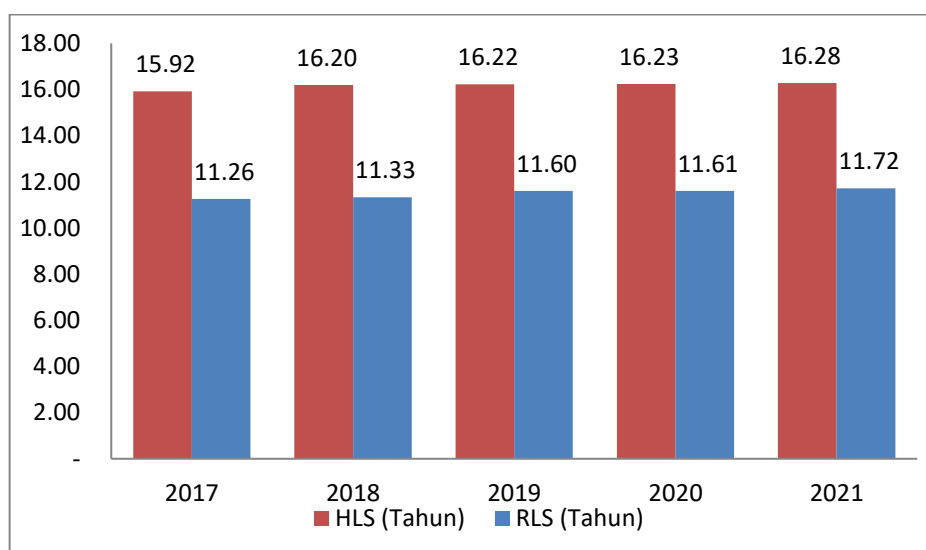
**Gambar 2.21**  
**Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2017 - 2021**

Gambaran AMH Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021 secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.21. AMH

tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 sebesar 100 % dan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 99,68 %. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 98,24 % dan terendah terjadi pada Tahun 2017 dan 2018 sebesar 97,08 %. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2020 dan 2021 sebesar 96,00 % dan terendah terjadi pada Tahun 2017 sebesar 95,50 %. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

**b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Gambar 2.22.



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.22**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**Kota Palu Tahun 2017-2021**



Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu. Tahun 2017 RLS mencapai 11,26 tahun, Tahun 2018 RLS naik menjadi 11,33 tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 yaitu 11,72 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu terus konsisten dalam memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 2 (dua) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun pula membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu juga terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2020 HLS Kota Palu mencapai angka 16,23 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

### c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2017-2021 secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.42.

**Tabel 2.42**  
**APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK**  
**Kota Palu (%) Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2017	126	107	108,39	105,43	99,19	94,29

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2018	110	109	114,46	105,28	92,88	90,63
2019	111	105	74,42	105,13	83,53	87,35
2020	104,81	91,85	111,55	92,50	78,81	74,94
2021	105,12	99,34	112,68	92,49	78,68	77,86

Sumber: BPS dan SIPD Kota Palu Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Untuk jenjang pendidikan SD, APK SD/MI di Kota Palu rata-rata 111,39 % lebih tinggi 11,22 % dari rata-rata APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah. APK SMP/MTs Kota Palu dengan rata-rata 102,44 % lebih tinggi 15,82 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, dan APK SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata 104,30 % lebih tinggi 19,29 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

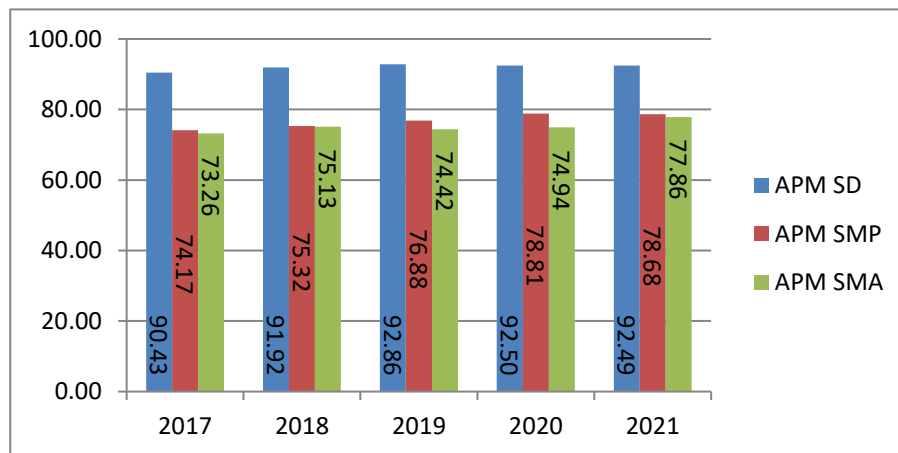
Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari

luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu.

**d. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni menunjukkan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.23 berikut ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.23**  
**Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK**  
**Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 ke Tahun 2020, namun masih menunjukkan tren naik. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2020 sebesar 92,50% mengalami penurunan lagi menjadi 92,49% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SD/MI adalah 0,51 persen. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 78,81% mengalami penurunan menjadi 78,68% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 1,13 persen. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2020 sebesar 74,94% mengalami kenaikan menjadi 77,86% pada Tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMA/SMK/MA adalah 1,15 persen. Meskipun terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SMA, secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik.

Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terurai dalam Tabel 2.43.

**Tabel 2.43**  
**Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021**

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	97,96	68,86	61,3
2	Banggai	93,69	73,74	63,94
3	Morowali	95,07	73,23	69,71
4	Poso	93,92	78,70	69,49
5	Donggala	94,08	78,44	61,17
6	ToliToli	91,53	64,24	56,29
7	Buol	97,55	76,00	62,52
8	Parigi Moutong	90,83	73,43	66,69

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
9	Tojo Una-Una	98,86	71,00	63,31
10	Sigi	93,50	75,84	58,82
11	Banggai Laut	86,18	71,48	61,98
12	Morowali Utara	90,77	84,73	71,16
<b>13</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>92,49</b>	<b>78,68</b>	<b>77,86</b>
	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>93,33</b>	<b>74,99</b>	<b>65,44</b>

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih relatif rendah. Terdapat 8 (delapan) Kabupaten yang memiliki APM lebih tinggi dibanding APM Kota Palu Tahun 2021 yaitu; Kabupaten Sigi (93,50%), Kabupaten Banggai (93,69%), Kabupaten Poso (93,92%), Kabupaten Donggala (94,08%), Kabupaten Morowali (95,07%), Kabupaten Buol (97,55%), Kabupaten Banggai Kepulauan (97,96%), dan Kabupaten Tojo Una-Una (98,86%), Kabupaten lainnya masih lebih rendah dibanding Kota Palu. Sementara APM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 juga masih lebih tinggi dibanding Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 78,68 % pada Tahun 2021. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan

datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

## 2) Aspek Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tahun 2021 AKB Kota Palu naik 0,72 dari tahun sebelumnya sebesar 2,01 menjadi 2,73 per 1000 kelahiran hidup, sehingga hal ini perlu untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap kelahiran hidup bayi. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Perkembangan AKHB Kota Palu dalam periode 2017 cenderung fluktuatif hingga Tahun 2021 namun rata-rata perkembangannya mengalami penurunan 0,15 tiap tahunnya. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.44.

**Tabel 2.44**  
**AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup)**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	1,42	2,67	1,48	2,01	2,73
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	998,58	997,33	998,52	997,99	997,99*

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021*

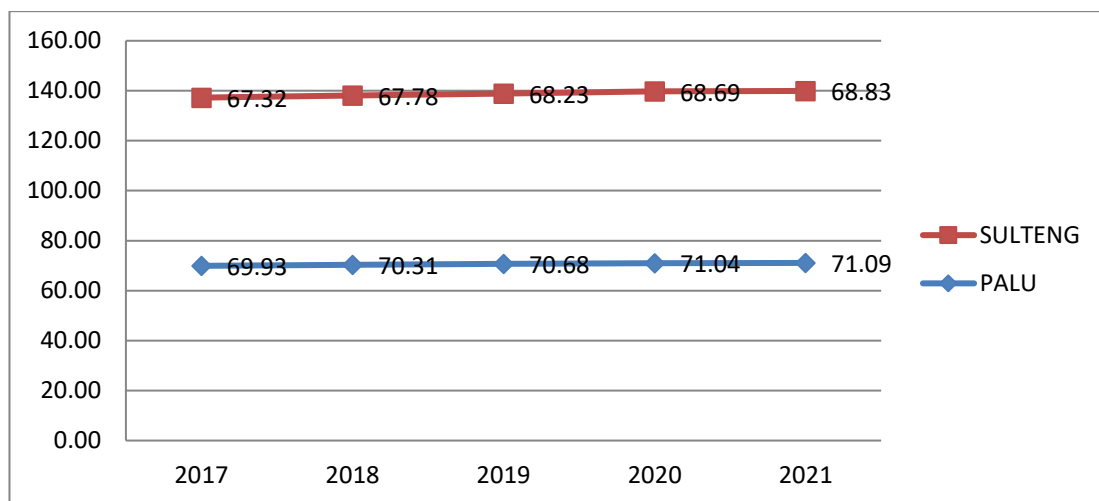
### b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka

harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71,09 tahun.

Gambar 2.24 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik dan memadai dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran angka harapan hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 tertera pada gambar 2.24 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.24**  
**Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 - 2021**

### **c. Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

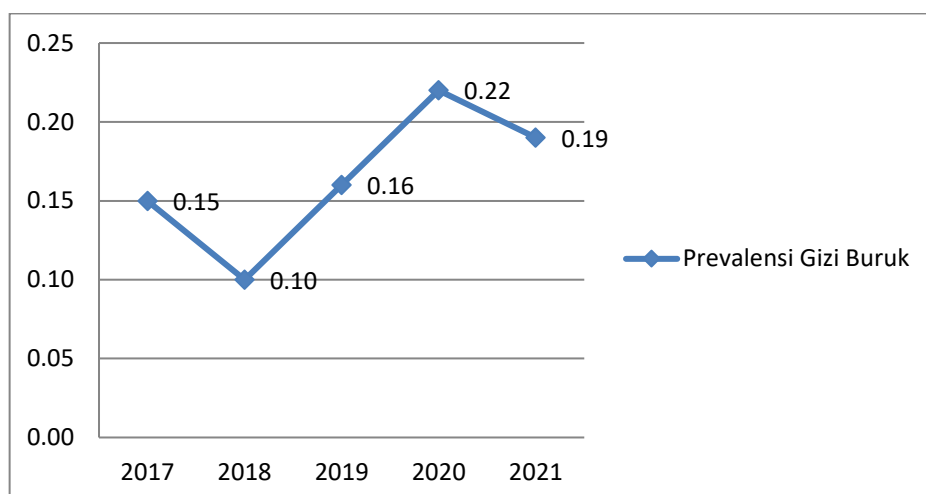
WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,17% menurun menjadi 0,10% pada Tahun 2018. Tahun 2019 kembali naik mencapai 0,16%. Tahun 2020 naik lagi menjadi 0,22%, dan Tahun 2020 persentase kembali menurun mencapai 0,19% dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,01% tiap tahunnya.

Gambaran ringkas persentase balita gizi buruk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 ditunjukkan dalam gambar 2.25.





Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.25**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2017-2021**

### 3) Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 12,496%. Pada Tahun 2016 tidak dilakukan survey. Pada Tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka menurun hingga mencapai 6,56% dan terus menurun pada Tahun 2018 hingga mencapai 5,81% kemudian meningkat menjadi 6,36% pada Tahun 2019. Gambaran tingkat pengangguran terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.45 berikut ini:

**Tabel 2.45**  
**Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017- 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
I. Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467	201.083
1. Bekerja/Working	177.959	181.079	181.523	185.507	185.777
2. Pengangguran/Unemployment	12.496	11.164	12.337	16.960	15.306
II. Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	100.103	102.166	109.963

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total</b>	<b>287.331</b>	<b>292.080</b>	<b>293.963</b>	<b>304.633</b>	<b>309.046</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>66,28</b>	<b>65,81</b>	<b>65,95</b>	<b>66,46</b>	<b>65,07</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,56</b>	<b>5,81</b>	<b>6,36</b>	<b>8,38</b>	<b>7,61</b>
<b>Rasio Penduduk yang bekerja</b>	<b>93,44</b>	<b>94,19</b>	<b>93,64</b>	<b>91,62</b>	<b>92,39</b>

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olah raga di Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan diukur dari ketersediaan sarana dan prasaran seni budaya dan olah raga. Pada Tahun 2017 organisasi kepemudaan di Kota Palu sebanyak 384 organisasi meningkat menjadi 385 organisasi pada Tahun 2021. Organisasi kepemudaan ini tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, Kecamatan yang paling banyak terdapat organisasi pemuda adalah Kecamatan Palu Selatan sebanyak 91 organisasi dan paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga sebanyak 30 organisasi.

Jumlah organisasi olahraga di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan. Tercatat pada Tahun 2017 sebanyak 204 organisasi hingga Tahun 2021 bertambah menjadi 205 organisasi. Organisasi olah raga tersebut tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, terbanyak di Kecamatan Palu Timur sebanyak 54 organisasi dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ulujadi sebanyak 14 organisasi. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 menurut Kecamatan terurai dalam Tabel 2.46 berikut ini:

**Tabel 2.46**  
**Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
<b>JUMLAH ORGANISASI PEMUDA</b>						
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	62	62	62
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	25	25	29	29	29
5	Kecamatan Tawaeli	65	65	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	29	32	32	32
7	Kecamatan Tatanga	29	29	30	30	30
8	Kecamatan Ulujadi	34	34	36	36	36
<b>Se-Kota Palu</b>		<b>384</b>	<b>384</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA</b>						
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	14	14	14	14	14
<b>Jumlah</b>		<b>204</b>	<b>204</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2021*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

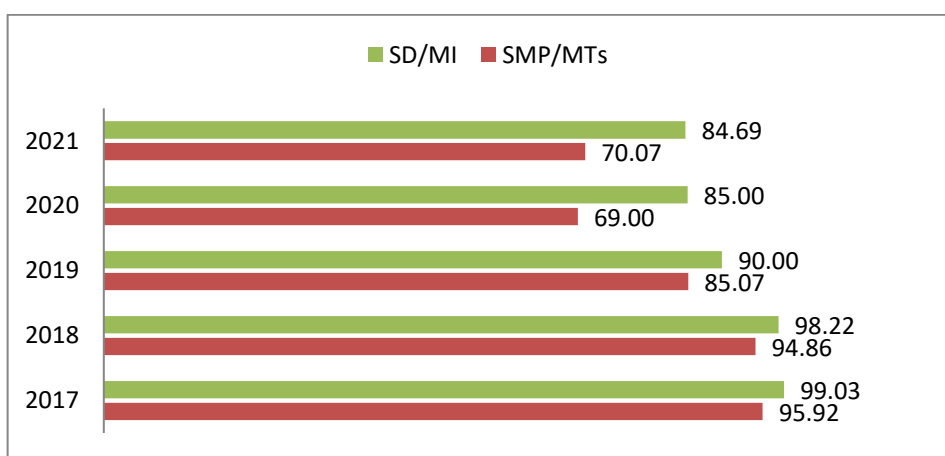
#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

##### 1) Pendidikan

###### a. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan SD/MI selama 5 (lima) tahun tidak banyak mengalami perubahan. Pada Tahun 2017 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 84,69% mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 85,00%. Pada Tahun 2017 APS SMP/MTs di Kota Palu sebesar 70,07% dan turun hingga mencapai 69,00% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 meningkat hingga mencapai 85,07%, dan terus naik hingga mencapai 94,86% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 terus meningkat mencapai 95,92 %. Gambaran secara rinci mengenai APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Gambar 2.26 berikut ini:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu 2022

**Gambar 2.26**  
**Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen)**  
**Tahun 2017 – 2021**

APS jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu sudah cukup tinggi namun belum mencapai 100 persen, yang bermakna masih terdapat 0,97 persen penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI. Apabila di kaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun kondisi ini hamper mencapai ideal, karena masih ada anak-anak yang masih tidak masuk sekolah pada pada jenjang Sekolah Dasar hingga SMP.

APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs Kota Palu juga belum mencapai 100 persen pada Tahun 2021 mengindikasikan bahwa masih ada sebagian penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTs berhenti sekolah. Penyebab lainnya yang dapat diidentifikasi adalah dugaan tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan SMP/MTs sehingga sebagian penduduk yang berpenghasilan rendah tidak memiliki cukup akses untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang tersebut.

#### **b. Rasio Ketersediaan Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.47 berikut ini:

**Tabel 2.47**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000)**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Jenjang pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Sekolah	185	185	189	190	191
1.2	Jumlah Penduduk	34.526	33.830	34.215	34.954	39.876

No.	Jenjang pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
	kelompok usia 7-12 tahun					
	<b>Rasio Palu</b>	<b>53.58</b>	<b>48,77</b>	<b>54.69</b>	<b>54.36</b>	<b>47,90</b>
<b>2.</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Sekolah	71	70	72	73	73
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	13.078	13.645	16.218	15.623	20.105
	<b>Rasio Palu</b>	<b>54.29</b>	<b>51.30</b>	<b>44.39</b>	<b>46.73</b>	<b>36,31</b>

*Sumber: Disdikbud Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022*

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Pada periode 2019-2021 rasionya menurun dari 54,69 per 10.000 penduduk menjadi 47,90 per 10.000 penduduk.

Sementara itu, Rasio Ketersediaan Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu pada Tahun 2017 sebesar 54,29 per 10.000 penduduk menurun hingga mencapai 44,39 per 10.000 penduduk pada Tahun 2019. Meskipun Tahun 2020 naik menjadi 46,73 per 10.000 penduduk namun pada Tahun 2021 kembali turun signifikan hingga menjadi 36,31 per 10.000 penduduk.

### **c. Rasio Ketersediaan Guru**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan

SD/MI, SMP/MTs, pada Tahun 2017 - 2021 terurai dalam Tabel 2.48 di bawah ini:

**Tabel 2.48**  
**Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs**  
**di Kota Palu (per 1.000 Murid)**  
**Tahun 2017 -2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. SD/MI:</b>					
1.1 Jumlah Guru	2.232	2.306	2.287	2.641	2.457
1.2 Jumlah Murid	40.818	39.166	36.003	38.916	38.123
1.3 Jumlah Kelas	1.365	1.396	1388	NA	NA
<b>Rasio Guru/Murid</b>	<b>54,68</b>	<b>58,87</b>	<b>63,52</b>	<b>67,86</b>	<b>64,45</b>
<b>Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata</b>	<b>40,05</b>	<b>42,17</b>	<b>45,76</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>2. SMP/MTs:</b>					
2.1 Jumlah Guru	1.601	1.579	1.599	1.675	1.676
2.2 Jumlah Murid	22.257	17.816	21.116	20.778	21.028
2.3 Jumlah Kelas	660	648	628	NA	NA
<b>Rasio Guru/Murid</b>	<b>71,93</b>	<b>88,62</b>	<b>75,72</b>	<b>80,61</b>	<b>79,70</b>
<b>Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata</b>	<b>108,98</b>	<b>136,75</b>	<b>120,57</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, BPS 2022*

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2017 adalah sebesar 54,68, atau sebanyak 54 guru per 1.000 murid SD/MI. Periode 2018 – 2020 menunjukkan tren peningkatan hingga rasio berada di titik tertinggi 67,68 pada tahun 2020, atau 67 guru per 1.000 murid SD/MI. Rasio guru/murid per kelas rata-rata juga menunjukkan trend yang sama, dan berada di titik 45,76 atau 45 guru per 1.000 murid per kelas rata-rata pada Tahun 2019. Namun angka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kota Palu kembali menurun hingga berada di angka 64,45 atau 64 guru per 1.000 murid SD/MI pada Tahun 2021 atau 1 orang guru untuk 15 orang murid SD/MI.

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 71,93 atau 72 orang guru per 1.000 murid. Pada periode 2018 - 2020 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu mengalami fluktuasi 88,62 Tahun 2018, 75,72 Tahun 2019, dan 80,61 Tahun 2020 per 1.000 murid. Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2021 menjadi 79 orang guru per 1.000 murid atau 1 orang guru untuk 12 orang murid SMP/MTs.

#### **d. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel Tabel 2.49

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Melek Huruf (Persen)	99,69	99,68	99,84	99,84	100,00

*Sumber: BPS Kota Palu 2022*

Penduduk Kota Palu yang berusia diatas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil



di atas angka 99%, namun sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi sebesar 99,68% dan mengalami kembali naik dan terus konsisten pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 99,84%. Pada tahun 2021 Angka Melek Huruf Kota Palu telah mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Palu untuk mencapai Angka Melek Huruf sebesar 100% di Tahun 2021.

#### **e. Kondisi Bangunan Sekolah**

Hingga Tahun 2017, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020 hampir seluruhnya dalam kondisi baik. Namun bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan di beberapa sekolah di Kota Palu, sehingga dari 2018 hingga 2020 terdapat 89,70% atau 148 sekolah yang berada dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dalam tabel 2.50.

**Tabel 2.50**  
**Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016 -2020**

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	162	162	142	143	145
Jumlah Sekolah	184	185	185	189	190
<b>Kondisi bangunan baik</b>	<b>88,04%</b>	<b>87,56%</b>	<b>76,75%</b>	<b>75,66%</b>	<b>76,31%</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021*

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2016-2019 dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tabel 2.51 yang menunjukkan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs**  
**di Kota Palu Tahun 2016 - 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	46	46	46	46	46
Jumlah Sekolah	71	71	70	72	73
<b>Kondisi bangunan baik</b>	<b>64,78%</b>	<b>64,78%</b>	<b>65,71%</b>	<b>63,88%</b>	<b>63,01%</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021*

**f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4 – 6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembangan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.52 berikut:

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**Kota Palu Tahun 2017 -2021**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	8.188	6.675	6.661	7.258	7.587
2.	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	11.975	18.222	19.572	19.381	13.136

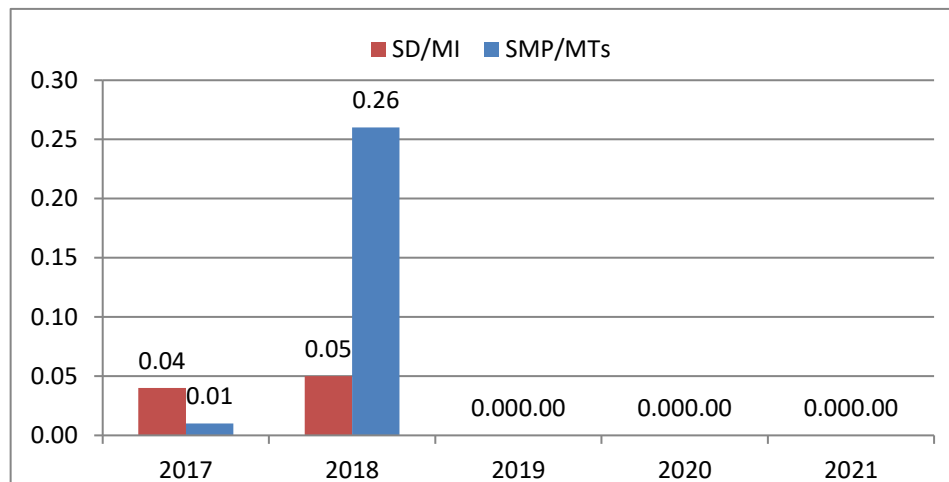
No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Persentase PAUD	68,38	36,36	34,03	37,45	57,76

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi di setiap tahunnya. Tahun 2017–2019 persentase PAUD mengalami penurunan dari 68,38% hingga menjadi 34,03%, namun pada Tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 37,45% dan terus naik lagi menjadi 57,76% pada Tahun 2021. Capaian persentase Tahun 2021 tersebut masih tergolong rendah karena masih ada sekitar 42,24 % atau sebanyak 5.548 anak usia dini 4 – 6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

#### **g. Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,04 % naik 0,01 % menjadi 0,05 % pada Tahun 2018. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,01 % naik 0,25 % menjadi 0,26 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 hingga 2021 APS SD/MI dan SMP/MTs sudah mencapai 0,00% yang artinya tidak ada lagi murid SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah. Gambaran Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, dan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.27 berikut ini:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.27**  
**Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

#### **h. Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah sebesar 100%.

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.53 sebagai berikut:

**Tabel 2.53**  
**Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%)**  
**Tahun 2017-2021**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah lulusan pada jenjang SMP	5.400	5.661	5.675	5.410	5.347
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	5.400	5.661	5.675	5.410	5.347
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

Tabel 2.53 memperlihatkan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 151,8% menurun menjadi 140,4% dan 136,2% di tahun 2017 dan 2018, lalu meningkat kembali menjadi 141,62% di tahun 2019.

Besarnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMPs ke SMA/SMK di Kota Palu yang melebihi angka 100% disebabkan tingginya jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Palu yang berasal dari daerah luar Kota Palu yang mungkin berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah bahkan mungkin juga dari provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

#### **i. Angka Melanjutkan Pendidikan**

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut.

Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada dua tahun terakhir di Tahun 2019 dan 2020, namun pada Tahun 2021 kembali naik menjadi 86,10%. Sementara Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMP ke SMA selama kurun 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat dari 136,20% di Tahun 2019 menjadi 141,62% di Tahun 2020 dan mencapai 177,74% di Tahun 2021.

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.54 sebagai berikut:

**Tabel 2.54**  
**Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP	5.634	5.621	5.303	5.259	5.257
<b>Angka Melanjut SD ke SMP</b>	<b>85,8%</b>	<b>86,7%</b>	<b>87,8%</b>	<b>85,86%</b>	<b>86,10%</b>
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP	4.820	5.400	5.661	5.675	5.347
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK	7.319	7.580	7.710	8.037	9.504
<b>Angka Melanjut SMP ke SMA/SMK</b>	<b>151,8%</b>	<b>140,4%</b>	<b>136,2%</b>	<b>141,62%</b>	<b>177,74%</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

#### **j. Kualifikasi Tenaga Pendidik**

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Perkembangan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama periode 2017 – 2018 mengalami sedikit penurunan seiring dengan menurunnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terlihat dalam tabel Tabel 2.55.

**Tabel 2.55**  
**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Guru SD/MI, SMP/MTs, Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA,MA,SMK)	4.228	4.099	4.335	4.184	2.909
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	5.676	5.599	5.664	6.322	3.675
<b>Rasio</b>	<b>74,48</b>	<b>73,20</b>	<b>76,88</b>	<b>66,18</b>	<b>79,17</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2022*

Pada Tahun 2017 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 74,48% dan mengalami penurunan 1,28% hingga menjadi 73,20% pada Tahun 2018. Tahun 2021, naik hingga mencapai 79,17% meskipun pada tahun sebelumnya turun hingga mencapai 66,18%. Rasio ini dipengaruhi oleh perbandingan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SD/MI, SMP/MTs sebesar 2.909 guru terhadap jumlah guru secara keseluruhan sebesar 3.675 guru di Tahun 2021.

Peningkatan jumlah guru secara total tidak dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu, jika ditilik dari tren secara keseluruhan, rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu selama periode 2017 – 2021 baru mencapai rata-rata sebesar 74% dan masih tergolong sedang berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja.

## **2) Kesehatan**

### **a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 1 unit posyandu bagi 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197). Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan

pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.

Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021 tertera dalam Tabel 2.56 berikut ini:

**Tabel 2.56**  
**Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Posyandu</b>	<b>Balita</b>	<b>Rasio</b>
Palu Barat	28	4.960	<b>5,65</b>
Tatanga	26	5.476	<b>4,75</b>
Ulujadi	29	1.290	<b>22,48</b>
Palu selatan	37	7.420	<b>4,99</b>
Palu Timur	23	2.109	<b>10,91</b>
Mantikulore	40	5.929	<b>6,79</b>
Palu Utara	21	1.519	<b>13,82</b>
Tawaeli	24	3.201	<b>7,49</b>
<b>Kota Palu</b>	<b>2021</b>	<b>227</b>	<b>31.904</b>
			<b>9,61</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022*

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 9,61 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan posyandu di Kota Palu adalah 1 : 104 balita yang berarti Kota Palu hampir memenuhi rasio ketersediaan posyandu yang ideal.

**b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk**

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di



Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit puskesmas dapat melayani 120.000 penduduk, poliklinik melayani 5.000 penduduk, dan pustu 30.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam dalam Tabel 2.57.

**Tabel 2.57**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu**  
**(per 100.000 penduduk) Tahun 2017 - 2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Puskesmas	13	14	14	14	14
Jumlah Poliklinik	52	50	29	17	16
Jumlah Pustu	30	34	27	25	25
Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>Rasio Puskesmas</b>	<b>3,42</b>	<b>3,63</b>	<b>3,57</b>	<b>3,75</b>	<b>3,71</b>
<b>Rasio Poliklinik</b>	<b>13,69</b>	<b>12,97</b>	<b>7,41</b>	<b>4,55</b>	<b>4,24</b>
<b>Rasio Pustu</b>	<b>7,89</b>	<b>8,81</b>	<b>6,90</b>	<b>6,70</b>	<b>6,63</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Puskesmas di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 3,71 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit puskesmas melayani 26.954 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya memenuhi rasio puskesmas yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaan tidak perlu lagi membangun puskesmas tapi bagaimana meningkatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Poliklinik sebesar 4,24 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan perbandingan yaitu 1 unit poliklinik melayani 23.584 penduduk yang berarti kondisi ini masih

dalam katagori jauh dari kondisi yang ideal atau belum memadai dari sisi ketersediaan poliklinik sehingga masih dibutuhkan penyediaan poliklinik yang mampu melayani jumlah masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Pustu sebesar 6,63 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2021 menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1 unit poliklinik melayani 15.083 penduduk yang berariti kondisi ini telah jauh memenuhi kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya tidak dibutuhkan lagi penyediaan pustu yang baru namun bagaimana menciptakan pelayanan pustu yang mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih baik.

**c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit rumah sakit dapat melayani 240.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam dalam Tabel 2.58 berikut:

**Tabel 2.58**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**  
**Di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	3	3	3	3	3
<b>Provinsi</b>	2	2	2	2	2
<b>Kota Palu</b>	1	1	1	1	1
<b>Jumlah Rumah Sakit Swasta</b>	3	4	4	4	4
<b>RS Umum</b>	3	3	3	3	3
<b>Rs Bersalin / RS Ibu Anak</b>	4	4	4	4	4

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RS Khusus (Mata)</b>	1	0	0	0	0
<b>Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI</b>	2	2	2	2	2
<b>Jumlah Seluruh Rumah Sakit</b>	19	19	19	19	19
<b>Jumlah Penduduk</b>	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)</b>	<b>5,00</b>	<b>4,92</b>	<b>4,85</b>	<b>5,09</b>	<b>5,04</b>

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2022, dan BPS Kota Palu Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Rumah Sakit yang berada di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 5,04 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit rumah sakit melayani 19.841 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya sekedar memenuhi rasio rumah sakit yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya sesungguhnya tidak perlu lagi membangun rumah sakit tapi bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat secara optimal.

#### **d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Rasio Dokter per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa 1 orang dokter dapat melayani 2.500 penduduk sedangkan menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia bahwa 1 orang dokter dapat melayani 3.000 penduduk.

Perkembangan jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.59.

**Tabel 2.59**  
**Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Jumlah Dokter</b>	319	385	374	374	308
<b>Jumlah Penduduk</b>	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>Rasio Dokter per-100.000 penduduk</b>	<b>83,99</b>	<b>99,83</b>	<b>95,56</b>	<b>100,21</b>	<b>81,69</b>

*Sumber: Dinkes Kota Palu 2022 dan BPS Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Dokter Kota Palu Tahun 2021 sebesar 81,69 per 100.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang dokter melayani 1.224 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio dokter yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal baik menurut organisasi kesehatan dunia WHO maupun BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

#### **e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tenaga medis dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 orang tenaga medis melayani 2.500 penduduk (Undang\_Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel 2.60 berikut:

**Tabel 2.60**  
**Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Jumlah Tenaga Medis</b>	2.361	2.538	2.795	2.795	3.036
<b>Jumlah Penduduk</b>	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>Rasio Tenaga Medis per-100.000 penduduk</b>	<b>621,67</b>	<b>658,16</b>	<b>714,13</b>	<b>748,89</b>	<b>805,24</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Tenaga Medis Kota Palu Tahun 2021 sebesar 805,24 per 100.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang tenaga medis melayani 124 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio tenaga medis yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

### **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Dengan perekonomian masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu secara signifikan.

#### a. Proporsi Jaringan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Perkembangan proporsi jalan dalam kondisi baik di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam Tabel 2.61 berikut ini:

**Tabel 2.61**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam**  
**Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2017-2021**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jalan Kondisi Baik (km)</b>	332,70	367,96	347,65	262,95	263,96
<b>Jalan Kondisi Baik Sedang (km)</b>	257,65	233,73	183,17	162,57	279,38
<b>Jalan Kondisi Rusak (km)</b>	157,05	137,62	178,83	200,48	205,81
<b>Jalan Kondisi Rusak Berat (km)</b>	104,17	112,24	164,72	140,86	103,41
<b>Panjang jalan (km)</b>	851,56	851,56	851,56	851,56	851,56
<b>Proporsi</b>	<b>39,07</b>	<b>43,21</b>	<b>40,83</b>	<b>30,88</b>	<b>31,00</b>

<sup>a</sup>  
*Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022*

Pada Tahun 2017 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 39,07%, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 43,21% pada Tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Pada Tahun 2019 pasca bencana alam, panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu menurun sepanjang 347,65 km. Kondisi ini terus mengalami penurunan hingga Tahun 2021 yang hanya mencapai 263,96 km.

Seiring dengan hal tersebut panjang jaringan jalan yang mengalami rusak pada Tahun 2018 sepanjang 137,62 km terus meningkat kerusakannya hingga mencapai 205,81 km pada Tahun 2021. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik pada Tahun

2021 hanya mencapai 31% sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih oleh Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kondisi jalan yang lebih baik dengan strategi pembangunan yang menitik beratkan pada infrastruktur jalan di Kota Palu.

### **b. Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase**

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedangkan drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Berikut perkembangan panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 terurai dalam Tabel 2.62 di bawah ini:

**Tabel 2.62**  
**Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km)**  
**Tahun 2017-2021**

No	Ruas jalan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan (Km)	851,56	851,56	851,56	851,56	851,56
4	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	3,12	4,12	5,12	6,12	8,12
5	% Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5)	0,37%	0,48%	0,6%	0,72%	0,95%

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu*

Tabel 2.62 menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang terus meningkat dari 0,37% di Tahun 2017 hingga mencapai 0,95% di Tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Palu setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 2 km dari tahun sebelumnya sebesar 6,12 km menjadi 8,12 km di tahun 2021.

### **c. Jaringan Irigasi**

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Tahun 2019 saluran irigasi di Kota Palu dengan kondisi baik mengalami penurunan sepanjang 21.018,87 meter atau turun sebesar 39,39 % dari Tahun 2018 yang mencapai panjang 53.354,87 meter. Seiring dengan turunnya kondisi saluran irigasi kondisi baik, kondisi rusak berat meningkat sepanjang 20.581,62 meter atau naik 245,42 % dari Tahun 2018 yang mencapai 8.386,38 meter. Untuk Panjang saluran irigasi di Kota Palu pada Tahun 2019 seluruhnya berkurang sebesar 291,92 meter dari tahun sebelumnya sepanjang 79.915 meter. Semua kondisi ini disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kota Palu pada akhir Tahun 2018.

Berkurangnya panjang saluran irigasi dan meningkatnya kondisi rusak berat saluran irigasi pada Tahun 2019 mempengaruhi kontribusi sektor pertanian di Kota Palu yang turun secara signifikan. Gambaran kontribusi sektor pertanian tertera dalam gambar 2.46 pada urusan pilihan pertanian.

Perkembangan jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2020 – 2021 tertera dalam Tabel 2.63 berikut ini:



**Tabel 2.63**  
**Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%)**  
**Tahun 2020-2021**

Saluran Irigasi	Panjang Saluran	
	2020	2021
Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (km <sup>2</sup> )	333,23	345,23
Luas Irigasi (km <sup>2</sup> )	1.001	1.001
<b>Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik</b>	<b>0,33</b>	<b>0,34</b>
Panjang Saluran Irigasi (km)	66.844	66.844
Luas Lahan Budidaya Pertanian (km <sup>2</sup> )	1.001	1.001
<b>Rasio Jaringan Irigasi</b>	<b>66,84</b>	<b>66,84</b>

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022

Tabel 2.62 memperlihatkan kondisi saluran irigasi di Kota Palu Tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik yaitu 333,23 km<sup>2</sup> di Tahun 2020 menjadi 345,23 km<sup>2</sup> di Tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 12 km<sup>2</sup>.

#### **d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**

Peningkatan jumlah tempat ibadah menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam daerah menjadi baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan cepat.

Perkembangan jumlah bangunan tempat ibadah di Kota Palu Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Perkembangan bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan

rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2020 terurai dalam Tabel 2.64 sebagai berikut:

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2018 - 2020**

Bangunan Tempat Ibadah	2018			2019			2020		
	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
Mesjid	431	303.700	1,4	431	308.138	1,4	504	310.441	1,6
Gereja	71	53.715	1,3	71	54.504	1,3	110	40.492	2,7
Pura	2	17.378	0,1	2	21.206	0,1	4	16.107	0,3
Wihara	3	8.810	0,3	3	8.990	0,3	4	6.178	0,7
<b>Jumlah</b>	<b>507</b>	<b>383.603</b>	<b>1,32</b>	<b>507</b>	<b>392.838</b>	<b>1,29</b>	<b>622</b>	<b>373.218</b>	<b>1,67</b>

*Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021*

Tabel 2.64 memperlihatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu pada Tahun 2018 sebesar 1,32 per 1.000 penduduk, mengalami penurunan hingga menjadi 1,29 per 1.000 penduduk pada Tahun 2019. Tahun 2020 rasio tempat ibadah di Kota Palu naik signifikan menjadi 1,67 per 1.000 penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu yang meningkat ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya bantuan dari berbagai daerah atau negara pasca bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2018.

#### **e. Rasio Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal, termasuk ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum.

Perkembangan rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2018 – 2021 tertera dalam tabel 2.65 berikut ini:

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Rasio Tempat Pemakaman Per satuan Penduduk**  
**di Kota Palu Tahun 2018 - 2021**

Uraian	2018		2019		2020		2021	
	Luas (m <sup>2</sup> )	Daya Tampung	Luas (m <sup>2</sup> )	Daya Tampung	Luas (m <sup>2</sup> )	Daya Tampung	Luas (m <sup>2</sup> )	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350
Jumlah	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132
Jumlah penduduk (jiwa)	379.782	379.782	391.383	391.383	373.218	373.218	377.030	377.030
<b>Rasio</b>		<b>63,54</b>		<b>61,65</b>		<b>64,66</b>		<b>64,01</b>

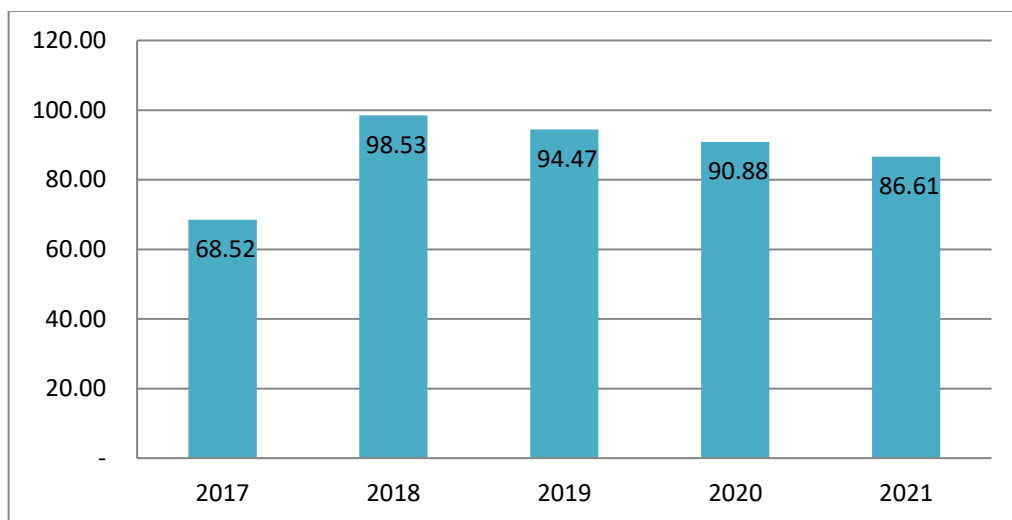
Sumber: SIPD Kota Palu, dan Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2022

Tabel 2.65 memperlihatkan perkembangan rasio tempat pemakaman per satuan penduduk dari Tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 63,54 per penduduk, turun menjadi 61,65 per penduduk di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 rasio daya tampung tempat pemakaman kembali naik menjadi 64,66 per penduduk dan kembali turun di Tahun 2021 hingga menjadi 64,01 per penduduk. Menurunnya rasio pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat.

#### **f. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**

Persentase jumlah sampah yang tertangani dari Tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 persentasenya sebesar 98,53 ton, turun menjadi 94,47 ton di Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 86,61 di tahun 2021.

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Gambar 2.28 berikut ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2022

**Gambar 2.28**  
**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**  
**Tahun 2017 – 2021**

#### **g. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan

- Didominasi komunitas tumbuhan.

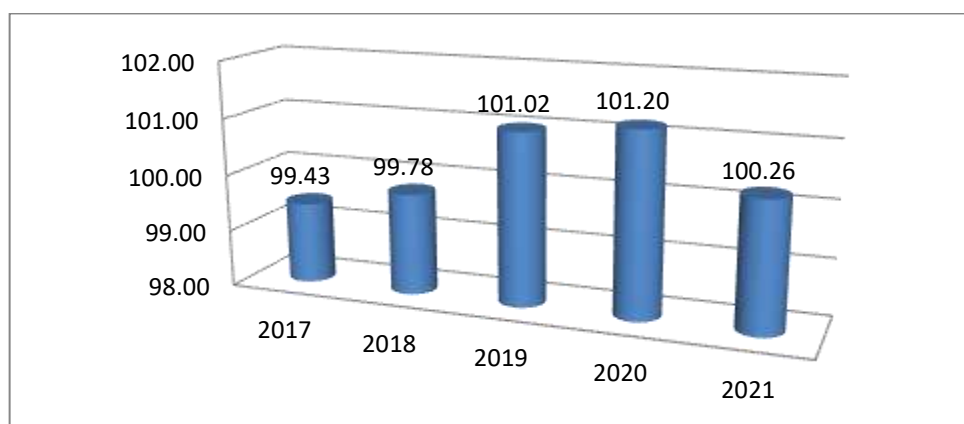
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam pemenuhan pengembangan ruang terbuka hijau untuk Kota Palu di Tahun 2014 terdapat 14,65% yang telah dilakukan, dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Keberadaan lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey program Kota tanpa kumuh Tahun 2021 diketahui bahwa persentase luas lingkungan perumahan kumuh yang tertangani di Kota Palu sebesar 73,98% atau seluas 197,33 ha dari luas permukiman kumuh sebesar 266,74 ha.

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 99,43% menjadi 101,20% di tahun 2020. Tahun 2021 persentasenya mengalami penurunan hingga menjadi 100,26%. Berikut persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2017-2021 yang tertera dalam Gambar 2.29 di bawah ini:

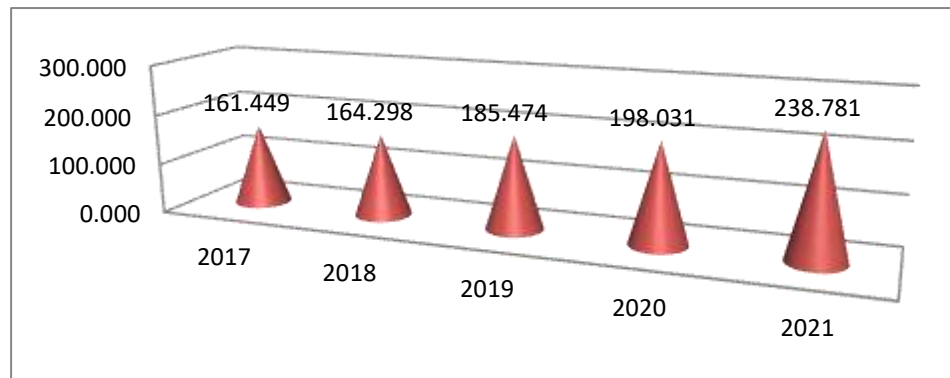


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2022

**Gambar 2.29**  
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2017-2021 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2021 sebesar 238,78% naik 40,75% dari tahun sebelumnya sebesar 198,031%. Persentase ini diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik terhadap total jumlah rumah tangga yang tersedia di Kota Palu. Besarnya jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik mengakibatkan nilai persentase menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 (satu) meteran listrik untuk 1 rumah tangga. Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah ketersediaan rumah sewa atau kost. Untuk 1 orang pemilik atau 1 rumah tangga yang memiliki rumah sewa / kost dapat menggunakan beberapa meteran listrik sesuai dengan jumlah petak rumah sewa/kost yang disediakan.

Adapun persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.30 berikut ini:

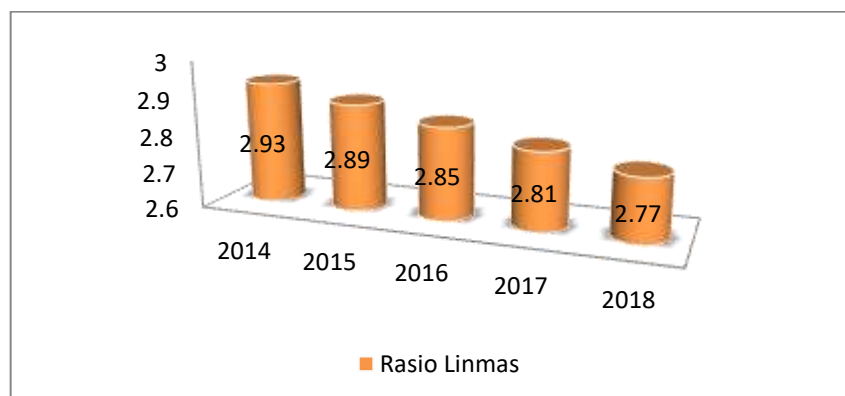


Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

**Gambar 2.30**  
**Persentase Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

#### 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2014 – 2018 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 yang sebesar 2,93 menjadi 2,89 di Tahun 2015. Pada Tahun 2016 rasionya sebesar 2,85 dan pada Tahun 2017 kembali mengalami penurunan yang rasionya menjadi 2,81. Dengan peningkatan jumlah penduduk, rasio linmas cenderung menurun hingga pada Tahun 2018 sebesar 2,77.

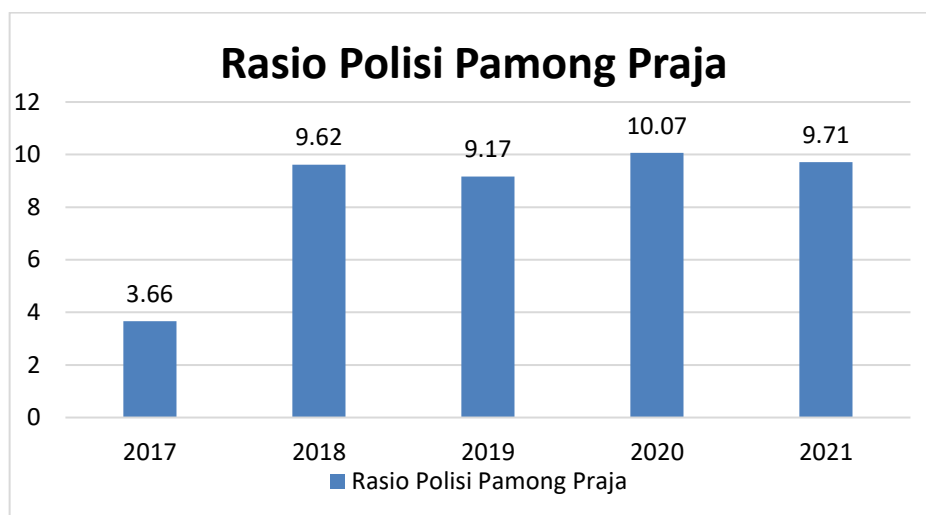


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019

**Gambar 2.31**  
**Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu**  
**Tahun 2014-2018**

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 rasionya sebesar 3,66 naik menjadi 9,62 di Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 turun hingga menjadi 9,17 lalu kemudian naik lagi mencapai 10,07 dan pada Tahun 2021 turun kembali menjadi 9,71 per 10.000 penduduk.

Berikut gambaran rasio polisi pamong praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2021

**Gambar 2.32**  
**Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

## 6) Sosial

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2017-2021. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selama kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 53 unit pada Tahun 2017 hingga naik menjadi 59 unit pada Tahun 2018 dan berkurang menjadi 41 unit pada Tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 kembali naik 2 unit hingga menjadi 43



unit. Berikut jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Tabel 2.66 di bawah ini:

**Tabel 2.66**  
**Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2017-2021**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah Panti Asuhan	53	59	41	41	43
Rumah singgah	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>44</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial di Tahun 2018 sebesar 41,27% turun signifikan hingga menjadi 10,60 % pada Tahun 2019. Tahun 2020 kembali naik hingga mencapai 11,57 %. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam Tabel 2.67 di bawah ini:

**Tabel 2.67**  
**PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017- 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	24.892	131.600	261.545	27.659
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	N/A	54.314	27.721	3.200
<b>% PMKS yg memperoleh bantuan sosial</b>		<b>41,27%</b>	<b>10,60%</b>	<b>11,57%</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021*

### **2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

#### **1) Tenaga Kerja**

Jumlah angkatan kerja Tahun 2021 turun sebesar 1.384 orang dari tahun sebelumnya hingga menjadi 201.083 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 185.777 orang dan yang menganggur sebesar 15.306 orang. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kota

Palu terhadap Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 masih lebih rendah. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbukanya yang terus lebih tinggi. Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.68 di bawah ini:

**Tabel 2.68**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467	201.083
	a. Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507	185.777
	b. Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960	15.306
2	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166	107.963
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	287.331	292.080	293.963	304.633	309.046
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,28	65,81	65,95	66,46	65,07
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	67,51	66,82	69,44	69,44	68,73
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,56	5,81	6,36	8,38	7,61
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,81	3,37	3,11	3,77	3,75

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

## **2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam tabel 2.69 di bawah ini:

**Tabel 2.69**  
**Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2021**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	4.908*
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	3.818
Jumlah pekerja perempuan	8.726
<b>Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta</b>	<b>56,25%</b>
<b>Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah</b>	<b>43,75%</b>

Sumber: BKPSDMD Kota Palu Tahun 2022

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 56,25% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 43,75%, menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

### 3) Pangan

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Gambaran umum terkait ketahanan pangan diantaranya dapat dilihat dari gambaran konsumsi energi dan konsumsi protein oleh masyarakat Kota Palu sebagaimana tertera dalam Tabel 2.70 berikut ini:

**Tabel 2.70**  
**Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2017-2020**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>			
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2090	1908	1960	2068
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	71,20	59,90	59,68	66,30

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi energi masyarakat Kota Palu di Tahun 2018 mengalami penurunan dari 2090 kkal/kap/hari di tahun 2017 menjadi 1908 kkal/kap/hari di Tahun 2018. Tahun 2021 konsumsi energy ini mencapai 2068 kkal/kap/hari. Sementara konsumsi protein masyarakat Kota Palu di Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan masing-masing yaitu 59,90 gram/kap/hari, dan 59,68 gram/kap/hari. Tahun 2021 konsumsi protein mencapai 66,30 gram/kap/hari.

#### 4) Pertanian

Luas lahan bersertifikat dalam lima tahun terakhir sejak Tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 820,10 hektar tiap tahunnya. Tahun 2016 luas lahan bersertifikat sebesar 1.183,89 ha. Tahun 2017 luas lahan bersertifikat naik sebesar 812,16 ha menjadi 1.996,05 Ha. Tahun 2018 naik signifikan sebesar 1.094,36 ha sehingga mencapai 3.090,41 ha. Tahun 2019 dan 2020 masing-masing naik sebesar 840,20 ha dan 533,69 ha sehingga menjadi 3.930,61 ha di Tahun 2019 dan 4.464,30 ha di Tahun 2020. Adapun data luas lahan bersertifikat Tahun 2016-2020 di Kota Palu tertera dalam tabel 2.71 sebagai berikut:

**Tabel 2.71**  
**Luas Lahan Bersertifikat (hektar) di Kota Palu**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Luas Tanah Bersertifikat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1). Hak Milik	508,75	137,02	419,22	165,06	51,85
2). Hak Guna Bangunan	675,14	675,14	675,14	675,14	481,84
3). Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
4). Hak Pakai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5). Girik	-	-	-	-	-

<b>Luas Tanah Bersertifikat</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah	1.183,89	812,16	1.094,36	840,20	533,69
Luas Wilayah	39.506	39.506	39.506	39.506	39.506
<b>Persentase Luas Lahan Bersertifikat</b>	<b>2,99</b>	<b>5,05</b>	<b>7,82</b>	<b>9,95</b>	<b>11,30</b>

*Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2020”*

Tabel 2.71 menunjukkan kenaikan persentase luas lahan bersertifikat di Kota Palu dari Tahun 2016-2020. Kenaikan persentase tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 2,77 %, dan kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 1,35 % dari tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2021, data terkait luas tanah bersertifikat dengan status hak milik dan hak guna bangunan belum tersedia sehingga persentase luas lahan bersertifikat belum dapat teridentifikasi. Berdasarkan hal itu data yang tersaji masih menggunakan data periode 2016-2020.

### **5) Lingkungan Hidup**

Persentase penanganan sampah di Kota Palu selama Tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 34,24%. Persentase penanganan sampah di Tahun 2017 sebesar 71,42% hingga menjadi 37,18% di Tahun 2018. Tahun 2020 persentasenya turun signifikan hingga menjadi 2,56% dan kembali naik signifikan menjadi 86,61% di Tahun 2021.

Persentase penanganan sampah berdasarkan jumlah volume sampah dan produksi sampah di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.72 berikut ini:

**Tabel 2.72**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

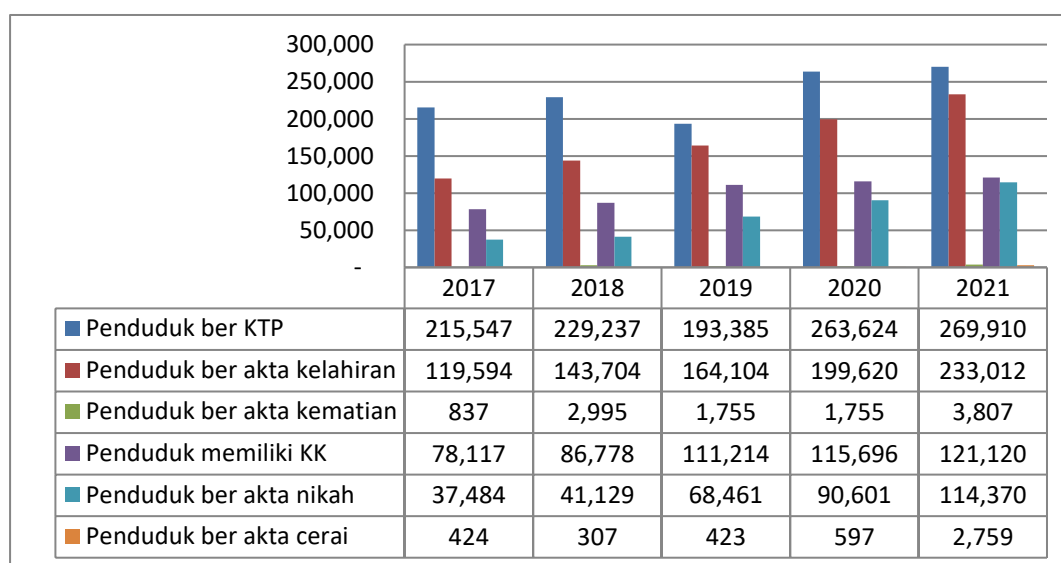
NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		dalam m3		dalam Ton		
1	Jumlah sampah yang ditangani	279.574	141.968	N/A	71.209,03	63.381,16
2	Jumlah volume produksi sampah	391.427	381.792	N/A	2.782.877	73.180,86
3	Persentase	71,42%	37,18%	N/A	2,56 %	86,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2022

### 6) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil suatu daerah menerbitkan beberapa dokumen atau surat/akta untuk masing-masing penduduk yang melakukan pengurusan administrasi pencatatan sipil di antaranya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, dan kartu keluarga (KK).

Gambaran jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam Gambar 2.33 berikut ini:



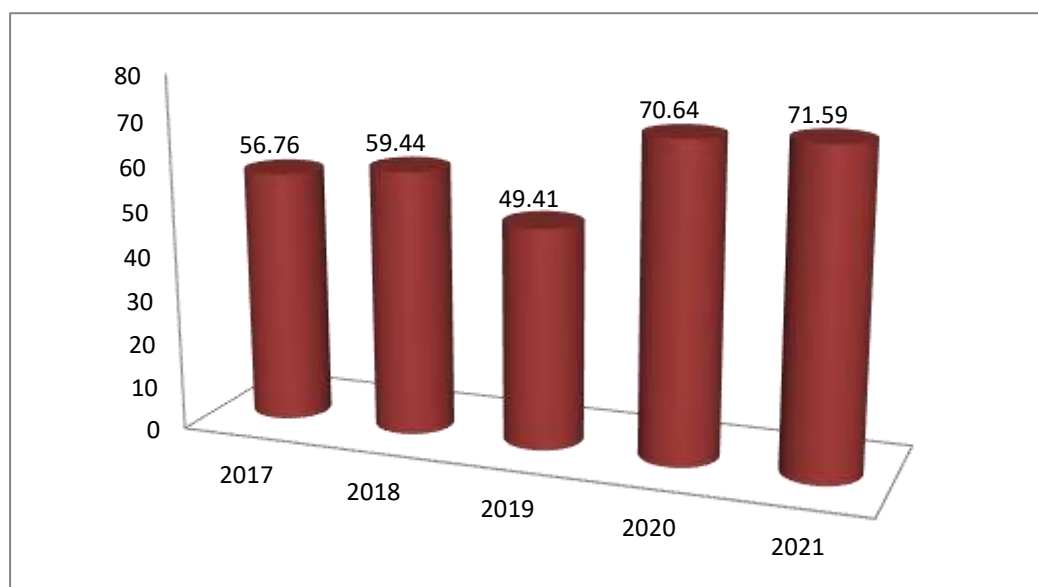
Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.33**  
**Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

Gambar 2.33 memperlihatkan kenaikan-kenaikan jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu tiap tahunnya periode 2017-2021 kecuali kepemilikan akta perceraian yang fluktuatif sampai dengan Tahun 2021. Tahun 2018 jumlah penduduk berakta cerai turun sebesar 117 orang dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 307 orang. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 116 orang dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 423 orang. Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing masing sebesar 174 orang pada Tahun 2020 dan 2.162 orang pada Tahun 2021.

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta cerai seperti yang tertera dalam gambar 2.33 di atas, maka dapat diketahui rasio atau perbandingannya terhadap jumlah penduduk dengan status kepemilikan yang belum tersedia.

Berikut rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.34 di bawah ini:

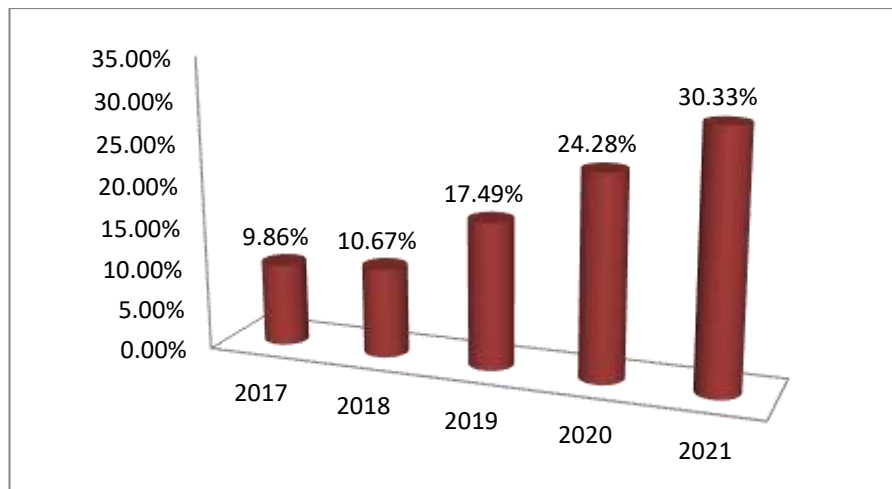


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.34**  
**Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.34 memperlihatkan rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2020 naik sebesar 21,23 % hingga mencapai 70,64 % dari tahun sebelumnya yang mencapai 49,41 %. Kenaikan ini adalah kenaikan tertinggi selama kurun waktu empat tahun terakhir dari Tahun 2017 hingga 2020. Kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 1,05 % hingga menjadi 71,59 % dari tahun sebelumnya.

Selain penduduk ber KTP, rasio pasangan berakte nikah di Kota Palu Tahun 2017-2021 digambarkan pada diagram di bawah ini:



Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2022

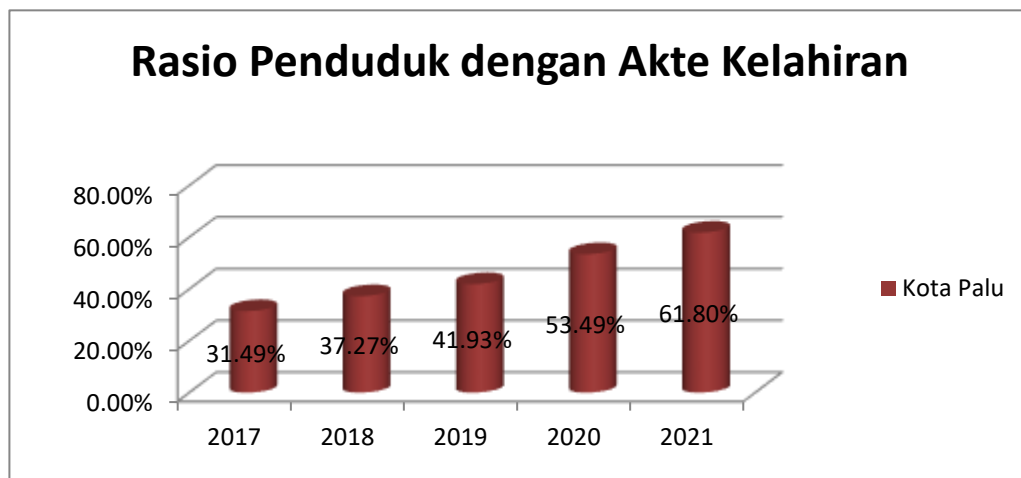
**Gambar 2.35**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.35 memperlihatkan kenaikan rasio pasangan berakte nikah tiap tahunnya sebesar 5,12 %. Tahun 2018 naik sebesar 0,81 % dari tahun sebelumnya, Tahun 2019 sebesar 6,82 %, Tahun 2020 sebesar 6,79 % dan Tahun 2021 sebesar 6,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan jumlah pasangan nikah disertai dengan pengurusan dan penerbitan surat akta nikah, kenaikan ini masih terbilang rendah karena perbandingannya terhadap penduduk yang belum memiliki akta nikah jauh di atas



penduduk yang telah memiliki akta nikah sebesar 69,67 % pada Tahun 2021, sehingga perlu untuk mengejar ketertinggalan.

Pengukuran selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran dan serta kepemilikan kartu keluarga. Rasio penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam gambar sebagai berikut:

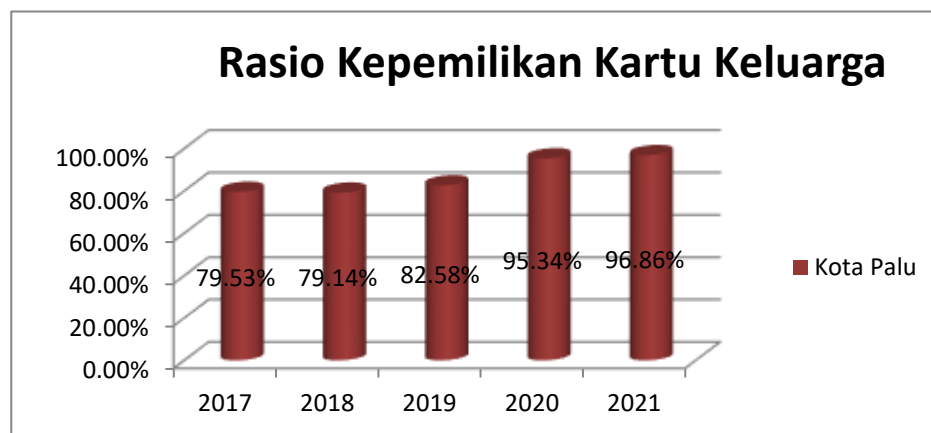


Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022

**Gambar 2.36**  
**Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.34 memperlihatkan rasio kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2017-2021. Pada Tahun 2017 rasionya sebesar 31,49% naik 30,31 % menjadi 61,80% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mencapai rasio di atas separuh penduduk yang seharusnya memiliki akta kelahiran, sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

Berikut rasio kepemilikan kartu keluarga di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022

**Gambar 2.37**  
**Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.35 memperlihatkan kenaikan rasio kepemilikan kartu keluarga tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 12,76 % hingga mencapai 95,34 %. Tahun 2021 naik sebesar 1,52 % hingga mencapai 96,86 % dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,33 % tiap tahunnya periode 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan, jumlah penduduk dengan kepemilikan kartu keluarga lebih besar dibandingkan dengan yang belum memiliki kartu keluarga. Meskipun demikian masih terdapat 3,14 % penduduk yang belum memiliki kartu keluarga dari jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memiliki kartu keluarga.

## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak.

Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015 sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Pada tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat menjadi total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga saat ini Tahun 2021 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

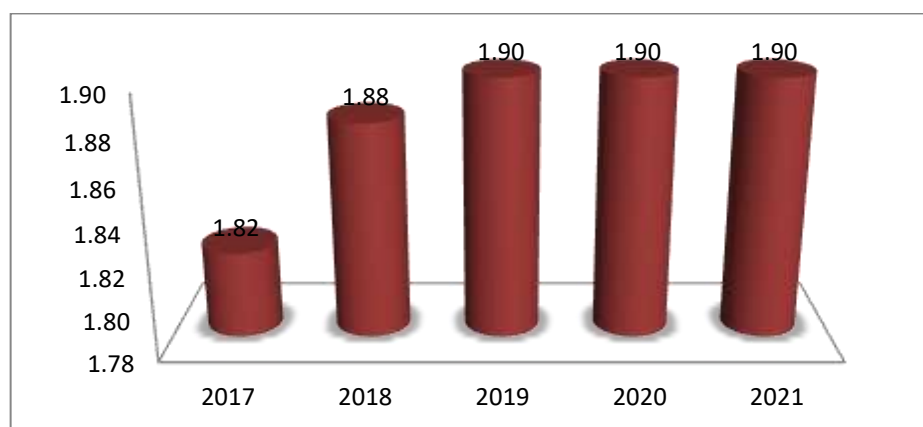
Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu diukur melalui tingkat keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi.

Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

## **8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kesehatan reproduksi ibu dan anak.

Berikut gambaran rata-rata anak per keluarga di Kota Palu Tahun 2017- 2021 terlihat dalam gambar 2.38 di bawah ini:

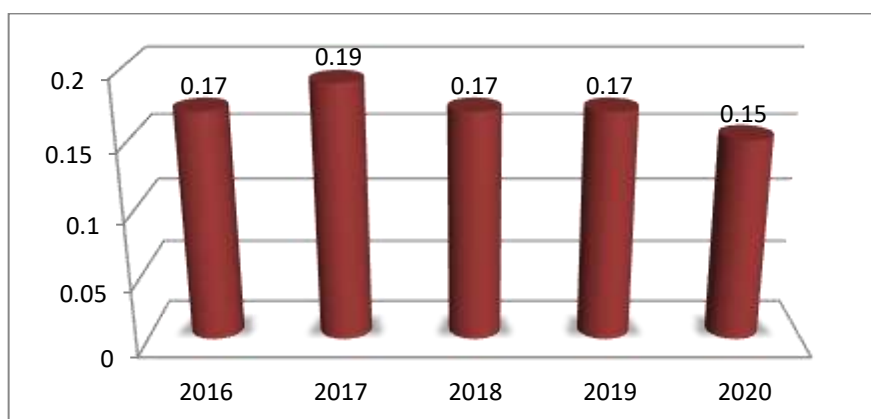


Sumber: DPPKB Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.38**  
**Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

Rata-rata jumlah anak di Kota Palu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 rata-rata jumlah anak sebesar 1,82 menjadi 1,88 di Tahun 2018 dan . Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,03. Kondisi ini menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah anak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah keluarga yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palu hingga Tahun 2020 adalah 1 atau 2 orang per keluarga.

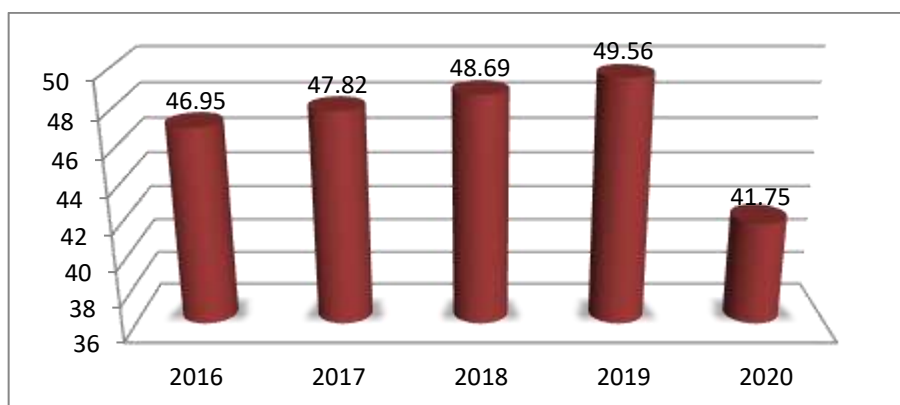
Rasio akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2017 naik 0,02 % hingga mencapai 0,19 % dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 rasio akseptor kembali turun sebesar 0,02 % dari tahun sebelumnya 0,17 % hingga menjadi 0,15 %. Berikut Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 tertera dalam Gambar 2.39 di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2020

**Gambar 2.39**  
**Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2016 - 2020**

Cakupan peserta KB aktif di Kota Palu Tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebesar 46,95 menjadi 47,82 pada Tahun 2018 dan kembali meningkat di Tahun 2019 hingga mencapai 49,56. Pada Tahun 2020 cakupan peserta KB aktif turun signifikan hingga menjadi 41,75 %. Berikut cakupan peserta Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 tertera dalam Gambar 2.40 di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020

**Gambar 2.40**  
**Cakupan Peserta KB di Kota Palu Tahun 2016 – 2020**

## 9) Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus

penumpang dari Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2017 arus penumpang sebesar 2.222.116 penumpang turun menjadi 889.367 penumpang di Tahun 2018, dan kembali meningkat hingga mencapai 1.726.366 penumpang di Tahun 2019. Pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 594.344 penumpang dan naik lagi menjadi 702.707 penumpang di Tahun 2021.

Berikut jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera pada Table 2.73 di bawah ini:

**Tabel 2.73**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	793.446	341.312	136.829	83.190	230.328
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	59.450	548.055	326.987	34.695	36.567
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	1.369.220	N/A	1.262.550	476.459	435.812
<b>Total Jumlah Penumpang</b>		<b>2.222.116</b>	<b>889.367</b>	<b>1.726.366</b>	<b>594.344</b>	<b>702.707</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022*

Rasio ijin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi selama Tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017 rasionya mencapai 0,0000158 menjadi 0,0000156 di Tahun 2018, kemudian kembali mengalami fluktuatif di Tahun 2019 dan 2020 dengan capaian berturut-turut 0,0000153 dan 0,0000161. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu. Rasio izin trayek di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada Tabel 2.74 berikut ini:

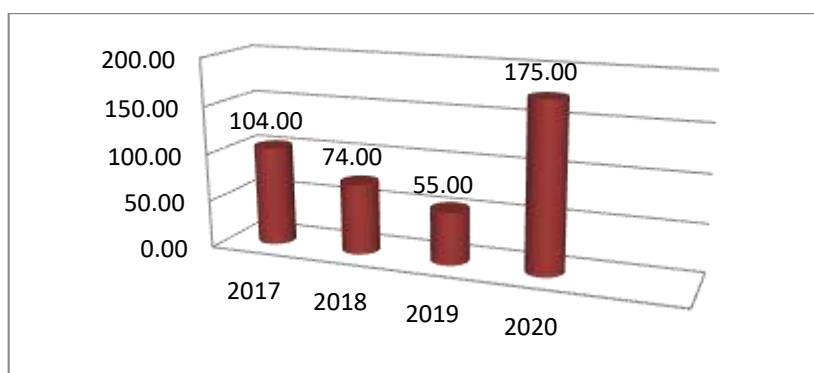
**Tabel 2.74**  
**Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Izin Trayek	6	6	6	6	6
2	Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>Rasio izin Trayek</b>		<b>0,0000158</b>	<b>0,0000156</b>	<b>0,0000153</b>	<b>0,0000161</b>	<b>0,0000159</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2022*

Persentase uji Kir di Kota Palu Tahun 2017-2019 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Tahun 2017 persentase uji Kir mencapai 104 % dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 55 % pada Tahun 2019 dengan rata-rata penurunan sebesar 77,67 % tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Persentase uji kir angkutan umum naik signifikan hingga mencapai 175 % di Tahun 2020.

Persentase uji kir angkutan umum di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam gambar 2.41 berikut ini:



*Sumber: Dinas Perhubungan 2021*

**Gambar 2.41**  
**Persentase Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2017 – 2020**

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan dengan total sebanyak 7 unit. Ketersediaan pelabuhan laut/udara/terminal bis dengan jumlah ketersediaan sebanyak 7 unit tersebut masih mampu melayani kebutuhan arus keberangkatan dan kedatangan jumlah penumpang di Kota Palu yang terus menurun dan berfluktuasi sejak Tahun 2017-2021 di Kota Palu. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2017-2021 terlihat pada tabel 2.75 berikut ini:

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**  
**Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

#### 10) Komunikasi dan Informatika

Pada indikator komunikasi dan informatika, dalam periode 2017-2021 di Kota Palu terdapat 4 jaringan telepon genggam, namun tidak tersedia jaringan stasioner.

**Tabel 2.76**  
**Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

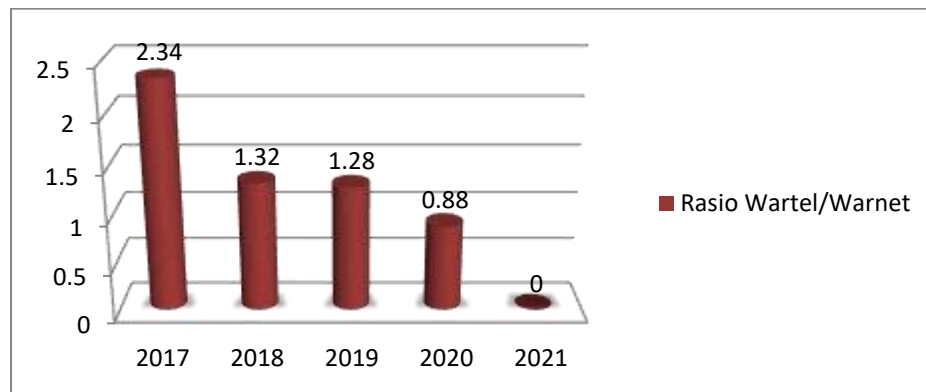
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
3	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022



Rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami penurunan yang signifikan selama Tahun 2017-2021, khususnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2021. Penurunan tertinggi sebesar 1,02 terjadi di Tahun 2018 dari rasio 2,34 pada tahun sebelumnya hingga menjadi menjadi 1,32. Begitupun yang terjadi di Tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 0,88 hingga menjadi 0 dalam artian sdh tidak tersedia wartel/warnet di Kota Palu. Penurunan rasio ini diantaranya dipengaruhi oleh pemasangan jaringan internet pribadi pada rumah-rumah masyarakat Kota Palu dan berkembangnya teknologi telepon genggam dalam periode tersebut.

Berikut rasio wartel/warnet di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.42**  
**Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

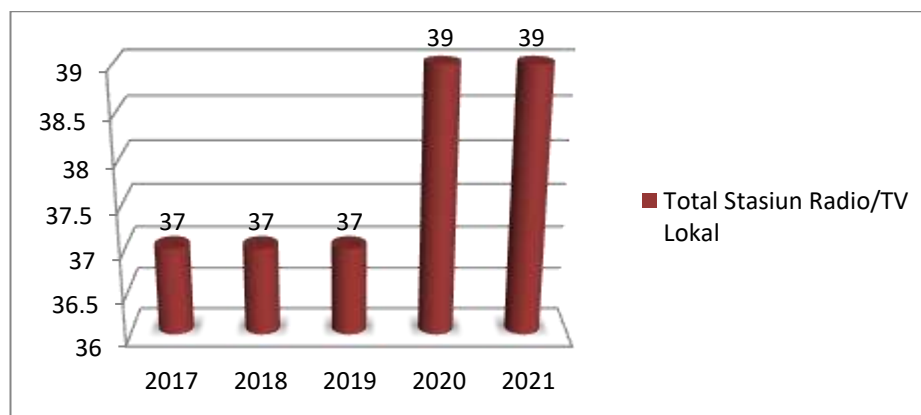
Pada Tahun 2021, terdapat total 18 jenis surat kabar nasional/lokal di Kota Palu. Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal di Kota Palu naik 1 jenis di Tahun 2018 dari jumlah 12 hingga menjadi 13 jenis sedangkan untuk terbitan nasional tidak ada penambahan jumlah dari tahun ke tahun hingga Tahun 2021 hanya terdapat 5 jenis yang tersedia.

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	12	13	13	13	13
3	Total jenis surat kabar	17	18	18	18	18

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kota Palu tidak mengalami peningkatan selama Tahun 2017-2019, yaitu berjumlah 37 stasiun penyiaran. Jumlah stasiun penyiaran di Kota Palu mengalami kenaikan hingga menjadi 39 stasiun penyiaran di Tahun 2020 dan 2021. Berikut jumlah stasiun radio/TV local di Kota palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.43**  
**Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu**  
**Tahun 2017 - 2021**

Website milik pemerintah Kota Palu adalah <http://palukota.go.id>, hal ini untuk mempermudah masyarakat Kota Palu untuk mengakses perkembangan Kota Palu.

Salah satu dasar daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika terdapat pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Energi listrik yang dikelola oleh PLN juga

merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Meski dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN cenderung mengalami fluktuasi, jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN menunjukkan trend kenaikan dalam dua tahun terakhir.

Pada periode 2016-2018 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 3,95 persen dari 511 juta di Tahun 2016, menjadi 490 juta kwh pada Tahun 2018. Namun di periode 2019-2020 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh di Tahun 2019 dan 557 juta Kwh di Tahun 2020. Produksi listrik yang meningkat ini diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

#### 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 83,25% terus meningkat hingga mencapai 100 % pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 dengan terjadinya pandemic Covid 19 mengalami penurunan yg signifikan hingga mencapai 39,25% koperasi yg aktif. Tahun 2021 kembali naik sebesar 39,35% hingga mencapai 78,60%. Berikut persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.78 di bawah ini:

**Tabel 2.78**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2017 - 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	174	182	215	84	169
2	Jumlah koperasi	209	216	215	214	215
<b>Persentase</b>		<b>83,25</b>	<b>84,26</b>	<b>100</b>	<b>39,25</b>	<b>78,60</b>

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

## 12) Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 jumlah investor berjumlah 4 investor dan menjadi 5 investor pada Tahun 2018. Pasca gempa bumi Tahun 2019 jumlah investor kembali turun hingga menjadi 4 investor. Tahun 2020 jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga menjadi 15 investor. Namun pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan secara signifikan hingga menjadi 2 investor itupun hanya dari PMDN. Berikut jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.79 di bawah ini:

**Tabel 2.79**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2017	Jumlah Investor	2	2	4
2018	Jumlah Investor	2	3	5
2019	Jumlah Investor	4	0	4
2020	Jumlah Investor	8	7	15
2021	Jumlah Investor	2	0	2

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2022

Jumlah investor dalam negeri maupun asing yang ingin melakukan rencana investasi di Kota Palu mengalami perkembangan, yang belum sejalan dengan realisasi nilai investasi. Untuk itu masih diperlukan upaya kerja keras dari instansi yang menangani penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Berikut jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.80 di bawah ini:

**Tabel 2.80**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2017	2	155.122.760.000
2018	2	2.027.507.880.000
2019	1	87.500.000.000
2020	2	36.058.613.903.200
2021	2	23.151.430.000

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2022

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama Tahun 2017-2021 di Kota Palu tidak mengalami banyak perubahan dari segi jumlah proyek, namun menunjukkan banyak perubahan dari sisi nilai yang diinvestasikan.

Jumlah proyek investasi berskala nasional di Kota Palu selama periode 2017-2021 berkisar di antara 1 hingga 2 proyek setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah nilai investasi yang ditanamkan untuk proyek-proyek tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Nilai investasi tertinggi terjadi pada Tahun 2020 hingga mencapai 36,058 Triliun rupiah sedangkan Tahun 2021 merupakan nilai investasi terendah yang terjadi dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 23,15 Miliar rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan penanaman modal khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu perlu untuk ditingkatkan lagi strategi penanganan/pengelolaan dan pembangunannya secara menyeluruh dan lebih baik sehingga benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih luas dan lebih baik kepada para investor PMDN dan PMA untuk dapat berinvestasi di Kota Palu.

### **13) Kepemudaan dan Olahraga**

Organisasi pemuda di Kota palu Tahun 2017-2021 memiliki jumlah yang sama dari tahun ke tahun. Organisasi Pemuda yang jumlahnya paling banyak berada di Kecamatan Palu Selatan yang berjumlah 91 organisasi, Palu Barat dan Tawaeli memiliki 65 organisasi dan Palu Timur memiliki 46 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tatanga dengan jumlah 25 organisasi, Palu Utara dengan 28 organisasi, dan Mantikulore dengan 30 organisasi kepemudaan.

Gambaran mengenai jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu pada periode 2017 – 2021 tertera dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	91
2	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	65
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
4	Kecamatan Palu Utara	28	28	28	28	28
5	Kecamatan Tawaeli	65	65	65	65	65
6	Kecamatan Mantikulore	29	30	30	30	30
7	Kecamatan Tatanga	25	25	25	25	25
8	Kecamatan Ulujadi	35	35	35	35	35
<b>Se-Kota Palu</b>		<b>384</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>

*Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2021*

Jumlah organisasi olahraga dalam periode 2017-2018 mengalami sedikit peningkatan. Dari jumlah organisasi olahraga yang sebesar 204 organisasi pada tahun 2017 menjadi 205 organisasi pada Tahun 2018 hingga 2020.

Jumlah organisasi olahraga yang paling banyak yaitu pada Kecamatan Palu Timur berjumlah 54 organisasi, Mantikulore dengan 36 organisasi dan Palu Selatan dengan 33 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Tawaeli dengan 10 organisasi, Kecamatan Ulujadi dengan jumlah 14 organisasi serta Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi dengan 19 organisasi.

Gambaran mengenai jumlah organisasi olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 2.82**  
**Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu**  
**Tahun 2017 s/d 2021**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	13	14	14	14	14
<b>Jumlah</b>		<b>204</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Total jumlah kegiatan kepemudaan selama periode 2017-2021 sebanyak 25 kegiatan dengan 5 kegiatan di masing-masing tahun. Sedangkan kegiatan olahraga selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari segi jumlah event yang diadakan. Pada Tahun 2017-2019 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 51 kegiatan dengan 27 kegiatan di masing-masing tahun, kemudian Tahun 2020-2021 meningkat menjadi 28 kegiatan di masing-masing tahun.

Berikut jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam table di bawah ini:

**Tabel 2.83**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	5
2	Jumlah kegiatan olahraga	27	27	27	28	28

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

#### 14) Statistik

Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan (berkaitan) dengan suatu masalah tertentu. umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, statistik dibutuhkan sebagai sarana penunjang untuk mengetahui kondisi suatu masalah dan perkembangannya dengan memperkirakan dan memproyeksikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan perencanaan dapat terintegrasi secara menyeluruh sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun-tahun rencana yang akan datang.

Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku kabupaten/kota dalam angka, dan buku PDRB dari tahun ke tahun pada suatu daerah merupakan indikator yang harus dipenuhi sebagai acuan atau bahan akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota.

Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan ketiga komponen indikator tersebut sebagai kebutuhan informasi yang tersusun dan tersaji dengan berbagai jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, serta ekonomi dan keuangan. Buku Kota Palu Dalam Angka dan buku PDRB Kota Palu selama periode 2017-2021 telah tersedia dengan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

#### **15) Kearsipan**

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu sejak Tahun 2015.



## 16) Perpustakaan

Perpustakaan adalah gudang ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat mengungkap sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapapun, usia berapa pun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Perpustakaan ada di mana-mana dan dapat dijumpai perpustakaan walupun dengan jenis, luas, dan kualitas yang berbeda-beda

Kota Palu telah memiliki perpustakaan dengan jenis kepemilikan yang berbeda. Berikut jumlah perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertara dalam Tabel 2.84 di bawah ini:

**Tabel. 2.84**  
**Jumlah Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemda	61	61	61	70	267
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	36	36	36	2	299
3	Total Perpustakaan (1+2)	97	97	97	72	566

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.83 memperlihatkan jumlah perpustakaan dengan kepemilikan pemda dan non pemda yang tidak ada perubahan jumlah ketersediaannya di Kota Palu sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2019 dimana untuk kepemilikan pemda berjumlah 61 unit dan non pemda berjumlah 36 unit dengan total perpustakaan berjumlah 97 unit di Kota Palu. Jumlah perpustakaan milik pemda naik di Tahun 2020 sebesar 9 perpustakaan dan secara signifikan naik lagi di Tahun 2021 sebesar 193 perpustakaan hingga menjadi 267 perpustakaan. Sedangkan untuk non pemda mengalami penurunan jumlah sebesar 34 perpustakaan di Tahun 2020 dan naik

signifikan sebesar 297 perpustakaan hingga menjadi 299 perpustakaan di Tahun 2021.

Selain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.85 berikut ini:

**Tabel 2.85**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Palu**  
**Tahun 2017–2021**

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemda	1.159	862	1.084	2.287	2.576
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda	9	7	6	3	10
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	1.168	869	1.090	2.290	2.586

*Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2021*

Tabel 2.84 memperlihatkan Jumlah total pengunjung perpustakaan di Kota Palu Tahun 2017–2019 cenderung mengalami fluktuasi, dimana Tahun 2017 total pengunjung perpustakaan sebesar 1.168 pengunjung turun menjadi 869 pengunjung di Tahun 2018 dan kembali naik mencapai 1.090 pengunjung di Tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 terus mengalami kenaikan masing-masing hingga mencapai 2.290 pengunjung dan 2.586 pengunjung dengan rata-rata kenaikan sebesar 1.709 tiap tahunnya sejak Tahun 2018 hingga 2021.

### **2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **1) Pariwisata**

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu diperlukan ketersediaan hotel yang memadai. Dari gambaran umum Kota Palu khususnya penyediaan fasilitas perhotelan, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari jenis

hotel non berbintang, sedangkan untuk jenis hotel berbintang terjadi sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Meskipun demikian secara keseluruhan dari jumlah hotel yang tersedia di Kota Palu pada Tahun 2017 tersedia jumlah hotel sebanyak 48 hotel dan Tahun 2021 menjadi 116 hotel.

Berikut jumlah hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Tabel 2.86 di bawah ini:

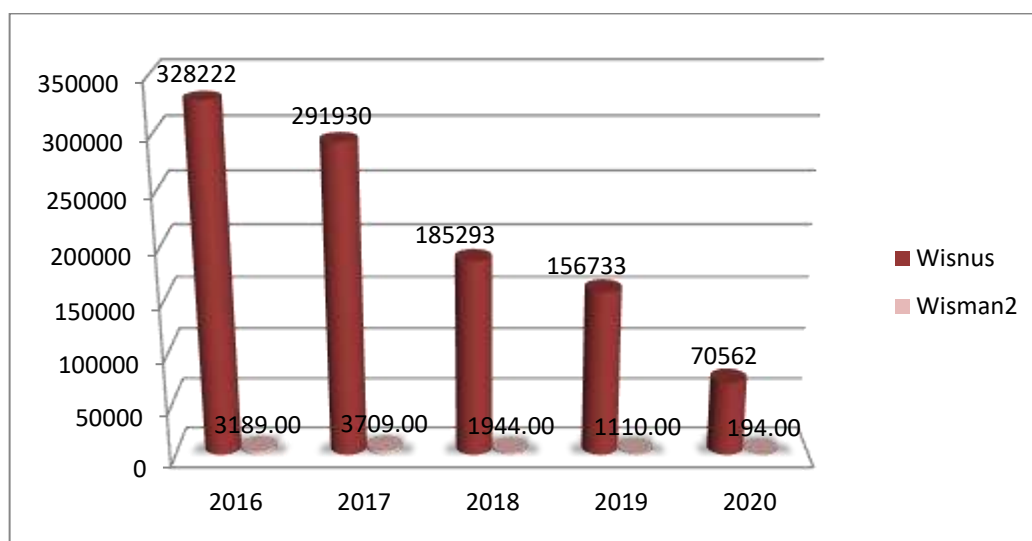
**Tabel 2.86**  
**Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021**

No.	Jenis	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Hotel berbintang	10	20,8%	11	23,4%	8	16,3%	7	6%	7	6%
2	Hotel non berbintang	38	79,2%	36	76,6%	41	83,7%	109	94%	109	94%
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2022*

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Palu Tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Tahun 2016 sejumlah 328.222 orang dan Tahun 2020 sejumlah 70.562 orang dengan penurunan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 106.097 orang. Lain halnya dengan kunjungan wisatawan mancanegara, pada Tahun 2017 jumlah kunjungan ini sempat mengalami kenaikan sebesar 520 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 3.189 orang menjadi 3.709 orang namun tahun selanjutnya yaitu pada Tahun 2018 juga mengalami penurunan terendah sebesar 1.765 orang hingga menjadi 1.944 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 3.709 orang.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Gambar 2.44 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.44**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu**  
**Tahun 2016 - 2020**

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi.

Beberapa obyek wisata di Kota Palu dengan pengelolanya tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.87**  
**Destinasi Wisata di Kota Palu**

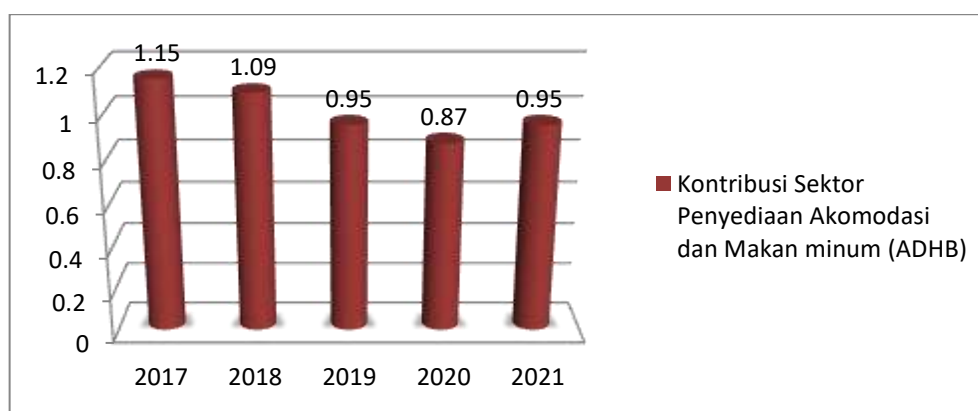
Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
<b>Gedung Bersejarah</b>	Gedung Juang	Lolu Utara	Pemerintah
	Banua Madika	Kabonena	Pemerintah
	Sou Raja	Lere	Pemerintah
<b>Tempat Spiritual</b>	Makam Datokarama	Lere	Pemerintah
	Makam Pue Paso	Watusampu	Pemerintah
	Makam Pue Ndjidi	Kabonena	Pemerintah
	Makam Pue Mpoloku	Lasoani	Pemerintah
	Vatu Posambaya	Donggala Kodi	Pemerintah
	Sumur Yoga	Donggala Kodi	Pemerintah
	Masjid Jami	Baru	Pemerintah
	Makam Gala	Bayaoge	Pemerintah
	Makam SIS Al-Jufri	Siranindi	Pemerintah

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
<b>Taman Rekreasi</b>	Pantai Taman Ria	Lere	Pemerintah
	Pantai Talise	Talise	Pemerintah
	Pantai Kampung Nelayan	Talise	Pemerintah
	Pantai Mamboro	Mamboro	Pemerintah
	Danau Sibili	Paantoloan	Pemerintah
<b>Wisata Tirta</b>	Taipa Beach	Taipa	Non Pemerintah
	Pantai Tombelaka	Tipo	Non Pemerintah
	Amazing Beach	Tipo	Non Pemerintah
	Graha Tirta	Birobuli Selatan	Non Pemerintah
	Milenium Water Park	Lolu Selatan	Non Pemerintah
	Winner	Silae	Non Pemerintah
	Mandi Sauna	Kabonena	Non Pemerintah

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2007

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi dan makan minum. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebelum Tahun 2021, kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 1,02 %. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,08 % hingga mencapai 0,95 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,87 %.

Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.45 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

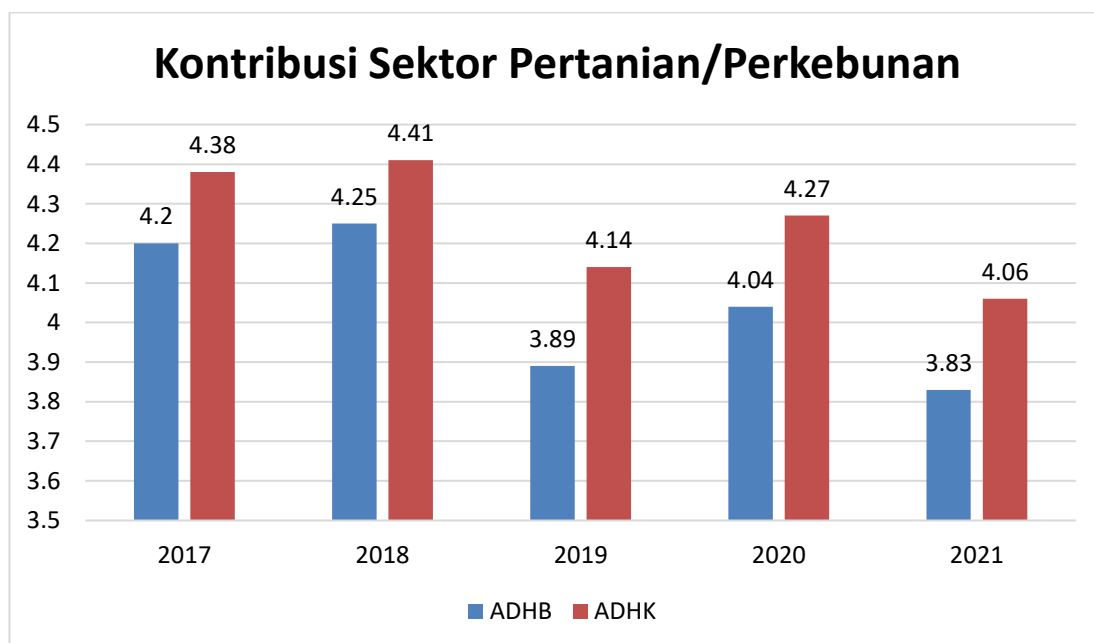
**Gambar 2.45**  
**Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

## 2) Pertanian

Kontribusi sector pertanian / perkebunan ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 kontribusi ini sebesar 4,2 % naik 0,05 % hingga menjadi 4,25 % di Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,36 % hingga menjadi 3,89 %. Tahun 2020 kembali naik sebesar 0,15 % hingga mencapai 4,04 % dan Tahun 2021 kembali turun sebesar 0,21 % sehingga menjadi 3,83 %.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan ADHK ini pun juga mengalami hal yang sama yaitu terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,27 % dan kenaikan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 0,13 %.

Berikut gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan di Kota palu yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga 2021 tertera dalam Gambar 2.46 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

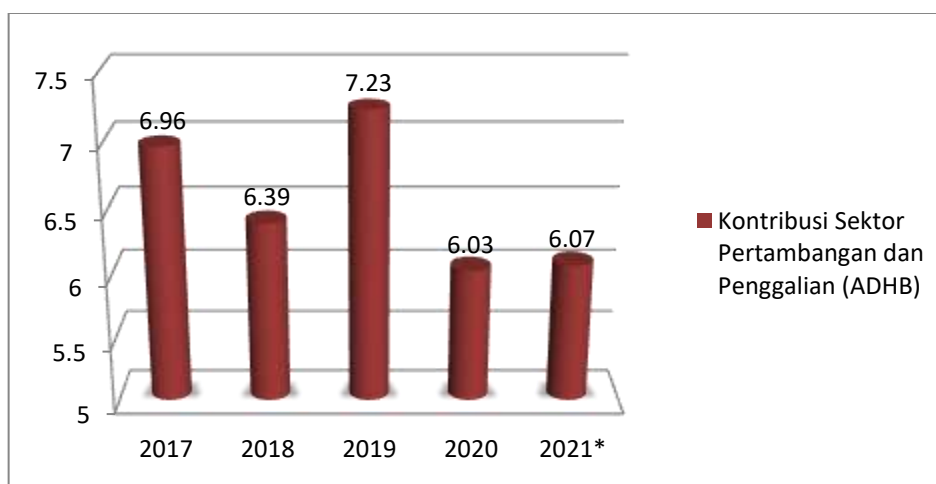
**Gambar 2.46**  
**Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan**  
**Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2017-2021**

### 3) Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu Tahun 2020 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

### 4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.47 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

**Gambar 2.47**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2017 - 2021**

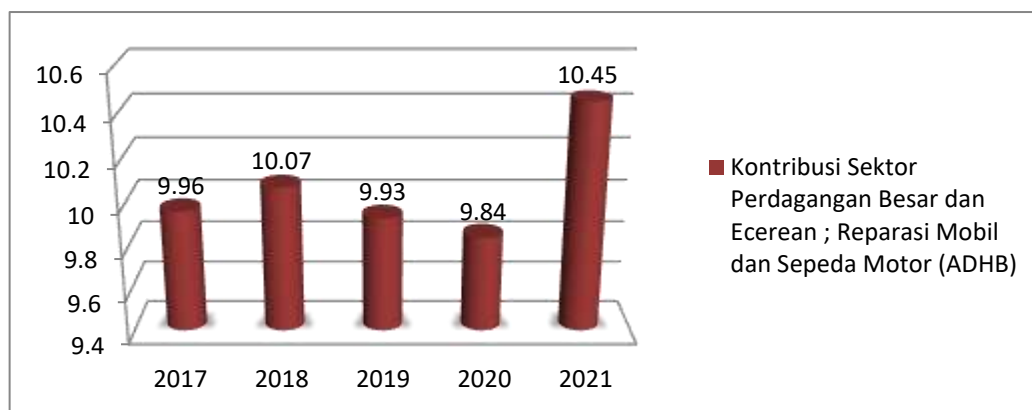
Gambar 2.47 memperlihatkan kontribusi yang diberikan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB di Kota Palu pada Tahun 2017-2021 yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perubahan signifikan terjadi pada Tahun 2018 dengan kontribusi terendah sebesar 0,57 % hingga menjadi 6,39 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,96 %. Sedangkan

perubahan signifikan dengan kontribusi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,84 % hingga mencapai 7,23 %. Kontribusi sektor ini pada Tahun 2021 sebesar 6,07 % hanya naik 0,01 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,06 %.

## 5) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi ketiga setelah sektor konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Meskipun Nilai riil PDRB dari sektor perdagangan ADHK selama Tahun 2017-2021 mengalami mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14 % per tahun. Demikian halnya dengan ADHB sektor ini yang juga mengalami fluktuatif dalam rentang Tahun 2017-2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,12 % setiap tahunnya.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2017-2021 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

**Gambar 2.48**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu**  
**Tahun 2017 – 2021**

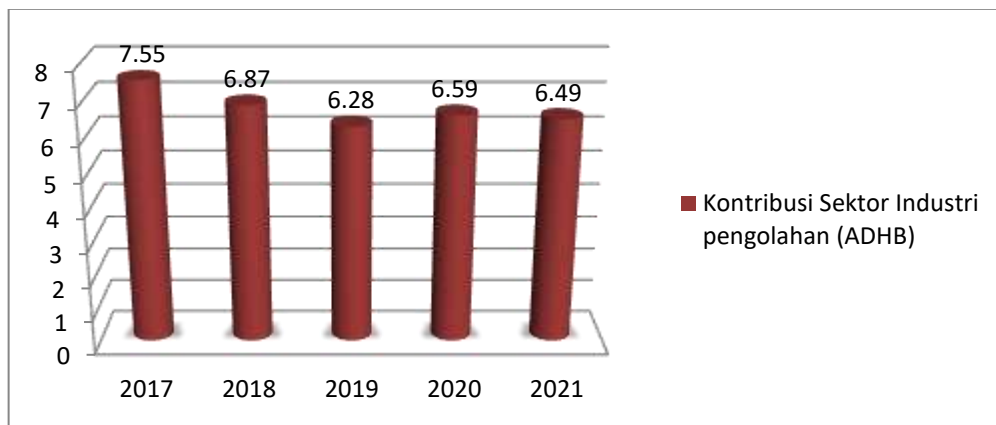
## 6) Perindustrian

Sektor perindustrian memiliki nilai riil yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Perkembangan



industri di Kota Palu yang fluktuatif disebabkan oleh banyaknya industri berkembang masih berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah yang dikelola secara formal maupun informal.

Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

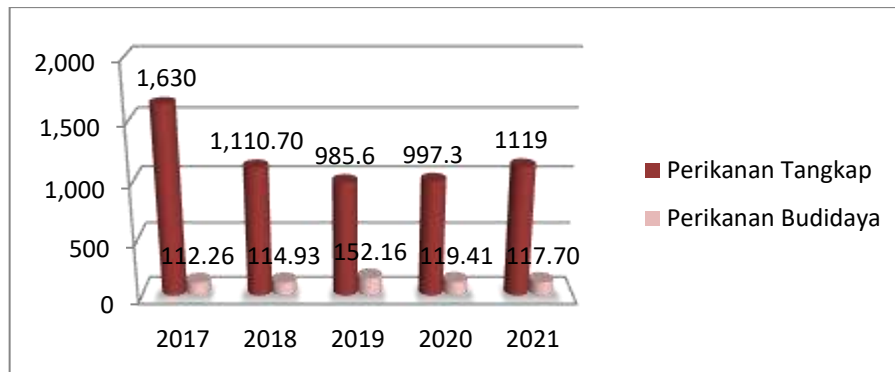
**Gambar 2.49**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

Gambar 2.49 di atas memperlihatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB di Kota Palu Tahun 2017-2021 yang cenderung menurun tiap tahunnya dengan rata-rata penurunan persentase selama lima tahun terakhir sebesar 0,27 %, di mana penurunan persentase pertumbuhan terbesar terjadi pada Tahun 2018 sebesar 0,68 % dan terkecil pada Tahun 2021 sebesar 0,10 %.

## **7) Kelautan dan Perikanan**

Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2021 tercatat sebesar 1.236,70 ton, atau naik 119,99 ton dari Tahun 2020. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1.119 ton, dan perikanan budidaya sebesar 117,70 ton.

Berikut produksi perikanan di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam Gambar 2.50 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.50**  
**Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2017 – 2021**

#### 2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

##### 1) Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang disertai dengan tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Ketersediaan dokumen perencanaan ini juga telah ditunjang dengan ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda, serta penjabaran konsistensi dari program-program seperti program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD ke dalam APBD.

Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2021 sebesar 82,43% atau pada tingkat Konsistensi Tinggi, sedangkan

konsistensi program RKPD ke dalam APBD Tahun 2021 sebesar 99,41% atau pada tingkat Konsistensi Sangat Tinggi.

## 2) Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 16,43 % tiap tahunnya. Berikut Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.88**  
**Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA (Rp)	32,544,874,571.38	97,039,433,016.28	196,010,911,504.53	196,010,911,504.53	602,363,096,947.52
2	Total APBD (Rp)	1,444,152,214,772.63	1,340,906,455,717.20	1,338,505,391,883.00	2,151,228,808,801.80	1,231,232,010,908.66
	% Silpa	2.25	7.24	14.64	9.11	48.92

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020 masing-masing adalah 31,49 %, 27,29 %, 23,27 %, 16,62 %, dan 27,79 %. Berikut Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.89**  
**Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (20%) (Rp)	454,709,446,669	365,901,335,868	311,411,942,442	357,476,512,500	342,163,506,421
2	Total APBD (Rp)	1,444,152,214,773	1,340,906,455,717	1,338,505,391,883	2,151,228,808,802	1,231,232,010,909
	Persentase	31.49	27.29	23.27	16.62	27.79

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2016-2020 masing-masing adalah 7,56 %, 5,59 %, 5,86 %, 4,96 %, dan 9,97 %. Berikut Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.90**  
**Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan (10%) (Rp)	109,231,625,219	74,999,376,907	78,416,678,023	106,679,185,470	122,718,012,552
2	Total APBD (Rp)	1,444,152,214,773	1,340,906,455,717	1,338,505,391,883	2,151,228,808,802	1,231,232,010,909
	Persentase	7.56	5.59	5.86	4.96	9.97

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2021

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut:

##### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

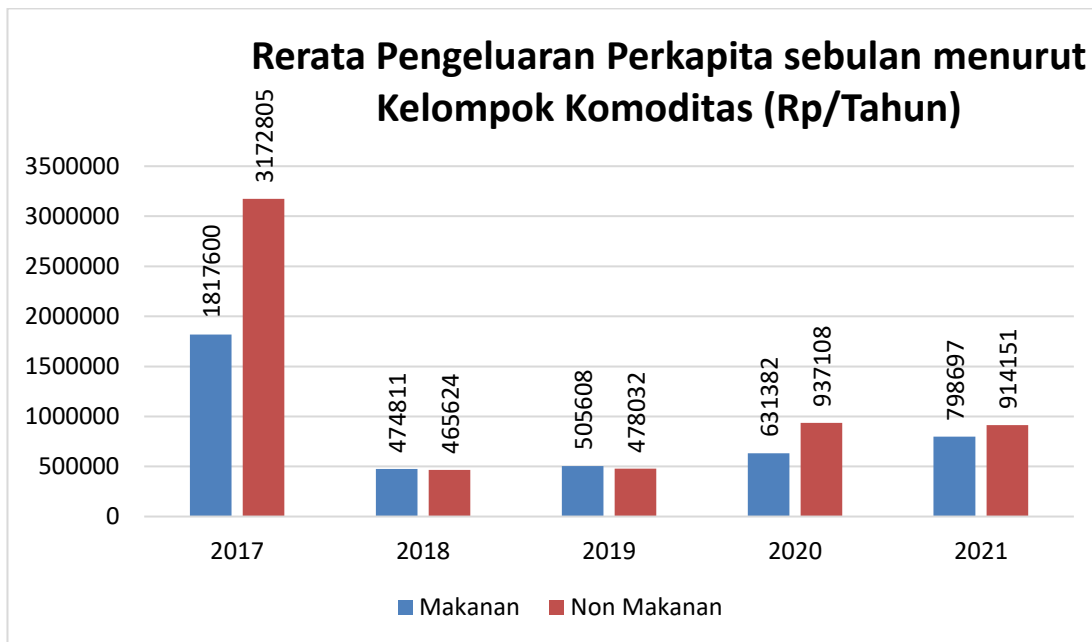
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan

akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (*multiflier effect*) dan efek menular (*contagious effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.

### **1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022

**Gambar 2.51**  
**Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2017-2021**

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas masyarakat Kota Palu Tahun 2017-2021 masing-masing sebesar -81,16 %, 4,59%, 59,46 %, dan 9,20 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu sejak pasca gempa bumi Tahun 2019 kembali mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.91**  
**Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita**  
**Sebulan Tahun 2021**

<b>Golongan Pengeluaran</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>
<b>&lt; 150000</b>	0,00	0,00
<b>150.000-199.999</b>	0,00	0,00
<b>200.000-299.999</b>	0,00	0,81
<b>300.000-499.999</b>	1,8	12,12
<b>500.000-749.999</b>	13,98	28,35
<b>750.000-999.999</b>	15,16	20,16
<b>1.000.000-1.499.999</b>	21,52	22,39
<b>1.500.000+</b>	47,53	16,17

*Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu Tahun 2021 didominasi oleh 5 (lima) golongan pengeluaran, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,53%), Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (21,52%), Rp.750.000-Rp.999.999 (15,16%), Rp.500.000-Rp.749.999 (13,98 %) dan Rp.300.000-Rp.499.999 (1,8%). Khusus pada golongan pengeluaran tertinggi yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka provinsi yang hanya mencapai 16,17%. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.92**  
**Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan**  
**Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020-2021**

Kelompok Bukan Makanan	Tahun		Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (%)
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	
Perumahan dan Fasilitas Rumah	470.376	637.521	35,53
Aneka Barang dan Jasa	217.933	169.959	(22,01)
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	49.307	34.014	(31,02)
Barang Yang Tahan Lama	112.333	14.758	(86,86)
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	54.029	43.933	(18,69)
Keperluan Pesta dan Upacara	33.131	13.966	(57,85)
<b>Jumlah</b>	<b>937.108</b>	<b>914.151</b>	<b>(2,45)</b>

*Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2022 (diolah)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi pada kelompok bukan makanan “perumahan dan fasilitas rumah” sebesar 35,53 % sebulan, dan terendah pada “Barang yang Tahan Lama” sebesar 86,86 % sebulan. Tingkat Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu menurut kelompok bukan makanan Tahun 2021 menurun sebesar 2,45 % sebulan dari 937.108 rupiah menjadi 914.151 rupiah.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi. Jika hal ini berlaku sebaliknya maka dengan melihat penurunan pengeluaran



konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2021 sebesar 22.957 rupiah sebulan maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 22.957 rupiah sebulan.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Berdasarkan tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2021 adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,92 %); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,06 %); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (12,53 %).

**Tabel 2.93**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu**  
**Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2017-2021**

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	9.70	5,21	12.42	4,87	0.94	(0,86)	0.04	(1,54)	2.82	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	14.31	10,49	2.21	0,66	24.58	14,98	(19.65)	(20,83)	9.16	7,20
C	Industri Pengolahan	3.97	0,61	1.36	(1,96)	0.63	(0,57)	1.11	(1,62)	6.74	3,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.15	5,67	18.68	7,34	2.52	2,10	1.18	1,04	6.86	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.79	4,01	16.88	1,00	(0.79)	(0,22)	3.98	(0,90)	9.07	4,86
F	Konstruksi	8.90	2,49	13.99	8,42	24.35	22,51	1.03	(2,21)	7.82	4,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.80	4,01	12.49	6,04	8.61	(0,40)	(4.46)	(6,31)	15.06	12,57
H	Transportasi dan Pergudangan	14.32	8,54	15.24	6,54	7.14	(1,81)	(35.37)	(35,91)	10.36	8,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.25	7,47	5.91	3,19	(4.40)	(10,56)	(11.21)	(13,83)	17.92	15,88
J	Informasi dan Komunikasi	11.47	7,76	13.78	8,60	14.76	9,87	5.09	8,24	7.44	6,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.65	7,00	7.99	0,80	(1.87)	(4,82)	7.07	7,24	11.65	9,58
L	Real Estate	9.39	4,31	9.77	3,87	0.48	(3,20)	1.44	0,21	6.84	3,57
M	Jasa Perusahaan	8.74	5,54	10.26	4,30	5.80	5,05	(1.41)	(3,07)	4.66	2,75
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.15	5,12	17.36	7,91	6.39	4,03	3.36	1,49	6.54	4,75
O	Jasa Pendidikan	9.95	5,72	6.62	0,27	5.46	3,18	(1.00)	(2,25)	3.60	1,84
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.30	11,82	14.40	9,55	9.92	9,42	7.92	7,41	12.53	7,03
Q	Jasa lainnya	9.18	5,13	9.15	2,53	5.92	2,26	(0.63)	(1,29)	5.04	3,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>9.94</b>	<b>5,53</b>	<b>11.32</b>	<b>5,00</b>	<b>10.15</b>	<b>5,65</b>	<b>(3.62)</b>	<b>(4,43)</b>	<b>8.32</b>	<b>5,97</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara total produktivitas total daerah Kota Palu mengalami masa fluktuatif selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017-2021 masing-masing sebesar 9,94; 11,32; 10,15; -3,62; dan 8,32. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja dalam pengembangan lapangan usaha di Kota Palu berbeda dari tahun ke tahun.

#### **2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (competitiveness).

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aspek perhubungan, penataan ruang, perbankan, rumah makan, hotel, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika.

##### **1) Perhubungan**

Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2021 telah membangun jalan sepanjang 851,26 km, sementara kendaraan yang wajib uji berjumlah 151 unit. Berikut data panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu:

**Tabel 2.94**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan (km)	851,558	851,563	851,558	851,563	851,563
2	Kendaraan wajib uji (unit)	2.401	N/A	1.152	534	151
3	Rasio Panjang Jalan/kendaraan	0,28	N/A	0,14	0,06	0,02

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu mengalami penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. dengan tingkat pertumbuhan kendaraan pada tahun 2018 sebesar 15 persen dan pertumbuhan panjang jalan hanya mencapai 2,72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dibanding panjang jalan yang dibangun oleh pemerintah sehingga menyebabkan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan wajib uji mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatkan jumlah kemacetan di wilayah Kota Palu.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Ini terjadi akibat imbas dari kejadian Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi) yang ada di Kota Palu, yang kemudian disusul dengan adanya pandemi Covid-19. Rendahnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh tidak beraturannya trayek angkutan umum di Kota Palu, sehingga masyarakat (penumpang) lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Terlebih saat ini angkutan umum online lebih diminati oleh masyarakat umum dibandingkan dengan angkutan umum biasa.

Berikut data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Palu.



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu, 2021

**Gambar 2.52**  
**Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2017-2021**

Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi udara di Kota Palu yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Aljufri yang mempunyai luas 12.511 meter persegi dengan daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal. Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan udara dari dan ke Kota Palu. Jumlah penumpang datang dan berangkat dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif akibat adanya kejadian bencana alam dan pandemi Covid-19. Adapun jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.95**  
**Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2017-2021**

Tahun	Penumpang (Orang)		
	Datang	Berangkat	Transit
2017	663.206	679.763	26.251
2018	N/A	N/A	N/A
2019	608.820	622.957	34.773
2020	230.910	235.441	10.108
2021	217.814	217.998	N/A

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022

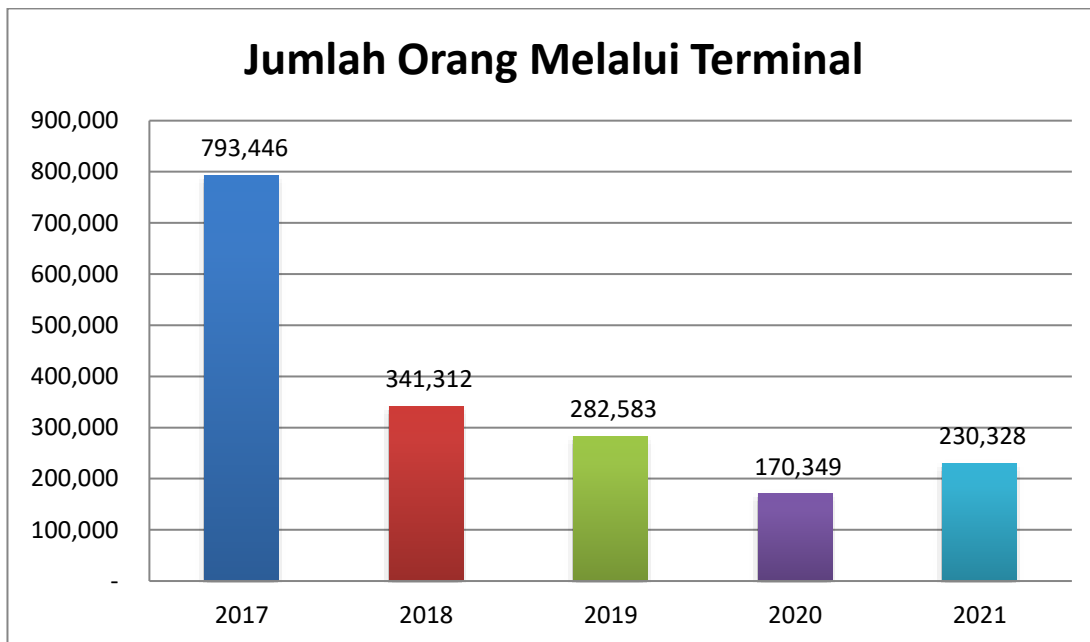
Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2 pelabuhan yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah penumpang pelabuhan cenderung mengalami penurunan, baik penumpang orang maupun barang selama kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memilih menggunakan transportasi darat dan udara. Gambaran mengenai jumlah penumpang baik orang maupun barang yang melalui Pelabuhan di Kota Palu tertera dalam Tabel 2.96 berikut ini:

**Tabel 2.96**  
**Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa)**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Penumpang (Org)		Barang (Ton)	
	Datang	Berangkat	Dibongkar	Dimuat
<b>2017</b>	<b>10.293</b>	<b>25.125</b>	<b>307.498</b>	<b>4.952</b>
<b>2018</b>	<b>6.668</b>	<b>23.419</b>	<b>399.191</b>	<b>3.615</b>
<b>2019</b>	<b>40.657</b>	<b>42.839</b>	<b>270.232</b>	<b>145.977</b>
<b>2020</b>	<b>16.805</b>	<b>17.890</b>	<b>255.806</b>	<b>29.825</b>
<b>2021</b>	<b>21.920</b>	<b>23.084</b>	<b>189.412</b>	<b>15.856</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu + PT Pelabuhan Indonesia*

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda dan Terminal Petobo. Adapun jumlah orang/penumpang yang melalui terminal adalah sebagai berikut:



Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2021

**Gambar 2.53**  
**Jumlah Orang Yang Melalui Terminal**

Berdasarkan gambar di atas, terjadi fluktuasi jumlah orang/penumpang yang melalui terminal selama lima tahun terakhir. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2018. Kondisi ini disebabkan pada saat itu Kota Palu mengalami Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi). Pada tahun 2021 jumlah orang/penumpang yang melalui terminal naik menjadi 230.238 setelah pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Upaya menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas di Kota Palu, diperlukan ketersediaan rambu jalan. Perkembangan rambu jalan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.80. Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan rambu dan marka jalan di Kota Palu mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2017 jumlah rambu lalu lintas di Kota Palu sebanyak 25 unit, dan terdapat 20 unit rambu lalu lintas pada Tahun 2021.

**Tabel 2.97**  
**Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Fasilitas Lalu Lintas</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
	I. Rambu Lalu Lintas :		
2017	Rambu Lalu Lintas	25	Unit
2018	Rambu Lalu Lintas	300	Unit
2019	Rambu Lalu Lintas	88	Unit
2020	Rambu Lalu Lintas	0	Unit
2021	Rambu Lalu Lintas	30	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2021

Sementara perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.81. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan di Kota Palu, perkembangan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sebanyak 480 kasus terus menurun hingga menjadi 125 kasus pada Tahun 2020.

**Tabel 2.98**  
**Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**  
**di Kota Palu Tahun 2017 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2017	480 Kasus
2018	380 Kasus
2019	220 Kasus
2020	125 Kasus
2021	n/a

Sumber : Data POLRES Kota Palu 2020



## 2) Penataan Ruang

Penataan ruang sangat penting untuk dapat menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembangunan Kota Palu yang berwawasan lingkungan. Data luas kawasan lindung, pemukiman, kawasan industri, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, wilayah budidaya dan wilayah perkotaan secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.99**  
**Luas Wilayah Industri dan Perkotaan di Kota Palu**  
**Tahun 2016-2018**

Uraian	Tahun (ha)		
	2016	2017	2018
1. Luas Kawasan Industri	1,534,123	1,534,123	1,534,123
2. Luas seluruh wilayah budidaya	27.838.49	27.676	17.246
3. Luas wilayah perkotaan	39.506	39.506	39.506
Rasio Wil. Industri/Wil. Budidaya	5,510.80	5,543.15	8,895.53
Rasio Wil. perkotaan/Wil. Budidaya	141.91	142.74	229.07

Sumber: SIPD Kota Palu, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio wilayah industri terhadap wilayah budidaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu pula dengan rasio wilayah perkotaan terhadap wilayah budidaya yang juga meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan perluasan wilayah industri dan perkotaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Selain hal tersebut di atas, daya saing daerah juga ditunjang oleh fasilitas perbankan, rumah makan, dan perhotelan. Ketiga jenis fasilitas tersebut mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Perkembangan jumlah bank di Kota Palu mengalami peningkatan relative kecil dari Tahun 2017-2021 sebanyak 28 Bank, yakni Bank umum sebanyak 23 buah sedangkan BPR berjumlah 5

Bank. Data perkembangan perbankan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.100**  
**Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2017-2021**

NO	Sektor	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	BankUmum	22	22	22	22	23
2.	BPR	5	5	5	5	5
Total		27	27	27	27	28

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Selain fasilitas perbankan, fasilitas rumah makan dan restoran juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu sebanyak 21 unit pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61 atau tumbuh 34 persen pada tahun 2021. Rumah makan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Palu, dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang ada di Kota Palu merupakan salah satu potensi dan daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun perkembangan jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.101**  
**Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Rumah Makan	Jumlah Restoran	Total
2017	122	21	143
2018	146	43	189
2019	N/A	N/A	N/A
2020	227	54	281
2021	249	61	310

*Sumber : Badan Pendapatan Kota Palu, 2022*

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu, diperlukan tersedianya sarana akomodasi (hotel) yang memadai. Fasilitas perhotelan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu lima

tahun terakhir, baik jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Selama kurun waktu lima tahun, terjadi pertumbuhan hotel sebesar 34,43 persen atau bertambah sebanyak 68 buah hotel. Bertambahnya jumlah hotel, maka terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur hotel. Fasilitas kamar dan tempat tidur pada tahun 2021 sebanyak 2.526 buah kamar dan 3.294 tempat tidur. Jumlah tenaga kerja perhotelan pada tahun 2021 sebanyak 878 orang. Tingkat hunian kamar pada hotel berbintang mengalami penurunan yaitu dari 61,80 persen pada tahun 2014 menjadi 61,45 persen pada tahun 2015. Sementara itu, tingkat hunian pada hotel non bintang mengalami peningkatan yaitu sebesar 30,65 persen. Secara rinci jumlah hotel di Kota Palu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.102**  
**Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2017-2021**

No.	Jenis	2017		2018		2019		2020		2021	
1	Hotel berbintang	10	20,8 %	11	23,4%	8	16,3%	7	6%	7	6%
2	Hotel non berbintang	38	79,2 %	36	76,6%	41	83,7%	109	94%	109	94%
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>	<b>100%</b>

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2022*

### 3) Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang baik pada suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator di antaranya ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan; terselenggaranya KLHS untuk kebijakan, rencana, program; hasil pengukuran indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan; penghargaan lingkungan hidup; peran dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA); penanganan persampahan; dan lain-lain.

Ketersediaan dokumen RPPLH Kota Palu sampai dengan Tahun 2021 belum terpenuhi sehingga pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pun belum sesuai harapan. Isu lingkungan hidup yang

dituangkan dalam dokumen perencanaan hanya terbatas pada penanganan persampahan, dan ketersediaan air bersih (air minum) bagi masyarakat di Kota Palu.

Berikut data penduduk terlayani air minum bagi masyarakat Kota Palu Tahun 2021 tertera dalam tabel 2.103 di bawah ini:

**Tabel 2.103**  
**penduduk terlayani Air Minum di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Non PDAM		Sambungan Rumah(SR)			Penduduk Terlayani (jiwa)	Penduduk Terlayani (KK/RT)	Jumlah Penduduk Kota Palu (jiwa)
		Jumlah Rumah	Jumlah Terlayani	PDAM Donggala	PDAM Kota Palu	Jumlah Terlayani			
1	2017	n/a	n/a	14.678	7.092	108.850	108.850	31.100	374.020
2	2018	n/a	n/a	14.405	7.596	110.005	110.005	31.430	385.619
3	2019	48.123	240.615	14.434	8.156	112.950	353.565	101.019	391.383
4	2020	48.124	240.620	14.434	8.285	113.595	354.215	101.204	373.218
5	2021	48.125	240.620	12.601	8.652	106.265	346.885	100.256	377.030

*Sumber: Dinas PU Kota Palu 2022*

Tabel 2.102 memperlihatkan jumlah penduduk terlayani air minum di Kota Palu, baik menggunakan sambungan rumah melalui PDAM dan Non PDAM.

Jumlah yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa layanan sistem penyediaan air minum yang ada di Kota Palu mencapai 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air minum bagi rumah tangga di Kota Palu sudah terbilang layak konsumsi. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 7,99 persen yang menggunakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya.

#### **4) Komunikasi dan Informatika**

Daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika didasarkan pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, meskipun pada Tahun 2018 produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 4 persen atau hanya diproduksi sekitar 490 juta kwh. Namun demikian di tahun 2019 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara tahun 2017 sampai tahun 2021. Sementara itu nilai yang dipakai sendiri dan susut/hilang selama tahun 2021 menunjukkan trend positif dari 124 ribu Kwh dan 58 juta Kwh.

**Tabel 2.104**  
**Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Daya Terpasang (KW)</b>	<b>Produksi Listrik (KWh)</b>	<b>Listrik Terjual (KWh)</b>	<b>Dipakai Sendiri (KWh)</b>	<b>Susut/Hilang (KWh)</b>
2017	262.881	510.761.690	458.461.811	306.457	n/a
2018	256.186	490.879.890	447.610.719	294.744	53.121.916
2019	290.189	516.135.639	453.953.681	n/a	73.764.409
2020	183.010	557.896.714	506.708.300	334.738	57.615.761
2021	201.285	594.488.027	535.914.759	124.251	58.573.267

*Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2022*

Rata-rata rasio pengguna listrik di Kota Palu oleh rumah tangga sekitar 166,91 persen dengan rasio tertinggi 197,14 % di Tahun 2021 dan terendah 149,67 %. Rasio ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2017 hingga 2021. Berikut rasio rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.105**  
**Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>Rumah Tangga Pengguna Listrik</b>	<b>Rasio (%)</b>
2017	107.871	161.449	149,67

2018	109.654	164.298	149,83
2019	111.214	185.474	166,77
2020	115.696	198.031	171,16
2021	121.120	238.781	197,14

Sumber: Dukcapil dan Kota Palu Dalam Angka 2021

Selain listrik, kebutuhan masyarakat akan Telepon juga sangat penting sebagai alat komunikasi. Adapun prosentase penduduk yang menggunakan telepon di Kota Palu pada Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.106**  
**Penduduk yang Menggunakan Telepon**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Pengguna Telepon	Penduduk	Rasio (%)
2014	15500	362.202	43.44
2015	21689	368.086	25.75
2016	5365	374.020	21.19
2017	4782	379.782	17.12
2018	2673	385.691	13.62

Sumber : BPS (data diolah) tahun 2019

Rasio penduduk yang menggunakan telepon cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan rasio pengguna telepon terhadap penduduk disebabkan oleh peralihan pengguna telepon pelanggan menjadi pengguna telepon bergerak.

#### **2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Investasi merupakan mesin pertumbuhan yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Makin tinggi tingkat investasi yang masuk ke suatu daerah, makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi daerah yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan yang tinggi bagi daerah. Investasi yang masuk dapat menghasilkan output, pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah Kota Palu harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan investor. Tanpa terciptanya iklim investasi yang baik, maka akan sangat sulit untuk menarik investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Berbagai faktor penting terkait dengan investasi di daerah harus dibenahi dan ditata dengan baik. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja; Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

### 1) Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi. Stabilitas suatu daerah dapat meningkatkan jumlah investor yang akan berusaha di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Palu cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), hal ini dapat mengundang kalangan investor untuk berinvestasi di Kota Palu. Adapun perkembangan angka kriminalitas di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.107**  
**Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Palu**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tindak Kriminal</b>	<b>Jumlah Tindak Kriminal tertangani</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Angka Kriminalitas yang tertangani</b>
2017	2.819	645	379.782	16,98
2018	2.274	1.262	385.619	32,73
2019	721	439	391.383	11,22
2020	628	271	373.218	7,26
2021	590	268	377.030	7,11

*Sumber: Kepolisian Resort Palu 2022*

## 2) Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kota Palu Tahun 2017-2021 cenderung menurun, khususnya pada bidang politik dan bidang ekonomi. Pada Tahun 2017 jumlah demonstrasi sebanyak 57 kali dan menurun menjadi 40 kali atau berkurang 3 kali pada tahun 2020, hal ini menunjukkan kondisi keadaan kota palu yang relatif baik dan stabil untuk berinvestasi. Adapun jumlah demonstrasi di Kota Palu dijabarkan secara rinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Politik	16	24	61	3	n/a
2	Bidang Ekonomi	41	2	36	24	n/a
3	Bidang lainnya	n/a	n/a	21	16	4
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>26</b>	<b>118</b>	<b>40</b>	<b>4</b>

Sumber: Satpol PP Kota Palu 2022

## 3) Standar Waktu Pelayanan Perizinan

Waktu pelayanan perijinan sangat penting karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang akan dilayani dalam mengurus suatu ijin dokumen. Semakin cepat waktu pelayanan perijinan, maka akan semakin baik kualitas layanan publik, demikian pula dengan biaya yang akan di keluarkan dalam rangka pengurusan perizinan tersebut. Adapun lama proses pengurusan perijinan dan biaya pengurusan perizinan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.87. Pada Tahun 2018 lama pengurusan perizinan di Kota Palu selama 3-14 hari untuk semua jenis perijinan dengan jumlah persyaratan sebanyak 5-13 dokumen untuk semua jenis perijinaan. Terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang bebas biaya yaitu; SIUP, TDP dan IUI, sementara 3 (tiga) lainnya masih dikenakan biaya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.



**Tabel 2.109**  
**Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan**  
**di Kota Palu Tahun 2021**

NO	Uraian	Lama mengurus	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi
		(hari)		(rata-rata maks Rph)
1	SIUP	2 Hari Kerja	9	Rp. 0.,-
2	TDP	3 Hari Kerja	8	Rp. 0.,-
3	IUI	5 Hari Kerja	9	Rp. 0.,-
4	SIUP - MB	3 Hari Kerja	8	Gol. A Kadar Etanol 0 % s/d 5 % Rp. 8.000.000.,-
				Gol. B Kadar Etanol di atas 5 % s/d 20 % Rp. 10.000.000.,-
				Gol. C Kadar Etanol di atas 20 % s/d 55 % Rp. 12.000.000.,-
5	TDI	-	-	-
6	IMB	14 Hari Kerja	Syarat ADM : 7	Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi
			Syarat Teknis: 6	
7	HO	7 Hari Kerja	13	Peninjauan, Pengukuran Lokasi, Penetapan Retribusi

Sumber: DPMPTSP Kota Palu Tahun 2022

Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dalam bentuk lamanya waktu dan besarnya biaya yang dibutuhkan akan menarik lebih banyak investor yang menanamkan modalnya di Kota Palu.

#### **4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama kurun waktu lima tahun, jenis pajak di Kota Palu masih tetap sebanyak 11 objek. Sedangkan untuk jenis retribusi mengalami penurunan dari 54 jenis pada tahun 2017 menjadi 23 jenis pada tahun 2021.

**Tabel 2.110**  
**Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Objek Pajak</b>	<b>Objek Retribusi</b>
2017	11	54
2018	11	20
2019	11	25
2020	11	20
2021	11	23

*Sumber: Badan Pendapatan Kota Palu 2022*

Penerimaan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 1 Tahun 2011, yang terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Bawah Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Penerimaan pajak daerah Kota Palu ditopang oleh 5 (lima jenis) obyek pajak daerah yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak

pengambilan bahan galian C, PBBP2 dan pajak parkir. Penerimaan pajak daerah Kota Palu Tahun 2021 mencapai Rp. 125 723 988.

Sedangkan retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jumlah penerimaan retribusi daerah Kota Palu tahun 2018 mencapai Rp.13.684.905.354. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu yaitu :

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari 6 jenis objek yang dipungut oleh daerah.

#### **2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus dan tujuan dalam pembangunan daerah.

Sumber daya manusia yang handal dicirikan dengan kemampuan dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, mampu memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Kota Palu. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

### 1) Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu naik sebesar 11,43 persen.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu Tahun 2017-2021 tertera dalam tabel 2.111 sebagai berikut:

**Tabel 2.111**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Lulusan S1/S2/S3</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rasio (%)</b>
2017	38.858	379.782	10,23
2018	40.585	385.691	10,52
2019	41.471	391.383	10,60
2020	42.801	373.218	11,47
2021	44.491	377.030	11,80

*Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2022 (diolah)*

### 2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun rasio ketergantungan di Kota Palu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.112**  
**Rasio Ketergantungan Kota Palu**

No	Uraian	2017	2018	2019#	2020	2021	Provinsi (2021)
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	93.441	94.367	94.911	100.764	100.890	811.090
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	12.163	12.699	15.589	14.864	15.614	156.657
3	Jumlah Penduduk Usia Tdk Produktif (1) & (2)	105.604	107.066	110.500	115.628	116.504	967.747
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	273.989	278.553	260.865	257.590	260.526	2.054.132
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)*(%)	38,54	38,44	42,36	44,89	44,72	47,11

*Sumber: Dukcapil Kota Palu 2022, BPS Kota Palu 2022, BPS Prov Sulteng 2022*

Rasio ketergantungan Kota Palu selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 38,54 persen menjadi 47,11 persen. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Palu menanggung sebanyak 44,72 orang belum dan tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kota Palu tahun 2021 masih lebih rendah dibanding rasio ketergantungan Propinsi Sulawesi Tengah (47,11).

**TABEL 2.113**  
**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**KOTA PALU TAHUN 2017 - 2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
2.1	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>					
	<b>Karakteristik Lokasi dan Wilayah</b>					
	<b>Luas Wilayah (KM<sup>2</sup>)</b>	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
	-Palu Barat	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	-Tatanga	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
	-Ulujadi	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25
	-Palu Selatan	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38
	-Palu Timur	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
	-Mantikulore	206,8	206,8	206,8	206,8	206,8
	-Palu Utara	29,94	29,94	29,94	29,94	29,94
	-Tawaeli	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Keadaan Iklim</b>					
	-Suhu	27,5	27,86	28,11	28,02	27,46
	-Tekanan Udara	1.008,24	1010,63	1011,70	1010,33	1011,93
	-Kelembaban Udara	79,31	76,275	77,56	77,11	78,80
	-Penyinaran Matahari	59,08	65,765	69,16	69,08	59,16
	-Curah Hujan	71,83	56,6225	76,91	77,91	83,00
	-Kecepatan Angin	4,50	4,37	4,16	3,25	3,91
	-Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Utara	Utara	Timur Laut
<b>2.1.2</b>	<b>Kejadian Bencana</b>					
	Banjir	8	6	11	16	10
	Kebakaran	89	104	171	144	159
	Angin Topan	-	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Angin Puting Beliung	-	1	-	4	-
	Tanah Longsor	-	-	-	-	-
	Gempa Bumi	-	21	9	7	-
<b>2.1.3</b>	<b>Demografi</b>					
	Perkembangan Jumlah Penduduk					
	-Kelurahan	46	46	46	46	46
	-Rumah Tangga	23.628	23.978	23.895	24.669	121.120
	-Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
	Rasio Ketergantungan	38,54	38,44	42,36	44,89	44,72
	Kepadatan Penduduk	961	976	940	945	954
<b>2.2</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu</b>	5,53	5,00	5,65	(4,43)	5,97
	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (juta)	20.416,01	22.726,17	25.033,06	24.125,89	26.135,95
	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (juta)	20.416,01	22.726,17	25.033,06	24.125,89	26.135,95
	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (juta)	14.585,80	15.315,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58
	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (juta)	14.585,80	15.315,03	16.180,29	15.462,91	16.385,58
<b>B</b>	<b>Kontribusi Sektor PDRB-ADH Berlaku (persen)</b>					
	- Pertanian	4,20	4,25	3,89	4,04	3,83
	- Pertambangan dan Penggalian	6,96	6,39	7,23	6,03	6,07
	- Industri Pengolahan	7,55	6,87	6,28	6,59	6,49
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,30	0,27	0,29	0,30
	-Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan	9,96	10,07	9,93	9,84	10,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Sepeda Motor					
	- Transportasi Dan Pergudangan	9,55	9,89	9,62	6,45	6,57
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	1,09	0,95	0,87	0,95
	- Informasi dan Komunikasi	8,59	8,78	9,14	9,97	9,89
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	5,82	5,19	5,77	5,94
	-Real Estate	2,53	2,49	2,27	2,39	2,36
	-Jasa Perusahaan	1,17	1,16	1,12	1,14	1,10
	-Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,53	14,26	13,77	14,77	14,53
	-Jasa Pendidikan	8,40	8,05	7,71	7,92	7,57
	-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,01	3,09	3,08	3,45	3,59
	-Jasa Lainnya	0,98	0,96	0,93	0,96	0,93
	-konstruksi	16,00	16,39	18,50	19,39	19,30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kontribusi Sektor PDRB-ADH Konstan</b>					
	- Pertanian	4,38	4.41	4,14	4,27	4,06
	- Pertambangan dan Penggalian	6,91	6.63	7,20	5,97	6,04
	- Industri Pengolahan	8,08	7.55	7,10	7,32	7,13
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0.20	0,19	0,21	0,20
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0.32	0,30	0,31	0,31
	-Perdagangan Besar da Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,31	10.42	9,81	9,63	10,23
	- Transportasi Dan Pergudangan	9,31	9.45	8,77	5,89	6,05
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1.08	0,92	0,83	0,90
	- Informasi dan Komunikasi	10,07	10.43	10,84	12,29	12,31
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	6,59	6.16	5,54	6,22	6,44
	-Real Estate	2,69	2.62	2,39	2,52	2,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	-Jasa Perusahaan	1,19	1.17	1,16	1,18	1,15
	-Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,00	13.42	13,20	14,03	13,87
	-Jasa Pendidikan	7,89	7.60	7,42	7,59	7,30
	-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,96	3.07	3,18	3,57	3,61
	-Jasa Lainnya	1,04	1.00	0,97	1,00	0,97
	-konstruksi	13,94	14.47	16,88	17,17	16,97
	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas	9.94	11.32	10,21	(3,72)	8,34
	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas	9.94	11.32	10,21	(3,72)	8,34
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas	5,53	5,00	5,78	(4,55)	5,97
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan tanpa Migas	5,53	5,00	5,78	(4,55)	5,97
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Pertumbuhan %)	9.94	11.32	10,21	(3,72)	8,34
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Konstan (Pertumbuhan %)	5,53	5,00	5,78	(4,55)	5,97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>C</b>	<b>Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi</b>					
	-Umum	4,33	6,46	2,30	0,15	0,14
	-Bahan Makanan	3,79	6,37	3,60	0,15	0,05
	-Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,96	8,12	3,42	0,4	0,21
	-Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	9,51	4,68	(0,35)	(0,01)	0,22
	-Sandang	2,09	2,12	5,06	0,81	0,19
	-Kesehatan	3,63	6,21	3,78	0,14	0,20
	-Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	(1,56)	8,01	4,18	0,25	0,21
	-Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	3,08	7,69	1,13	(0,27)	0,15
<b>D</b>	<b>PDRB Per Kapita</b>					
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Berlaku	53,76	58,93	63,96	64,64	69,32
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Konstan	38,41	39,71	41,34	41,43	43,46

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>E</b>	<b>Indeks Gini</b>	0,37	0,35	0,33	0,33	0,30
<b>F</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	80,24	80,91	81,5	81,47	81,47
<b>G</b>	<b>Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia</b>					
	-40% Bawah	15,3	25	29,58	16,75	N/A
	-40% Menengah	39,2	39,4	39,7	39,8	N/A
	-20% Atas	45,5	45,6	45,8	43,35	N/A
<b>H</b>	<b>Kemiskinan</b>	6,74	6,01	6,83	6,80	7,17
<b>2.2.2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>					
<b>A</b>	<b>Aspek Pendidikan</b>					
1	AMH	99,69	99,68	99,84	99,84	100,00
2	Rata-rata Lama Sekolah	11,26	11,33	11,60	11,61	11,72
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	-APK SD/MI	126	110	111	104,81	105,12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	-APK SMP/MTs	107	109	105	91,85	99,34
	-APK SMA/SMK/MA	108,39	114,46	74,42	111,55	112,68
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	-APM SD/MI	90,43	91,92	92,86	92,50	92,49
	-APM SMP/MTs	74,17	75,32	76,88	78,81	78,86
	-APM SMA/MA	73,26	75,13	74,42	74,94	77,86
<b>B</b>	<b>Kesehatan</b>					
1	Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)					
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.233	6.739	6.959	7.056	7.106
	AKB/1.000 KH	1,42	2,67	1,48	2,01	2,73
	AKHB/1.000 KH	998,58	997,33	998,52	997,99	997,99*
2	Jumlah Kematian Balita (<1-5 Tahun)	44	24	34	12	19
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.233	6.739	6.959	7.056	7.106

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	AKABA/1.000 KH	6,08	3,56	4,89	1,7	2,67
	AKAHBA/1.000 KH	993,92	996,44	995,11	998,3	997,33
3	Jumlah Kasus Gizi Buruk	53	52	54	53	30
	Jumlah Balita ditimbang	31741	33516	33384	34713	29698
	Prevalensi Gizi Buruk	0,167	0,155	0,162	0,153	0,101
4	Ketenagakerjaan					
	-Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467	201.083
	-Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507	185.777
	-Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960	15.306
	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166	107.963
	-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,28	65,81	65,95	66,46	65,07
	-Tingkat Pengangguran Terbuka	6,56	5,81	6,36	8,38	7,61



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	-Rasio Penduduk Yang Bekerja	93,00	94,00	93,00	91,00	92,00
<b>2.2.3</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>					
	-Jumlah Organisasi Pemuda	384	385	385	385	385
	-Jumlah Organisasi Olahraga	204	205	205	205	205
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	5	5	5
	Jumlah Kegiatan Olahraga	27	27	27	28	28
<b>2.3</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>2.3.1</b>	<b>Fokus Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar</b>					
<b>A</b>	<b>Pendidikan</b>					
1	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI	99,03	98,22	90,00	85,00	84,69

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	APS SMP/MTs	95,92	94,86	85,07	69,00	70,07
	APS SMA/SMK/MA	86,58	84,74	n/a	87,03	n/a
2	Rasio Ketersediaan Sekolah					
	Jumlah Sekolah SD	185	185	189	190	191
	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	34.526	33.830	34.215	34.954	39.876
	Jumlah Sekolah SMP	71	70	72	73	73
	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	13.078	13.645	16.218	15.623	20.105
	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	64	64	64	64	66
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 16-18 tahun	33.120	34.722	34.676	n/a	n/a
	Rasio SMA/SMK/MA	19.32	18.43	18.45	n/a	n/a
3	Rasio Ketersediaan Guru					
	SD/MI:					
	-Jumlah Guru	2.232	2.306	2.287	2.641	2.457
	-Jumlah Murid	40.818	39.166	36.003	38.916	38.123

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	-Jumlah Kelas	1.365	1.396	1388	n/a	n/a
	-Rasio Guru/Murid	54,68	58,87	63,52	67,86	n/a
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	40,05	42,17	45,76	n/a	n/a
	SMP/MTs:					
	-Jumlah Guru	1.601	1.579	1.599	1.675	1.676
	-Jumlah Murid	22.257	17.816	21.116	20.778	21.028
	-Jumlah Kelas	660	648	628	n/a	n/a
	-Rasio Guru/Murid	71,93	88,62	75,72	80,61	
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	108,98	136,75	120,57	n/a	n/a
	SMA/SMK/MA:					
	-Jumlah Guru	1.843	1.714	2.078	2.006	2.006
	-Jumlah Murid	24.449	24.337	24.857	25.439	25.999
	-Jumlah Kelas	766	916	n/a	n/a	n/a
	-Rasio Guru/Murid	75,38	70,42	83,59	78,85	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	98,40	76,87	n/a	n/a	n/a
4	Perkembangan Angka Melek Huruf	99,69	99,68	99,84	99,84	100,00
5	Kondisi Bangunan Sekolah					
	Kondisi Bangunan SD					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	182	184	176	162	148
	-Jumlah Sekolah	182	184	186	162	165
	-Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	90%
	Kondisi Bangunan SMP/MTs					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	73	73	73	46	46
	-Jumlah Sekolah	73	73	73	46	47
	-Kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	98%
6	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	8.188	6.675	6.661	7.258	7.587
	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	11.975	18.222	19.572	19.381	13.136

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Rasio	68,38	36,36	34,03	37,45	57,76
7	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah SD	0,04	0,05	0	0	0
	Angka Putus Sekolah SMP	0,01	0,26	0	0	0
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan SD					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
	Angka Kelulusan SMP					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP	5.400	5.661	5.675	5.410	5.347
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	5.400	5.661	5.675	5.410	5.347
9	Angka Melanjutkan SD ke	85,8%	86,7%	87,8%	85,86%	86,10%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	SMP					
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMP	5.634	5.621	5.303	5.259	5.257
	Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	6.498	6.399	6.176	6.169	6.106
	-Angka melanjutkan					
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA	151,8%	140,4%	136,2%	141,62%	n/a
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMA/SMK/MA	7.319	7.580	7.710	8.037	n/a
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya	4.820	5.400	5.661	5.675	5.347
	Angka melanjutkan					
10	Angka Melanjutkan Pendidikan					
	Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV	n/a	n/a	n/a	n/a	2.909
	Jumlah guru	n/a	n/a	n/a	n/a	3.094
	Guru yang memenuhi kualifikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	94,02%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>B</b>	<b>Kesehatan</b>					
	<b>Jumlah Rumah Sakit Daerah</b>	3	3	3	3	3
	Propinsi	2	2	2	2	2
	Kota Palu	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah Rumah Sakit Swasta</b>	3	4	4	4	4
	RS Umum	3	3	3	3	3
	Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	4	4	4	4
	Rs Khusus (Mata)	1	0	0	0	1
	<b>Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI</b>	2	2	2	2	2
	<b>Jumlah Seluruh Rumah Sakit</b>	19	19	19	19	19
	<b>Jumlah Penduduk</b>	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
	<b>Rasio Rumah Sakit (per- 100.000 Penduduk)</b>	5,00	4,92	4,85	5,09	5,04
	Jumlah Puskesmas	13	14	14	14	14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	30	34	27	25	25
	Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Poskesdes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Posyandu	224	223	218	223	227
	Jumlah Klinik / Balai Kesehatan	52	50	39	28	28
	Jumlah Polindes	4	3	3	3	4
	<b>Jumlah Dokter</b>	319	385	374	374	308
	Jumlah Dokter Umum/Sp	288	355	347	121	220
	Jumlah Dokter Gigi	31	30	27	51	88
	<b>Jumlah Tenaga Paramedis (Perawat)</b>	2.361	2.538	2.795	2.795	3.036
	<b>Rasio Dokter per-100.000 penduduk</b>	83,99	99,83	95,56	100,21	81,69
	<b>Rasio Tenaga Paramedis per-100.000 penduduk</b>	621,67	658,16	714,13	748,89	805,24



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>					
	Kondisi Jalan					
	Jalan Baik (Km)	332,70	367,96	347,65	262,95	263,96
	Jalan Baik Sedang (Km)	257,65	233,73	183,17	162,57	279,38
	Jalan Rusak (Km)	157,05	137,62	178,83	200,48	205,81
	Jalan Rusak Berat (Km)	104,17	112,24	164,72	140,86	103,41
	Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase					
	- Panjang Drainase (Km)	1.006,88	1.011,09	1.114,54	1.217,99	1.321,45
	- Panjang Trotoar (Km)	9.645	9.756	1.030	872	995
	Panjang Saluran Irigasi (m)	11.538,57	35.063,99	65.226,70	79.074,13	79.915,31
	Saluran Kondisi Baik (m)	8.165,16	24.804,71	47.016,29	61.127,17	53.354,87
	Saluran Kondisi Sedang (m)	1.423,27	4.328,47	7.734,18	7.610,33	6.487,45
	Saluran Kondisi Rusak Ringan (m)	1.401,23	4.261,45	7.608,24	6.834,04	11.686,61

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Saluran Kondisi Rusak Berat (m)	548,91	1.669,36	2.867,99	3.502,59	8.386,38
	Jumlah Tempat Ibadah	474	601	589	507	507
	Masjid	308	435	384	356	356
	Surau	71	65	89	75	75
	Gereja Kristen	86	92	107	69	69
	Gereja Khatolik	2	2	2	2	2
	Pura	2	2	2	2	2
	Wihara	5	5	5	3	3
	Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Penduduk	n/a	63,54	61,65	64,66	64,01
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66
<b>D</b>	<b>Perumahan</b>					
	Rumah Tangga Pelanggan Air Bersih	31.100	31.430	101.019	101.204	100.256

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Rumah Tangga Pengguna Listrik	161.449	164.298	185.474	198.031	238.781
<b>E</b>	<b>Perhubungan</b>					
	Jumlah Penumpang Bis (AKDP)	0	93.243	93.557	112.838	108.547
	Jumlah Penumpang Kereta api	0	0	0	0	0
	Jumlah Penumpang Kapal Laut (Naik/Turun)	59.450	548.055	326.987	n/a	n/a
	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	1.369.220	N/A	1.262.550	476.459	435.812
	Total Jumlah Penumpang	2.222.116	889.367	1.726.366	559.649	666.140
	Izin Trayek Perkotaan	6	6	6	6	6
	Izin Trayek Pedesaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Izin Trayek	6	6	6	6	6
	Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
	Rasio izin Trayek	N/A	0,0000158	0,0000156	0,0000162	0,0000159
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	2.401	n/a	1.152	534	151

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Mobil Penumpang Umum	406	n/a	15	1	2
	Mobil Bus Umum	95	n/a	152	98	3
	Mobil Bus Bukan Umum	0	0	0	0	0
	Mobil Barang Umum	1.493	n/a	n/a	n/a	n/a
	Mobil Barang Bukan Umum	399	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kendaraan Khusus Umum	0	0	0	0	0
	Kendaraan Khusus Bukan Umum	0	0	0	0	0
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Umum	0	0	0	0	0
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Bukan Umum	5	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kendaraan Bermotor (Tiga Roda) Bukam Umum	0	0	0	0	0
	Sepeda Motor	3	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>F</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
	Persentase Sampah Yang Dittangani	71,42%	37,18%	N/A	2,56 %	86,61
	Jumlah sampah yang ditangani (terangkut) m3	279.574	141.968	N/A	71.209,03	63.381,16
	Jumlah volume produksi sampah	391.427	381.792	N/A	2.782.877	73.180,86
<b>G</b>	<b>Pertanahan</b>					
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	3,33%	3,33%	32,01	30,69%	25,98%
	1). Hak Milik	1.251,05	1.251,05	341.097	301.027	297.091
	2). Hak Guna Bangunan	119.378,50	119.378,50	923.447	911.391	729.099
	3). Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
	4). Hak Pakai	10.842	10.842	-	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	5). Girik	-	-	-	-	-
	Jumlah	131.471,55	131.471,55	1.264.544	1.212.418	1.026.190
	Luas Wilayah (Km2)	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600
<b>H</b>	<b>Kependudukan dan Catata Sipil</b>					
	Jumlah Penduduk Wajib KTP	265.855	262.294	275.933	273.951	270.567
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP	215.547	229.237	193.385	263.624	197.587
	Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki KTP	50.308	33.057	82.548	10.327	72.980
	Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki Akta Kelahiran	119.594	143.704	164.104	199.620	233.012
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga	85.794	86.778	91.839	110.306	117.320
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Kartu Keluarga	22.077	22.876	19.375	5.390	3.800
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Nikah	37.484	41.129	68.461	90.601	122.447
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Nikah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perceraian	424	307	423	597	2.759
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Perceraian	3.583	3.913	4.140	4.473	2.909
	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kematian	792	2.995	541	2.279	1.716
<b>I</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>					
	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	6149	6.116	5349	5265	4908
	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	5053	5.357	4456	4350	3.818
	Jumlah pekerja perempuan	11.202	11.272	9805	9615	9324
	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	54,89	54,26	54,55	54,76	52,64
	Persentase pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	45,11	45,74	45,45	45,24	47,36
<b>J</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>					
	Rata-rata Anak Per Keluarga	1,82	1,88	1,90	1,90	1,90
	Rasio Akseptor KB	0,17	0,19	0,17	0,17	0,15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Cakupan Peserta KB	46,95	47,82	48,69	49,56	41,75
	Jumlah Akseptor KB	12.962	9.993	9.677	30.419	8.731
<b>K</b>	<b>Sosial</b>					
	Jumlah Sarana Sosial					
	-Jumlah Panti Asuhan	53	59	41	41	43
	-Rumah singgah	1	1	1	1	1
	PMKS yang memperoleh bantuan social	n/a	54.314	27.721	3.200	N/A
	PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	24.892	131.600	261.545	27.659	24.892
	% PMKS Yang Diberikan Bantuan		41,27%	10,60%	11,57%	n/a
<b>L</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
	Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467	201.083
	a. Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507	185.777
	b. Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960	15.306



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166	107.963
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	287.331	292.080	293.963	304.633	309.046
	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	66,28	65,81	65,95	66,46	65,07
	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	6,56	5,81	6,36	8,38	7,61
<b>M</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>					
	Persentase koperasi aktif	52,06%	61,51%	63,24%	83,25%	84,26%
	-Jumlah koperasi aktif	174	182	215	84	169
	-Jumlah koperasi tidak aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	-Jumlah koperasi	174	182	215	84	169
<b>N</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
	Total Jumlah Investor	4	5	4	15	2
	PMDN	2	2	4	8	2
	PMA	2	3	0	7	0
	Jumlah Investasi PMDN/PMA (Persetujuan)	155.122.760.000	2.027.507.880.000	87.500.000.000	36.058.613.903.20 0	23.151.430.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>O</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	<b>Jumlah Organisasi Pemuda</b>	382	382	384	384	385
	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	
	Kecamatan Palu Barat	65	65	65	65	65
	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	46
	Kecamatan Palu Utara	28	28	28	28	28
	Kecamatan Tawaeli	63	63	65	65	65
	Kecamatan Mantikulore	29	29	29	29	30
	Kecamatan Tatanga	25	25	25	25	25
	Kecamatan Ulujadi	35	35	35	35	35
	<b>Jumlah Organisasi Olahraga</b>	204	205	205	205	205
	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	54
	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
19	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
	Kecamatan Ulujadi	13	14	14	14	14
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	5	5	5
	Jumlah Kegiatan Olahraga	27	27	27	28	28
<b>P</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
	Rasio Polisi Pamong Praja	3,66	9,62	9,17	10,07	9,71
	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	2,93	2,89	2,85	2,81	2,77
	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan	0,13	5,35	7,57	9,79	13,51

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Q</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
	-Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
	-Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4
	Rasio Wartel/Warnet	2,34	1,32	1,28	0,88	0
	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	5	5
	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	12	13	13	13	13
	Total jenis surat kabar (1+2)	17	18	18	18	18
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	37	37	37	39	39
<b>R</b>	<b>Perpustakaan</b>					
	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	61	61	61	70	267
	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	36	36	36	2	299
	Total Perpustakaan (1+2)	97	97	97	72	566

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1.159	862	1.084	2.287	2.576
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	9	7	6	3	10
	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	1.168	869	1.090	2.290	2.586
<b>2.3.2</b>	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
1	Pertanian					
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHK)	4,38	4,41	4,14	4,27	4,06
2	Kehutanan					
	Luas Wilayah Kehutanan	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha	16.318 Ha
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral					
4	Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	2.113	48.815	3.076	3.709	2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	152.072	3.938	327.982	287.395	250
	Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHB)	1,15	1,09	0,95	0,87	0,95
	Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman Terhadap PDRB (ADHK)	1,12	1,08	0,92	0,83	0,90
5	Kelautan dan Perikanan					
	Produksi Ikan (Ton)	1.742,26	1.225,63	1.137,76	1.116,71	1.236,70
6	Perdagangan					
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)	9,96	10,07	9,93	9,84	10,45
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)	10,31	10,42	9,81	9,63	10,23
7	Perindustrian					
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (ADHB)	7,55	6,87	6,28	6,59	6,49
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	8,08	7,55	7,10	7,32	7,13

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	(ADHK)					
<b>2.4</b>	<b>DAYA SAING DAERAH</b>					
<b>2.4.1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>					
<b>2.4.1.1</b>	<b>Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan</b>					
	- < 150.000	0	n/a	0	0	0
	- 150.000-199.999	0	n/a	0	0	0
	- 200.000-299.999	0,64	n/a	0	0	0
	- 300.000-499.999	8,69	n/a	3,81	2,25	1,80
	- 500.000-749.999	17,43	n/a	14,37	12,52	13,98
	- 750.000-999.999	14,06	n/a	13,74	18,30	15,16
	- 1.000.000-1.499.999	23,58	n/a	20,67	22,00	21,52
	- 1.500.000+	35,60	n/a	47,41	44,92	47,53

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4.1.2</b>	<b>Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan</b>					
	- Perumahan dan Fasilitas Rumah	420.399	246.215	247.717	470.376	637.521
	- Aneka Barang dan Jasa	211.037	93.694	100.292	217.933	169.959
	- Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	45.428	30.339	32.692	49.307	34.014
	- Barang Yang Tahan Lama	104.816	49.401	48.688	112.333	14.758
	- Pajak, Pungutan, dan Asuransi	n/a	27.686	30.826	54.029	43.933
	- Keperluan Pesta dan Upacara	n/a	18.489	17.817	33.131	13.966
<b>2.4.1.3</b>	<b>Produktivitas Total Daerah</b>					
	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,20	4,25	3,89	4,04	3,83
	- Pertambangan dan Penggalian	6,96	6,39	7,23	6,03	6,07
	- Industri Pengolahan	7,55	6,87	6,28	6,59	6,49



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,30	0,27	0,29	0,30
	- Konstruksi	16,00	16,39	18,50	19,39	19,30
	- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,96	10,07	9,93	9,84	10,45
	- Transportasi dan Pergudangan	9,55	9,89	9,62	6,45	6,57
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	1,09	0,95	0,87	0,95
	- Informasi dan Komunikasi	8,59	8,78	9,14	9,97	9,89
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	5,82	5,19	5,77	5,94
	- Real Estate	2,53	2,49	2,27	2,39	2,36
	- Jasa Perusahaan	1,17	1,16	1,12	1,14	1,10
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,53	14,26	13,77	14,77	14,53
	- Jasa Pendidikan	8,40	8,05	7,71	7,92	7,57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,01	3,09	3,08	3,45	3,59
	- Jasa lainnya	0,98	0,96	0,93	0,96	0,93
<b>2.4.2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>					
<b>2.4.2.1.</b>	<b>Aksesibilitas daerah</b>					
<b>2.4.2.1.1</b>	<b>Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan</b>	0,28	n/a	0,14	0,06	0,02
	- Panjang Jalan	851,558	851,563	851,558	851,563	851,563
	- Jumlah Kendaraan	2.401	n/a	1.152	534	151
<b>2.4.2.1.2</b>	<b>Arus Lalulintas Pelabuhan</b>					
	Jumlah Penumpang Datang (Org)	10.293	6.668	40.657	16.805	21.920
	Jumlah Penumpang Berangkat (Org)	25.125	23.419	42.839	17.890	23.084
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	307.498	399.191	270.232	255.806	189.412
	Jumlah Barang Muat (Ton)	4.952	3.615	145.977	29.825	15.856
<b>2.4.2.1.3</b>	<b>Arus Lalulintas Bandara</b>					
	- Jumlah Penumpang Datang	663.206	n/a	608.820	230.910	217.814

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	- Jumlah Penumpang Berangkat	679.763	n/a	622.957	235.441	217.998
	- Jumlah Penumpang Transit	26.251	n/a	34.773	10.108	n/a
<b>2.4.2.2</b>	<b>Fasilitas Daerah</b>					
	Jumlah Bank	27	27	27	27	27
	Jumlah Hotel Berbintang	10	11	8	7	7
	Jumlah Hotel Non Bintang	38	36	41	109	109
<b>2.4.2.3</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
<b>2.4.2.3.1</b>	<b>Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih</b>					
	Air Dalam Kemasan	-	20	N.A	N.A	N.A
	Leding	-	973	N.A	N.A	N.A
	Sumur Bor/Pompa	-	6624	N.A	N.A	N.A
	Sumur Terlindungi	-	929	N.A	N.A	N.A
	Mata Air Terlindungi	-	85	85	85	80
	Mata Air Tak Terlindungi	-	218	N.A	N.A	N.A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Lainnya	-	155	N.A	N.A	N.A
	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga melalui PDAM	14.678	14.405	14.434	14.434	12.601
<b>2.4.2.3.2</b>	<b>Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN</b>					
	- Daya Terpasang	262.881	256.186	290.189	183.010	201.285
	- Produksi (Kwh)	510.761.690	490.879.890	516.135.639	557.896.714	594.488.027
	- Terjual (Kwh)	458.461.811	447.610.719	453.953.681	506.708.300	535.914.759
	- Dipakai Sendiri (KWh)	306.457	294.744	n/a	334.738	124.251
	- Susut/Hilang (KWh)	n/a	53.121.916	73.764.409	57.615.761	58.573.267
<b>2.4.2.3.3</b>	<b>Jumlah Pelanggan Manurut Pengguna Listrik</b>					
	Rumah Tangga	161.449	164.298	185.474	198.031	238.781
	Indutri	140	141	139	142	142
	Instansi	847	887	946	985	1.035
	Bisnis	7.450	8.172	8.525	8.957	9.495
	Sosial	2.256	2.357	2.481	2.633	2.746

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4.2.3.4</b>	<b>Jumlah Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi Menurut STO dan Jenis Pengguna</b>					
	<b>(1P) Berlangganan Layanan Telepon Saja atau Internet Saja</b>	15.500	21.689	5.365	4.782	1.986
	<b>(2P) Berlangganan Layanan Telepon dan Internet atau Telepon dan TV Kabel (Use TV) atau Internet dan TV Kabel (Use TV)</b>	-	-	4.556	5.876	6.354
	<b>(3P) Berlangganan Layanan Telepon, Internet dan Use TV</b>	-	-	5.148	8.022	8.237
<b>2.4.3</b>	<b>Iklm Berinvestasi</b>					
<b>2.4.3.1</b>	<b>Angka Kriminalitas</b>					
	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor Kota Palu	2.819	2.274	721	628	590
	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisisn Sektor Kota Palu	645	1.262	439	271	268
<b>2.4.3.2</b>	<b>Jumlah Demonstrasi</b>	57	26	118	40	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	- Bidang Politik	16	24	61	3	n/a
	- Bidang Ekonomi	41	2	36	24	n/a
	- Bidang Lainnya	n/a	n/a	21	16	4
<b>2.4.3.3</b>	<b>Lama Proses Perizinan</b>	-	28			
	- SIUP	2	2	2	2	2
	- TDP	3	3	3	3	3
	- IUI	5	5	5	5	5
	- TDI	3	3	3	3	3
	- IMB	14	14	14	14	14
	- HO	7	7	7	7	7
<b>2.4.3.4</b>	<b>Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah</b>					
	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Sektor Pajak					
	Perkotaan (Rp)	10.886.578.131,77	13.221.721.221,31	14.114.780.667,71	12.328.070.351,48	10.792.587.731,44

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Pertambahan (Rp)	91771	89436	53098	352120	
	Jumlah Wajib PBB dan Luas Tanah yang dikenakan PBB menurut Sektor Pajak					
	Perkotaan - Wajib Pajak	125258	118588	123189	127357	
	Perkotaan - Luas Tanah (Ha)	140103921	143357,98	14481600	15069364	
	Pertambahan Non Migas- Wajib Pajak	0	0	8	11	
	Pertambahan Non Migas- Luas Tanah	0	0	10727	366534	
<b>2.4.3.5</b>	<b>Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi</b>	2	2	2	2	2
	- Jumlah Perda Yang Terkait Perizinan	1	1	1	1	1
	- Jumlah Perda Yang Terkait Lalu Lintas Barang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	- Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	1	1	1	1	1
<b>2.4.4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>					
<b>2.4.4.1</b>	<b>Rasio Lulusan S1/S2/S3</b>					
	Lulusan S1	33.838	35.202	35.932	37.137	38.636

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Lulusan S2	4.565	4.905	5.049	5.154	5.310
	Lulusan S3	455	478	490	510	545
	Jumlah Penduduk	379.782	385.619	391.383	373.218	377.030
<b>2.4.4.2</b>	<b>Tingkat Ketergantungan</b>					
	- Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	93.441	94.367	94.911	100.764	100.890
	- Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	12.163	12.699	15.589	14.864	15.614
	- Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	105.604	107.066	110.500	115.628	116.504
	- Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	273.989	278.553	260.865	257.590	260.526
	- Rasio Ketergantungan	38,54	38,44	42,36	44,89	44,72



## 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

### 2.2.1 Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV (empat) per program dari masing – masing bidang urusan dan unsur pemerintahan di atas, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.114**  
**Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**  
**RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur**  
**Pemerintahan**

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>90,71%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>82,41%</b>	<b>Tinggi</b>
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	90,10%	Sangat Tinggi	95,08%	Sangat Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	94,68%	Sangat Tinggi	90,59%	Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86,05%	Tinggi	78,33%	Tinggi
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90,57%	Tinggi	82,27%	Tinggi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	93,23%	Sangat Tinggi	67,46%	Sedang
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	89,62%	Tinggi	83,58%	Tinggi
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>94,97%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>86,91%</b>	<b>Tinggi</b>
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	100,00%	Sangat Tinggi	94,22%	Sangat Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99,60%	Sangat Tinggi	87,83%	Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	94,35%	Sangat tinggi	92,51%	Sangat Tinggi

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	69,48%	Sedang	63,05%	Rendah
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	93,21%	Sangat Tinggi	90,79%	Sangat Tinggi
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98,97%	Sangat Tinggi	96,30%	Sangat tinggi
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00%	Sangat Rendah	0,00%	Sangat Rendah
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	97,06%	Sangat Tinggi	90,98%	Sangat Tinggi
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	90,03%	Tinggi	91,96%	Sangat Tinggi
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	83,57%	Tinggi	74,62%	Sedang
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	99,86%	Sangat Tinggi	93,14%	Sangat Tinggi
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	97,69%	Sangat Tinggi	94,39%	Sangat Tinggi
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	97,22%	Sangat Tinggi	90,18%	Tinggi
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	95,00%	Sangat tinggi	92,57%	Sangat Tinggi
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100,00%	Sangat Tinggi	100,00%	Sedang
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100,00%	Sangat Tinggi	94,22%	Sangat Tinggi
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	100,00%	Sangat Tinggi	99,53%	Sangat Tinggi
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	98,53%	Sangat tinggi	74,89%	Sedang
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>97,21%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>92,22%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	98,67%	Sangat Tinggi	95,89%	Sangat Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	94,26%	Sangat Tinggi	94,18%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	93,13%	Sangat Tinggi	90,67%	Tinggi
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	100,00%	Sangat Tinggi	93,52%	Sangat Tinggi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	100,00%	Sangat Tinggi	91,24%	Sangat Tinggi
<b>D</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN</b>	<b>91,17%</b>	<b>Sangat</b>	<b>92,02%</b>	<b>Sangat</b>

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PEMERINTAHAN</b>		<b>Tinggi</b>		<b>Tinggi</b>
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	90,73%	Tinggi	91,22%	Sangat Tinggi
2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	91,61%	Sangat Tinggi	92,78%	Sangat Tinggi
<b>E</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>87,70%</b>	<b>Tinggi</b>	<b>85,36%</b>	<b>Tinggi</b>
I	<b>PERENCANAAN</b>	88,34%	Tinggi	96,12%	Sangat Tinggi
II	<b>KEUANGAN</b>	87,93%	Tinggi	81,25%	Tinggi
III	<b>KEPEGAWAIAN</b>	92,93%	Sangat Tinggi	92,00%	Sangat Tinggi
IV	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	83,20%	Tinggi	85,10%	Tinggi
V	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	85,08%	Tinggi	90,55%	Tinggi
<b>F</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>100,00%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>96,71%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
1	<b>INSPEKTORAT</b>	100,00%	Sangat Tinggi	96,71%	Sangat Tinggi
<b>G</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>98,04%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>94,95%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
I	<b>KECAMATAN</b>	98,04%	Sangat Tinggi	94,95%	Sangat Tinggi
<b>H</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>96,79%</b>	<b>Sangat gi</b>	<b>93,53%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
I	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	96,79%	Sangat Tinggi	93,53%	Sangat Tinggi

Tabel 2.114 memperlihatkan capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Kota Palu Tahun 2021 berdasarkan 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tiga unsur dan lima unsur tersebut adalah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 6 (enam) bidang urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 90,71 % atau capaian kategori sangat tinggi dan

capaian realisasi anggaran sebesar 82,41 % termasuk dalam kategori tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja menunjukkan bahwa telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,68%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang secara fisik mencapai 95,73% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,23%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang secara fisik mencapai 99,79% yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan capaian realisasi anggaran sebesar 95,08,%. Pencapaian ini ditunjang oleh capaian realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar 95,08%, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi anggaran 96,01% pada Triwulan IV tahun 2021.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 18 (delapan belas) bidang urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94,97 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran sebesar 86,91 % (tinggi) pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program hubungan terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian realisasi sebesar 99,60%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 97,23%, Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan capaian realisasi sebesar 94,35%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 92,63%, Program Penanganan Kerawanan Pangan terealisasi sebesar 90,45%, Program Pengawasan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 99,97% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi sebesar 98,97%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97,10%, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 97,76%, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi sebesar 97,06%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97,53%, Program Pengendalian Penduduk terealisasi sebesar 94,17%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar 96,53%, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi sebesar 99,86%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 99,31%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi sebesar 97,69%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program

Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dengan capaian realisasi sebesar 97,22%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 91,66%, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi sebesar 95,00%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terealisasi sebesar 95,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dengan capaian realisasi sebesar 100,00%, Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pembinaan Perpustakaan dan Program

Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dengan capaian realisasi sebesar 98,53%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,59% , Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Triwulan IV tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja terealisasi sebesar 94,22%. Pencapaian ini didukung Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 99,47%, Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi 100,00% dan Program hubungan Industrial terealisasi 90,31% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi sebesar 90,79%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96,36%, Program Perencanaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 99,95%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terealisasi sebesar 98,51% dan Program Pengelolaan Persampahan terealisasi sebesar 93,48% yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi sebesar



96,30%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,63%, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 98,49%, Program Pencatatan Sipil terealisasi sebesar 99,77%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi sebesar 90,98%. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 99,91% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan capaian realisasi sebesar 91,96%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 93,14% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi sebesar 93,14%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,03%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terealisasi sebesar 98,23%, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terealisasi sebesar 99,51% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi sebesar 94,39%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 96,82%, Program

Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00%, Program Promosi Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi sebesar 95,14% dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal realisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi sebesar 92,57%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektor realisasi sebesar 92,57% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan capaian realisasi sebesar 94,22%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dengan realisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan capaian realisasi sebesar 99,53%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Program Pembinaan Perpustakaan terealisasi sebesar 99,46% dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Triwulan IV tahun 2021.

### 3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 5 (lima) bidang urusan pilihan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 97,21 % atau

capaian dengan kategori sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,22 % atau capaian dengan kategori sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,67% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar 83,76% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan pada triwulan III tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,26% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,13%. ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,25% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00%. Ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Perencanaan dan Pembangunan

Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 100,00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 95,89% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 99,99%, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 93,49% dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 99,46% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 94,18% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,23% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 90,67% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata pada triwulan IV tahun 2021.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 93,52% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,46%, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar 100,00%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 99,06%, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 100,00%, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 96,08% yang dilaksanakan oleh Dinas

Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian kinerja realisasi keuangan sebesar 91,24% yang ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar 96,47% dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 92,47% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2021.

#### 4. Unsur Pendukung

Unsur pendukung ini terdiri dari 2 (dua) unsur kesekretariatan yaitu Sekretariat Daerah Kota Palu, dan Sekretariat DPRD Kota Palu, dengan Rata- capaian kinerja fisik pada unsur pendukung sebesar 91,17 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,02 % (sangat tinggi).

Secara fisik, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 90,73% (tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 91,61% (sangat tinggi). Secara keuangan pencapaian kinerja Sekretaris Daerah sebesar 91,22% (sangat tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 92,78% (sangat tinggi).

#### 5. Unsur Penunjang

Unsur penunjang ini terdiri dari 5 (lima) bidang unsur penunjang dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 87,70 % atau capaian yang tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 85,36 % (tinggi) pada Triwulan IV Tahun 2021.

- Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu Unsur penunjang urusan pemerintah (Kepegawaian) sebesar 92,93% ditunjang oleh capaian kinerja fisik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,43% dan Program Kepegawaian Daerah sebesar

92,44% Yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2021.

- Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan/anggaran yang sangat tinggi yaitu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) sebesar 96,12% ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,57% dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 95,59% Yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Kepegawaian sebesar 92,00% ditunjang oleh capaian realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,14% Yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2021.

#### 6. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Inspektorat dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00 % atau capaian sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 96,71 % atau capaian sangat tinggi.

#### 7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan diselenggarakan oleh kecamatan se-Kota Palu yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 98,04 % atau capaian yang sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 95,00 % atau capaian kategori sangat tinggi.

#### 8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,79 % atau capaian sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 95,35 % atau capaian sangat tinggi.

### 2.2.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan IV (empat) per bidang urusan dan unsur pemerintahan di atas, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.115**  
**Rata - Rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan**  
**RKPD Tahun 2021 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Kota Palu**

No.	Uraian / Urusan / Unsur	Rata-Rata Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA PALU</b>		<b>94,57%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>90,52%</b>	<b>Tinggi</b>
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	90,71%	Sangat Tinggi	82,41%	Tinggi
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94,97%	Sangat Tinggi	86,91%	Tinggi
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97,21%	Sangat Tinggi	92,22%	Sangat Tinggi
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	91,17%	Sangat Tinggi	92,02%	Sangat Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	87,70%	Tinggi	85,36%	Tinggi
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	100,00%	Sangat Tinggi	96,71%	Sangat Tinggi
G	UNSUR KEWILAYAHAN	98,04%	Sangat Tinggi	94,95%	Sangat Tinggi
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	96,79%	Sangat Tinggi	93,53%	Sangat Tinggi

Tabel 2.115 memperlihatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94,57 % atau capaian sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar 90,52 % atau capaian yang tinggi pada Triwulan IV Tahun 2021.

Secara fisik dan keuangan, terdapat 1 (satu) urusan pemerintahan yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Urusan Pemerintahan pilihan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 97,21% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 92,22% , terdapat 2 (dua) urusan pemerintahan yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 90,71% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 82,41% dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi ) sebesar 94,97% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 86,91%, terdapat 4 (empat) Unsur yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (sangat tinggi) yaitu Unsur pendukung urusan Pemerintahan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 91,17%% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 92,02%, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 100,00% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 96,71%, Unsur Kewilayahan dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 98,04% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 95,00%, Unsur Pemerintahan Umum dengan hasil capaian kinerja fisik (sangat tinggi) sebesar 96,79% dan capaian anggaran/keuangan yang sangat tinggi sebesar 93,53%, terdapat 1 (Satu) unsur yang pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan



minimal kelulusan penilaian kinerja (tinggi) yaitu unsur penunjang urusan Pemerintahan Dengan Hasil Capaian Kinerja Fisik (Tinggi) Sebesar 87,70% dan capaian anggaran/keuangan yang tinggi sebesar 85,36%.

Evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Palu yang dicapai melalui program prioritas RKPD Tahun 2021 seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.116 Pencapaian Program OPD terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021**

**BIDANG EKONOMI**

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman					
			1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
			- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	940.000.000	25 juta per rumah (Kel.Pantoloan 32 unit dan Kel. Pantoloan Boya 15 Unit)	Lanjutan	940.000.000	Lanjutan
		Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja	Program Pengembangan UMKM					
		1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil						

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi -	220.916.850	Fasilitasi pelatihan Pembentukan kelompok UMKM	188.569.725	118.430.225	Lanjutan
	Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja/DPKAD	- BTT					
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
	Dinas Sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
		- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8.842.213.500	Bantuan untuk peralatan usaha kelompok	3.349.669.825		Bantuan Sarana dan Prasarana KUBE untuk 77 KUBE dan 2 UEP
					5.000.000.000	4.300.000.000	Bantuan Modal Usaha Keluarga Fakir Miskin (10 jt/Keluarga untuk 500 keluarga)

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output	
2.	Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
		-	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	206.489.520	Publikasi usaha berbasis online	403.683.427	373.288.660	Publikasi usaha berbasis online dan Expo (Dekranasda)
		Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				
		-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
		-	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	75.291.000	Data dan informasi UMKM	283.003.625	220.873.775	Pendataan UMKM Kota Palu
		Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
-	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output	
		- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.245.590.790	Untuk menyiapkan jaringan	3.241.439.200			
3.	Penguatan UMKM	Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja	Program Pengembangan UMKM					
		'1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil					
		-	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	220.916.850	Pelatihan, bantuan peralatan, dan pengembangan usaha	188.569.725	118.430.225	Publikasi usaha berbasis online dan Expo (Dekranasda)
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
		1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					
-	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	206.489.520	Publikasi usaha berbasis online	2.000.000.000	2.000.000.000	Bantuan Modal Usaha 2 jt per UMKM untuk 1.000 UMKM(BTT)		

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output	
4.	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
		1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	750.904.326	Revitalisasi Perparkiran Kota Palu Berbasis e-Parkir (OPD pendukung : Dinas Perindag, Dinas PU dan Dinas Penataanruang)			Sosialisasi
		1	Program Penunjang urusan Pemerintah daerah kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah					
		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			531.344.151		Pendampingan Pengawasan Guna Meningkatkan Potensi Parkir Tepi Jalan (Parkir Sistem On Street) dan Penyusunan Raperwali tentang Perparkiran
5.	Reformasi dan revitalisasi moda	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output	
	transportasi		1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	869.070.600	Manajemen Transportasi	164.457.600			
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				75.637.500	67.450.000	Kajian Model Penanganan Moda Transportasi Darat
			1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						
			- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						
6.	Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi	Dinas pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						
			1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
			- Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	187.495.775	Pelatihan			
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
			1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
			- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	178.777.575	Perencanaan Kawasan (RIPARKOT)	140.000.000		Perencanaan City Branding
7.	<b>Kawasan agrowisata Layana dan Petobo</b>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					Lanjutan
			1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					
			- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	25.720.870	Pembelian Bibit Buah-buahan, pengolahan Tanah, Penyediaan Pupuk	600.000.000		Perencanaan Pengembangan Potensi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Kota Palu



Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
			- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	49.042.840				
			- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	7.281.080.160				
		Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					Lanjutan
			1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			- Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.685.518.125	Identifikasi lahan dan pembebasan lahan			
8.	Revitalisasi pasar berbasis segmentasi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
			1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
		- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	200.697.280	Operasi Pasar Murah	143.000.000	143.000.000	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
		1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Pengawasan Harga Barang			
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	56.700.000		56.700.000	56.700.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
		1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
		- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			221.350.000	195.000.000	Rehabilitasi Pasar Rakyat Masomba
					196.700.000	196.700.000	Pembuatan Embrio Pasar Buah Pasar manonda

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
		Dinas PU	Program Penataan Bangunan Gedung					
			1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
			- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Perencanaan Revitalisasi Pasar Manonda,Masomba	7.173.487.999	4.297.228.080	Peningkatan Jalan Kawasan Pasar Masomba
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					
			1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
			- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			163.230.000	163.230.000	Kajian Pasar Berbasis Segmentasi
9.	Wisata pasar ikan Kota Palu	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
			1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
			- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	178.777.575	Perencanaan Kawasan (RIPARKOT)			
10.	1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
			1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
			- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	290.158.000	Bahan Gillnet, Accu 40 Ampere	165.000.000		Bantuan pembudidayaan ikan di Lekatu dan Kabonena
						123.200.000	123.200.000	Bantuan gilnet ke nelayan Kel. Mamboro Barat
11.	Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan Setda	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Lanjutan
			1 Administrasi Tata Pemerintahan					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
			- Penataan Administrasi Pemerintahan	70.060.000	APEKSI			
		Bappeda	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
			1 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
			- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	307.774.700	Data dan Informasi			
			- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	644.836.200	Libu Ntodea, Dokumen LP2KD, Dokumen SPKD		638.666.200	
12.	Forum komunitas kreatif Kota Palu	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					
			1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
			- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	187.495.775	Bantuan Peralatan			Identifikasi dan pembentukan forum komunitas kreatif Kota Palu

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Keuangan	Ket/Output
			28.422.017.831	-	8.037.704.826		

### BIDANG INFRASTRUKTUR

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Bangun Palu Tahan Gempa	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung					
			1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
			- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Analisis Tanah dan Pondasi Bangunan	27.500.000.000		ganti rugi lahan pembangunan lahan jembatan IV
				9.025.000.000	Pembangunan Gedung Perpustakaan	23.335.360.252	14.291.847.140	
			9.785.961.600	Pembangunan 6 Kantor Kelurahan				

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
			4.456.000.000	Pembangunan 2 Kantor Kecamatan			
			4.472.910.400	Pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
			4.999.956.800	Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penataan Bangunan Gedung					Lanjutan
		1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
		- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	1.472.522.530	Penerbitan IMB, SLF	422.684.800	395.954.800	

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Implementasi SIMBG					
		- Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	42.615.600	Dokumen Perda bangunan Gedung	49.682.500	49.682.500	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
		1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
		- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	176.534.240	Dokumen GSB	1.076.625.700	306.582.700	
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman					
		1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha					



Program Pembangunan		OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
			- Perbaikan Rumah tidak layak huni	75.000.000	Penertiban bangunan hunian Huntara	12.263.625.000	-	Penyiapan lahan ganti rugi hantap Petobo (23 Ha)
			Penanganan Bencana					
2.	Pembangunan Gudang Logistik Bencana	Dinas Sosial	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	711.896.250	Penyediaan Stok Gudang Logistik Bencana Alam. Non Alam dan Sosial	1.040.548.750		bantuan logistik keluarga korban covid 19 (ODP/OTG), stok dapur umum, stok gudang bencana alam, dan stok gudang bencana sosial

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Penyediaan Sandang	605.917.560		364.085.660		Penyediaan Sandang Berupa bantuan bahan bangunan rumah yang terbakar, bantuan stok gudang bencana alam, bantuan stok gudang bencana sosial
		- Penyediaan Makanan					
	BPBD	Program Penanggulangan Bencana					
		1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
		- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	461.165.780	Penyediaan Saran Pedukung dan Logistik			Penetapan lokasi pembangunan gudang logistik bencana di 8 Kecamatan

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Program Penataan Bangunan Gedung					
	Dinas Pekerjaan Umum	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
		- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Revisi Obyek	100.000.000		Perencanaan Gudang Logistik Bencana Alam
3.	Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)	Dinas Pekerjaan Umum					
		Program Penataan Bangunan Gedung					
		1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Revisi Perencanaan				
4.	Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
		1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
		-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.453.919.500	Perencanaan dan pembanguna lap. Sepak Bola Tipo	33.200.000		Pembuatan Sarana Panjat Tebing ( Boulder )
						175.000.000		Belanja Pemeliharaan Lapangan Tenis
						150.000.000		Pembebasan Lahan untuk Parkir Lap. Koni

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
					67.311.100		Pembuatan Lapangan Volly
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		- Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.685.518.125	Ganti Rugi Lahan			
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung					
		1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Donggala Kodi
					500.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Pengawu
					400.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tondo
					400.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Taipa
					500.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Silae
					500.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Tatura Utara (Lap. Koni)

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
					400.000.000		Revitalisasi Lapangan Sepakbola Kel. Baiya	
					100.000.000		Pengawasan Revitalisasi Lapangan Sepakbola Tahun 2021	
5.	Ruang terbuka hijau/public area per kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					
		1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
		-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.752.361.850	Penanaman dan pemeliharaan pohon	15.000.000		Design RTH Pertokoan Hasanuddin (Sayembara)
					Pendataan Ruang Terbuka Hijau Kota Palu	15.000.000		Design RTH Kampung Baru (Sayembara)
								Pembangunan Taman Balikpapan (CSR)

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
							Pembangunan Taman Transmart (CSR)
	Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Informasi Informatika					
		1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		- Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah	2.870.700.000	Penyediaan Bandwidth	68.750.000	68.750.000	Pemasangan Wifi di area Publik (20 kelurahan)
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung					
		1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
		- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah			100.000.000	99.550.000	Perencanaan Teknis Revitalisasi Taman Vatulemo



Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
		Kabupaten/Kota						
					100.000.000	99.800.000	Perencanaan Taman Taipa	
6.	Pembangunan gedung kesenian Kota Palu	Program Penataan Bangunan Gedung						
		Dinas Pekerjaan Umum	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
		-	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Revisi Perencanaan	300.000.000		Perencanaan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu
		Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					

Program Pembangunan	OPD Penanggungjawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		- Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.685.518.125	Ganti Rugi lahan			
			<b>48.983.498.360</b>		<b>70.476.873.762</b>		

## BIDANG PELAYANAN DASAR

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>KESEHATAN</b>							

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
1.	Palu kota sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
		1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	265.041.200		75.384.075	58.884.075	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.022.500		224.272.500	160.972.500	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.510.000		248.460.000	230.710.000	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	765.457.700		1.273.095.200	1.228.365.200	
DPPKB	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						
	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	425.230.100	Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Sejahtera	44.597.400	44.597.400	Pertahanan Keluarga Kelompok BKB di Kampung KB
		Program Perlindungan Perempuan					
		1. Peyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan					
	DP3A	- penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan	149.098.400	peningkatan Kesejahteraan perempuan dan anak	51.816.101	51.381.500	Operasional rumah aman dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
		Program Peningkatan Kualitas keluarga					

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		<p>penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan</p> <p>1. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak-hak anak</p>					
		- penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas keluarga	55.857.000		65.113.400	64.013.400	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS ) dan Peringatan Hari Ibu
	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial					
		<p>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</p> <p>1.</p>	854.840.050	Peningkatan kesejahteraan sosial			

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	1.424.306.500		1.900.000	1.900.000	penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas
		Program Kawasan Permukiman					
		1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
	Dinas perumahan dan Permukiman	- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2.562.759.100	Sanitasi Lingkungan Perumahan dan permukiman	1.575.000.000	1.575.000.000	Pembangunan tangki Septik Individual Perkotaan (Huntap Balaroa 127 Unit dan Kelurahan Birobuli Selatan 83 Unit)

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
					15.000.000		Pembangunan Tangki Septik Pasar Bulili di Kelurahan Petobo
2.	Transformasi puskesmas menjadi klinik modern	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Belanja Kapitasi 13 Puskesmas, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3			
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
			32.206.121.000				
3.	Satu ambulans satu kelurahan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan 3 unit Ambulans	2.340.000.005	1.954.999.995	Pengadaan 7 unit Ambulans
			1.002.855.000				
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
				Pendataan kendaraan Ambulans di setiap Kelurahan				
4.	BPJS gratis warga tidak mampu	Perindungan dan jaminan Sosial						
		Dinas Sosial	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
			-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	321.683.000	Data Warga Tidak Mampu	7.625.400	3.198.651
		8 Kecamatan		Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
			1	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
			-	Penyediaan jasa layanan umum kantor			59.384.400	BPJS Tenaga Kerja RT/RW 1.394 orang
		Bagian Kesra Setda Kota Palu					93.038.400	BPJS Tenaga Kerja Pegawai Syara 2.184 orang



Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
	Bagian Kesra Setda Kota Palu				18.957.000		BPJS Tenaga Kerja Petugas Pemulsaran Jenazah 445 orang
	Dinas Kesehatan				47.925.000		BPJS Tenaga Kerja Kader Posyandu 1.125 orang
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				15.250.800		BPJS Tenaga Kerja Kader KB 385 orang
	Dinas Pertanian				66.880.800	56.196.000	BPJS Tenaga Kerja Nelayan 1.327 orang
	Dinas Sosial				1.831.800		BPJS Tenaga Kerja SDM PKH 43 orang
	Dinas Sosial				1.405.800		BPJS Tenaga Kerja TAGANA 33 orang
	Dinas Sosial				1.959.600		BPJS Tenaga Kerja Pekerja Sosial Masyarakat 46 orang

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
	Dinas Lingkungan Hidup				6.552.000		BPJS Tenaga Kerja Pemulung 130 orang
	Dinas Sosial				38.808.000		BPJS Tenaga Kerja Pekerja Disabilitas 770 orang
	Dinas Sosial				5.140.800		BPJS Tenaga Kerja Kusir Dokar & Becak 102 orang
	Dinas Perhubungan		94.742.400	BPJS Tenaga Kerja Juru Parkir 556 orang			
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Belanja Kapitasi 13 Puskesmas, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Jumlah Peserta sebanyak 67.230 orang (APBD Kota Palu) 79.708 PBI Nasional 428 Jiwa PBI Sulteng			
1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
-		Pengelolaah Jaminan kesehatan Masyarakat	32.206.121.000				

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
5.	Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah	Bag. Kesra, Bag. Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		insentif untuk 10 masjid terpencil di Kota Palu	276.000.000	Insentif untuk petugas 46 rumah ibadah
			1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
			- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.478.261.234			
			- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	343.500.000			
		8 Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
			1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.509.200.000	Insetif RT/RW dinaikkan diperuban APBD 2021		

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
<b>PENDIDIKAN</b>							
1.	1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu	Bagian Hukum			Kajian Hukum ( Jukinis/Juklak)		
		Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan Sosial				
			1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
			- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	321.683.000	Data Warga Tidak Mampu		
2.	Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi	Dinas pendidikan dan Kebudayaan			Kajian(Juknis/Juklak) TA 2021, Pelaksanaan APBD TA 2022		
3.	Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan				
		1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Peningkatan dan pembangunan Sarpras		

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000		35 000.000	34.523.500	Pembangunan SD satu atap di Uwentumbu
		- Penambahan Ruang Kelas Baru	510.225.736		535.225.736	474.731.582	Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres 1 Kamonji dan Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tipo
		- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.560.634.967		1.569.528.868	1.524.387.175	pembangunan ruang guru beserta pengadaan perabot ruang guru di 8 SD
		- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.785.034		101 891.133	99.992.875	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di SD Inpres 7 Labuan Baru

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	90.000.000		90 000 000	87.900.000	pengadaan alat musik Marching Band SDN 2 Lere dan SD Inpres 1 Tatura
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
		- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	75.000.000		100.000.000	99.220.000	Perencanaan Pembangunan SMP Negeri 23
		- Pembangunan Laboratorium	1.017.134.490		1.017.134.490	817.705.364	Pembangunan ruang laboratorium beserta pengadaan perabotnya di SMPN 11 dan SMPN 5 Palu
4.	Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan	Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
		- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	18.695.300	Pelatihan	149.226.200	148.226.200	Tim Penguji Kompetensi Pelatihan Bahasa Jepang (SSW)
5.	Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
		1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
		- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.753.700	Penilaian Kinerja Guru (PKG)	41.598.700		
6.	Bus gratis untuk siswa sekolah Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
		1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.216.000	Dukungan Operasional Bus gratis	Lanjutan		Lanjutan
7.	Kepala sekolah magang	Program Pengelolaan Pendidikan					
		1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					
		- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	407.530.000	Rview Perencanaan (Revisi)			
		1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
		- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	79.617.500	Rview Perencanaan (Revisi)			
			<b>82.073.881.912</b>		<b>9.743.839.975</b>		



**BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN**

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	8 Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
			1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.445.269.000	Honorarium padat karya 250 rb/orng	2.633.800.000		Penambahan Honor padat karya	
						731.400.000		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Padat Karya 2 pasang/orang	
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
			1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
			- Pengelolaah Jaminan kesehatan Masyarakat	14.422.927.500	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3			
2.	Badan pelayanan rumah ibadah	Badan kessatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48.540.500	Rapat Kerja FKUB Kota Palu, Fasilitasi Kelembagaan FKUB Kota Palu, Verifikasi dan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat			
		Program Pemerintahan dan kesra					
	Bag. Kesra	1 Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat					
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	654.000.000	Dukungan Insentif pegawai Syara untuk 10 Masjid daerah terpencil			

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
3.	Palu berbagi	Bag. Kesra Setda Kota palu			100.000.000		Pembagian THR kepada petugas penyapu jalan, pemulung, pegawai honor, pegawai syara berupa minuman dan bahan makanan (hasil donasi OPD, PKK, BUMN, dan Pengusaha)
							Bakti sosial di Uwentumbu Kel. Kawatuna berupa bantuan sembako dan uang
		Bagian Hukum Setda Kota Palu		Kajian Perwali Palu Berbagi	346.951.832		Pemberian penghargaan kepada siswa, guru, seniman, dan OPD yang berprestasi dalam rangka HUT Kota Palu ke 43 tahun 2021
4.	Palu religi	Badan Kesatuan Bangsa	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
		- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48.540.500	- Rapat Kerja FKUB Kota Palu - Fasilitasi Kelembagaan FKUB Kota Palu - Verifikasi dan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Ibadat	48.540.500	48.277.625	Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan - Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.445.436.300	- Penyusunan Buku Khotbah Lintas Agama (5 Agama) - Silaturahmi dan Dialog Tokoh Lintas Agama di Rumah Ibadat (5 Agama)	1.403.277.750	1.392.218.325	Kegiatan Lembaga Adat
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
	Bag. Kesra	1 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
		- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.514.711.234	Pelaksanaan Kegiatan/festival/Acara Keagamaan	347.000.000		MTQ tingkat Kota Palu di Kecamatan Palu Selatan

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output	
5.	Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya	Badan Kesatuan Bangsa	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
			1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
			- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.445.436.300	Fasilitasi Kelembagaan Adat, Pengadaan Pakaian Adat , Pengadaan Alat Kesenian, Sosialisasi Penguatan Penyelesaian Perkara/Kasus Adat	1.403.277.750		

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah -	21.233.750	- Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) - Rakor Lembaga Adat			
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	91.505.000	Pengadaan Alat Musik Untk Komunitas	118.956.500		engadaan Alat Musik untuk Forum Anak Besusu Timur dan komunitas Seni Bantaya



Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
			Program Pengembangan Kebudayaan					
			1 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Kegiatan Libu Mbaso			
6.	Palu Ramah Difabel	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial					
			1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan pengemis di Luar Panti					
			- Penyediaan Permakanan	151.127.900				

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
		- Penyediaan Alat Bantu	98.110.000		1.900.000	1.900.000	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	570.144.050		522.533.150		
		- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	35.458.100				
	Bappeda	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Musrenbang Inklusif			
		1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
		- Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	154.000.000		233.419.075		

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/Output
7.	Event olahraga tahunan Kota Palu	Dinas pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
			1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event tingkat Kabupaten/Kota	425.435.200	Penyelenggaraan Lomba Olahraga (	1.989.510.250	-Porseni - Open Turnamen Liga Ramadhan Wali Kota Cup 2021 - POPDA - Liga Ramadhan Wali Kota Cup 2021 - Basket Ball Wali Kota Cup - Perlengkapan Pendukung Olahraga	
8.	Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu	Dinas pemuda dan Olahraga			Pendataan komunitas anak muda di Kota Palu		Penetapan Komunitas-komunitas Anak Muda di Kota Palu 74 Kelompok	
				35.571.875.334	APDB	5.701.710.250		
					CSR	446.951.832		

## BIDANG BIROKRASI DAN KEUANGAN

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Audit APBD oleh auditor independent	Inspektorat	Program Penyelenggaraan pengawasan					
			1 Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan tertentu					
			- Pengawasan dengan Tujuan tertentu	248.935.000	Koordinasi dengan Lembaga Audit dengan tujuan tertentu			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			221.000.000	Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP	
					227.674.400	181.957.600	Kegiatan Probitiy Audit	
						377.165.800	212.971.000	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Perpajakan

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output	
2.	E – Government/Smart City	Bappeda	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah				
			1 Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah						
			- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	307.774.700		316.864.175	316.269.975	E-Planning/E-Budgeting dan SIPD	
			- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	644.836.200		515.250.650	495.471.778	E-Data Base dan Forum Satu Data	
			- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	494.360.700					
		Dinas Kominfo	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Penyiapan Sarana dan Prasarana serta SDM				
			1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3.127.697.400		2.870.700.000	2.870.700.000	Sewa Bandwidth untuk OPD dan kelurahan	

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
		- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	51.200.890		574.200.000	-	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika - Pembuatan Master Plan Smart City
					1.488.300.000	-	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika - Pembuatan Smart City Platform
					45.000.000	45.000.000	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika Pembaruan Website palukota.go.id
		- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	66.692.500				

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
		Dinas Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
			- Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					
			- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.158.300.000	Revisi			
3.	QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal		Fasilitasi Layanan perizinan			
			1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
			- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	176.861.275		221.683.275	221.683.275	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
			1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.664.330				
4.	One touch info Kota Palu	Dinas Kominfo	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Penyediaan data dan Informasi serta Peningkatan Kapasitas SDM, dan Publikasi			
			1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;	42.858.750		70.908.750	64.778.500	Data Statistik OPD Sekota Palu dan Tim Forum Satu Data
			- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	11.571.500				



Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					
			1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	128.883.800				
5.	<b>Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi</b>	Bag. Organisasi Setda Kota Palu			kajian			
6.	<b>Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer</b>	BKPSDMD	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.517.600	4.292 orang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan	182.839.200		4.292 orang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan
						187.075.000		Perekrutan Pegawai Kontrak Daerah 270 orang

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
7.	ASN magang nasional	BKPSDMD			Kajian penetapan ASN Magang (APBD-P 2021)	32.000.000		Fasilitasi ASN Magang 15 orang - Damkar di DKI Jakarta - Bappeda di Bappenas
8.	Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan Kecamatan	Program pendaftaran penduduk 1 Pelayanan pendaftaran penduduk - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	204.677.500 111.900.000	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelayanan kependudukan	204.677.500 111.900.000	204.677.500 111.900.000	Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, KIA, Akta Lahir, Akta kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah/Datang Pelayanan keliling Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian dan perkawinan)

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi keuangan	Ket/Output
		Pencatatan, Penatausahaan dan - Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4.433.750		13.387.500	13.237.500	pencatatan pernikahan massal
		Program Pencatatan sipil					
		1 Pelayanan pencatatan sipil					
		Pencatatan, Penatausahaan dan - Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.087.500				
		- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	178.021.250		191.871.250	181.671.250	Sosialisasi Akta kelahiran kepada pengurus PKK dalam rangka pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
			<b>7.608.274.645</b>		<b>7.852.497.500</b>		

## BIDANG LINGKUNGAN

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Palu Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Penunjang Pencapaian			
			1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
			- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	665.093.339				
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					
			1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
			- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.752.361.850	Penanaman dan pemeliharaan pohon	8.240.592.500	7.698.185.000	Biaya operasional Palu Adipura
			- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	693.200.510	Penataan Pohon Kota			

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
		Program Pengelolaan Persampahan					
		1 Pengelolaan Sampah					
		- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.368.192.020	Honorarium Tenaga Pengangkut sampah dan Oprasional	21.091.749.450		Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Persampahan
					12.000.000.000	12.000.000.000	Pengadaan mobil operasional pengangkut sampah 48 unit
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Perbaikan Lahan TPA	28.000.000.000		Perbaikan sarana dan prasarana TPA sumber dana UNDP
				Pembentukan Tim Adipura Kota Palu			Pembentukan Perempuan Penggerak Adipura

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
2.	Palu Terang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					
			1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
			- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	50.000.000	Pemasangan Lampi Dusun Uwentumbu (70 KK)			
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	34.104.545.500	Operasional Pemeliharaan dan Pembayaran PJU	85.945.000.000		Pelaksanaan kontrak kerja Pemerintah Kota Palu dengan PT. Solarance Ledindo untuk 11.468 titik jangka waktu 3 tahun
3.	Palu Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
			1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
			- Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.752.361.850	Penanaman dan pemeliharaan pohon	2.760.792.387	2.612.383.756	
			- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	693.200.510	Penataan Pohon Kota	4.069.781.210	2.151.771.655	
4.	Palu Ramah	Bag. Hukum			Kajian Indikator Palu Ramah			
5.	CSR Forum	Bag. Hukum			Kajian Indikator CSR			
6.	Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center	BPBD	Program Penanggulangan Bencana					
			1 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
			- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	282.275.200	Operasioanal PUSDALOPS	386.289.200	381.559.900	dibentuk Tim Reaksi Cepat Jaga Palu

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	110.285.000	Pengadaan Sarpras Pendukung	134.775.000	130.773.190	
		- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.590.000				
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	656.438.300	Rekayasa Jalan			



Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
			1 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.889.166.500	1.785.870.400	
		Sat. Pol.PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					
			1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	1.034.330.000	Operasional Kegiatan	3.510.000.000	3.463.750.000	

Program Pembangunan	OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum -	324.000.000	Linmas			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Dinas Kesehatan	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	30.800.000	Analisis dan Penyelidikan	34.317.779.855	21.097.307.770	
	Dinas PU	Program Penyelenggaraan Jalan					
		1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					

Program Pembangunan		OPD Penanggung jawab	Prog Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Ket/Output	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi keuangan	Ket/O
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	5.205.349.589	Pemeliharaan Jalan-Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	6.256.743.589	6.206.298.704	
		Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana					
			1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
			- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	111.187.500		165.600.000	124.200.000	
7.	Kelurahan mantap 2 miliar	Bag. Pemerintahan Setda Kota Palu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
			1 Administrasi Tata Pemerintahan					
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	529.149.920	Lomba Kelurahan(pembuatan Juknis dan Juklak Lomba Kelurahan MANTAP )			
					Pelaksanaan TA 2022			
				<b>60.382.361.088</b>		<b>208.768.269.691</b>		

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1. Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan merata**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00%, Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -4,43 % dan Tahun 2021 tumbuh mencapai 5,97 %. Meskipun secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu tumbuh 5,97%, namun beberapa sektor yang tumbuh positif seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan social perlu terus untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%, selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020 (BPS,2020, diolah).

Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Palu meningkat dari 6,80 persen (Tahun 2020) menjadi 7,17 (Tahun 2021). Secara absolut, jumlah penduduk miskin Tahun 2021

mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yakni dari 26.890 jiwa menjadi 28.600 jiwa. Raihan angka kemiskinan ini secara konsisten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada diangka 13 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,71 persen pada tahun 2021. Fakta ini juga menggambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termaksud dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang menggambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukkan penurunan di tahun 2021, yaitu 0,86, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angkanya sedikit turun dari 0,22 di Tahun 2020, menjadi 0,2 di Tahun 2021.

## **2. SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing.**

Keberadaan sumberdaya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isyu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang srategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor

sumberdaya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumberdaya yang adauntuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penanggulangan dimasa tanggap darurat. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia, ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan

khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan kerja. Capaian IPM Kota Palu dalam dua tahun terakhir (Tahun 2020 dan 2021) kategori “sangat tinggi”, yaitu angka 81,47 di Tahun 2020 dan 81,70 di Tahun 2021, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup, angka tersebut di Kota Palu menunjukkan peningkatan dari 71.04 tahun di Tahun 2020 menjadi 71,09 tahun pada Tahun 2021.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah, untuk angka harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,23 tahun di Tahun 2020, naik menjadi 16,28 tahun pada Tahun 2021, demikian juga pada angka rata rata lama sekolah, meningkat diangka 11,61 tahun pada Tahun 2020 menjadi 11,72 tahun di Tahun 2021.

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2021 sebesar 201.083 jiwa sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 92,39 % pada Tahun 2021. Tingginya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh turunnya angka atau jumlah pengangguran menjadi 15.3006 jiwa dari Tahun 2020 sebesar 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,61% pada Tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 8,38%.

### **3. Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan Inklusif**

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujuduan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau

publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, smart dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumberdaya pembiayaan yang mendukung dalam kategori mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memiliki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

#### **4. Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

## **5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan produktif kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, etika dan budaya organisasi serta visi strategis.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.



Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan yang bergerak menyelenggarakan pemerintahan di Kota Palu Triwulan IV tahun 2021 memiliki permasalahan umum yaitu:

1. Adanya kenaikan beberapa harga barang sehingga kegiatan tidak terealisasi dan direvisi di perubahan menyesuaikan harga baru.
2. Terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya karena terkendala Covid-19.
4. Unsur Kewilayahan ( terdiri dari 8 Kecamatan) , Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan perlu penetapan titik lokasi yang telah disepakati bersama sehingga tidak terjadi pemindahan lokasi (revisi objek) yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sedangkan pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perlu verifikasi

yang lebih cermat terhadap kelompok penerima manfaat KUBE agar tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu.

### **2.3.2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu**

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

**Tabel 2.117**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

No	Urusan	Data	Permasalahan
1	<b>Pendidikan</b>	2021 : Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 48,73%	Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi
		2021 : SMP akreditasi A sejumlah 21 sekolah, B sejumlah 19 sekolah, dan C sejumlah 5 sekolah.	Masih terdapat sekolah yang terakreditasi standar
		2021 : Jumlah kerusakan SMP pasca bencana sejumlah 1 sekolah.	Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana
		APM Pendidikan Dasar Tahun 2021 SD : 79,91% SMP : 65,95% PAUD : 19,95%	Masih terdapat Standar Pelayanan Minimal pendidikan Kota Palu yang belum terpenuhi (Permendikbud Nomor 32

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Angka Putus Sekolah Tahun 2021 SD : 0,03 % SMP : 0,07%	Tahun 2018)
2	<b>Kesehatan</b>	2021 : Jumlah dokter spesialis : 40 (Berdasarkan hasil FGD kekurangan dokter spesialis urologi, anak, anastesi)	Beberapa dokter spesialis belum diakui status keahliannya di institusi kepegawaian
		2021 : Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar :6, Madya : 6, tidak terakreditasi : 2	Peningkatan akreditasi puskesmas
		2019 : Sampah : 1,84 (buruk) Air limbah : 1,62 (buruk) Drainase : 0,25 (sangat buruk)	Peningkatan cakupan indeks sanitasi
		2021 : Prevalensi wasting Kota Palu : 3,9% Sulteng : 6,6%	Prevalensi wasting(kurus) pada anak balita
3	<b>Pekerjaan Umum</b>	2020 Panjang drainase : 1321,5 km Kondisi baik : 903,6 km Kondisi sedang : 78,2 km Kondisi buruk : 339,7 km  2021 Panjang drainase : 1327,6 km Kondisi baik : 1.062,1 km Kondisi sedang : 66,4 km Kondisi buruk : 199,14	Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal

No	Urusan	Data	Permasalahan
		km	
		<p>2020 :</p> <p>PDAM Donggala kapasitas terpasang 185,62 l/dt Kapasitas produksi 154,42 l/dt Sambungan rumah 14527 Tingkat layanan 19,55%</p> <p>2021 :</p> <p>PDAM Donggala kapasitas terpasang 185,62 l/dt Kapasitas produksi 154,42 l/dt Sambungan rumah 12601 Tingkat layanan 40,09%</p> <p>PDAM Palu kapasitas terpasang 60 l/dt Kapasitas produksi 47 l/dt Sambungan rumah 8652 Tingkat layanan 18,09%</p> <p>Target 100% air bersih perpipaan, capaiannya 30,63%</p>	<p>Akses layanan air bersih perkotaan belum optimal.</p>
		<p>2019 :</p> <p>Rasio panjang jalan : 0,145 (capaian : 65,91%) 2021 :</p> <p>Rasio panjang jalan: 2,28 (capaian 94,30%)</p>	<p>Belum optimalnya rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk</p>

No	Urusan	Data	Permasalahan
4	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	Rumah tangga kumuh 2020 : 11.725 KK 2021 : 1.926 KK	Belum tersedianya database yang lengkap terkait kawasan kumuh
		Luasan kawasan kumuh 2020 : 266,47 Ha 2021: 248,47 Ha	Minimnya alokasi anggaran untuk pengentasan kawasan kumuh
		Rumah tidak layak huni 2020 : 11,40% (8.316 rumah) 2021 : 1,59% (1.177 rumah)	Masih rendahnya partisipasi swadaya masyarakat
5	<b>Penataan ruang dan pertanahan</b>	Target RTH publik 20% dari luas kawasan perkotaan/budidaya	Luasan RTH publik kawasan Kota (kawasan budidaya ) belum terpenuhi
		Untuk pemenuhan RTH Publik Tahun 2020 : 18,48% Tahun 2021 : 17,12 %	
		Luas RTH ( kawasan lindung dan budidaya): 11.720,35 Ha (32,83%)(target 30,00%).	
		2019 : Ketaatan terhadap RTRW :65,62% 2021 : Ketaatan terhadap RTRW :81,56%	Kurangnya ketaatan terhadap RTRW (%)
		2020 : Aset daerah yang sudah tersertifikasi : 11,88%	Belum optimalnya sertifikasi pertanahan aset daerah. Usulan penerbitan sertifikat aset tanah Pemda dilaksanakan oleh Dinas Penataan ruang dan Pertanahan Kota Palu bidang urusan pertanahan,

No	Urusan	Data	Permasalahan
			<p>namun penerbitan sertifikat aset tanah Pemda menjadi wewenang Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Palu. Dengan adanya lintas koordinasi antar sektor mempengaruhi pencapaian penerbitan sertifikat, karena adanya proses teknis maupun proses administrasi. Adanya perbedaan data fisik tanah di lapangan yang telah diukur dan data yuridis yang tertuang dalam alas hak. Adanya beberapa aset Pemda yang masih di klaim oleh masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian oleh Pemda (sengketa). Banyak asset pemda yang bukti dokumen kepemilikannya tidak ditemukan.</p>
6	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP, BPBD, Damkar)</b>	<p>2020 : Kerusakan bangunan : Rusak berat : 11.643 unit Sedang : 16.050 unit Ringan : 21.354 unit Hilang : 6.522 unit</p>	<p>Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian pasca bencana</p>
		<p>2020 : Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 60%</p> <p>2021 : Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 53%</p>	<p>Belum terbangunnya sistem pencegahan kebakaran</p>

No	Urusan	Data	Permasalahan
7	<b>Sosial</b>	Tahun 2021 : Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 154.991 jiwa Jumlah penduduk miskin : 154.991 jiwa	Belum optimalnya program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan di perkotaan
		Tahun 2021 : Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 6 jiwa	Belum optimalnya pembinaan penyalahgunaan Napza
		Tahun 2021 : Orang dengan HIV/AIDS : 8 jiwa	Belum optimalnya penanganan penderita ODHA
		Tahun 2021 : Mantan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) : 51 jiwa	Belum optimalnya penanganan ODGJ
		Tahun 2021 : Penyandang tuna netra : 112 jiwa Penyandang tuna rungu : 35 jiwa Penyandang tuna wicara : 75 jiwa Penyandang tuna rungu wicara 33 jiwa Penyandang tuna grahita : 125 jiwa Penyandang tuna daksa : 186 jiwa Penyandang cacat ganda : 153 jiwa	Belum optimalnya pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada tuna netra, rungu, wicara, rungu wicara, grahita, daksa dan cacat ganda
		Tahun 2021 : Gelandangan dan pengemis : 122 jiwa Anak jalanan : 21 jiwa Anak terlantar : 501 kasus Lansia terlantar : 122 jiwa Disabilitas terlantar : 0 kasus Mantan narapidana : 40 kasus Tuna susila : 187 jiwa	Belum optimalnya pembinaan pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada gelandang dan pengemis serta anak jalanan

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Bayi terlantar : 2 kasus	

### 2.3.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.118**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

No.	Urusan	Data	Permasalahan
1	<b>Tenaga Kerja</b>	Tingkat pengangguran terbuka kota palu tahun 2018, 5,81%, meningkat menjadi 6,32% ditahun 2019 dan terus mengalami peningkatan ditahun 2020 menjadi 8,38% 2021 : 7,61%	Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga profesional
2	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	Kekerasan terhadap perempuan: 2017 : 92 kasus 2018 : 79 kasus 2019 : 85 kasus 2020 : 70 kasus	Kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat



No.	Urusan	Data	Permasalahan
		2021 : 80 kasus	
		Keterwakilan perempuan dalam parlemen : 2014-2019 : 5 orang 2019-2024 : 4 orang Standar 30% dari 35 kursi DPRD Kota Palu	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen
		Kekerasan terhadap anak : 2017 : 35 kasus 2018 : 33 kasus 2019 : 59 kasus 2020 : 63 kasus 2021 : 65 kasus	Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak
		Anak yang berhadapan dengan hukum : 2017 : 35 kasus 2018 : 32 kasus 2019 : 30 kasus 2020 : 20 kasus 2021 : 32 kasus	Masih tingginya anak yang berhadapan dengan hukum
		Pernikahan Dini : 2020 : Jumlah pernikahan dini : 179	Masih tingginya angka pernikahan dini
<b>3</b>	<b>Pangan</b>	Nilai skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018 dan 2019 masih 90,4% 2020 : 89,6%	Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		Capaian data tahun 2018 dan 2019 sebesar 2090 Kkal/Kap/Hari  2020 : 2.093,7 Kkal/Kap/Hari	Belum optimalnya konsumsi energi penduduk per kapita per hari.
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup dan kesehatan</b>	Persentase sampah yang tertangani Tahun 2020 sebesar 90,91%	Pengelolaan persampahan Kota belum optimal
		Thn 2021 Terdapat 44 unit RTH dengan Luas	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		7.603,74 Ha	belum Terpenuhi
6	<b>Kependudukan dan catatan sipil</b>	Tahun 2019 : Masih terdapat 1.334 jiwa yang belum memiliki E-KTP Tahun 2020: 327 jiwa Tahun 2021: 287 jiwa	Masih terdapat Penduduk Belum memiliki identitas kependudukan
		Rasio anak (0-18 Tahun) yang ber Akte Kelahiran Tahun 2020 : sebesar 82,81% Tahun 2021 : sebesar 90,67%	Masih terdapat Rasio anak (0-18 Tahun) yang belum ber Akte kelahiran
7	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	Tahun 2020 sebanyak 46 LPM	LPM Belum berfungsi secara optimal
		Tahun 2021: Presentase PKK Aktif sebesar 100%	PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
8	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Rasio akseptor KB Tahun 2019: 0,81% Tahun 2020: 0,76% Tahun 2021 : 0,81 %	Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB
		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 : 1,71 % Tahun 2020 : 1,71 % Tahun 2020 : 1,71 %	Masih Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
		Jumlah Akseptor KB tahun 2019 : 46.162 tahun 2020 : 45.895 tahun 2021 : 49.756	Belum optimalnya pelayanan kontrasepsi

No.	Urusan	Data	Permasalahan
9	<b>Perhubungan</b>	<p>Jumlah angkutan kota : 2020 : 468</p> <p>Jumlah angkutan kota : 2021 : 74</p>	<p>Minat masyarakat semakin rendah untuk menggunakan angkot dalam bepergian, Keberadaan angkutan online yang memberikan pelayanan yang nyaman , kelaikan jalan kendaraan serta kenyamanan angkot untuk penumpang sangat rendah.</p>
		<p>2021: Jumlah titik parkir : 200 Yang sudah terintegrasi dengan e-parking sebanyak 50 titik</p>	<p>Belum optimalnya manajemen perpajakan di Kota Palu</p>
10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<p>2020 dan 2021 : Jumlah website : 13 OPD</p> <p>Jumlah OPD yang terintegrasi dalam system informasi belum ada</p>	<p>Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai <i>Good Governance</i> , Aplikasi khusus yang ada disetiap OPD belum terintegrasi, karena belum ada system informasi khusus untuk mensupport dan harus ada audit dulu apakah open source atau tidak</p>
		<p>2021 : Terdapat 44 unit RTH Tahun 2018 tersedia 2 unit Tahun 2020 : Tersedia 2 unit di Taman GOR dan Vatulemo Tahun 2021 : Tersedia 21 unit di 20</p>	<p>Belum tersedianya untuk pemanfaatan TIK di Ruang Terbuka Hijau (Ruang Publik)</p>

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Kelurahan dan vatulemo	
11	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	Tahun 2018 Jumlah Koperasi Primer sebanyak 270 Buah dan dinyatakan tidak aktif sebanyak 100 Buah.  Tahun 2019 koperasi aktif : 167 unit Jumlah : 215 unit  Tahun 2020 koperasi aktif : 84 unit Jumlah : 215 unit  Tahun 2021 koperasi aktif : 89 unit Jumlah : 219 unit	Menurunnya status koperasi aktif disebabkan karena usaha koperasi yang terdampak bencana tahun 2018 dan belum pulih terdampak lagi pandemi covid-19, kurangnya dukungan anggaran pembinaan dan kurangnya SDM pembina yang memadai.
		2020 : Jumlah UMKM : 41.750 2021 : Jumlah UMKM : 30.198	UMKM Belum berkembang dengan baik.
12	<b>Penanaman Modal dan Perizinan</b>	2020 : Jumlah Investor Berskala dan Nasional (PMDN/PMA) : 147	Belum updatenya data dan peta potensi investasi Kota Palu.
13	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>	Jumlah organisasi pemuda sebanyak 378 organisasi di Tahun 2021	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda dalam peningkatan peran pemuda di masyarakat
		Jumlah organisasi olahraga Tahun 2021 sebanyak 205	Belum optimalnya pembinaan yang di lakukan oleh

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		<p>organisasi. Organisasi yang melakukan pembinaan sebanyak 62 organisasi atau sekitar 30% dari jumlah organisasi yang ada.</p>	<p>organisasi olahraga dalam menciptakan atlet berprestasi</p>
		<p>Tahun 2021:  Lapangan Voly sebanyak 70 unit.  Lapangan Basket sebanyak 14 unit.  Lapangan Tenis sebanyak 15 unit.  Lapangan futsal sebanyak 33 unit.  Stadion Sepak Bola sebanyak 2 unit.  Stadion Atletik 1 unit.  Lapangan Bulu tangkis sebanyak 37 unit.  Gedung olahraga sebanyak 3 unit.  Rumah Biliar sebanyak 12 unit.  Lapangan olahraga terbuka sebanyak 6 unit.</p>	<p>Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas</p>
14	<b>Statistik</b>	<p>Persentase keterisian data tahun 2020 : 75%</p> <p>Persentase keterisian data tahun 2021 : 80%</p>	<p>Belum optimal keterisian data OPD karena kurangnya perhatian OPD dalam menginput data statistik; Kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya SDM dalam mengolah data</p>
15	<b>Persandian</b>	<p>Kategori pemilahan kerahasiaan dokumen negara : cukup</p>	<p>Belum optimalnya tugas dan fungsi kelembagaan persandian</p>

No.	Urusan	Data	Permasalahan
17	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019 : 60 unit Tahun 2020 : 141 unit Tahun 2021 : 185 unit	Rendahnya minat baca dan koleksi bahan pustaka
18	Kearsipan	Jumlah pengelola arsip  Tahun 2020 : 13 orang Tahun 2021 : 13 orang  Jumlah arsip dinamis 340 dokumen terduplikasi	Masih terbatasnya SDM ahli dan trampil di bidang kearsipan.

### 2.3.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

**Tabel 2.119**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan**

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	<b>Perikanan dan Kelautan</b>	Data Tahun 2021 : Kawasan perikanan budidaya sebesar 20,33 Ha. Produksi perikanan budidaya sebesar 154,06 Ton. Produksi olahan perikanan sebesar 8.802 Ton. Produksi perikanan tangkap sebesar 1.111 Ton. Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan sebesar 63 kelompok. Jumlah pemasar hasil perikanan sebesar 800 orang.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan.
			Belum optimalnya dukungan sarpras bagi nelayan pasca bencana.
			Belum optimalnya fungsi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk mensuplai kebutuhan benih ikan air tawar

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Jumlah pembudidaya ikan sebesar 448 orang. Luas lahan potensi budidaya 0,55 Km <sup>2</sup> . Jumlah BBI UPTD tersedia 1 unit	
2	<b>Kebudayaan dan Pariwisata</b>	Jumlah kunjungan wisata nusantara Tahun 2020 : 109,213 orang Tahun 2021 (s/d bln juni) : 25,387 orang  Jumlah kunjungan wisata mancanegara Tahun 2020 : 216 orang Tahun 2021(s/d bln juni) : 1.907 orang	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata/agrowisata
	<b>Kebudayaan</b>	PP No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2011 -2025	Belum tersedia Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Palu (RIPARKOTA)
	<b>Kebudayaan</b>	Masih kurangnya SDM pelaku kebudayaan yang terlatih.	Peningkatan <i>Skill</i> pelaku kebudayaan
3	<b>Pertanian</b>	Kawasan perkebunan sebesar 4.893,97 Ha. Kawasan tanaman pangan sebesar 427,45 Ha. Produktivitas beberapa jenis komoditi tanaman pangan Tahun 2020 : 341 ton/Ha.	Belum Optimalnya penyediaan dan pengelolaan pertanian perkotaan (Agrowisata).
4	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	Jumlah izin dan produksi sumber daya mineral	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penanganan terhadap dampak lingkungan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
5	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>	<p>2020 : Jumlah Pasar Harian sebanyak 6 pasar Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 4 pasar.</p> <p>2021 : Jumlah Pasar Harian sebanyak 5 pasar (manonda, masomba, tavanjuka, bambaru, talise) Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 5 pasar (Vinase, mamboro, lasoani, petobo, silae)</p> <p>2019 : Persentase retribusi pasar Tahun 2019 adalah 89%.</p> <p>Persentase retribusi pasar Tahun 2020 : 93% Persentase retribusi pasar Tahun 2021 : 85%</p>	<p>Belum optimal pengelolaan retribusi pasar Persentase retribusi pasar thn 2021 mengalami penurunan karena pasar bambaru di revitalisasi</p>
		<p>Jumlah IKM yang aktif ( 8 kecamatan) tahun 2021 : 1.189 IKM, terdiri dari : 662 kategori low produksi 492 kategori middle produksi 30 IKM kategori high produksi</p> <p>Industri pengolahan/ <i>Manufacturing</i> terhadap PDRB ADHB</p>	<p>Belum optimalnya penanganan sektor industri khususnya IKM dibidang SDM, produksi dan pemasaran.</p>



No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Tahun 2020 naik 0,3%, sedangkan ADHK naik sebesar 0,25%.	
		Laporan Audit Kinerja KEK (Diisi Oleh Tim Teknis)	Belum optimalnya manajemen dan kewirausahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

#### 2.3.2.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahan berkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

**Tabel 2.120**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang**

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	<b>Perencanaan</b>	Jumlah OPD Kota Palu sejumlah 41 OPD. Jumlah OPD yang memanfaatkan aplikasi e-planning secara aplikatif sejumlah 2 OPD atau 4,65%. Jumlah OPD yang belum memanfaatkan secara aplikatif sebesar 95,35%.	Belum optimalnya pemanfaatan <i>e_planning</i> dalam perencanaan pembangunan daerah
		Jumlah Program dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 terdapat 169	Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		<p>program RKPD yang konsisten terhadap 205 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 82,43 % (Konsistensi Tinggi);</p> <p>Jumlah Program pada Perubahan RKPD (P - RKPD) Kota Palu Tahun 2021 yang penyusunannya dilaksanakan pada Tahun 2021 telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 169 Program dan jumlah Program dalam penjabaran APBD terdiri dari 168 Program.</p> <p>Rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu pada Triwulan IV Tahun 2021 secara fisik dicapai sebesar 94,57 % atau capaian (sangat tinggi) , dan capaian realisasi anggaran/keuangan sebesar 90,52 % atau capaian (tinggi).</p>	<p>perencanaan.</p>

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Seluruh OPD se-Kota Palu kurang memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan khusus terkait pengelola data.	Belum tersedianya kompetensi SDM spesifik pengelola data
			Belum optimalnya penyediaan <i>updating</i> data sebagai basis perencanaan
2	<b>Keuangan</b>		Belum optimalnya pengelolaan <i>e_budgeting</i>
			Belum optimalnya tata kelola aset daerah
		Data Aset Daerah	
3	<b>Pendapatan</b>	Capaian Penerimaan Retribusi daerah kota palu, tahun 2020 : 106,84% Kontribusi PAD tahun 2020 terhadap pendapatan daerah sebesar 19,09 persen.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu
		Kontribusi PAD Tahun 2021 terhadap pendapatan daerah sebesar : sebesar 24,73%	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
			Belum terintegrasinya sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai lembaga pengelola pajak dan retribusi dengan lembaga perbankan
			Belum Optimalnya kinerja masing-masing bidang sebagai sumber penghasil pengelola pendapatan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
4	<b>Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah</b>	Persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional: Tahun 2018 :9,6% Tahun 2019 :5,8% Tahun 2020 :1,3% Tahun 2021 :0,9%	- Timbangnya proporsi sumberdaya aparatur daerah yang telah mengikutui bimbingan teknis dan non teknis dan Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang di alokasikan
			Rendahnya proporsi jumlah pegawai yang bekerja sesuai kompetensi
		Jumlah pegawai yang mendapat bantuan biaya pendidikan Tahun 2018 : 77 siswa Tahun 2019 : 78 siswa Tahun 2020 : 0 (tdk ada) Tahun 2021 : 0 (tdk ada)  (updating data, diisi oleh tim teknis)	Relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur sipil daerah
5	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	Perwali no. 32 tahun 2017	Belum tersedianya Rencana Induk Penelitian Kota Palu
		Tidak ada peneliti fungsional balitbangda kota palu	Belum optimalnya kompetensi SDM bidang penelitian
		Belum ada	Belum terbentuknya Dewan Riset Daerah Kota Palu
		Belum ada inovasi OPD yang diimplementasikan	Rendahnya proporsi jumlah inovasi yang terimplementasikan yang dilakukan oleh instansi pemerintah

No.	Bidang	Data	Permasalahan
6	<b>Pemerintahan Umum</b>	Penghargaan yang diterima pemerintah Kota Palu : Tahun 2017 : 5 penghargaan Tahun 2018: 8 penghargaan Tahun 2019 : 8 Penghargaan Tahun 2020 : 6 Penghargaan Tahun 2021 : 18 Penghargaan	Masih rendahnya jumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi pencapaian kinerja pembangunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 : - Kota Palu 79,72 poin (kuning) - Pendidikan dasar 87,00 poin (baik) - Puskesmas 79,04 poin (baik) - RSUD Anutapura 74,62 poin (baik) - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 95,80 poin (sangat baik) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 80,08 poin (baik)	Belum optimalnya capaian standar indeks kepuasan masyarakat
7	<b>Inspektorat</b>	Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2020: Level 2 (penuh)  Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2021 : Level 2 (penuh)	Belum optimalnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah  Sesuai Hasil Penilaian BPKP Pusat di Bulan Desember 2021 Inpektorat Kota Palu sudah mencapai Level 3

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			namun belum disampaikan dengan Surat Tertulis/Formal
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2020 : 46 %	Belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal OPD dalam upaya preventif setiap temuan
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2021 : 79 %	Sisa rekomendasi 48, dari Sisa Rekomendasi Itu, 38 dalam proses dan 10 belum diproses
		<p>Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP / Pejabat fungsional ) thn 2020 : Auditor : 22 orang 2021 : Auditor : 33 orang</p> <p>Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) : 10 orang  2021 : 13 orang</p>	Masih kurangnya SDM APIP
		<p>Jumlah anggaran dan pembinaan pengawasan Inspektorat tahun 2021 : RP. 10.785.782.385 (70% untuk gaji, 30% operasional)</p> <p>Jumlah hasil pemeriksaan inspektorat daerah kota palu tahun 2020 : 29 OPD  2021 : 40 OPD</p>	Belum proporsional jumlah anggaran dengan kinerja APIP

No.	Bidang	Data	Permasalahan
8	<b>Kesbangpol</b>	Data ratio 2019-2021 (Jumlah Linmas dan Pol PP dan jumlah penduduk ) : Jumlah linmas 2019: 108 2020: 108 2021: 105  Jumlah Pol PP : 2019: 452 2020: 492 2021: 469  Jumlah penduduk : 2019: 371.365 2020: 372.113 2021: 373.857	Masih rendahnya ratio Linmas dan Pol PP terhadap jumlah penduduk.
		Data kelembagaan masyarakat dan ormas 2021 : 49	Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat untuk antisipasi dini berbagai konflik SARA dan penyebaran paham radikalisme

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.



### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021**

#### **a. Struktur Ekonomi**

Setelah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga ke angka -4,54 yang merupakan dampak pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, Kota Palu berupaya bangkit pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh ke angka 5,94. Pertumbuhan tersebut didorong oleh 17 sektor lapangan usaha yang kembali memulai trend positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Tahun 2021 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 26.135.980 juta. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 8,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 24.889.981,47 juta dengan selisih sebesar Rp. 1.960.090,1 juta.

Berdasarkan data yang dirilis BPS 4 Sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu sektor Konstruksi (19,30%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (14,53%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (10,45%) dan informasi dan komunikasi (9,89%). Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya berada pada rentan 0,9-7,6%. Diantara 13 sektor tersebut 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,13%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (0,30%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (0,94%), dan sektor jasa lainnya (0,93%).

Perkiraan kondisi ekonomi daerah Tahun 2022 masih akan melanjutkan progres positif dengan target pertumbuhan hingga 3,21%. Stimulan terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Palu, tentunya upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kota yang bersumber pada sektor jasa. Selain sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga besar kontribusinya terhadap PDRB. Mengglihatnya sektor perdagangan tersebut juga didorong oleh

peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dari peningkatan pengeluaran per kapita yang pada Tahun 2021 sebesar Rp 14,89 Juta per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**  
**(Jutaan Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	644.506	662.060	670.096	659.801	665.490
		858.145	921.711	973.764	974.147	1.001.660
2	Pertambangan dan Penggalian	1.008.258	1.014.918	1.166.936	923.844	990.320
		1.421.139	1.451.687	1.808.869	1.472.082	1.587.270
3	Industri Pengolahan	1.179.481	1.180.608	1.149.779	1.131.203	1.168.590
		1.540.744	1.607.913	1.571.544	1.588.989	1.695.980
4	Pengadaan Listrik dan Gas	28.671	30.780	31.424	31.750	33.380
		25.716	29.023	31.276	31.852	33.820
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48.629	50.615	49.004	48.565	50.920
		58.774	64.193	68.152	71.860	77.290
6	Konstruksi	2.044.265	2.216.300	2.735.278	2.655.143	2.780.650
		3.267.247	3.724.379	4.665.252	4.692.048	5.045.060
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.504.427	1.547.307	1.590.899	1.473.641	1.675.810
		2.034.442	2.220.024	2.485.642	2.344.665	2.732.330
8	Transportasi dan Pergudangan	1.357.741	1.438.204	1.420.453	914.367	990.820
		1.950.205	2.198.600	2.407.804	1.556.080	1.717.230
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	160.689	160.878	148.315	127.796	148.080
		234.647	249.006	237.578	208.652	248.750
10	Informasi dan Komunikasi	1.471.406	1.597.988	1.755.683	1.915.374	2.016.540
		1.752.796	1.994.364	2.288.772	2.465.361	2.584.280
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	935.348	945.436	897.408	962.382	1.054.560
		1.225.842	1.267.975	1.299.037	1.390.908	1.552.980
12	Real Estate	385.885	400.804	387.980	389.356	402.680
		515.581	565.959	568.689	576.888	616.330
13	Jasa Perusahaan	172.175	179.578	188.654	182.865	187.890
		239.389	263.959	279.259	275.318	288.150
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.904.645	2.055.219	2.138.074	2.169.956	2.273.120
		2.761.360	3.240.726	3.447.844	3.563.721	3.796.790
15	Jasa Pendidikan	1.161.306	1.209.404	1.201.432	1.174.433	1.196.090
		1.715.516	1.898.137	1.929.051	1.909.814	1.978.530
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	429.233	480.719	514.517	552.662	591.510
		613.732	702.124	751.762	822.901	937.300
17	Jasa lainnya	149.140	152.909	156.358	154.339	159.140
		200.745	219.105	232.077	230.605	242.230
<b>PDRB</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>	<b>14.585.805</b>	<b>15.323.730</b>	<b>16.202.288</b>	<b>15.467.476</b>	<b>16.385.590</b>
	<b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>	<b>20.416.019</b>	<b>22.618.887</b>	<b>25.046.371</b>	<b>24.175.890</b>	<b>26.135.980</b>

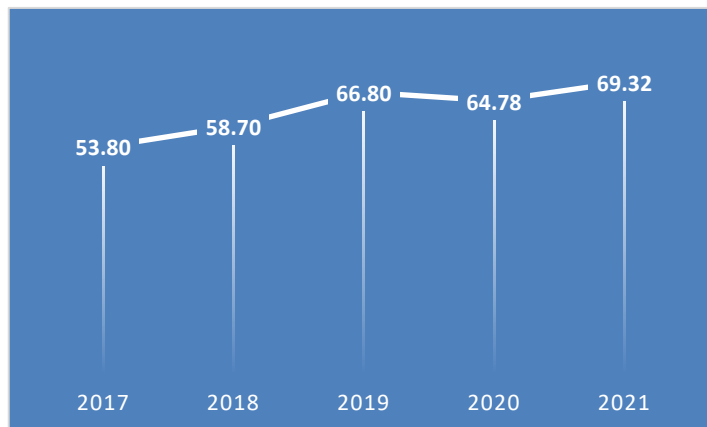
Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Keterangan :  Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

## b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4,10 juta atau 8,25%. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 juga mengalami kenaikan masing-masing 9,11 % dan 13,80 % menjadi Rp. 58,7 juta dan Rp. 66,8 juta, sedangkan pada Tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi yang penurunannya sebesar Rp. 20,2 juta atau dalam %tase sebesar menurun 3,02 %

Dari data tersebut terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Palu PDRB per kapita Kota Palu Tahun 2017-2021 tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 9,43 %, sedangkan Tahun 2020 mengalami kontraksi. Tahun 2021 merupakan pendapatan per kapita dengan nominal tertinggi bahkan setelah sempat terkoreksi pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 69,32 Juta. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :



Sumber: BPS, 2021

Gambar 3.1  
PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2017 – 2021  
(dalam jutaan Rupiah)

Apabila PDRB perkapita Kota Palu dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah, pun demikian pada tahun 2020 meskipun mengalami penurunan namun Rp. 1,03 juta lebih tinggi dari Provinsi. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **c. Laju Inflasi**

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49%. Namun, kembali naik di Tahun 2017 yakni sebesar 4,33%. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2016 sebesar 1,49% merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi sebesar 4,33% kemudian kembali terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2018 sebesar 6,46%, hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,14%, diantara komoditas yang memiliki andil positif terbesar terhadap inflasi yakni cabai rawit dan angkutan udara.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 3,41%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,60%. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2017-2021

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Palu	4,33	6,46	2,3	1,81	2,14	3,41
Indonesia	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%. Selama Desember 2021, Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,77% yang dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,69%), kelompok transportasi (1,67%), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (1,38%), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,56%), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,36%), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32%), kelompok kesehatan (0,28%), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,03%). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,88%) dan kelompok pakaian dan alas kaki (0,35%). Sedangkan kelompok pendidikan pada bulan ini relatif stabil. Pada bulan Desember 2021, laju inflasi tahun kalender bulan Desember 2021 sebesar 2,14% dan inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) juga sebesar 2,14%.

Inflasi Kota Palu disumbangkan oleh andil positif kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,44%); kelompok transportasi (0,23%); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,11%); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03%); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,02%); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,02%); kelompok kesehatan (0,01%); dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil kurang dari 0,01%. Sementara itu, andil negatif berasal dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,06%); dan kelompok pakaian dan

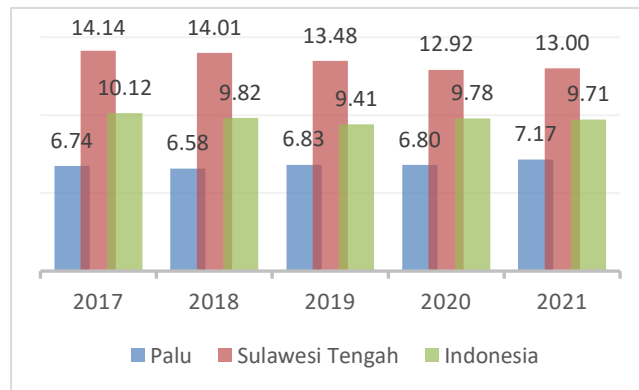
alas kaki (0,02%) (BRS Kota Palu). Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2021 diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran  
Tahun 2021 (dalam %)

No.	Sumber Inflasi	Tahun
		2021
	Umum	2,14
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	2,56
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,11
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,46
4	Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,54
5	Kesehatan	2,48
6	Transportasi	2,76
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,25
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,30
9	Pendidikan	0,80
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,64
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,74

#### d. Kemiskinan

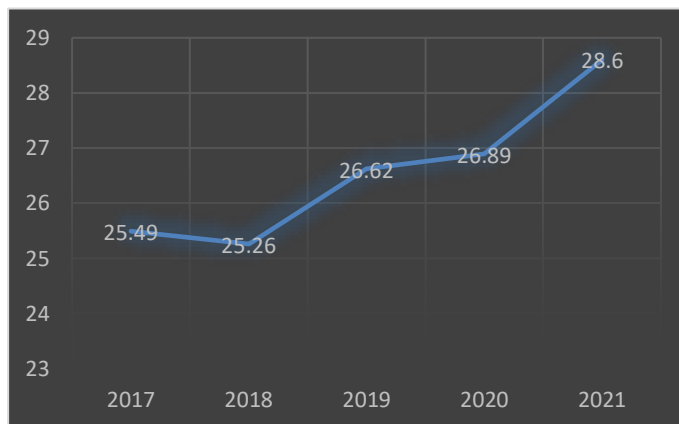
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa. Pada Tahun 2019 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Tahun 2020 terjadi penurunan masyarakat miskin menjadi 26.890 jiwa, dengan %tase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga masyarakat miskin menjadi 28.600 jiwa. Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2

Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu Tahun 2017-2021

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat Gambar 3.3 di bawah ini :



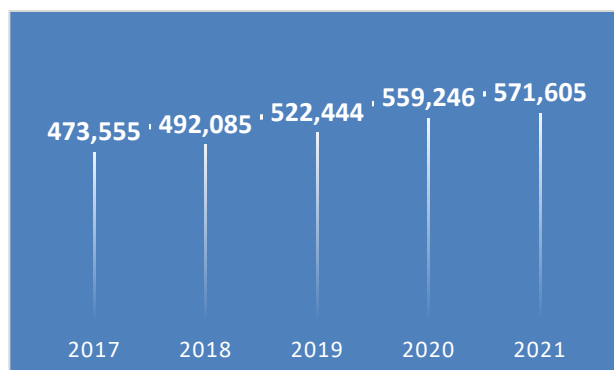
Gambar 3.3

Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2017-2021 (dalam ribu jiwa)

#### e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 sebesar Rp.451.737 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.30.359 menjadi Rp.522.444 per jiwa, dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi

Rp. 559.246 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 3.4  
Garis Kemiskinan Kota Palu

Selanjutnya, perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4  
Perbandingan Garis Kemiskinan  
(dalam Rp)

Garis Kemiskinan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Palu	473.555	492.085	522.444	559.246	571.605
Sulawesi Tengah	391.763	413.785	441.036	474.627	496.872

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu sejak Tahun 2017 dimana pada terus mengalami kenaikan dimana hingga pada Tahun 2021 berada pada angka Rp. 571605 per jiwa dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar Rp. 496.872 per jiwa.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)**

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini



bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.5  
*Gini Ratio Kota Palu Tahun 2017-2021*

<i>Gini Ratio</i>	<b>Tahun</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kota Palu	0,367	0,357	0,304	0,304	0,308

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

#### **g. Indeks Pembangunan Manusia**

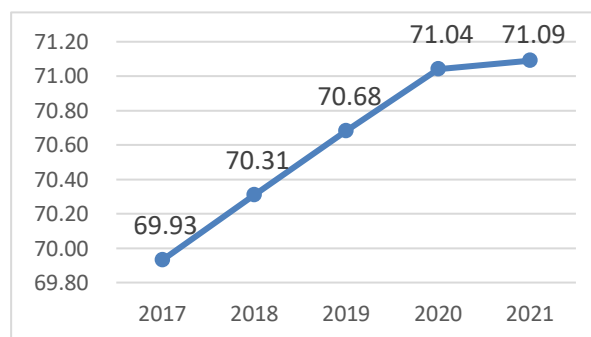
Capaian IPM Kota Palu Tahun 2017 merupakan momentum keluar dari stagnasi periode sebelumnya yang bertahan pada angka 70-an yang kemudian berhasil mencapai 80,24, atas capaian tersebut Kota Palu berhasil masuk kelompok wilayah dengan kategori “sangat tinggi”. Pada Tahun 2018 menjadi 80.91 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 pada Tahun 2019. Tren peningkatan IPM Kota Palu berlanjut hingga Tahun 2021, yakni 81,47 pada Tahun 2021 dan 81,70 pada Tahun 2022. Peningkatan nunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat Kota Palu diterpa bencana alam pada Tahun 2018 dan bencana non alam pada Tahun 2019 hingga saat ini, peningkatan IPM berhasil terjaga. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu

di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi yang sama terjadi pada tingkat nasional dan provinsi dimana tren positif juga terjadi hingga Tahun 2021 dengan capaian Nasional 72,29 dan Provinsi Sulawesi Tengah 69,79. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.5 di bawah ini :



Gambar 3.5  
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2017-2021

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat dalam Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8 :

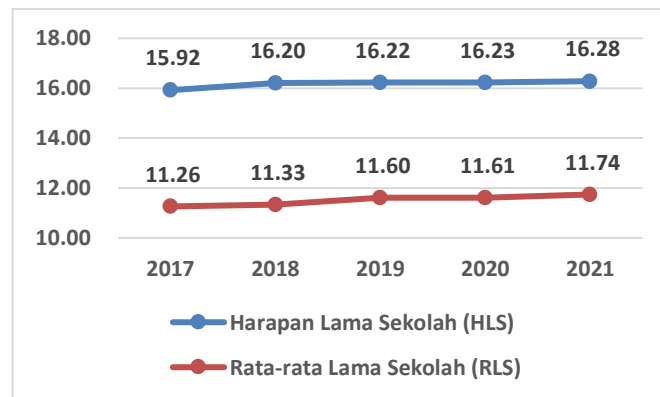


Gambar 3.6  
Angka Harapan Hidup

Tahun 2017 angka harapan hidup yakni 69,93 tahun. Kota Palu dapat keluar dari stagnansi angka harapan hidup pada Tahun 2018

menjadi 70,31 tahun dan pada Tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi 70,68, 71,04, dan 71,09 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2017 menunjukkan 11,26 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,74 tahun di Tahun 2021. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XI. Begitupun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2017 sebesar 15,92 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2021 sebesar 16,28 Tahun.



Gambar 3.7  
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2017 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp.14.871.000,- dan naik hingga Tahun 2019 sebesar Rp.15.205.000,-. Pertumbuhan tersebut terkoreksi saat pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sehingga pengeluaran per kapita menjadi Rp. 14.839.000,- kemudian merangkak naik pada Tahun 2021 sebesar Rp. 14.894.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp.41.810,-.



Gambar 3.8  
Dimensi Daya Beli Masyarakat

#### h. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Tengah	2,97%	3,19%	3,54%	3,77%	3,75%
Palu	3,37%	5,81%	6,36%	8,38%	7,61%

Sumber : BPS Sulteng, 2022

Data TPT Kota Palu Tahun 2017 sebesar 3,37%, namun mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi 5,81% dan berlanjut hingga Tahun 2020 dengan TPT masing-masing 6,36% dan 8,38%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan

pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perekonomian di masyarakat. Sektor tersier yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Palu pertumbuhannya negatif sehingga berdampak pada peningkatan TPT hingga 2,02% pada Tahun 2020 menjadi 8,38%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2021 turut mendongkrang serapan tenaga kerja sehingga TPT menjadi 3,75%, dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.658 Jiwa.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Perekonomian domestik terus membaik secara bertahap. Searah dengan perekonomian Nasional, perekonomian Kota Palu juga terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Palu yang mengalami kontraksi berangsur menghasilkan realisasi pertumbuhan yang positif. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja perekonomian Kota Palu pada Tahun 2021 yang tumbuh dengan angka pertumbuhan 5,95 %.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong perbaikan disegala aspek. Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang terus meningkat di Tahun 2021. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan trus berlanjut ditahun 2022. Seperti perkiraan sebelumnya, pada tahun 2022 tekanan dampak Covid-19 diperkirakan masih ada namun diperkirakan berangsur menurun. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program vaksinasi, perkembangan kasus Covid-19 yang menurun dan persiapan masa transisi dari pandemi ke endemi, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian

diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian, utamanya untuk konsumsi *leisure* yang pada tahun sebelumnya tertahan akibat penerapan kebijakan penanganan Covid-19.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kota Palu yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pada sektor jasa. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Palu tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Palu.

Sementara kondisi perekonomian Kota Palu pada Tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai. Perkiraan kondisi perekonomian Kota Palu Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2022 dan  
Proyeksi Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	647.713	671.873
		1.033.140	1.071.677
2	Pertambangan dan Penggalian	1.026.532	1.064.822
		1.637.379	1.698.453
3	Industri Pengolahan	1.097.561	1.138.500
		1.750.674	1.815.974
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.985	22.805
		35.067	36.375
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.735	52.627
		80.925	83.943
6	Konstruksi	3.263.933	3.385.677
		5.206.164	5.400.354
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.767.259	1.833.178
		2.818.882	2.924.026
8	Transportasi dan Pergudangan	1.111.090	1.152.534
		1.772.254	1.838.359
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	160.660	166.653
		256.262	265.821
10	Informasi dan Komunikasi	1.672.554	1.734.940
		2.667.822	2.767.332
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.004.547	1.042.017
		1.602.312	1.662.078
12	Real Estate	399.113	414.000
		636.609	660.354
13	Jasa Perusahaan	186.027	192.966
		296.724	307.792
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.457.251	2.548.906
		3.919.460	4.065.655
15	Jasa Pendidikan	1.280.206	1.327.957
		2.042.003	2.118.170
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	607.125	629.771
		968.401	1.004.522
17	Jasa lainnya	157.278	163.144
		250.867	260.224
<b>PDRB</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>	<b>16.911.567</b>	<b>17.542.369</b>
	<b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>	<b>26.974.945</b>	<b>27.981.110</b>

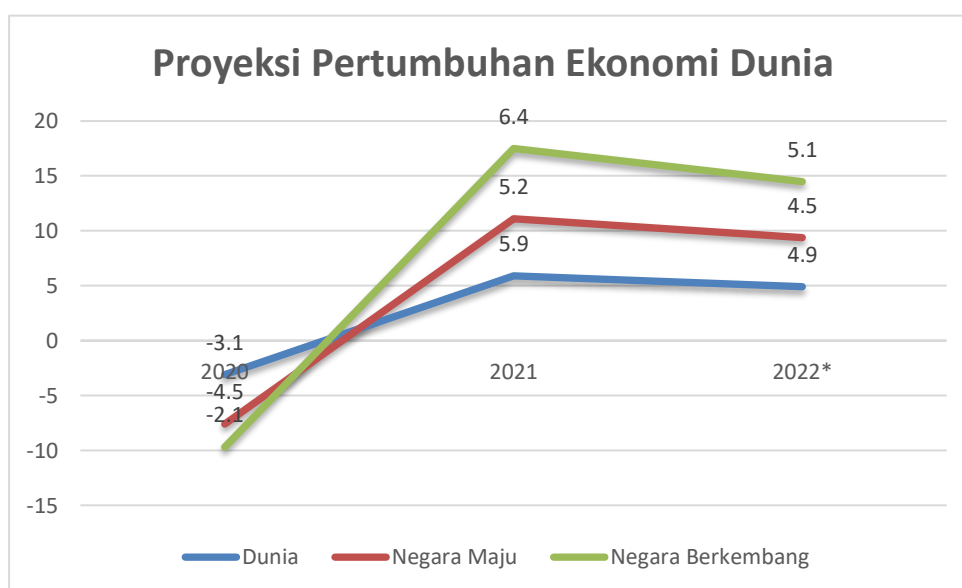
Sumber: RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026

### 3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan ekonomi dunia mulai pulih, meski pandemi virus corona Covid-19 masih berlangsung. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 5,9% pada Tahun 2021, naik dari tahun sebelumnya yang justru berkontraksi 3,1%. Walau demikian, IMF memproyeksikan

pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 4,9% pada Tahun 2022. Hal yang sama terjadi untuk negara maju dan berkembang.

Ekonomi negara maju diproyeksi pulih dari -4,5% pada Tahun 2020 menjadi 5,2% pada Tahun 2021. Pertumbuhannya kemudian melambat menjadi 4,5% pada tahun depan. Sementara, ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 6,4% pada Tahun 2021, lebih baik dari tahun lalu yang berkontraksi 2,1%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang lalu melambat menjadi 5,1% pada Tahun 2022. Secara grik dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini.



Sumber International Monetary Fund (IMF), Oktober 2021

Gambar 3.9  
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022

#### 3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perbaikan ekonomi domestik diprakirakan tetap berlangsung seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan I Tahun 2022, perbaikan ekonomi terus berlanjut didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor sejalan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik. Sejumlah indikator dini pada Maret Tahun 2022, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya pemulihan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang kinerja positif berbagai lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan



perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang terutama oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa dan Balinusra, disertai tetap baiknya kinerja ekonomi Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi akan dipengaruhi oleh volume ekspor yang tertahan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Perbaikan permintaan domestik ke depan juga akan terpengaruh baik karena tertahannya volume ekspor maupun kenaikan harga energi dan pangan global. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2022 Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5-5,3%, sedikit lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4,7-5,5%.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan triwulan I 2022 diprakirakan tetap rendah, didukung surplus neraca perdagangan sebesar 9,3 miliar dolar AS. Perkembangan ini didukung oleh tingginya surplus neraca perdagangan nonmigas, terutama sejalan dengan tingginya nilai ekspor karena harga komoditas global, seperti batu bara, besi dan baja, serta biji logam, di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang sempat tertahan pada triwulan I 2022 dengan net outflows sebesar 1,8 miliar dolar AS, kembali mencatat net inflows pada awal triwulan II 2022 yaitu sebesar 0,8 miliar dolar AS (hingga 14 April 2022). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022 tercatat sebesar 139,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, tingginya harga komoditas global diprakirakan akan menopang peningkatan nilai ekspor untuk tahun 2022 sehingga defisit transaksi berjalan diprakirakan akan lebih rendah, yaitu menjadi 0,5% - 1,3% dari PDB, menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 1,1% - 1,9% dari PDB. Pada periode yang sama,

neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing, sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang tetap terjaga. Secara keseluruhan kinerja NPI diperkirakan akan tetap surplus sehingga menopang ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil selama bulan April Tahun 2022 ditopang berlanjutnya pasokan valas domestik, aliran masuk modal asing, dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 April Tahun 2022 tercatat depresiasi sekitar 0,70% dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Thailand 0,77%, Malaysia 2,10%, dan Filipina 2,45%. Ke depan, stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terjaga didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap baik, terutama oleh lebih rendahnya defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret Tahun 2022 tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Maret Tahun 2022 tercatat 2,64% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,06% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok meningkat terutama dipengaruhi kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga dan bensin karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan

meningkatnya mobilitas masyarakat. Inflasi 2022 diperkirakan tetap terkendali dalam sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalnya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mewaspadai sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasarannya. Koordinasi dengan Pemerintah tersebut juga diperkuat untuk menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1443H.

Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola kecukupan likuiditas. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret Tahun 2022 tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada Maret Tahun 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 32,11%, meski lebih rendah dibandingkan AL/DPK bulan sebelumnya yang sebesar 32,72%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,92% (yoy). Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember Tahun 2022, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN Tahun 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp17,81 triliun (hingga 14 April Tahun 2022) melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian. Pada Maret Tahun 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada

uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,68% (yoy) dan 13,27% (yoy).

Suku bunga perbankan masih menurun kendati lebih terbatas didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan terjaganya likuiditas perbankan. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Maret Tahun 2022 stabil sebesar 2,79% dibandingkan dengan Maret Tahun 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 91 bps sejak Maret Tahun 2021 menjadi 2,85% pada Maret Tahun 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit baru lebih rendah 17 bps (yoy) pada periode yang sama, sejalan dengan penurunan SBDK dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Februari Tahun 2022 tetap tinggi sebesar 25,85%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,08% (bruto) dan 0,87% (neto). Intermediasi perbankan pada Maret Tahun 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 6,65% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi termasuk subsektor prioritas, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, yang tercermin dari perbaikan penjualan dan belanja modal, serta terjaganya kemampuan membayar. Sementara dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit terus melonggar seiring menurunnya persepsi risiko kredit. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 14,98% (yoy) pada Maret Tahun 2022, khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK pada Tahun 2022 masih

sesuai prakiraan, yaitu masing-masing dalam kisaran 6,0-8,0% dan 7,0-9,0%.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal (cemumuah) serta inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital menunjukkan perkembangan pesat seiring peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Di sisi nontunai, nilai transaksi uang elektronik (UE) pada triwulan I Tahun 2022 tercatat tumbuh 42,06% (yoy), dan untuk keseluruhan Tahun 2022 diproyeksikan meningkat 18,03% (yoy) hingga mencapai Rp 360 triliun. Nilai transaksi digital banking pada triwulan I Tahun 2022 meningkat 34,90% (yoy), dan untuk keseluruhan tahun 2022 diproyeksikan meningkat 26,72% (yoy) hingga mencapai Rp 51.729 triliun. Bank Indonesia terus mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk dalam rangka mendukung program pemerintah dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mendorong akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang inklusif dan efisien melalui kebijakan sistem pembayaran nontunai. Bank Indonesia terus melanjutkan upaya perluasan layanan BI-FAST melalui mobile banking serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sinergi dengan Pemerintah juga terus dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran melalui elektronifikasi bansos, transaksi Pemda, dan transportasi. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada triwulan I Tahun 2022 meningkat 13,58% (yoy). Bank Indonesia memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui implementasi digitalisasi layanan kas keliling (PINTAR), menjaga ketersediaan uang tunai, termasuk tambahan penyediaan uang sebesar Rp 27,4 triliun sehingga menjadi Rp 202,7 triliun selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1443H serta memperkuat kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang ke seluruh wilayah NKRI.

### **a. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2023**

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada 2023 adalah 3,73 %. Laju inflasi dijaga 2 %. PDRB per kapita riil sebesar Rp. 78.170.432 dan penduduk miskin sebesar 6,4 % dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,25 %, indeks pembangunan manusia sebesar 81,9, dan rasio gini diproyeksi 0,300 – 0,330.

### **b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu**

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa

dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang sedang disusun, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum,



skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Palu sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 60,73 % dan PAD menyumbang sebesar 20,24 %. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Palu masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi

dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan PAD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023, disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.176.218.365.347</b>	<b>1.304.323.670.760</b>	<b>1.392.223.293.825</b>	<b>1.337.102.449.228</b>	<b>1.300.668.233.312</b>
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	235.922.540.209	260.179.152.643			
1.1.1.	Pajak Daerah	107.199.060.079	112.880.185.945			
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.032.938.664	9.901.834.854			
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.193.768.512	2.048.503.784			
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	117.496.772.954	135.348.628.060			
1.2.	Dana Perimbangan	940.428.625.740	886.421.012.129			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.692.496.200	57.467.020.999			
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	698.733.242.000	648.403.965.000			
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	211.002.887.540	180.550.026.130			
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	999.867.199.398	157.723.505.988			
1.3.1.	Hibah	868.758.875.487	48.196.398.616			
1.3.2.	Dana Darurat					
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.207.565.911	74.790.199.372			
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	51.780.758.000	31.231.328.000			
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	120.000.000	3.505.580.000			

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			341.922.999.304	321.645.128.984	261.196.328.984
4.1.01.	Pajak Daerah			125.723.988.663	128.383.660.000	128.383.660.000
4.1.02.	Retribusi Daerah			8.849.306.839	71.280.365.809	41.280.365.809
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			2.613.386.311	2.500.000.000	2.500.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah			200.025.970.725	119.481.103.175	89.032.303.175
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER			1.012.164.953.521	965.015.920.244	989.030.504.328
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			901.364.371.746	889.951.231.000	932.012.368.000
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah			85.800.581.775	75.064.689.244	57.018.136.328
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya			-	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			38.135.341.000	50.441.400.000	50.441.400.000
4.3.01.	Pendapatan Hibah			-	-	-
4.3.02.	Dana Darurat			-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			27.513.296.411	50.441.400.000	50.441.400.000

Sumber : BPKAD Kota Palu dan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-202

Berdasarkan tabel 3.8, pada tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.176.218.365.347, dari jumlah tersebut terdapat hibah dari pemerintah pusat Rp. 868.758.875.487 yang diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah rusak bagi korban terdampak bencana alam, jika perhitungan pendapatan daerah tanpa bantuan sosial dana stimulan maka berjumlah sebesar Rp. 1.307.459.489.860 dengan %tase peningkatan sebesar 0,66 %. Tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.304.323.670.760, secara umum terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah tapi dari sisi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.256.612.434 dan penurunan pendapatan daerah paling besar yakni Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Rp. 842.143.693.410. Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 1.337.102.449.228 dengan kenaikan 3,65% dibandingkan pendapatan daerah Tahun 2020. Target pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 1.337.102.449.228, terdapat penurunan target pendapatan terhadap realisasi tahun sebelumnya sebesar -1,09%. Tahun 2023 diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.300.668.7233.312.

Dampak dari bencana alam yang melanda Kota Palu pada Bulan September Tahun 2018 maka realisasi PAD Tahun 2019 terkoreksi dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 235.922.540.209. Tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 10,28% menjadi Rp. 260.179.152.643, dimana peningkatan berasal dari pendapatan BLUD RSUD. Anutapura meningkat sekitar Rp. 11,1 Milyar, penambahan penerimaan jasa giro Rp. 6,2 Milyar, dan item lain dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta komponen PAD lainnya. Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 337.212.652.538 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,94%, peningkatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah khususnya pendapatan BLUD dimana terdapat penerimaan dari pemerintah pusat atas jasa pelayanan Covid-19 sehingga penerimaan BLUD menjadi sekitar Rp. 160 Milyar. Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 321.645.128.984 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,06%, secara umum semua komponen PAD mengalami kenaikan namun

peningkatan signifikan terdapat pada retribusi daerah yang peningkatannya sebesar Rp. 62.431.058.970. Proyeksi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 261.196.328.984, target PAD dirasionalkan berdasarkan potensi dan kondisi *existing*. Rasionalisasi PAD dilakukan untuk menjaga likuiditas keuangan daerah dalam tahap penyesuaian regulasi daerah tentang retribusi khususnya retribusi parkir dan penanganan persampahan. Tahun 2022 kedua jenis retribusi tersebut ditargetkan masing-masing Rp 30 Milyar namun dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dilapangan dan perbaikan manajemen operasional secara terus-menerus sehingga target dirasionalkan menjadi masing-masing Rp 15 Milyar.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023, meliputi:

1. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
3. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
4. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian



objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.

5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
6. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
7. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

## **B. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer**

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, Tahun 2019 sebesar Rp. 940.428.625.740, komponen dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar Rp. 13.229.004.594 adalah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sedangkan DAU dan DAK naik masing-masing sebesar Rp. 27.132.707.000 dan Rp. 15.831.795.340. Semenjak pandemi covid-19 merambat ke Indonesia

aktivitas masyarakat dibatasi guna mengendalikan masifnya penyebaran penularan Covid-19, hal tersebut berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga penerimaan pemerintah, serta besarnya kebutuhan anggaran penangan dan penanggulangan pandemi sehingga dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 54.007.613.611 menjadi Rp. 886.421.012.129 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 67,96%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening anggaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Atas peraturan tersebut dana perimbangan menjadi dana transfer yang pada Tahun 2021 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 987.164.953.521. Berdasarkan data Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dirilis Kementerian Keuangan menetapkan dana transfer Tahun 2022 Kota Palu sebesar Rp. 965.015.920.244.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;

3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2023 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

### **C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.8 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2019 mengalami lonjakan tajam dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 861.874.347.778 yang sebagian besar merupakan hibah bermerek dari pemerintah pusat diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebesar Rp. 820.653.280.000. Tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 157.723.505.988 dengan kontribusi 12,09% terhadap pendapatan daerah.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2021 sebesar Rp. 27.513.296.411 berkontribusi 2,04% terhadap pendapatan daerah. Target Tahun berjalan 2022 sebesar Rp. 50.441.400.000 serta Proyeksi Tahun 2023 sama dengan Tahun 2022 dimana anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun

Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;

4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip

kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2019 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung naik sebesar 2,86% menjadi Rp. 544.785.927.954 alokasi tersebut sebesar 40,69% dari belanja daerah sedangkan belanja langsung sebesar 59,31% dengan anggaran berjumlah Rp. 794.049.824.047.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pildaka) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp. 60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam juga berlanjut sehingga total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.050.796.412.188.

Tahun 2021 realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah, realisasi belanja modal Rp. 320.284.928.589 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya, dan belanja modal lainnya. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 5.025.990.065 yang salah satu penggunaannya ialah untuk penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. Alokasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp. 1.259.716.953.444, belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 320.284.928.589. Tahun 2023 belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1.090.047.276.454, belanja modal sebesar Rp. 224.388.560.861,

belanja tidak terduga Rp. 15 Milyar, dan belanja transfer yang diperuntukkan bantuan partai politik sebesar Rp. 1.000.000.000.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 :



Tabel 3.9  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.338.835.752.001</b>	<b>1.733.027.788.274</b>	<b>1.611.481.408.559</b>	<b>1.589.129.409.596</b>	<b>1.330.435.837.315</b>
2.1.	Belanja Tidak Langsung	544.785.927.954	1.050.796.412.188			
2.1.1.	Belanja Pegawai	525.868.254.729	552.059.713.079			
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-			
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-			
2.1.4.	Belanja Hibah	12.084.881.673	69.784.545.762			
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	6.350.000.000	409.665.000.000			
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-			
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	186.131.552	629.167.400			
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	296.660.000	18.657.985.947			
2.2.	Belanja Langsung	794.049.824.047	682.231.376.086			
2.2.1.	Belanja Pegawai	65.152.920.716	68.262.945.071			
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	415.792.341.370	426.659.044.750			
2.2.3.	Belanja Modal	313.104.561.961	187.309.386.265			
5.1.	BELANJA OPERASI			1.347.006.916.603	1.259.716.953.444	1.090.047.276.454
5.1.1.	Belanja Pegawai			563.347.591.561	617.632.198.184	632.632.198.184
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa			480.523.529.623	477.503.878.270	442.055.078.270
5.1.3.	Belanja Bunga			-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi			-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah			9.566.783.887	158.335.876.990	6.750.000.000
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial			251.315.000.000	6.245.000.000	8.610.000.000

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
5.2.	BELANJA MODAL			259.476.501.891	320.284.928.589	224.388.560.861
5.2.1.	Belanja Modal Tanah			14.361.555.920	30.526.822.735	1.000.000.000
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin			79.009.085.792	52.354.289.800	49.904.289.800
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan			42.593.375.881	78.043.150.333	54.043.150.333
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			121.683.743.370	159.208.665.721	119.289.120.728
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya			211.807.929	152.000.000	152.000.000
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya			-	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA			4.997.990.065	9.127.527.563	15.000.000.000
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga			5.025.990.065	9.127.527.563	15.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER			-	-	1.000.000.000
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil			-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan			-	-	1.000.000.000

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

## **1. Arah Kebijakan Belanja Operasi**

### **a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

1. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023;
3. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
4. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

**b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**c. Arah Kebijakan Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

**d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

**e. Arah Kebijakan Belanja Hibah**

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

#### **f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial**

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **2. Arah Kebijakan Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah**

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### **c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **d. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **e. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **f. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya**

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **3. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan

Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **4. Arah Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

#### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2023 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Dalam pembiayaan terdapat rekening penyertaan modal (investas) daerah yang mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Olehnya Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran



untuk investasi langsung di Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk penyertaan modal.

Dalam upaya mewujudkan Kota Palu meraih Adipura maka dibutuhkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana persampahan yang akan dibiayai dengan skema pinjaman.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2023 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10  
 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021, Tahun Berjalan 2022, serta Proyeksi Tahun 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Realisasi	Relisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>195.688.411.505</b>	<b>1.031.071.024.850</b>	<b>602.363.096.947,52</b>	<b>252.026.960.368,00</b>	<b>29.767.604.003,44</b>
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	196.010.911.505	1.033.071.024.850	602.363.096.948	252.026.960.368	39.767.604.003
6.1.1.	SilPa	196.010.911.505	1.033.071.024.850	602.363.096.948	252.026.960.368	39.767.604.003
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	322.500.000	2.000.000.000	-	-	10.000.000.000
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal	322.500.000	2.000.000.000	-	-	10.000.000.000
6.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu**

Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga pembangunan harus direncanakan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Oleh karena itu, pembangunan sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan memperbanyak masalah. Berdasarkan masalah yang terjadi melahirkan isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode Tahun 2021-2026. Rumusan isu strategis Kota Palu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dan merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.

Keberadaan sumber daya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang strategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penanggulangan dimasa tanggap darurat.

3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif berbasis budaya.

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujudan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, *smart* dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga

kesiapan kelembagaan dan sumber daya pembiayaan yang mendukung dalam kategori mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memiliki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4. Mitigasi Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menejerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan menejerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

#### **4.1.2 Tema Pembangunan**

Tema pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Transformasi Digital dalam Penatakelolaan Pemerintahan menuju Palu Adipura. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 adalah bagian dari tahapan ke empat tahun kedua pembangunan jangka panjang Kota Palu.

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap empat sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesungguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Tema Pembangunan disusun berdasarkan pendekatan yang Partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (**THIS**) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (**KISS**) antar pemangku kepentingan. Berikut tema Pembangunan Kota Palu Tahun 2023 dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2021–2026.



Gambar 4.1  
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu  
Tahun 2021-2026

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2023 dapat dijelaskan kedalam tiga poin penting yaitu :

**MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP** dengan sinergitas antar *stake holder* untuk mencapai suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di Kota Palu. Kualitas lingkungan ini dicirikan antara lain dari suasana yang membuat warga Kota Palu betah untuk tinggal di Kota Palu yang dilihat dari pemenuhan berbagai keperluan hidup mereka, baik kebutuhan dasar seperti



sandang, pangan, papan, hingga keperluan pendidikan, rasa aman, Ibadan dan sebagainya.

**TRANSFORMASI DIGITAL** yang merupakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital yang selama ini masih dilakukan dalam penatakelolaan Pemerintahan di Kota Palu sehingga memungkinkan terjadinya inovasi dan kreativitas dalam Pelayanan Publik sehingga pemerintah lebih adaptif dan berintegrasi disetiap sektor bersama seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja Birokrasi.

**PALU ADIPURA** merupakan program pemicu bagi pemerintah Kota Palu dalam penguatan tatakelola kebersihan Kota, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan setempat serta merubah perilaku yang lebih peka terhadap kebersihan.

Tematik Pembangunan Kota Palu Tahun 2023 ini tidak lepas dalam mendukung Visi Pembangunan kota Palu yaitu Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan hal tersebut ditarik nilai pembangunan Kota Palu yang meliputi :

**Mandiri – Aman – Nyaman – Tangguh – Profesional –  
Berkelanjutan – Kearifan Lokal – Keagamaan**

yang digaungkan dengan

## **PALU MANTAP BERGERAK**

**Palu Mantap Bergerak** merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

### **1. Kota cerdas (*smart city*)**

Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi

sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

## **2. Kota tangguh (*resilience city*)**

Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

## **3. Kota hijau (*green city*)**

Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

## **4. Kota inklusif (*inclusive city*)**

Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi

### **4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Palu 2021–2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2023.

Tabel. 4.1  
 Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2023

<b>5 Arah Utama RPJMN 2020-2024</b>	<b>Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026</b>	<b>Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025</b>	<b>Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap IV (2021-2025)</b>
Penyederhanaan Regulasi	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, gernas, dll)	Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum	Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi
Penyederhanaan Birokrasi		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	
		Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau	
Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas infastruktur perdagangan, industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbangan lingkungan
Pembangunan SDM	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menuju kota ekologis.
	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan		
Transformasi Ekonomi	Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah	Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya manusia yang semakin membaik
		Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan	

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kota Palu Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa perencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanaan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kota Palu, sesuai RPJMD Kota Palu 2021-2026 yaitu:

1. Ekonomi mantap berdaya saing;
2. Lingkungan mantap berkelanjutan;
3. Infrastruktur mantap berketahanan;
4. SDM mantap, tangguh dan berkarakter;
5. Pelayanan dasar mantap berkualitas; dan
6. Pemerintahan mantap melayani

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan untuk periode lima tahun kedepan pada tiap misi dan sub misi yang telah ditetapkan, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota  
Palu Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
<b>VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN</b>						
<b>MISI 1: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL</b>						
1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54	3,73	4,42
	1.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	28,04	28,4
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	65,67	66,1
<b>MISI 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA</b>						
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	62	64
		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	125,08	100
	2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,92	74,60	75,62
	2.2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100
	2.3 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	Persen (%)	1,34	4,39	10,72
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen (%)	17,99	21,04	29,51
		Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,31	0,00
		Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	10,30	8,66
	2.4 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen (%)	75	85	100

	2.5	Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks ketangguhan kota	Poin	263	450	550
<b>MISI 3 MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID - 19</b>							
3. Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	81,90	82,60
	3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,23	17,00	18,00
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,61	11,65	12,00
	3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,60	72,20
			Case Fatality Rate Covid-19	Persen (%)	2,89	1,50	< 1,00
	3.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	70	100
			Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,11	98,29
			Indeks Kota Layak Anak	Level	NA	Pratama	Madya
	3.4	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	83	84,5
			Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	69	72
			Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	52,42	55
	<b>MISI 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI</b>						
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	78	92
	4.1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi AKIP	Level	B	BB	A
			Tingkat Maturitas SPIP	Level	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL III
	4.2	Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	75	90
	4.3	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	C	B

	4.4 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	50	80
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poim	1,54	2,4	3
	4.5 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan)	Poin	NA	78	90

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026



#### **4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan**

Perencanaan Pembangunan Kota Palu Tahun 2023, mempertimbangkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbagai strategi dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Palu juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam melaksanakan RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2025. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah

akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

### 3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

### 4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

### 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta

## 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah kota melakukan, penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kota Palu, yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu:

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital;
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin dan difabel dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah;
6. Mendorong kontibusi sektor primer dalam pertumbuhan ekonomi.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian dampak/risiko terhadap lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
3. Penambahan dan peningkatan pengelolaan RTH publik dan jalur hijau;
4. Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas masyarakat yang tangguh bencana;
5. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat Kota;
6. Mengembangkan penataan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
7. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni;

8. Meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan dan transportasi yang inklusif.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
2. Mewujudkan Palu ramah difabel dan kelompok rentan;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan keolahragaan;
5. Mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui upaya promotif, preventif, Kuratif, dan rehabilitative;
6. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar;
7. Meningkatkan kualitas anak, perempuan;
8. Meningkatkan kualitas pemuda;
9. Mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan kebangsaan;
10. Mengembangkan karakter kebangsaan berdasarkan nilai keagamaan;
11. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan Perempuan;
12. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja;
2. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah;
5. Optimalisasi pelayanan publik berbasis IT;
6. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur;
7. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart city*);

8. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif;
9. Implementasi inovasi daerah.

Selain strategi di atas, juga terdapat Standar Pelayanan Minimal seperti yang telah di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memenuhi pelayanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar warga Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum pada Pasal 3 ayat 2 sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
17. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;

18. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
21. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
22. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
23. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana;
24. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran;
25. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
26. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
27. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
28. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
29. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam RPJP Kota Palu Tahun 2005-2025, juga tertera strategi untuk mencapai visi “Kota Palu untuk semua” (*City for All*), yang di tuangkan kedalam sasaran yang di jabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan;
2. Menyediakan pelayanan publik yang layak dan terjangkau;
3. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum;
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan;
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan resiko bencana.

Agar sinkronisasi tersebut tercapai, maka perlu memantapkan strategi nasional dengan strategi pembangunan Kota Palu.

Dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi. Dalam perencanaan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota Palu menyambut semangat P3DN dengan penerapan dengan mempersiapkan beberapa langkah strategis yakni dengan mempersiapkan perangkat yang akan bertugas mengawal pelaksanaan pengadaan barang P3DN yang pada Tahun 2022 telah ditetapkan dalam SK Nomor 027/551/PBJ/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kota Palu, mewajibkan belanja dengan kandungan produk dalam negeri sekurangnya 40%, mendorong penyedia untuk melakukan sertifikasi P3DN produk.

## **1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023**

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2023 diselaraskan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif,

- terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
  3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
  4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

### **1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan



- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
  - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
  - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;

- 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- c) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- d) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
  - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
  - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
  - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
  - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
  - 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
  - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
  - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
  - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - 3) kualitas pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
- g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- 2) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
- 3) prestasi olahraga.

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
  - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
  - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
  - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
  - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan

4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

## **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - 4) keselamatan dan keamanan transportasi; dan
  - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur;
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) konektivitas jalan; dan
  - 2) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) transportasi perkotaan;
  - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
  - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
  - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) penuntasan infrastruktur TIK;
- 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
- 3) fasilitas pendukung transformasi digital.

## **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penanggulangan bencana; dan
  - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
  - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;

- 3) pengelolaan limbah;
- 4) pengembangan industri hijau; dan
- 5) rendah karbon pesisir dan laut.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
  - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
  - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penataan regulasi;
  - 2) penguatan sistem anti korupsi; dan
  - 3) peningkatan akses terhadap keadilan.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
  - 2) transformasi pelayanan publik;
  - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan

- 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - 3) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai

keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengusung Visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah,

hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.3  
Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas  
Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya	Ekonomi Mantap Berdaya Saing
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Infrastruktur Mantap Berketahanan Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter Pemerintahan Mantap Melayani
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pemerintahan Mantap Melayani SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Infrastruktur Mantap Berketahanan Ekonomi Mantap Berdaya Saing Lingkungan Mantap Berkelanjutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penanggulangan korban bencana	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Infrastruktur Mantap Berketahanan

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Pemerintahan Mantap Melayani Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Program Prioritas Pembangunan Kota Palu

Misi	Program Prioritas pembangunan
1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	1. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan; 2. Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan; 3. Penguatan UMKM; 4. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi; 5. Kawasan agrowisata Layana dan Petobo;

Misi	Program Prioritas pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;</li> <li>7. Wisata pasar ikan Kota Palu;</li> <li>8. 1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu;</li> <li>9. Kerjasama antar Pemerintah Daerah;</li> <li>10. Forum komunitas kreatif Kota Palu.</li> </ul>
<p>2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bangun Palu Tahan Gempa;</li> <li>2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana;</li> <li>3. <i>Waterfront Park</i> Talise (Monumen Tsunami);</li> <li>4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu;</li> <li>5. Ruang terbuka hijau/<i>public area</i> per kecamatan;</li> <li>6. Pembangunan gedung kesenian Kota Palu;</li> <li>7. Palu Adipura;</li> <li>8. Palu Terang;</li> <li>9. Palu Hijau;</li> <li>10. Palu Ramah Difabel;</li> <li>11. CSR Forum;</li> <li>12. Satgas Cepat Tanggap (<i>Quick Respons/ Command Center</i>);</li> <li>13. Kelurahan mantap 2 miliar;</li> <li>14. Revitalisasi perpustakaan Kota Palu;</li> <li>15. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi.</li> </ul>
<p>3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Palu kota sehat;</li> <li>2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;</li> <li>3. Satu ambulans satu kelurahan;</li> <li>4. BPJS gratis warga tidak mampu;</li> <li>5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah;</li> <li>6. 1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota Palu;</li> <li>7. Reward sebesar Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi;</li> <li>8. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu;</li> <li>9. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan;</li> <li>10. Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar;</li> <li>11. Bus gratis untuk siswa sekolah;</li> </ul>



Misi	Program Prioritas pembangunan
	12. Kepala sekolah magang; 13. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya; 14. Badan pelayanan rumah ibadah; 15. Palu berbagi; 16. Palu religi; 17. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya 18. Palu Ramah Difabel; 19. Event olahraga tahunan Kota Palu; 20. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani	1. Pengelolaan APBD secara transparan dan akuntabel 2. <i>E – Government/ Smart City</i> 3. QSL ( <i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat) 4. <i>One touch</i> info Kota Palu 5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di semua Instansi 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer 7. ASN magang nasional 8. Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akte lahir di kantor kelurahan.

Sumber: RPJMD Kota Palu 2021-2026

Berdasarkan penetapan prioritas pembangunan pada tiap-tiap misi di atas, maka dapat disusun prioritas pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

Prioritas pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walaupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5  
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026,  
Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2023,  
Dan Prioritas RPJMD Kota Palu 2021-2026

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
1.	Penanggulangan Korban Bencana	Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap kecamatan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
		Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada pendidikan dasar di Kota Palu</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
		Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan berkualitas</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
		Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
		Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastruktur berbasis budaya</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD 2021-2026)	Prioritas Tahunan RPJMD Kota Palu	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
		Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Palu</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
		Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasiaan data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
4.	Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditi pertanian lainnya	Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>

Sumber: RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah.

Adapun relevansi antara isu strategis pembangunan Kota Palu dan prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023, tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6  
Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
1	2	3	4
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Mantap Berdaya Saing</li> <li>• Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
2	Peningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar	SDM unggul, tangguh dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
3	Peningkatan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.	Pencapaian target dan sasaran SDGs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
4	Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
5	Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas</li> <li>• Pemerintahan Mantap Melayani</li> </ul>

No	Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah (RPJMD Provinsi Sulteng)	Isu strategis pembangunan Kota Palu (RPJMD Kota Palu)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2023
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
6	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
7	Harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.	Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
8	Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.	Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan Mantap Berkelanjutan</li> <li>• Infrastruktur Mantap Berketahanan</li> </ul>
		Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi</li> </ul>
9	Pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Mantap Berdaya Saing</li> </ul>

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu

yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu kedalam, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7  
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2023 disertai Pagu Indikatif

<b>Prioritas Daerah</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>OPD Pelaksana</b>
Ekonomi Mantap Berdaya Saing	Rp. 4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha	15.007.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Sosial
	Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan	4.407.911.050	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penguatan UMKM	12.646.279.091	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Sosial 8 Kecamatan
	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	1.300.506.000	Dinas Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	75.600.000	Dinas Perhubungan
	Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi	836.217.760	Dinas Pariwisata Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Kawasan agrowisata Layana dan Petobo	349.646.470	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Revitalisasi pasar berbasis segmentasi	1.059.017.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Wisata pasar ikan Kota Palu		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu	2.416.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Kerjasama antar pemerintah daerah	153.073.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana	
	Forum komunitas kreatif Kota Palu	3.213.217.760	Dinas Pariwisata	
Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Palu Adipura	50.869.431.750	Dinas Lingkungan Hidup	
	Palu Terang	47.408.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Palu Hijau	3.304.323.500	Dinas Lingkungan Hidup	
	Palu Ramah, Aman, dan Tertib			
	CSR forum	9.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Satgas Cepat Tanggap		40.116.488.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Dinas Perhubungan
				Satuan Polisi Pamong Praja
				Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum				
Dinas Sosial				
Kelurahan mantap 2 miliar	2.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		
Infrastruktur Mantap Berketahanan	Bangun Palu tahan gempa	66.806.767.650	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	
			Dinas Pekerjaan Umum	
			Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pembangunan gudang logistik bencana	19.193.959.698	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Dinas Pekerjaan Umum	
	<i>Waterfront Park Talise</i> (Monumen Tsunami)		Dinas Sosial	
	Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu	2.255.671.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Ruang terbuka hijau/publik area per kecamatan	14.340.575.550	Dinas Pekerjaan Umum		



Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Dinas Lingkungan Hidup
			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan gedung kesenian Kota Palu	13.102.281.450	Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	25.099.692.000	8 kecamatan
	Badan pelayanan rumah ibadah	638.397.470	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Palu berbagi	787.913.954	Dinas Sosial
	Palu religi	3.441.876.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Pelestarian seni budaya	1.566.823.810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Palu ramah difabel	1.097.751.504	Dinas Sosial
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Event olahraga tahunan Kota Palu	6.333.906.600	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu	359.860.500	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	
Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	A.Kesehatan		
	Palu kota sehat	73.313.748.875	Dinas Kesehatan
			RSUD Anutapura
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Transformasi puskesmas menjadi klinik modern	2.753.451.230	Dinas Kesehatan
	Satu ambulans satu kelurahan	1.505.000.000	Dinas Kesehatan
	BPJS gratis warga tidak mampu	23.846.457.800	Dinas Kesehatan
			Dinas Sosial
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Dinas Pendidikan			
			Dinas Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
	Tunjangan kesehatan dan santunan duka RT/RW, petugas Rumah Ibadah	575.785.500	8 Kecamatan
			Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	B.Pendidikan		
	1.000 beasiswa kuliah bagi keluarga tidak mampu	900.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
	Reward Rp. 2 miliar bagi SD dan SMP berprestasi	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu	49.962.767.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi perkelurahan	1.052.192.500	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
			Dinas Pekerjaan Umum
	Update berkala kompetensi, dan kapasitas guru/pengajar	30.277.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bus gratis untuk siswa sekolah	775.781.320	Dinas Perhubungan
Kepala sekolah magang nasional	506.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemerintahan Mantap Melayani	Audit APBD oleh auditor independent	1.312.762.600	Inspektorat
	<i>E – Government (Palu Smart City)</i>	4.701.821.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penerapan QSL ( <i>Quick Service License</i> = Pelayanan Perizinan Cepat)	286.103.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Administrator KEK
	<i>One touch info</i> Kota Palu	2.594.613.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi	616.205.500	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	2.280.600.000	8 Kecamatan
ASN magang nasional	565.556.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Pelayanan pembuatan KTP, KK, Akte kelahiran, dan	345.889.950	Dinas Kependudukan dan	

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
	dokumen kependudukan lainnya di kelurahan		Pencatatan Sipil 8 Kecamatan

#### **4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu**

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Arahana Presiden, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Arahana Presiden, misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.8

Matriks Keterkaitan Arahan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

Arahan Presiden	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Misi RPJMD Kota Palu 2021-2026
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;	<b>Misi 1</b> Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	<b>Misi 1</b> Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	<b>Misi 3</b> Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;	<b>Misi 2</b> Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	<b>Misi 3</b> Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	<b>Misi 1</b> Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
	<b>Misi 3</b> Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	<b>Misi 4</b> Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	<b>Misi 2</b> Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana (Arahan Presiden ke 2)
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang pertama Undang-Undang	<b>Misi 4</b> Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	<b>Misi 6</b> Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.	

<p>Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);</p> <p>4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan</p> <p>5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p>	<p><b>Misi 5</b> Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>	<p><b>Misi 5</b> Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p><b>Misi 3</b> Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</p>
	<p><b>Misi 6</b> Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p>	<p><b>Misi 2</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</p>	<p><b>Misi 4</b> Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)</p>
	<p><b>Misi 7</b> Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga</p>	<p><b>Misi 8</b> Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.</p>	
	<p><b>Misi 8</b> Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p>	<p><b>Misi 7</b> Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.</p>	<p><b>Misi 4</b> Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)</p>
<p><b>Misi 9</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>			

		<p><b>Misi 9</b> Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan Peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.</p>	<p><b>Misi 1</b> Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Prov. Sulteng 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

Dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9  
Dukungan Program Daerah RKPD 2023 terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	Penyediaan Air untuk Pertanian	Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	5.500 ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	39,28	2.914.161.401	Dinas Pekerjaan Umum
Rasio jaringan irigasi							80%			
			Penyediaan Air Baku untuk kawasan Prioritas	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	2 m <sup>2</sup> /detik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	81,20%	5.665.497.804	Dinas Pekerjaan Umum
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	31,78%		
			Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	Peningkatan tutupan hutan	450.000 ha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	661.747.461	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Konsumsi daging	14,4 kg/kapita/tahun	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,04	411.894.687	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Konsumsi protein asal ternak	12,7 gram/kapita/hari	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan pangan	100%	39.258.385	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Konsumsi sayur dan buah	30 1,3 gram/kapita/hari	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	23.438.897	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Konsumsi ikan	6 1,02 kglkapita/tahun					
				Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	90-95 %					
				Luas lahan produksi beras biofortifikasi	150.000 ha					
				Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	80% penerima BPNT					
				Persentase pangsa pangan organik	15%					
			Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Penggunaan benih bersertifikat	75%	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	311.936.767	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan beras	45,4 juta ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,63	1.356.387.926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Ketersediaan protein hewani	2,78 juta ton					
				Produksi jagung	34,12 juta ton					
				Produksi daging	5,9 juta ton					
				Produksi umbi-umbian	25,2 juta ton					
				Produksi sayuran	15,5 juta ton					
				Produksi buah-buahan	29,29 juta ton					



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDMI Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani	80-90%	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	15%	717.983.386	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Nilai tambah per tenaga kerja pertanian	57,0 juta rupiah/tenaga kerja/tahun					
			Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	90%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,63	1.356.387.926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Jumlah varietas unggul tanaman dan hewar untuk pangan yang dilepas	30 dan 8 varietas unggul baru dan galur					
				Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	4.250 aksesi					
			Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	<i>Global food security index</i>	68,4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,04	411.894.687	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan pangan	100%	39.258.385	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	311.936.767	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Produksi ikan	18,48 juta ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1090	2.260.729.848	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Produksi rumput laut	12,10 juta ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	130	477.808.509	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Produksi garam	2,00 juta ton					
			Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	9,91 triliun rupiah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	75,35	149.119.850	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	104					
		Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan	10%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	343.194.145	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor sektor ekonomi lainnya	160 IKM (kumulatif)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan fomal	29,27%	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	74,8%	32.290.087	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	4,10%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi	75%					
			Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	340 unit (kumulatif)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	88,01%	113.131.949	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,2%	116.526.555	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	19,60%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Penumbuhan start-up	2.800 start-up (kumulatif)					
				Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	12.000 WUB					
		Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pertumbuhan PDB perkebunan	5%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Pertumbuhan PDB hortikultura	5,90%					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman	6,3-6,85%					
			Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi	16 KI-KEK industri	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Promosi Penanaman Modal	40 investor	74.228.213	Administrator KEK
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	232.163.996	Administrator KEK
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	100%	19.333.024	Administrator KEK
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	87.625.266	Administrator KEK
			Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya	10 destinasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	215.023.313	Dinas Pariwisata
				Revitalisasi destinasi Bali	1 destinasi	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	232.343.071	Dinas Pariwisata
				Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	25 unit					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Destinasi wisata berbasis geopark	16 destinasi					
				Destinasi wisata bahari	6 destinasi					
			Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	5,40%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	24.306.039	Dinas Pariwisata
				Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi	7%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komikasi dan Informatika
						Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	3.647.355.774	Dinas Komikasi dan Informatika
			Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	48,90%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	117.349.558	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	48,50%	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	385,9	74.281.687	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83.664.693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	561.852.785	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	93.067.824	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	83%	167.344.725	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah branding Wonderful Indonesia	10 destinasi branding	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	215.023.313	Dinas Pariwisata
				Nilai ekspor ekonomi kreatif	26,46 miliar US\$	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	232.343.071	Dinas Pariwisata
				Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)	2 lokasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	24.306.039	Dinas Pariwisata
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	Kontribusi ekonomi digital	6%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komikasi dan Informatika
				Nilai transaksi e-commerce	843,4 triliun rupiah	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	3.647.355.774	Dinas Komikasi dan Informatika
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Skor logistic performance index	3,4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	3.074.466.730	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Tingkat inflasi	2,0-4,0%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	190.807.270	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	2.754.259.158	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	6%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	11 lokasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	215.023.313	Dinas Pariwisata
			Reformasi Fiskal	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	1.147.642.775	Badan Pendapatan Daerah
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	4 database	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	100%	206.960.188	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce	1 database					
				Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan	3 database					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB	1 database					
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pengembangan Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap wilayah	>1	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Promosi Penanaman Modal	40 investor	74.228.213	Administrator KEK
				Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	8 kawasan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	232.163.996	Administrator KEK
				Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	2 jumlah destinasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	100%	19.333.024	Administrator KEK
				Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	1 jumlah destinasi	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	87.625.266	Administrator KEK
				KEK berbasis pariwisata dan industri	3 kawasan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	215.023.313	Dinas Pariwisata
				KI Prioritas dan KI Pengembangan	2 jumlah KI	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	232.343.071	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao	1-3%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,63	1.356.387.926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi	2-4%	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	15%	717.983.386	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa	1-2%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1090	2.260.729.848	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun lada	1-2%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	130	477.808.509	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala	1-2%					
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh	4-6%					
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap	2-4%					
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya	1-2%					
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam	10-12%					
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit	4-6%					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu	4-6%					
			Pengembangan Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	48,31	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	33,88%	646.954.529	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
							Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	18,02%		
							Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	20%		
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan	20%	341.605.632	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
							Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan	19,22%		
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	85,07%	454.491.702	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	78,87%	1.228.305.404	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
							Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		
						Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,897	3.662.948.372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		54,23%			
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,897	5.451.596.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	100%	44.387.740.301	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,56%	77.967.154.070	Dinas Pekerjaan Umum
						Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	100%	19.798.103.774	Dinas Pekerjaan Umum
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	63,18%	6.952.801.855	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase jalan yang memiliki drainase		4,39%			
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,42%	305.122.121	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	81,20%	5.665.497.804	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan		31,78%			
			Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,24	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah
				Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi	37,50%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80%	999.710.629	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah daerah penerimaan daerah dengan meningkat	74 daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	1.147.642.775	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas	66 daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	19.419.589.555	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	5.887 dokumen	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	1.857.242.644	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	10 daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83.664.693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	66 daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	232.163.996	Administrator KEK
				Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah	6 daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	85,07%	454.491.702	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Persentase capaian SPM di daerah	91,30%	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu	20%	502.298.400	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik	34 daerah		Persentase kawasan pemetaan	20%		
				Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik	1.559.602 ha					
				Luas cakupan peta dasar pertanahan	1.000.725 ha					
				Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR kab/kota	137 materi teknis dan Ranperkada RDTR					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah persetujuan substansi RDTR kab/kota	95 persetujuan substansi RDTR					
				Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW prov/kab/kota	7 materi teknis dan Ranperda RTRW					
				Jumlah persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota	7 persetujuan substansi RTRW					
				Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	5					
				Jumlah materi teknis RTR nasional (pulau/kep dan KSN)	1 materi teknis dan Raperpres RTR					
				Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang	10 perkara					
				Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan	475 desa					
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun	50 pedoman/kebijakan/SOP	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	66,8%	1.254.526.448	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	171.710.015	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
		Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang dikembangkan dan diintegrasikan	I sistem	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	137.331.893	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	11.666.899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendampingan dan layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	89%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	3.445.343.503	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial
				Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	90%					
				Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%)	95%					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%)	50%					
				Persentase kementerian/ lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan	50%					
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	53	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,75	66.319.028	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	2.143.909.335	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial	3 dokumen	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial
			Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Akurasi penyaluran bantuan sosial	57%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	727.017.941	Dinas Sosial



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan	70%	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	920.836.486	Dinas Sosial
				Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	8.000.000 keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial
				Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah	15.600.000 keluarga					
				Penyaluran bantuan LPG 3 kg	15.600.000 keluarga					
				Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	15.600.000 keluarga					
			Perlindungan Sosial Adaptif	Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	500.000 jiwa	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50%	2.712.727.952	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,49%	838.276.953	Dinas Sosial
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,16%	1.205.677.065	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	24%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	727.017.941	Dinas Sosial
				Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial	18%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	920.836.486	Dinas Sosial
				Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	45.000 jiwa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	30.458.384	Dinas Sosial
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	75%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	59.052.067.124	Dinas Kesehatan
				Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,57%	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,75	66.319.028	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	2.143.909.335	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	76%	2.380.480.016	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	55%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	59.052.067.124	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11,50%					
			Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART)	55%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	59.052.067.124	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	194.584.428	Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	385 kab/kota	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	400.303.453	Dinas Kesehatan
				Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	2.238.397.872	Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	482 kab/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A	105.247.977.255	RSU Anutapura
				Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	150 kab/kota					
				Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	24 desa					
				Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	360 kab/kota					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	474 kab/kota					
			Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Jumlah kabupaten/kota sehat	380 kab/kota	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	2.238.397.872	Dinas Kesehatan
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	59.052.067.124	Dinas Kesehatan
			Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter	0%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	59.052.067.124	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	194.584.428	Dinas Kesehatan
				Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	85%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	400.303.453	Dinas Kesehatan
				Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	2.238.397.872	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah sakit terakreditasi	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A	105.247.977.255	RSU Anutapura

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%					
				Persentase kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	55%					
				Persentase obat memenuhi syarat	96%					
				Persentase makanan memenuhi syarat	86%					
		Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	75.832.116.712	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	100%					
			Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,32%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	75.832.116.712	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun	96,34%					
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA / SMLB/ Sederajat	92,80%					
				Angka Kesiapan Sekolah	75,59%					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase daerah yang memiliki Indeks Pemerataan Guru dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Baik	34,31%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%	1.585.570.445	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48,83%					
			Penjaminan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI)	82,56%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	75.832.116.712	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS)	77,72%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%	1.585.570.445	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA)	75,90%					
				Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT)	130 PT					
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD)	68,03%					
				Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF)	59,20%					
			Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	75.832.116.712	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
		Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,39	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	20.787.351	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	69,44	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Kota Layak Anak	Pratama	279.871.613	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	54,38%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,11	40.709.875	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,07%	168.356.594	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	138.454.244	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	34.053.116	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kualitas Pemuda	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	meningkat %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	178.351.200	Dinas Pemuda dan Olahraga



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentas usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	23,58%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	245.977.118	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3%	265.699.621	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	15.901.011	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	44,56%	143.643.831	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		1,28%			
		Pengentasan Kemiskinan (PP6)	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro	0,15%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	343.194.145	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	74,8%	32.290.087	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga)	4.200 lembaga	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	727.017.941	Dinas Sosial
				Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.500 orang					
			Reforma Agraria	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah	0,0047 indeks	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	40%	22.531.698	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria	20%	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	9.593.375	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu	20%	502.298.400	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
							Persentase kawasan pemetaan	20%		
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7)	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	1.890.345 orang	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3%	265.699.621	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
				PT Vokasi berakreditasi A	14 PT Vokasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	15.901.011	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
				Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi	2.082.084 orang					
				Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi	329.498 orang					
				Jumlah lulusan pelatihan vokasi	2,6 juta orang					
				Jumlah pemagangan dalam negeri	55.000 orang					
				Jumlah pemagangan luar negeri	3.000 orang					
			Peningkatan Kapabilitas. Iptek dan Penciptaan Inovasi	Jumlah <i>paten granted</i> (domestik)	950 paten	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80%	999.710.629	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada SEA Games	69 medali emas, 92 medali perak, 80 medali perunggu	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	7.742.024.734	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games	126 medali emas 75 medali perak 50 medali perunggu					
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	35%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	75.832.116.712	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	Skor rata-rata nilai SKM secara nasional	76,61	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	BB	26.422.898.698	Sekretariat Daerah
							Nilai Sakip	BB		
							Indeks Reformasi Birokrasi	78		
			Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	77,22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	138.454.244	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	35	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	7.127.856.240	Dinas Sosial
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	343.194.145	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	74,8%	32.290.087	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	340 unit (kumulatif)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	88,01%	113.131.949	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	16.000 WUB	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,2%	116.526.555	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	94%	3.736.038.264	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan lokal	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	30%	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	603.858.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100%	164.922.004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100%	12.516.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	78%	42.793.213	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni	0,31%	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	603.858.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100%	164.922.004	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100%	12.516.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	78%	42.793.213	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22,58%	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	603.858.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	60%	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	603.858.754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Memperkuat Moderasi beragama untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen)	89,58%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen)	88%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen)	75,83%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	94%	1.253.909.459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen)	55%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah
			Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen)	53%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	14.618.753.662	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)	Peningkatan Budaya Literasi	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	01:14	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan perpustakaan	100%	153.057.317	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 : 18.000					
				Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	21,24%					
			Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	46%	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	30.171.716	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Indeks daya hidup bahasa daerah	0,57					
			Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	Jumlah talenta nasional bidang riset dan inovasi	11.500 orang	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80%	999.710.629	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan	4%	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan perpustakaan	100%	153.057.317	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah	4.988 unit	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	78,87%	1.228.305.404	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERAs	20.000 rumah tangga		Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		
				Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	220.000 rumah tangga	Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,897	3.662.948.372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah	124.750 unit		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23%		
				Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	275 ha	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,897	5.451.596.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48 kab/kota	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	100%	44.387.740.301	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	48 kab/kota	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	33,88%	646.954.529	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
							Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	18,02%		
							Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	20%		
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	19.185.621 sambungan rumah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	81,20%	5.665.497.804	Dinas Pekerjaan Umum
				Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukanjaringan perpipaan	47 .631.449 rumah tangga		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	31,78%		
				Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	9.740.076 rumah tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,42%	305.122.121	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	63,18%	6.952.801.855	Dinas Pekerjaan Umum
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	62.352 sambungan rumah		Persentase jalan yang memiliki drainase	4,39%		
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	284. 145 sambungan rumah	Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,897	3.662.948.372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1.730.314 rumah tangga		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23%		
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	4.470.423 rumah tangga	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,897	5.451.596.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	376.144 rumah tangga	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	100%	44.387.740.301	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	473.562 rumah tangga	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72%	14.459.491.882	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	88 kab/kota	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	315.588.817	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	84 kab/kota					
				Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	1,49%					
			Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	41,82 m3/detik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	39,28	2.914.161.401	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	70%		Rasio jaringan irigasi	80%		
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	81,20%	5.665.497.804	Dinas Pekerjaan Umum
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	31,78%		
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	661.747.461	Dinas Lingkungan Hidup
		Infrastruktur Ekonomi (PP2)	Konektivitas Jalan	Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	8 lokasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,56%	77.967.154.070	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun	379,8 km					
				Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun	10.337,9 m					
			Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan	24 lokasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	21%	5.283.561.411	Dinas Perhubungan
				Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun	13 lokasi					
				Jumlah layanan perintis angkutan jalan	336 layanan					
				Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	325 layanan					
		Infrastruktur Perkotaan (PP3)	Transportasi Perkotaan	Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota)	4 kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	21%	5.283.561.411	Dinas Perhubungan
				Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota)	11 kota					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
			Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga	25,4% (kumulatif)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komikasi dan Informatika
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal	7 kab/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	81,20%	5.665.497.804	Dinas Pekerjaan Umum
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	31,78%		
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,42%	305.122.121	Dinas Pekerjaan Umum
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	63,18%	6.952.801.855	Dinas Pekerjaan Umum
							Persentase jalan yang memiliki drainase	4,39%		
						Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,897	3.662.948.372	Dinas Perumahan dan Kawasan



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
							Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23%		Permukiman
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,897	5.451.596.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	100%	44.387.740.301	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72%	14.459.491.882	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	315.588.817	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan	1 kawasan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	78,87%	1.228.305.404	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		
						Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,897	3.662.948.372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23%		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,897	5.451.596.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU )	100%	44.387.740.301	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	33,88%	646.954.529	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung		18,02%			
					Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu		20%			
		Transformasi Digital (PP5)	Penuntasan Infrastruktur TIK	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	99,5% (kumulatif)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komikasi dan Informatika
				Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	60% (kumulatif)					
				Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	8%					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)	0,30%					
				Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	94%					
				Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital	75%					
			Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5-5,7%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komikasi dan Informatika
				Persentase K/L/Dyang memanfaatkan cloud pemerintah (kumulatif)	35%	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	3.647.355.774	Dinas Komikasi dan Informatika
			Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	15.700 peserta	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	45%	1.717.734.520	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	1.141 lokasi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	661.747.461	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup	3.375 perusahaan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	498.499.317	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional	70 juta ha	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	3.310.314.566	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline	2%	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	59.764.808	Dinas Lingkungan Hidup
				Luas kawasan konservasi	27 juta ha	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	315.588.817	Dinas Lingkungan Hidup
				Luas kawasan konservasi perairan	29,1 juta ha					
				Akurasi informasi meteorologi	92%					
				Akurasi informasi klimatologi	83%					
			Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	69,20 juta ton	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72%	14.459.491.882	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline	50%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	661.747.461	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah limbah B3 yang dikelola	117,22 juta ton					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,046%					
			Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut	330.000 ha	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	661.747.461	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional	285.000 ton					
				Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan	40 lokasi					
				Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya	25 jenis					
			Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	68%	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	59.764.808	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kesehatan yang ditangani	610 kasus					
				Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.150.000 ha					
				Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	7 daerah					
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN	1,06	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50%	2.712.727.952	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis	96%	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,49%	838.276.953	Dinas Sosial
				Indeks Risiko Bencana Indonesia	132,5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,16%	1.205.677.065	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir	0,65%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	498.499.317	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	0,06%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	3.310.314.566	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian	0,207%					
				Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan	0,078%					
		Pembangunan Rendah Karbon	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional	69,20 juta ton	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72%	14.459.491.882	Dinas Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu	76,1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	85%	2.757.803.630	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Terbebas dari ancaman dan/ penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan	95,35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,11	40.709.875	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Keternakmakan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif	61,3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,07%	168.356.594	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	138.454.244	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	34.053.116	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	79%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	122.720.352	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase konten informasi publik yang berkualitas	90%	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	3.647.355.774	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	50.000 orang					
		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Nilai Indeks Sistem Merit Nasional	0,7	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	2.026.223.717	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	2.726.128.811	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Transformasi Pelayanan Publik	Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	82,5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	117.349.558	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
				Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	72,5	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	385,9	74.281.687	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
				Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Pelayanan Publik	86,42	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83.664.693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	561.852.785	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	93.067.824	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
						Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	66,8%	1.254.526.448	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	171.710.015	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	137.331.893	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	11.666.899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan	56	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B (70)	26.422.898.698	Sekretariat Daerah
			Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L)	78	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	19.419.589.555	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi)	70	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	1.857.242.644	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	Program	Indikator	Target	Pagu Anggaran	OPD Pelaksana
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/ Kota)	65	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	1.147.642.775	Badan Pendapatan Daerah
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	1.383.720.237	Inspektorat
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	99.905.794	Inspektorat
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka prevalensi penyalahguna narkoba	1,69%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2.159.282.148	Dinas Polisi Pamong Praja
				Crime rate	111/100.000 penduduk	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	7%	374.604.702	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pelayanan publik Polri yang prima	9%					
			Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	Skor Global Cyber Seuity Index	88,54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	58.291.230	Dinas Komunikasi dan Informatika



#### 4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2023, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2023, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2023, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah  
dan Kota Palu Tahun 2023

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran RKP Nasional (2023)</b>	<b>Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (2023)</b>	<b>Sasaran Pembangunan Kota Palu (2023)</b>
Pertumbuhan PDRB	5,3 – 5,9%	10,36%	3,73 %
Inflasi	3,0%	1,91%	2 %
Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5%	10,84%	5,5 - 6,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0%	2,84%	6,0 – 7,0%
IPM	73,29 – 73,35	69,87	81,9
Indeks Gini	0,375 – 0,378	0,220	0,308 - 0,330
Pendapatan Per Kapita	Rp 61.650.000 – 63.450.000	Rp 70.200.000	Rp 73.500.000

Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target periode kedua RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.

6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah
7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Pagu indikatif Tahun 2023 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan urusan pemerintahan disajikan dalam tabel 5.1, sedangkan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai pagu indikatif dapat dilihat pada Buku 2 RKPD Tahun 2023.

**Tabel 5.1**  
**Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	890.928.970.589
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	383.290.071.244
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	383.290.071.244
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	263.344.885.558
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	130.591.193.979
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	132.753.691.578
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	136.462.542.874
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	128.500.417.509
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.962.125.365
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59.568.935.228
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.568.935.228
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31.962.186.744

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.145.597.965
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.269.537.337
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	14.547.051.443
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.300.348.941
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	16.300.348.941
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.760.493.838
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	448.945.357
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	448.945.357
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.257.776.503
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.257.776.503
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	763.089.839
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	763.089.839
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	534.423.473
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	534.423.473
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	30.825.064.199
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	30.825.064.199
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.065.554.317
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.065.554.317
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.007.475.352
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.007.475.352



Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.645.839.190
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	17.645.839.190
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.793.535.075
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.793.535.075
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.799.387.509
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.799.387.509
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.402.172.633
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.431.406.929
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.970.765.703
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.379.483.114
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.379.483.114
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	206.960.188
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	206.960.188
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	58.291.230
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	58.291.230
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	824.090.609
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	824.090.609
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	183.229.033
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	183.229.033
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.565.176.217
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.565.176.217
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.203.531.589

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.887.658.207
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.887.658.207
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.222.463.835
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	5.222.463.835
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.791.265.731
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.791.265.731
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.519.123.858
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.519.123.858
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.783.019.958
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.783.019.958
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.140.487.818
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	43.795.911.517
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	43.795.911.517
4	02		SEKRETARIAT DPRD	43.344.576.300
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	43.344.576.300
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	74.390.397.581
5	01		PERENCANAAN	9.044.129.065
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.044.129.065
5	02		KEUANGAN	49.195.408.248
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.242.358.434
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	16.953.049.815
5	03		KEPEGAWAIAN	8.305.166.100
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.305.166.100
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.726.128.811
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.726.128.811

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2023
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.119.565.357
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.119.565.357
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.567.067.016
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	10.567.067.016
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.567.067.016
7			UNSUR KEWILAYAHAN	101.332.143.991
7	01		KECAMATAN	101.332.143.991
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	13.304.096.310
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	17.702.310.708
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	11.861.383.274
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	10.827.125.511
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	12.984.014.548
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	11.116.475.408
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	12.813.131.096
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	10.723.607.136
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.112.744.892
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.112.744.892
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.112.744.892
<b>Total</b>				<b>1.330.435.837.315</b>

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan perkiraan capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah sesuai tahapan tahunan pada Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Penetapan kinerja capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu bertujuan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dijanjikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu selama periode Tahun 2023.

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Palu periode Tahun 2023 dijadikan dasar oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2023. Dengan demikian, indikator capaian pembangunan daerah dalam RKPD menjadi dasar bagi PD dalam pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD ditetapkan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang diukur dari capaian indikator kinerja program kegiatan merupakan keberhasilan pemerintah Kota Palu dalam pembangunan daerah yang diukur dari capaian indikator pembangunan daerah dalam RKPD periode yang bersesuaian. Oleh karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome/impact*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kota Palu Tahun 2023**

No.	Indikator	Target IKU Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,73
2	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	28,04
3	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	65,67
4	Indeks Kota Layak Huni	62
5	Indeks Risiko Bencana	125,08
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,60
7	Indeks ketentraman dan ketertiban	100
8	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,39
9	Persentase Layanan Angkutan Darat	21,04
10	Persentase luas kawasan kumuh	0,31
11	Persentase rumah tidak layak huni	10,30
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	85
13	Indeks ketangguhan kota	450
14	Indeks Pembangunan Manusia	81,90
15	Harapan Lama Sekolah	17,00
16	Rata-rata Lama Sekolah	11,65
17	Angka Harapan Hidup	71,60
18	Case Fatality Rate Covid-19	1,50
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	70
20	Indeks Pembangunan Gender	98,11

No.	Indikator	Target IKU Tahun 2023
21	Indeks Kota Layak Anak	Pratama
22	Indeks kerukunan umat beragama	83
23	Indeks Aktualisasi Pancasila	69
24	Indeks pembangunan kebudayaan	52,42
25	Indeks Reformasi Birokrasi	78
26	Opini BPK	WTP
27	Nilai Evaluasi AKIP	BB
28	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL III
29	Indeks Profesionalitas ASN	75
30	Indeks Pelayanan Publik	C
31	Indeks Inovasi Daerah	50
32	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,4
33	Indeks Kualitas Kebijakan	78

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini :

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Palu Tahun 2023**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
1	Pertumbuhan PDRB	3,73%
2	Laju inflasi	2
3	PDRB per kapita ADHK (2010)	43.995.582
4	PDRB per kapita ADHB	78.170.432
5	Indeks Gini	0,300 - 0,330
6	Indeks Wiliamson	< 0,265
7	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	
	a, 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	24,75
	b, 40% Penduduk Berpenghasilan	37,5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
	Menengah	
	c, 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	37,5
8	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	93,6
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,9
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,2
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,9
10	Harapan Lama Sekolah (tahun)	17
11	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,65
12	Angka harapan hidup	71,6
13	Pengeluaran Perkapita/ tahun (ribu rupiah)	15.605
14	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,46
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,08
16	Tingkat pengangguran terbuka	8,25
17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADHB	1,12
18	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ADHB	10,5
19	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	7,1
	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>	
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-13,50%
2	Angka kriminalitas (per 10,000 penduduk)	12,00
3	Rasio ketergantungan	37,5
4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	4 - 3,6
	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>	
	<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>	
1	<b>Pendidikan</b>	
1.1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	17
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,65
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54,87
1.3	Angka Partisipasi Kasar	
	1,3,1 Angka Partisipasi Kasar SD	92

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
	1,3,2 Angka Partisipasi Kasar SMP	87
1.4	Angka Partisipasi Murni	
	1,4,1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	88,24
	1,4,2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	78,496
1.5	Angka Partisipasi Sekolah	
	1,5,1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	91
	1,5,2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/ Paket B	81,4
1.6	Angka Putus Sekolah	
	1,6,1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	8
	1,6,2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	12
1.7	Angka Kelulusan (AL)	
	1,7,1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100
	1,7,2 Angka Kelulusan SMP/MTS/Paket B	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM)	
	1.8.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	91,52
	1.8.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	124,97
1.9	Fasilitas Pendidikan	
	1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	81,40%
	1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	71,80%
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	
	SD	46,03
	SMP	28,22
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	
	SD	21,4
	SMP	21,2
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,95
1.13	Kualifikasi S1 / D-IV	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD	92
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SMP	97
1.16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	57,32
1.17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,50
1.18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	84,50
2	<b>Kesehatan</b>	
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9975
2.2	Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	16,5
2.3	Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	11,6
2.4	Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	180,31
2.5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3,79
2.6	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	60,33
2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100
2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	100
2.9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
2.10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.11	AFP Rate per 100.000 penduduk	2
2.12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100
2.13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100
2.14	Penderita Diare yang ditangani	100
2.15	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100
2.16	Cakupan kunjungan bayi	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
2.17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100
2.18	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100
2.19	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100
2.20	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100
2.21	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
2.22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
2.23	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
2.24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.25	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.27	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100
2.28	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
2.29	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	100
2.30	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100
2.31	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100
2.32	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	87
2.33	Prevalensi balita Stunting	0,14

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
2.34	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100
2.35	Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19	1,5
2.36	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,531
2.37	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	95
2.41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
3	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
3.1	<b>Pekerjaan Umum</b>	
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	71,56
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,452
3.1.3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	96,80
3.1.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	4,39
3.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	63,18
3.1.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	50,23
3.1.7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	39,28
3.1.8	Rasio jaringan irigasi	80,14
3.1.9	Persentase penduduk berakses air minum	95,71
3.1.10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	31,78
3.1.11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,14
3.1.12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	95,71

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
	kabupaten/kota	
3.1.13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,42
3.1.14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,56
3.1.15	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	44,56
3.1.16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1,28
3.2	<b>Penataan Ruang:</b>	
3.2.1	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	10,00%
3.2.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,3388
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	85,07%
3.2.4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	34,40%
4	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	
4.1	Rasio rumah layak huni	0,897
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,70%
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,31%
4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100,00%
4.5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100.00%
4.6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100.00%
4.7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	54,23%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
4.8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,30%
4.9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00%
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	
5.1	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	2,9
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	13,86
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%
5.4	Persentase Penegakan PERDA	100%
5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	101,25%
5.6	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit
5.7	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	50%
5.8	Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	65%
5.9	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%
5.10	Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	45%
5.11	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50%
5.12	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	65%
5.13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,16%
5.14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
5.15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
6	<b>Sosial</b>	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	68,53
6.2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	64,05
6.3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80,82
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	88,10
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	75,73
6.8	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	16,18%
6.9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,49%
	<b>Urusan Wajib</b>	
	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>	
1	<b>Tenaga Kerja</b>	
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	83%
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	44%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,75%
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	37,79%
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	74,00%
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	
1.8	Prosentase terfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan	0,33
1.9	Prosentase Pekerja yang terfasilitasi penyelesaian Perselisihan	0,4
1.10	Prosentase tenaga kerja yang dilatih kopetensi keahlian dan keterampilan Tenaga kerja yang ditempatkan	0,373
1.11	Tenaga kerja yang ditempatkan	0,3163
1.12	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100
1.13	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3
1.14	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18,89
1.15	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	2,4
1.16	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72
2	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,04
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	13.33
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	89.29
2.4	Rasio KDRT	0.07

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	31.38
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	39,44
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,96
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,93
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,11
2.16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	165
2.17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.11%
2.18	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68.89
2.19	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	33.02



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0.036
2.21	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.066
3	<b>Pangan</b>	
3.1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	3,100
3.2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	72.90
3.3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93.04
3.4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	150
4	<b>Pertanahan</b>	
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	85%
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	40%
5	<b>Lingkungan Hidup</b>	
5.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	17
5.2	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	83%
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	20,6
5.4	Persentase sampah yang terangkut	100
5.5	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	786.1
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
5.7	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	70.95%
5.8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0
5.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	74.6
5.10	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74.6
6	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
6.1	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0.668
6.2	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran	100
6.3	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	184%
6.5	Perekaman KTP elektronik	100%
6.6	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30%
6.7	Kepemilikan akta kelahiran	100%
6.8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	22
6.9	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	100%
6.1	Rasio anak (0-17 tahun kurang satu hari) ber-KIA	30%
6.11	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	100%
6.12	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	100%
7	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
7.1	Persentase PKK aktif	100%
7.2	Persentase pengentasan desa tertinggal	0%
7.3	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%
8	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,75
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0
8.4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1
8.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	18
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,06
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,15
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	10%
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34%
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	36%
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	83%
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75%
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	41%
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	52,22
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	55%
8.20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	69%
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan	1,63
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	76%
8.23	Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	25%
8.24	TFR (Angka Kelahiran Total)	33.02%
8.25	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	3.60%
8.26	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6.60%
9	<b>Perhubungan</b>	
9.1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	108,906
9.2	Jumlah trayek angkutan umum	8 trayek
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	102 unit
9.4	Persentase layanan angkutan darat	21.04%
9.5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan ( KIR)	2.42%
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	59.09%
9.8	Tingkat pelayanan ruas jalan Kota Palu	17 ruas Jalan
9.9	Jumlah Titik Parkir yang direvitalisasi	100 titik Parkir
9.10	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.58
9.11	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	17 ruas Jalan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%
10.3	Jumlah Staf IT yang terlatih	192 org
10.4	Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	42
10.5	Rasio Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	100%
10.6	Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media)	7 media
10.7	Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota	4
10.8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
10.9	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	33.33%
11	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>	
11.1	Persentase koperasi aktif	88.01%
11.3	Persentase Usaha Mikro	0.94%
11.4	Persentase usaha mikro Yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas produk	0.39
11.5	Presentase koperasi aktif yang menjalankan RAT	0.61
11.6	Prosentase koperasi RAT yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas usaha	3
11.7	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46
11.8	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	10.8
12	<b>Penanaman Modal</b>	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
12.2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	208 Investor
12.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	38.785 M
12.4	Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	0.18%
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,65
13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	54
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	65
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	24.6
13.4	Peningkatan prestasi olahraga	2
14	<b>Statistik</b>	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia
14.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50
14.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	50
15	<b>Persandian</b>	
15.1	Jumlah Sandiman yang tersedia	5
16	<b>Kebudayaan</b>	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6
1.2	Terlestarikannya Cagar Budaya	78

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
17	<b>Perpustakaan</b>	
17.1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	0.99
17.2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	33.29
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.05
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	294
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5
17.6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67.3
17.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.00
18	<b>Kearsipan</b>	
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	41
18.2	Jumlah SDM Pengelola kearsipan	40
18.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100
18.4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100
	<b>Urusan Pilihan</b>	
1	<b>Pariwisata</b>	
1.1	Kunjungan wisata	115,950
1.2	Lama kunjungan Wisata	1.75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
1.3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15,37
1.4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	15
1.5	Tingkat hunian akomodasi	5.85
1.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,12%
1.7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,20%
2	<b>Pertanian</b>	
2.1	Produksi tanaman pangan utama	
	1. Padi (ton)	5.63
	2. Jagung (ton)	4.77
2.3	Produksi peternakan utama	
	1. Sapi (ekor)	6,659
	2.Kambing/domba (ekor)	27,475
	3. Unggas (ekor)	4,746,407
2.5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	15
2.6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.63
2.7	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10
5	<b>Perdagangan</b>	
5.1	Jumlah pasar yang tersegmentasi	2
5.2	Tipe pasar yang ditingkatkan	2
5.3	Pasar Tematik	1
5.4	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	64%
5.5	Pengawasan UTTP dan BDKT	12
6	<b>Perindustrian</b>	
6.1	Cakupan Bina IKM	45%
6.2	Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi halal dan HAKI	21%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
6.3	Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil	19%
6.4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu	1,970
6.5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	10,00%
6.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,10%
6.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	1,40%
6.8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	30
7	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	
7.1	Produksi perikanan	
	1. Perikanan tangkap (ton)	1,090
	2. Perikanan budi daya (ton)	130
7.3	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	75,35
7.4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	15
7.5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1,220,26
	<b>Penunjang Urusan</b>	
1	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai
2	<b>Keuangan</b>	
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	3.20%
2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	22.58%
2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	26.3
2.5	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0.05%
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu
2.7	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,69%
2.8	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	19,99%
2.9	Opini Laporan Keuangan	WTP
2.10	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	19,99%
2.11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	19,99%
2.12	Manajemen Aset :	
	2.12.1 Apakah ada daftar aset tetap?	Ya
	2.12.2 Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ya
	2.12.3 Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan ?	Ya
	2.12.4 Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	Ya
3	<b>Pendapatan</b>	
3.1	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD	44.1
3.2	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD	9.15

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
3.3	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	0.87
3.4	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD	45.88
3.5	Rasio PAD	8.02
4	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	
4.1	Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP
4.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7
4.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	88.89
4.4	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	39
4.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	3
4.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5.25
4.7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.1445
4.8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.04
4.9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00%
5	<b>Penelitian dan pengembangan</b>	
5.1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan.	35,49%
5.2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan.	85,00%
5.3	Penerapan SIDA:	
5.3.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	36,59%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Kota Palu
		2023
5.3.2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	66,67%
6	<b>Pengawasan</b>	
6.1	Persentase tindak lanjut temuan	82%
6.2	Persentase pelanggaran pegawai	25.00%
6.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
6.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
7	<b>Sekretariat Dewan</b>	
7.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tersedia
7.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tersedia
7.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasi
8	<b>Pengadaan</b>	
8.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	37,90%
8.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	37,90%
8.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,90%
9	<b>Transparansi dan Partisipasi Publik</b>	
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100

<b>No.</b>	<b>Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</b>	<b>Target IKK Kota Palu</b>
		<b>2023</b>
9.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2023, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana baik alam maupun non alam di Kota Palu yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan daerah Kota Palu, prioritas pembangunan Sulawesi Tengah, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan Indonesia.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota Palu. RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu 2023.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2023 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.







**BUKU 2**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA PALU**  
**TAHUN 2023**

*\*palumantapbergerak*



**BUKU 2**  
**MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**RKPD TAHUN 2023**

Buku 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023 memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah untuk Tahun Rencana 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024. Buku ini memuat uraian rinci yang menjelaskan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Pagu indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023**

No.	Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2023
1	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384.114.161.853
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	130.591.193.979
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSU. Anutapura	132.753.691.578
4	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	128.500.417.509
5	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	8.496.548.838
6	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	59.568.935.228
7	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.145.597.965
8	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	14.547.051.443
9	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.269.537.337
10	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	16.300.348.941
11	2.08.0.00.0.00.01.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.257.776.503
12	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	30.825.064.199
13	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.065.554.317
14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.007.475.352
15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	17.645.839.190

No.	Kode	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2023
16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.058.786.493
17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja	6.248.332.867
18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.431.406.929
19	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.970.765.703
20	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.379.483.114
21	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.748.405.250
22	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	5.222.463.835
23	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.442.013.777
24	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.302.143.816
25	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	43.795.911.517
26	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	43.344.576.300
27	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.044.129.065
28	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.242.358.434
29	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	16.953.049.815
30	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.031.294.911
31	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.119.565.357
32	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.567.067.016
33	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	13.304.096.310
34	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	17.702.310.708
35	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	11.861.383.274
36	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	10.827.125.511
37	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	12.984.014.548
38	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	11.116.475.408
39	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	12.813.131.096
40	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	10.723.607.136
41	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.112.744.892
<b>Total</b>			<b>1.330.435.837.315</b>

Rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2023 serta Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				890.928.970.589		935.475.419.119
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				383.290.071.244		402.454.574.807
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000			<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				383.290.071.244		402.454.574.807
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	305.872.384.088	B	321.166.003.292
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	4 Dokumen	184.583.465	4 Dokumen	193.812.639
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	37.640.332	1 Dokumen	39.522.349
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	83.466.939	1 dokumen	87.640.286
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	10.317.914	1 dokumen	10.833.809
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	53.158.280	1 laporan	55.816.194
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	100	303.533.189.066	100	318.709.848.519
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	2714 org/bulan	303.494.527.880	2714 org/bulan	318.669.254.274
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 lappran	38.661.186	4 lappran	40.594.245
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	100%	27.660.273	100%	29.043.286
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	2 Laporan	27.660.273	2 Laporan	29.043.286
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	100%	28.457.025	100%	29.879.876
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	2 dokumen	28.457.025	2 dokumen	29.879.876
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	100%	564.885.654	100%	593.129.936
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	5 paket	2.355.984	5 paket	2.473.784
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	6 paket	52.530.212	6 paket	55.156.723
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	12 paket	156.500.749	12 paket	164.325.786

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	25.406.554	4 paket	26.676.881
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	3 dokumen	50.653.786	3 dokumen	53.186.475
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 laporan	11.363.073	15 laporan	11.931.227
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	25 laporan	266.075.295	25 laporan	279.379.060
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>6.416.794</b>	<b>100%</b>	<b>6.737.634</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	20 unit	6.416.794	20 unit	6.737.634
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.314.854.252</b>	<b>100%</b>	<b>1.380.596.964</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	321.073.057	12 laporan	337.126.710
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	993.781.195	12 laporan	1.043.470.255
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>212.337.559</b>	<b>100%</b>	<b>222.954.437</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	23 unit	121.432.972	23 unit	127.504.621
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 unit	16.333.658	1 unit	17.150.341
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	74 unit	12.541.916	74 unit	13.169.012
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	54.445.528	1 unit	57.167.804
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	8 paket	7.583.484	8 paket	7.962.658
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>75.832.116.712</b>	<b>100%</b>	<b>79.623.722.547</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100</b>	<b>43.421.671.831</b>	<b>100</b>	<b>45.592.755.422</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 paket	96.251.916	1 paket	101.064.511
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	2 ruang	555.287.996	2 ruang	583.052.396
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Palu	7 ruang	360.044.952	7 ruang	378.047.199
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	3 ruang	340.284.550	3 ruang	357.298.778
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	5 unit	4.061.104.964	5 unit	4.264.160.212
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	5 ruang	584.530.528	5 ruang	613.757.054
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	8 ruang	97.303.549	8 ruang	102.168.727

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	153 paket	6.072.565.617	153 paket	6.376.193.898
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Palu	160 unit	33.905.379	160 unit	35.600.648
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Palu	35.370 peserta didik	30.800.700.000	35.370 peserta didik	32.340.735.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kota Palu	172 satuan pendidikan	171.428.065	172 satuan pendidikan	179.999.468
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Palu	50 satuan pendidikan	30.144.350	50 satuan pendidikan	31.651.567
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Palu	670 peserta didik	170.832.567	670 peserta didik	179.374.195
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Palu	172 satuan pendidikan	47.287.399	172 satuan pendidikan	49.651.769
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.1.01.2.22.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100</b>	<b>23.977.375.249</b>	<b>100</b>	<b>25.176.244.012</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 unit	96.251.916	1 unit	101.064.511
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	6 ruang	307.590.711	6 ruang	322.970.246
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Palu	7 ruang	282.436.177	7 ruang	296.557.985
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	10 ruang	399.975.111	10 ruang	419.973.867
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	9 ruang	420.234.370	9 ruang	441.246.089
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Palu	2 ruang	570.970.252	2 ruang	599.518.765
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 unit	466.535.952	1 unit	489.862.749
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	6 ruang	284.852.780	6 ruang	299.095.419
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	9 ruang	187.628.623	9 ruang	197.010.054
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	5 ruang	338.828.132	5 ruang	355.769.539
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	10 unit	170.044.565	10 unit	178.546.793
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	1 paket	153.614.168	1 paket	161.294.877
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Palu	16.008 peserta didik	19.641.105.000	16.008 peserta didik	20.623.160.250
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kota Palu	3 paket	202.226.247	3 paket	212.337.559
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kota Palu	16140 peserta didik	69.532.530	16140 peserta didik	73.009.156
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Palu	48 satuan pendidikan	41.675.135	48 satuan pendidikan	43.758.892
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Palu	650 peserta didik	307.393.618	650 peserta didik	322.763.299

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Palu	48 satuan pendidikan	36.479.962	48 satuan pendidikan	38.303.960
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100</b>	<b>6.658.394.683</b>	<b>100</b>	<b>6.991.314.417</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Palu	3 unit	1.096.792.710	3 unit	1.151.632.345
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kota Palu	5 paket	360.494.682	5 paket	378.519.416
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Palu	7.450 peserta didik	168.562.383	7.450 peserta didik	176.990.502
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Palu	270 satuan pendidikan	24.344.910	270 satuan pendidikan	25.562.155
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Palu	270 satuan pendidikan	5.008.200.000	270 satuan pendidikan	5.258.610.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100</b>	<b>1.774.674.949</b>	<b>100</b>	<b>1.863.408.696</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Palu	1.545 peserta didik	291.198.906	1.545 peserta didik	305.758.852
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Palu	10 satuan pendidikan	17.476.042	10 satuan pendidikan	18.349.844
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Palu	10 satuan pendidikan	1.466.000.000	10 satuan pendidikan	1.539.300.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.585.570.445</b>	<b>100%</b>	<b>1.664.848.967</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100</b>	<b>1.585.570.445</b>	<b>100</b>	<b>1.664.848.967</b>
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Palu	3 dokumen	891.069.123	3 dokumen	935.622.579
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Palu	2 Laporan	694.501.322	2 Laporan	729.226.388
1	02					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				<b>263.344.885.558</b>		<b>276.512.129.836</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				<b>Dinas Kesehatan</b>				<b>130.591.193.979</b>		<b>137.120.753.678</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>68.705.841.102</b>	<b>B</b>	<b>72.141.133.157</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>12 Dok</b>	<b>357.847.606</b>	<b>12 Dok</b>	<b>375.739.986</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	47.743.770	1 Dokumen	50.130.958
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	209.541.247	1 dokumen	220.018.309
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	30.696.508	1 dokumen	32.231.333



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	13.087.222	1 laporan	13.741.583
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	1 laporan	56.778.859	1 laporan	59.617.802
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>59.595.534.480</b>	<b>100%</b>	<b>62.575.311.204</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	1.099 orang/bulan	59.581.687.329	1.099 orang/bulan	62.560.771.695
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.746.969	1 dokumen	4.984.318
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.284.768	1 Laporan	2.399.006
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Palu	1 dokumen	2.406.298	1 dokumen	2.526.613
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 lappran	3.242.426	4 lappran	3.404.547
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu	1 Dokumen	1.166.690	1 Dokumen	1.225.024
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.677.117</b>	<b>100%</b>	<b>1.760.973</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.677.117	1 Laporan	1.760.973
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>18.103.138</b>	<b>100%</b>	<b>19.008.295</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	1 dokumen	18.103.138	1 dokumen	19.008.295
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>429.638.222</b>	<b>100%</b>	<b>451.120.133</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.884.496	1 paket	1.978.721
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	42.487.248	1 paket	44.611.611
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	16.759.456	1 paket	17.597.429
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	10.412.707	1 paket	10.933.343
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	53.109.911	1 paket	55.765.407
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	2.430.604	12 dokumen	2.552.134

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	3.675.073	12 laporan	3.858.827
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	24 laporan	298.878.726	24 laporan	313.822.662
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>6.671.119.013</b>	<b>100%</b>	<b>7.004.674.963</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	843.474.252	12 laporan	885.647.965
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	5.827.644.760	12 laporan	6.119.026.998
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.631.921.527</b>	<b>100%</b>	<b>1.713.517.604</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	1 unit	483.374.204	1 unit	507.542.914
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	338 unit	1.131.482.540	338 unit	1.188.056.667
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	48 unit	7.777.933	48 unit	8.166.829
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	96 unit	9.286.851	96 unit	9.751.194
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan SPM Kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>59.052.067.124</b>	<b>100%</b>	<b>62.004.670.481</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>14 Puskesmas</b>	<b>10.580.034.522</b>		<b>11.109.036.248</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kota Palu	1 unit	426.753.285	1 unit	448.090.949
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Palu	7 unit	540.566.314	7 unit	567.594.630
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Palu	3 unit	470.564.921	3 unit	494.093.167
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Palu	8 unit	295.632.387	8 unit	310.414.006
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Palu	7 unit	1.020.853.650	7 unit	1.071.896.333
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	631.957.022	10 unit	663.554.873



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	449 unit	5.137.739.149	449 unit	5.394.626.107
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Kota Palu	369 unit	171.114.517	369 unit	179.670.242
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.786.581.644	1 paket	1.875.910.726
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	98.271.633	1 paket	103.185.214
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>14 Puskesmas</b>	<b>48.260.209.065</b>	<b>14 Pkm</b>	<b>50.673.219.518</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	8.547 orang	477.552.907	8.547 orang	501.430.552
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	8.158 orang	78.684.483	8.158 orang	82.618.707
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	7.521 orang	81.765.516	7.521 orang	85.853.792
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	49.674 orang	18.083.693	49.674 orang	18.987.878
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	45.918 orang	330.810.178	45.918 orang	347.350.686
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	275.422 orang	32.327.032	275.422 orang	33.943.384
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	29.115 orang	776.310.589	29.115 orang	815.126.119
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	31.063 orang	13.611.382	31.063 orang	14.291.951
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	10.051 orang	413.154	10.051 orang	433.812
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Palu	795 orang	1.008.701	795 orang	1.059.136
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	16.385 orang	113.898.100	16.385 orang	119.593.005
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	7.192 orang	21.061.183	7.192 orang	22.114.242
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kota Palu	1 dokumen	2.000.238.281	1 dokumen	2.100.250.195
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kota Palu	1 dokumen	2.916.725	1 dokumen	3.062.561

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Palu	1 dokumen	851.871.551	1 dokumen	894.465.129
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Palu	1 dokumen	3.694.518	1 dokumen	3.879.244
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Palu	1 dokumen	2.595.885	1 dokumen	2.725.679
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Palu	1 dokumen	4.818.672	1 dokumen	5.059.606
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Palu	1 dokumen	9.953.323	1 dokumen	10.450.989
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Palu	1 dokumen	6.623.396	1 dokumen	6.954.565
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Palu	150 orang	814.252	150 orang	854.965
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Palu	14 Puskesmas	1.701.423	14 Puskesmas	1.786.494
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kota Palu	1 dokumen	949.945.521	1 dokumen	997.442.797
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Palu	1 dokumen	508.786.168	1 dokumen	534.225.476
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Palu	1 dokumen	32.422.488.000	1 dokumen	34.043.612.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kota Palu	450 orang	3.645.906	450 orang	3.828.201
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kota Palu	1 paket	12.881.763	1 paket	13.525.851
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Palu	1 dokumen	18.667.038	1 dokumen	19.600.390
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kota Palu	11 unit	1.871.565.026	11 unit	1.965.143.277
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	7.305.083.004	1 dokumen	7.670.337.154
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Palu	1 dokumen	1.154.537	1 dokumen	1.212.264
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 unit	280.769.755	2 unit	294.808.242

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Palu	1 laporan	10.646.045	1 laporan	11.178.347
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Palu	1 unit	43.821.358	1 unit	46.012.426
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1 Dinas, 14 Puskesmas</b>	<b>204.825.829</b>	<b>1 Dinas, 14 Puskesmas</b>	<b>215.067.120</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Palu	45 dokumen	45.686.314	45 dokumen	47.970.630
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Palu	2 dokumen	22.053.453	2 dokumen	23.156.125
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	137.086.062	2 unit	143.940.365
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>10 RS</b>	<b>6.997.709</b>	<b>10 RS</b>	<b>7.347.594</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kota Palu	10 RS	2.379.561	10 RS	2.498.539
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kota Palu	10 RS	2.199.697	10 RS	2.309.681
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Palu	13 unit	2.418.451	13 unit	2.539.373
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>194.584.428</b>	<b>100%</b>	<b>204.313.650</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		<b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota</b>	<b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>256 Sarana Praktek Swasta</b>	<b>2.250.739</b>	<b>256 Sarana Praktek Swasta</b>	<b>2.363.276</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Palu	2 dokumen	2.250.739	2 dokumen	2.363.276

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Palu	14 Puskesmas, 13 RS	1.482.668	14 Puskesmas, 13 RS	1.556.802
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Kota Palu	2 dokumen	1.482.668	2 dokumen	1.556.802
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 nakes	190.851.021	99 nakes	200.393.572
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	Kota Palu	100 Orang	190.851.021	100 Orang	200.393.572
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Palu	100%	400.303.453	100%	420.318.626
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Palu	265 PIRT	291.404.133	265 PIRT	305.974.339
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Palu	1 dokumen	291.404.133	1 dokumen	305.974.339
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Palu	1.348 TPM	2.588.593	1.225 TPM	2.718.023
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Palu	1 dokumen	2.588.593	1 dokumen	2.718.023
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Palu	1.600 stiker	2.133.098	1.650 stiker	2.239.753
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Palu	1 dokumen	2.133.098	1 dokumen	2.239.753
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06		Pemeriksaan dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	Kota Palu	135 sarana PIRT	104.177.629	135 sarana PIRT	109.386.510

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Palu	135 unit	104.177.629	135 unit	109.386.510
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.238.397.872</b>	<b>100%</b>	<b>2.350.317.765</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.148.847</b>	<b>100%</b>	<b>3.306.290</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palu	1 dokumen	3.148.847	1 dokumen	3.306.290
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>42.351.159</b>	<b>100%</b>	<b>44.468.717</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Palu	1 dokumen	42.351.159	1 dokumen	44.468.717
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.192.897.866</b>	<b>100%</b>	<b>2.302.542.759</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Palu	1 dokumen	2.192.897.866	1 dokumen	2.302.542.759
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001				<b>Rumah Sakit Umum Anutapura</b>				<b>132.753.691.578</b>		<b>139.391.376.157</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>A</b>	<b>105.247.977.255</b>	<b>A</b>	<b>110.510.376.118</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>37.016.277.255</b>	<b>95%</b>	<b>38.867.091.118</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	518 orang/bulan	37.016.277.255	518 orang/bulan	38.867.091.118
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Capaian SPM Gawat Darurat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>75,00%</b>	<b>68.231.700.000</b>	<b>75,00%</b>	<b>71.643.285.000</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	13 unit kerja	68.231.700.000	13 unit kerja	71.643.285.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase pemenuhan SPM Kesehatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>27.407.682.233</b>	<b>100%</b>	<b>28.778.066.345</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS kelas B dan standar akreditasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>70,3%</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>70,3%</b>	<b>23.100.000.000</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	2.000.000.000	1 unit	2.100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	124 unit	20.000.000.000	124 unit	21.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>16 BAB</b>	<b>5.407.682.233</b>	<b>16 BAB</b>	<b>5.678.066.345</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Palu	3 Paket	5.407.682.233	3 Paket	5.678.066.345
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>47.6%</b>	<b>98.032.090</b>	<b>48.5%</b>	<b>102.933.694</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelatihan 20 Jam/Tahun	Kota Palu	47.6%	98.032.090	48.5%	102.933.694
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Palu	6 orang	98.032.090	6 orang	102.933.694
1	03					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>136.462.542.874</b>		<b>143.285.670.018</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00				<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>				<b>128.500.417.509</b>		<b>134.925.438.384</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>14.753.932.652</b>	<b>B</b>	<b>15.491.629.285</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Nilai B	47.868.314	Nilai B	50.261.729
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	10.848.271	1 Dokumen	11.390.685
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	13.177.033	1 dokumen	13.835.885
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	14.756.926	1 dokumen	15.494.772
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	9.086.084	1 laporan	9.540.388
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>7.993.180.520</b>	<b>95%</b>	<b>8.392.839.546</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	92 orang/bulan	7.988.181.740	92 orang/bulan	8.387.590.827
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	4.998.780	1 Laporan	5.248.719
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>102.222.937</b>	<b>100%</b>	<b>107.334.084</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	102.222.937	1 Laporan	107.334.084
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>126.391.404</b>	<b>100%</b>	<b>132.710.975</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	2 orang	126.391.404	2 orang	132.710.975
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>569.649.462</b>	<b>100%</b>	<b>598.131.935</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	14 paket	6.324.529	14 paket	6.640.755
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	29 paket	30.864.246	29 paket	32.407.459
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	45 paket	102.429.976	45 paket	107.551.475
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	29.485.656	7 paket	30.959.939
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	9.829.362	12 dokumen	10.320.830
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	29.667.952	1 laporan	31.151.349
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	361.047.741	35 laporan	379.100.128
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.1.03.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.323.724.855</b>	<b>100%</b>	<b>2.439.911.098</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	291.672.472	1 unit	306.256.095
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	2.025.052.244	1 unit	2.126.304.856
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.000.139	1 paket	7.350.146
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.1.03.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.900.170.123</b>	<b>100%</b>	<b>1.995.178.629</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	144.280.649	12 laporan	151.494.682
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.755.889.474	12 laporan	1.843.683.947
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.1.03.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.690.725.037</b>	<b>100%</b>	<b>1.775.261.289</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	20 unit	277.001.346	20 unit	290.851.414
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	32 unit	311.043.558	32 unit	326.595.736
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Palu	4 unit	989.746.496	4 unit	1.039.233.820
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	140 unit	112.933.637	140 unit	118.580.318
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.1.03.0.00.02.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>39,28</b>	<b>2.914.161.401</b>	<b>39,28</b>	<b>3.059.869.471</b>
							<b>Rasio jaringan irigasi</b>		<b>80%</b>		<b>80%</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.1.03.0.00.02.00</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>725.642.220</b>	<b>100%</b>	<b>761.924.331</b>
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Palu	500 m	725.642.220	500 m	761.924.331



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Kota Palu	80%	2.188.519.181	80%	2.297.945.140	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Kota Palu	1 dokumen	104.564.581	1 dokumen	109.792.810
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Palu	7,838,35 km	1.680.384.902	7,838,35 km	1.764.404.147
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	1,741 m	403.569.699	1,741 m	423.748.183
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk berakses air minum</b>	Kota Palu	<b>81,20%</b>	5.665.497.804	<b>89,32%</b>	5.948.772.694
						<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan</b>			<b>31,78%</b>		<b>32,45%</b>	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari</b>	Kota Palu	20%	5.665.497.804	20%	5.948.772.694
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kota Palu	1 dokumen	174.145.480	1 dokumen	182.852.754
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi sasi SPAM	Kota Palu	1 dokumen	296.173.950	1 dokumen	310.982.648
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kota Palu	33,204 km	4.348.942.227	33,204 km	4.566.389.338
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Palu	2584,59 m	846.236.147	2584,59 m	888.547.955
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	Kota Palu	6,42%	305.122.121	7,22%	320.378.227
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Limbah Domestik</b>	Kota Palu	20,00%	305.122.121	20,00%	320.378.227
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Palu	8 kelompok	52.950.707	8 kelompok	55.598.242
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	6 unit	252.171.415	6 unit	264.779.985
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>	Kota Palu	<b>63,18%</b>	6.952.801.855	<b>64,68%</b>	7.300.441.947
						<b>Persentase jalan yang memiliki drainase</b>			<b>4,39%</b>		<b>6,27%</b>	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Palu	20,00%	6.952.801.855	20,00%	7.300.441.947
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Palu	1 dokumen	342.860.990	1 dokumen	360.004.040
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Palu	2.416,15 km	5.849.392.742	2.416,15 km	6.141.862.379



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	32.200 km	760.548.123	32.200 km	798.575.529
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal</b>	Kota Palu	100%	19.798.103.774	100%	20.788.008.963
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang andal sesuai standar bangunan tahan gempa</b>	Kota Palu	100%	19.798.103.774	100%	20.788.008.963
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 dokumen	19.798.103.774	5 dokumen	20.788.008.963
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>	Kota Palu	71,56%	77.967.154.070	76,14%	81.865.511.774
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang</b>	Kota Palu	5 Km	77.967.154.070	5 Km	81.865.511.774
							<b>Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>		3 Unit		3 Bangunan	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Kota Palu	3 dokumen	913.051.019	3 dokumen	958.703.570
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Palu	4 Ha	972.241.572	4 Ha	1.020.853.650
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Palu	2 dokumen	607.007.359	2 dokumen	637.357.726
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Palu	16,307,50 km	40.304.141.419	16,307,50 km	42.319.348.490
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Palu	63,675,70 km	23.559.032.741	63,675,70 km	24.736.984.378
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Kota Palu	9,471,00 km	5.331.187.584	9,471,00 km	5.597.746.963
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kota Palu	440 km	5.891.595.748	440 km	6.186.175.536
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Kota Palu	1 km	388.896.629	1 km	408.341.460
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga operator/ teknis/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>	Kota Palu	44,56%	143.643.831	48,31%	150.826.023
						<b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</b>	1,28%		1,16%			
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil yang dihasilkan</b>	Kota Palu	40 Peraturan	86.920.827	40 Peraturan	91.266.868
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Kota Palu	40 org	86.920.827	40 org	91.266.868
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan</b>	Kota Palu	1 laporan	56.723.004	1 laporan	59.559.154
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Palu	1 dokumen	56.723.004	1 dokumen	59.559.154
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00				<b>Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan</b>				7.962.125.365		8.360.231.633
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	Kota Palu	B	6.519.073.503	B	6.845.027.178

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dok</b>	<b>6.447.614</b>	<b>4 dok</b>	<b>6.769.995</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.223.370	1 Dokumen	3.384.538
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.160.638	1 dokumen	1.218.670
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.233.556	1 dokumen	1.295.234
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	830.051	1 laporan	871.554
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.414.676.182</b>	<b>95%</b>	<b>4.635.409.991</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/bulan	4.414.249.368	38 orang/bulan	4.634.961.836
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	426.814	1 Laporan	448.155
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>450.148</b>	<b>100%</b>	<b>472.655</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	291.672	1 dokumen	306.256
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	158.475	1 Laporan	166.399
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>24.782.438</b>	<b>100%</b>	<b>26.021.560</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	2 Orang	24.782.438	2 Orang	26.021.560
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>540.401.305</b>	<b>100%</b>	<b>567.421.370</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.241.066	1 paket	1.303.120
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	17 unit	101.935.134	17 unit	107.031.891
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	59 paket	99.683.248	59 paket	104.667.410
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	26.012.323	4 paket	27.312.939
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	3 dokumen	9.139.071	3 dokumen	9.596.024
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	17.592.711	1 laporan	18.472.347
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	1 laporan	284.797.751	1 laporan	299.037.639
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>54.573.961</b>	<b>100%</b>	<b>57.302.659</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	32 unit	51.657.236	32 unit	54.240.098
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	4 unit	2.916.725	4 unit	3.062.561
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.107.416.984</b>	<b>100%</b>	<b>1.162.787.834</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	1 laporan	138.777.762	1 laporan	145.716.650
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 laporan	968.639.222	1 laporan	1.017.071.184
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>370.324.870</b>	<b>100%</b>	<b>388.841.114</b>
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	18 unit	240.231.170	18 unit	252.242.729
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	7 unit	108.801.610	7 unit	114.241.690
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	163 unit	21.292.090	163 unit	22.356.695
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan</b>	Kota Palu	<b>33,88%</b>	<b>646.954.529</b>	<b>33,94%</b>	<b>679.302.255</b>
					<b>Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung</b>		<b>18,02%</b>		<b>19,82%</b>			
					<b>Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu</b>		<b>20%</b>		<b>20%</b>			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara Teknis</b>	Kota Palu	<b>605 Reg PBG</b>	<b>646.954.529</b>	<b>666 Rek PBG</b>	<b>679.302.255</b>
					<b>Jumlah Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung yang disusun</b>		<b>1 dokumen</b>		<b>1 dokumen</b>			
					<b>Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan</b>		<b>2 peraturan</b>		<b>2 peraturan</b>			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Palu	605 Rek PBG	567.558.171	605 Rek PBG	595.936.079
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Palu	2 peraturan	79.396.358	2 peraturan	83.366.176
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan</b>	Kota Palu	<b>20%</b>	<b>341.605.632</b>	<b>20%</b>	<b>358.685.914</b>
					<b>Persentase Bangunan yang dimonitoring dan ditertibkan</b>		<b>19,22%</b>		<b>20,51%</b>			
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kota</b>	<b>Jumlah laporan penyelenggaraan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan yang dilaksanakan</b>	Kota Palu	<b>5 laporan</b>	<b>341.605.632</b>	<b>5 laporan</b>	<b>358.685.914</b>

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024			
				Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Palu	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang memenuhi syarat Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kota Palu	453 bangunan		483 bangunan			
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Palu	1 penataan	212.507.702	1 penataan	223.133.087		
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	09 2.01 06 Monitoring Penataan bangunan dan Lingkungan	Kota Palu	2 dokumen	129.097.930	2 dokumen	135.552.827		
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase ketaatan terhadap RTRW</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>85,07%</b>	<b>454.491.702</b>	<b>90,08%</b>	<b>477.216.287</b>
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>2 peraturan</b>	<b>108.027.122</b>	1 peraturan	<b>113.428.478</b>
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 peraturan	43.804.344	1 peraturan	45.994.561
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Kota Palu	1 peraturan	64.222.778	1 peraturan	67.433.917
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1 laporan</b>	<b>73.793.135</b>	<b>1 laporan</b>	<b>77.482.792</b>
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Palu	1 dokumen	21.817.101	1 dokumen	22.907.956
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Palu	1 aplikasi	51.976.034	1 aplikasi	54.574.836
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>272.671.444</b>	<b>4 dok</b>	<b>286.305.016</b>
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Palu	1 dokumen	60.894.577	1 dokumen	63.939.305
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Palu	1 dokumen	69.425.146	1 dokumen	72.896.403
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kota Palu	1 dokumen	39.970.066	1 dokumen	41.968.570
1 03	1.03.2.10.0.00.01.00	12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Palu	1 dokumen	102.381.656	1 dokumen	107.500.738
1 04			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>59.568.935.228</b>		<b>62.547.381.990</b>
1 04	1.04.0.00.0.00.01.00		<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>59.568.935.228</b>		<b>62.547.381.990</b>
1 04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>4.838.344.253</b>	<b>B</b>	<b>5.080.261.466</b>
1 04	1.04.0.00.0.00.01.00	01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.734.816</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.971.557</b>
1 04	1.04.0.00.0.00.01.00	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	950.366	1 Dokumen	997.884

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.599.337	1 dokumen	1.679.304
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.234.747	1 dokumen	1.296.484
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	950.366	1 laporan	997.884
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.257.308.732</b>	<b>95%</b>	<b>3.420.174.168</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	37 orang/bulan	3.253.575.324	37 orang/bulan	3.416.254.090
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	3.733.408	1 Laporan	3.920.078
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>425.626.749</b>	<b>100%</b>	<b>446.908.086</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.916.725	1 paket	3.062.561
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	19.444.831	1 paket	20.417.073
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	67.843.309	1 paket	71.235.474
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	14.583.624	1 paket	15.312.805
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	3.402.846	1 dokumen	3.572.988
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	9.175.530	11 laporan	9.634.306
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	32 laporan	308.259.885	32 laporan	323.672.879
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>97.224.157</b>	<b>100%</b>	<b>102.085.365</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	14 unit	97.224.157	14 unit	102.085.365
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>686.234.158</b>	<b>100%</b>	<b>720.545.865</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	64.167.944	12 laporan	67.376.341
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	622.066.214	12 laporan	653.169.524
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>367.215.642</b>	<b>100%</b>	<b>385.576.424</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	216.999.458	12 unit	227.849.431

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 Unit	89.013.577	3 Unit	93.464.256
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	46 unit	7.486.260	46 unit	7.860.573
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	48.612.079	1 unit	51.042.683
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	14 unit	5.104.268	14 unit	5.359.482
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan</b>	Kota Palu	78,87%	1.228.305.404	79,40%	1.289.720.674
							<b>Cakupan pelayanan rusunawa</b>		20,67%		20,67%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana</b>	Kota Palu	100,00%	877.448.019	100,00%	921.320.420
							<b>Persentase penyediaan rumah akibat relokasi program pemerinath</b>		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kota Palu	30 unit	291.672.472	30 unit	306.256.095
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Ha	585.775.547	1 Ha	615.064.324
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05		<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase rusunawa yang terkelola</b>	Kota Palu	100%	222.781.573	100%	233.920.651
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Palu	3 laporan	222.781.573	3 laporan	233.920.651
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06		<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase izin site plan yang diterbitkan</b>	Kota Palu	100,00%	128.075.813	100,00%	134.479.604
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Palu	6 laporan	128.075.813	6 laporan	134.479.604
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rasio rumah layak huni</b>	Kota Palu	0,897	3.662.948.372	0,903	3.846.095.791
							<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>		54,23%		89,69%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penataan kawasan permukiman</b>	Kota Palu	100,00%	1.799.926.694	100,00%	1.889.923.029
							<b>Persentase sanitasi yang terbangun</b>		100,00%		100,00%	
							<b>Persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun</b>		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kota Palu	5 Dokumen	749.905.796	5 Dokumen	787.401.086
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Palu	9 laporan	1.050.020.898	9 laporan	1.102.521.943
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase rumah MBR dalam kawasan kumuh yang mendapat bantuan</b>	Kota Palu	100,00%	1.863.021.678	100,00%	1.956.172.762
							<b>Persentase jalan lingkungan permukiman kumuh yang terbangun</b>		100,00%		100,00%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Palu	131 Unit	554.878.682	131 Unit	582.622.616
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kota Palu	9 dokumen%	1.308.142.996	9 dokumen%	1.373.550.146
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Rasio rumah layak huni</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>0,897</b>	<b>5.451.596.898</b>	<b>0,903</b>	<b>5.724.176.743</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase rumah MBR luar kawasan kumuh yang mendapat bantuan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.451.596.898</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.724.176.743</b>
							<b>Persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun</b>		<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Palu	45 Unit	5.208.536.505	45 Unit	5.468.963.330
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Palu	5 dokumen	243.060.393	5 dokumen	255.213.413
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum ( PSU )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>44.387.740.301</b>	<b>100%</b>	<b>46.607.127.316</b>
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase jalan lingkungan perumahan yang terbangun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>44.387.740.301</b>	<b>100%</b>	<b>46.607.127.316</b>
							<b>Persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
							<b>Persentase lampu PJU hemat energi terpasang</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kota Palu	6 lokasi	2.041.707.301	6 lokasi	2.143.792.666
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kota Palu	4 dokumen	42.346.033.000	4 dokumen	44.463.334.650
1	05					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>31.962.186.744</b>		<b>33.560.296.081</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00				<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>				<b>10.145.597.965</b>		<b>10.652.877.863</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>8.939.920.900</b>	<b>B</b>	<b>9.386.916.945</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>2.829.442</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>2.970.914</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	576.345	1 Dokumen	605.162
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	565.358	1 dokumen	593.626
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.219.556	1 dokumen	1.280.533



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	468.183	1 laporan	491.592
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.482.012.139</b>	<b>95%</b>	<b>4.706.112.746</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	43 orang/bulan	4.481.641.180	43 orang/bulan	4.705.723.239
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	370.959	1 Laporan	389.507
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.318.148.888</b>	<b>100%</b>	<b>1.384.056.332</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	30.100.307	1 paket	31.605.323
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	88 paket	992.744.397	88 paket	1.042.381.616
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	22 paket	19.966.343	22 paket	20.964.660
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	53 laporan	275.337.841	53 laporan	289.104.733
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>53.278.838</b>	<b>100%</b>	<b>55.942.780</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	39.278.560	1 unit	41.242.487
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	4 unit	14.000.279	4 unit	14.700.293
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.773.163.428</b>	<b>100%</b>	<b>2.911.821.599</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	24 laporan	55.612.218	24 laporan	58.392.829
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	66 laporan	2.717.551.210	66 laporan	2.853.428.771
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>310.488.165</b>	<b>100%</b>	<b>326.012.574</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	297.119.844	6 unit	311.975.836
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	13 unit	2.770.888	13 unit	2.909.433
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	14 unit	5.687.613	14 unit	5.971.994
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 unit	4.909.820	6 unit	5.155.311



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kota Palu	97,16%	1.205.677.065	97,51%	1.265.960.918	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran	Kota Palu	97,16%	1.133.367.376	97,51%	1.190.035.745	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Palu	10 dokumen	45.631.380	10 dokumen	47.912.949
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	568.368.728	12 laporan	596.787.165
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Palu	12 dokumen	20.750.066	12 dokumen	21.787.569
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Palu	40 unit	435.272.017	40 unit	457.035.618
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kota Palu	20 orang	47.789.319	20 orang	50.178.785
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kota Palu	1 kelurahan	15.555.865	1 kelurahan	16.333.658
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Kota Palu	100%	45.034.230	100%	47.285.941
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Palu	313 dokumen	2.746.582	313 dokumen	2.883.912
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Palu	313 dokumen	42.287.647	313 dokumen	44.402.030
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	Kota Palu	5 kali	3.305.621	5 kali	3.470.902
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kota Palu	5 dokumen	3.305.621	5 dokumen	3.470.902

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Kota Palu	56 orang	23.969.838	56 orang	25.168.330
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Palu	56 orang	23.969.838	56 orang	25.168.330
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.02.00</b>				<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>				<b>14.547.051.443</b>		<b>15.274.404.015</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	Kota Palu	<b>B</b>	<b>12.387.769.295</b>	<b>B</b>	<b>13.007.157.760</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>4 dokumen</b>	<b>1.186.135</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>1.245.441</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	306.256	1 Dokumen	321.569
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	306.256	1 dokumen	321.569
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	306.256	1 dokumen	321.569
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	267.366	1 laporan	280.735
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	<b>95%</b>	<b>6.190.030.416</b>	<b>95%</b>	<b>6.499.531.937</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	300 orang/bulan	6.189.763.050	300 orang/bulan	6.499.251.203
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	267.366	1 Laporan	280.735
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>122.502.438</b>	<b>100%</b>	<b>128.627.560</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palu	5 orang	122.502.438	5 orang	128.627.560
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>446.051.658</b>	<b>100%</b>	<b>468.354.241</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.795.681	1 paket	2.935.465
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	24.484.310	1 paket	25.708.525
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	45.278.068	6 paket	47.541.971
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	31.980.136	3 paket	33.579.143
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	7.291.812	12 dokumen	7.656.402
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	23 laporan	334.221.652	23 laporan	350.932.734

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>392.252.418</b>	<b>100%</b>	<b>411.865.039</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	291.672.472	1 unit	306.256.095
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	2.916.725	1 unit	3.062.561
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	97.663.221	10 unit	102.546.383
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.874.125.839</b>	<b>100%</b>	<b>5.117.832.131</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	93.189.355	12 laporan	97.848.822
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	4.780.936.484	12 laporan	5.019.983.308
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>361.620.391</b>	<b>100%</b>	<b>379.701.411</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	47.299.552	6 unit	49.664.530
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	15 unit	225.287.817	15 unit	236.552.208
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	46 unit	10.305.761	46 unit	10.821.049
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	15 unit	78.727.261	15 unit	82.663.624
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.159.282.148</b>	<b>100%</b>	<b>2.267.246.255</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.159.282.148</b>	<b>100%</b>	<b>2.267.246.255</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Palu	58 kasus	1.682.922.667	58 kasus	1.767.068.800
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Palu	38 kasus	161.353.211	38 kasus	169.420.872
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	1.296 laporan	315.006.269	1.296 laporan	330.756.583
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00				<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				<b>7.269.537.337</b>		<b>7.633.014.203</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	4.556.809.384	B	4.784.649.854
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	4 dokumen	5.566.691	4 dokumen	5.845.025
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.206.988	1 Dokumen	2.317.338
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.945.091	1 dokumen	2.042.345
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	855.573	1 dokumen	898.351
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	559.039	1 laporan	586.991
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	95%	3.346.838.682	95%	3.514.180.616
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	36 orang/bulan	3.344.411.967	36 orang/bulan	3.511.632.565
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	2.426.715	2 laporan	2.548.051
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	100%	380.606.033	100%	399.636.335
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	1 paket	2.178.210	1 paket	2.287.121
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	1 paket	74.250.089	1 paket	77.962.593
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 paket	37.880.865	1 paket	39.774.908
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	1 paket	9.486.064	1 paket	9.960.367
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	12 dokumen	5.463.998	12 dokumen	5.737.198
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	10 laporan	5.104.268	10 laporan	5.359.482
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	21 laporan	246.242.540	21 laporan	258.554.667
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	Kota Palu	100%	8.575.171	100%	9.003.929
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Palu	4 unit	8.575.171	4 unit	9.003.929
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Kota Palu	100%	428.037.324	100%	449.439.191
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 laporan	126.120.732	12 laporan	132.426.769

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	301.916.592	12 laporan	317.012.422
1	05	<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>387.185.484</b>	<b>100%</b>	<b>406.544.758</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	9 unit	217.684.888	9 unit	228.569.132
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	7 unit	115.930.085	7 unit	121.726.589
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	40 unit	14.778.072	40 unit	15.516.975
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	29 unit	16.041.986	29 unit	16.844.085
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	2 paket	22.750.453	2 paket	23.887.975
1	05	<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>50%</b>	<b>2.712.727.952</b>	<b>65%</b>	<b>2.848.364.350</b>
1	05	<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Terlayannya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>50%</b>	<b>1.880.574.748</b>	<b>65%</b>	<b>1.974.603.485</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Palu	300 org	22.264.332	300 org	23.377.549
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	58.334.494	1 dokumen	61.251.219
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Palu	10 kawasan	23.747.000	10 kawasan	24.934.350
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	persentase penanganan pasca bencana	Kota Palu	100%	1.648.607.631	100%	1.731.038.013
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Palu	500 org	57.133.776	500 org	59.990.465
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kota Palu	1 dokumen	70.487.514	1 dokumen	74.011.890
1	05	<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Terlayannya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>767.078.378</b>	<b>100%</b>	<b>805.432.296</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Palu	1 dokumen	457.176.377	1 dokumen	480.035.195
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Palu	100 orang	309.902.001	100 orang	325.397.101
1	05	<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>65.074.826</b>	<b>100%</b>	<b>68.328.568</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Palu	6 laporan	65.074.826	6 laporan	68.328.568

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16.300.348.941		17.115.366.388
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000			Dinas Sosial				16.300.348.941		17.115.366.388
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	6.655.902.936	B	6.988.698.083
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	3.840.354	4 dokumen	4.032.372
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	607.651	1 Dokumen	638.034
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	789.946	1 dokumen	829.444
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.640.658	1 dokumen	1.722.691
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	802.099	1 laporan	842.204
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.736.063.382	95%	4.972.866.551
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	40 orang/bulan	4.728.893.100	40 orang/bulan	4.965.337.755
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	7.170.282	2 laporan	7.528.796
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	624.358.881	100%	655.576.825
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	15 paket	36.138.730	15 paket	37.945.666
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	40 paket	51.370.717	40 paket	53.939.253
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	3 paket	54.056.631	3 paket	56.759.463
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	12 dokumen	8.293.221	12 dokumen	8.707.882
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	4 laporan	63.836.409	4 laporan	67.028.230
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	410.663.173	15 laporan	431.196.332
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	10.548.821	100%	11.076.262
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Palu	5 paket	10.548.821	5 paket	11.076.262
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	867.238.109	100%	910.600.015
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 laporan	72.334.773	12 laporan	75.951.512

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	794.903.336	12 laporan	834.648.503
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>413.853.389</b>	<b>100%</b>	<b>434.546.059</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	249.178.612	12 unit	261.637.543
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	5 unit	153.542.611	5 unit	161.219.742
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	54 unit	5.882.062	54 unit	6.176.165
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 unit	5.250.104	18 unit	5.512.610
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>727.017.941</b>	<b>100%</b>	<b>763.368.838</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>20%</b>	<b>21.875.435</b>	<b>20%</b>	<b>22.969.207</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palu	4 dokumen	21.875.435	4 dokumen	22.969.207
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>20%</b>	<b>705.142.506</b>	<b>20%</b>	<b>740.399.631</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	92 org	270.769.278	92 org	284.307.742
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	9 org	80.015.481	9 org	84.016.255
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 keluarga	237.713.064	46 keluarga	249.598.718
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 lembaga	105.099.314	46 lembaga	110.354.280
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	15 sertifikat	11.545.369	15 sertifikat	12.122.637
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>30.458.384</b>	<b>100%</b>	<b>31.981.303</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>30.458.384</b>	<b>100%</b>	<b>31.981.303</b>



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 orang	30.458.384	5 orang	31.981.303
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis</b>	Kota Palu	100%	920.836.486	100%	966.878.311
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial</b>	Kota Palu	20%	902.218.060	25%	947.328.963
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	19.687.892	50 orang	20.672.286
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	28 orang	64.702.677	28 orang	67.937.810
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	71 org	817.827.492	71 org	858.718.866
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Kota Palu	20%	18.618.426	25%	19.549.347
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	18.618.426	1 dokumen	19.549.347
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)</b>	Kota Palu	100%	7.127.856.240	100%	7.484.249.052
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota</b>	Kota Palu	100%	7.127.856.240	100%	7.484.249.052
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 keluarga	474.026.101	100 keluarga	497.727.406
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	250 orang	6.653.830.139	250 orang	6.986.521.646
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>	Kota Palu	99,49%	838.276.953	99,63%	880.190.800
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota</b>	Kota Palu	20%	678.391.826	20%	712.311.417



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	294.425.374	50 orang	309.146.642
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	274.953.866	50 orang	288.701.560
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 unit	94.793.553	46 unit	99.533.231
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	14.219.033	50 orang	14.929.985
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>159.885.126</b>	<b>100%</b>	<b>167.879.383</b>
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 org	159.885.126	33 org	167.879.383
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>116.760.493.838</b>		<b>122.598.518.530</b>
2	07					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				<b>448.945.357</b>		<b>471.392.625</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				<b>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b>				<b>448.945.357</b>		<b>471.392.625</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>3%</b>	<b>265.699.621</b>	<b>3%</b>	<b>278.984.602</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Terlaksananya pelatihan kerja berdasarkan kompetensi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>265.699.621</b>	<b>100%</b>	<b>278.984.602</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Palu	20 Orang	265.699.621	20 Orang	278.984.602
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>8,72%</b>	<b>15.901.011</b>	<b>8,72%</b>	<b>16.696.061</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>15.901.011</b>	<b>14 dokumen</b>	<b>16.696.061</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Palu	7.500 orang	15.901.011	7.500 orang	16.696.061
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>83%</b>	<b>167.344.725</b>	<b>80%</b>	<b>175.711.961</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>133 Kasus</b>	<b>167.344.725</b>	<b>133 Kasus</b>	<b>175.711.961</b>
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Palu	40 perkara	167.344.725	40 perkara	175.711.961

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.257.776.503		5.520.665.328
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.257.776.503		5.520.665.328
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	4.575.543.710	B	4.804.320.896
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	3.135.479	4 dokumen	3.292.253
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	243.060	1 Dokumen	255.213
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.020.854	1 dokumen	1.071.896
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	510.427	1 dokumen	535.948
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.361.138	1 laporan	1.429.195
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.310.021.584	95%	3.475.522.663
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	28 orang/bulan	3.310.021.584	28 orang/bulan	3.475.522.663
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	417.871.557	100%	438.765.135
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	1.187.107	2 paket	1.246.462
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	57.887.263	2 paket	60.781.626
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	33 paket	19.448.711	33 paket	20.421.146
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	16.248.879	6 paket	17.061.323
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	3.033.394	2 dokumen	3.185.063
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 Laporan	11.302.308	12 Laporan	11.867.424
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	33 laporan	308.763.895	33 laporan	324.202.090
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	291.672.472	100%	306.256.095
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	291.672.472	1 unit	306.256.095
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	400.696.535	100%	420.731.362
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	3 laporan	45.632.669	3 laporan	47.914.302

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	355.063.867	12 Laporan	372.817.060
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	Kota Palu	100%	152.146.084	100%	159.753.388
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	1 unit	40.396.637	1 unit	42.416.469
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	4 unit	87.239.236	4 unit	91.601.198
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 paket	24.510.210	6 paket	25.735.721
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	Kota Palu	98,11	40.709.875	98,14	42.745.369
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Palu	100%	25.708.624	100%	26.994.055
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	16.233.401	41 Perangkat Daerah	17.045.071
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	9.475.223	41 Perangkat Daerah	9.948.984
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>	Kota Palu	100%	15.001.251	100%	15.751.313
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	1 dokumen	15.001.251	1 dokumen	15.751.313
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio KDRT</b>	Kota Palu	0,07%	168.356.594	0,06%	176.774.424
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	Kota Palu	100%	16.053.406	100%	16.856.076
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	16.053.406	41 Perangkat Daerah	16.856.076
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</b>	Kota Palu	100%	152.303.188	100%	159.918.348

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Palu	80 orang	152.303.188	80 orang	159.918.348
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>68,89</b>	<b>138.454.244</b>	<b>68,91</b>	<b>145.376.956</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>34.581.335</b>	<b>100%</b>	<b>36.310.402</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 Perangkat Daerah	15.238.829	8 Perangkat Daerah	16.000.771
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengembangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 dokumen	19.342.506	8 dokumen	20.309.631
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>103.872.909</b>	<b>100%</b>	<b>109.066.554</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 dokumen	103.872.909	8 dokumen	109.066.554
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>34.053.116</b>	<b>100%</b>	<b>35.755.772</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>34.053.116</b>	<b>100%</b>	<b>35.755.772</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	2 Dokumen	34.053.116	2 Dokumen	35.755.772
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Indeks Kota Layak Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Pratama</b>	<b>279.871.613</b>	<b>Madya</b>	<b>293.865.193</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>40.941.522</b>	<b>100%</b>	<b>42.988.598</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	40.941.522	1 dokumen	42.988.598
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>238.930.091</b>	<b>100%</b>	<b>250.876.596</b>
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 orang	107.246.454	33 orang	112.608.777
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	131.683.637	1 dokumen	138.267.819

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	Kota Palu	100%	20.787.351	100%	21.826.719	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kota Palu	100%	20.787.351	100%	21.826.719	
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 Perangkat Daerah	20.787.351	8 Perangkat Daerah	21.826.719
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				763.089.839		801.244.331	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				763.089.839		801.244.331	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kota Palu	93,04	411.894.687	93,97	432.489.422	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau	Kota Palu	100%	148.345.591	100%	155.762.871	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Palu	12 Laporan	133.933.082	12 Laporan	140.629.736
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Palu	12 Laporan	14.412.509	12 Laporan	15.133.135
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu	Kota Palu	100%	263.549.096	100%	276.726.551	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Palu	1 dokumen	51.784.284	1 dokumen	54.373.498
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Palu	12 laporan	211.764.812	12 laporan	222.353.052
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	Kota Palu	100%	311.936.767	100%	327.533.605	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Kota Palu	100%	311.936.767	100%	327.533.605	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 dokumen	311.936.767	12 dokumen	327.533.605
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian pengawasan keamanan pangan	Kota Palu	100%	39.258.385	100%	41.221.305	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Palu	100%	39.258.385	100%	41.221.305	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	39.258.385	2 dokumen	41.221.305
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				534.423.473		561.144.647	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan				534.423.473		561.144.647	

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Kota Palu	40%	22.531.698	60%	23.658.283	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disusun	Kota Palu	1 laporan	22.531.698	1 laporan	23.658.283	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	13 kasus	22.531.698	13 kasus	23.658.283
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kota Palu	100%	9.593.375	100%	10.073.044	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun	Kota Palu	2 laporan	9.593.375	2 laporan	10.073.044	
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	9.593.375	1 laporan	10.073.044
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemda Kota Palu	Kota Palu	20%	502.298.400	20%	527.413.320	
						Persentase kawasan pemetaan		20%		20%		
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota	Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan penggunaannya yang diterbitkan	Kota Palu	266 sertipikat	502.298.400	266 sertipikat	527.413.320	
						Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah		2 lokasi		2 lokasi		
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Palu	266 sertipikat	484.724.647	266 sertipikat	508.960.879
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Kota Palu	1 dokumen	8.631.318	1 dokumen	9.062.883
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	8.942.435	1 dokumen	9.389.557
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				30.825.064.199		32.366.317.409	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00			Dinas Lingkungan Hidup				30.825.064.199		32.366.317.409	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	11.519.657.348	B	12.095.640.215	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	11.987.982	4 dokumen	12.587.381	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	725.778	1 Dokumen	762.067
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.098.970	1 dokumen	4.303.919

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.092.457	1 dokumen	3.247.080
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.070.775	1 laporan	4.274.314
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>8.709.130.988</b>	<b>95%</b>	<b>9.144.587.537</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	87 orang/bulan	8.706.637.188	87 orang/bulan	9.141.969.047
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	2.493.800	2 laporan	2.618.490
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>497.052.874</b>	<b>100%</b>	<b>521.905.518</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	19.585.029	12 paket	20.564.280
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	65.865.050	1 paket	69.158.302
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	41.283.322	5 paket	43.347.488
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	5 dokumen	4.550.091	5 dokumen	4.777.595
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	6.866.456	11 laporan	7.209.779
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	39 laporan	358.902.928	39 laporan	376.848.074
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>94.584.521</b>	<b>100%</b>	<b>99.313.747</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	91.147.647	2 unit	95.705.030
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	3.436.874	2 unit	3.608.718
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.307.148.848</b>	<b>100%</b>	<b>1.372.506.291</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	117.845.790	12 Laporan	123.738.079
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	1.189.303.059	12 Laporan	1.248.768.211
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>899.752.135</b>	<b>100%</b>	<b>944.739.741</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	103 unit	625.676.341	103 unit	656.960.158



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	11 unit	265.544.374	11 unit	278.821.592
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	2 unit	3.402.846	2 unit	3.572.988
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	5.128.574	1 unit	5.385.003
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Cakupan perencanaan lingkungan hidup</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>498.499.317</b>	<b>100%</b>	<b>523.424.283</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>498.499.317</b>	<b>100%</b>	<b>523.424.283</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Palu	1 dokumen	498.499.317	1 dokumen	523.424.283
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>661.747.461</b>	<b>100%</b>	<b>694.834.834</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>603.755.050</b>	<b>100%</b>	<b>633.942.803</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	1 dokumen	107.168.050	1 dokumen	112.526.452
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kota Palu	1 dokumen	496.587.000	1 dokumen	521.416.351
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>36.963.506</b>	<b>100%</b>	<b>38.811.682</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Palu	1 titik	36.963.506	1 titik	38.811.682
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>21.028.905</b>	<b>100%</b>	<b>22.080.350</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kota Palu	1 dokumen	21.028.905	1 dokumen	22.080.350
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Cakupan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.310.314.566</b>	<b>100%</b>	<b>3.475.830.295</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.310.314.566</b>	<b>100%</b>	<b>3.475.830.295</b>
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 Ha	2.621.993.565	5 Ha	2.753.093.244
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	3 Ha	688.321.001	3 Ha	722.737.051



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Palu	100%	59.764.808	100%	62.753.048	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	59.764.808	100%	62.753.048	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Palu	1 dokumen	39.932.225	1 dokumen	41.928.836
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	19.832.583	1 laporan	20.824.212
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Palu	100%	315.588.817	100%	331.368.258	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	315.588.817	100%	331.368.258	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Palu	1 lembaga	315.588.817	1 lembaga	331.368.258
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Kota Palu	72%	14.459.491.882	71%	15.182.466.476	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	Kota Palu	72%	14.459.491.882	71%	15.182.466.476	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 ton	12.244.402.420	1 ton	12.856.622.541
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Palu	1 unit	2.215.089.462	1 unit	2.325.843.935
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				7.065.554.317		7.418.832.033	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00			<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				7.065.554.317		7.418.832.033	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	5.490.319.063	BB	5.764.835.016	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	23.880.392	4 dokumen	25.074.412	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.853.237	1 Dokumen	2.995.899

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.013.508	1 dokumen	7.364.183
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.013.508	1 dokumen	7.364.183
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	7.000.139	1 laporan	7.350.146
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.711.181.757</b>	<b>95%</b>	<b>3.896.740.845</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	36 orang/bulan	3.709.162.411	36 orang/bulan	3.894.620.532
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.019.346	1 Laporan	2.120.313
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>45.579.657</b>	<b>100%</b>	<b>47.858.640</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	3 orang	45.579.657	3 orang	47.858.640
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>642.880.603</b>	<b>100%</b>	<b>675.024.633</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	32 paket	1.140.939	32 paket	1.197.986
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	274.047.945	13 paket	287.750.342
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	96 paket	39.582.191	96 paket	41.561.300
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	4.931.569	13 paket	5.178.147
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	3.033.394	2 dokumen	3.185.063
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	15.585.032	12 laporan	16.364.284
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	24 laporan	304.559.534	24 laporan	319.787.510
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.394.435</b>	<b>100%</b>	<b>4.614.156</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	4.394.435	2 unit	4.614.156
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>751.716.591</b>	<b>100%</b>	<b>789.302.421</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	154.003.065	12 laporan	161.703.218
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	597.713.526	12 laporan	627.599.203

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>310.685.628</b>	<b>100%</b>	<b>326.219.909</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	156 unit	291.921.365	156 unit	306.517.434
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	25 Unit	18.764.262	25 Unit	19.702.475
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>66,8%</b>	<b>1.254.526.448</b>	<b>66,5%</b>	<b>1.317.252.771</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.091.629.317</b>	<b>100%</b>	<b>1.146.210.783</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Palu	2400 Dokumen	28.000.557	2400 Dokumen	29.400.585
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	72000 Dokumen	831.214.412	72000 Dokumen	872.775.133
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	24000 orang	93.908.813	24000 orang	98.604.254
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	12000 laporan	134.081.835	12000 laporan	140.785.927
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Palu	2400 Dokumen	4.423.699	2400 Dokumen	4.644.884
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>162.897.131</b>	<b>100%</b>	<b>171.041.987</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Palu	11 dokumen	162.897.131	11 dokumen	171.041.987
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>171.710.015</b>	<b>100%</b>	<b>180.295.515</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>170.251.652</b>	<b>100%</b>	<b>178.764.235</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Palu	9000 Dokumen	583.345	9000 Dokumen	612.512
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Palu	2 layanan	169.668.307	2 layanan	178.151.723
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.03		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.458.362</b>	<b>100%</b>	<b>1.531.280</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palu	12 dokumen	1.458.362	12 dokumen	1.531.280
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>137.331.893</b>	<b>100%</b>	<b>144.198.488</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>99.032.770</b>	<b>100%</b>	<b>103.984.408</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Palu	2 dokumen	20.562.909	2 dokumen	21.591.055
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Palu	13 dokumen	78.469.860	13 dokumen	82.393.353
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>38.299.123</b>	<b>100%</b>	<b>40.214.080</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	49 laporan	7.729.320	49 laporan	8.115.787
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	1 laporan	30.569.803	1 laporan	32.098.293
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan pengelolaan profil kependudukan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>11.666.899</b>	<b>100%</b>	<b>12.250.244</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.00</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>11.666.899</b>	<b>100%</b>	<b>12.250.244</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Palu	75 dokumen	11.666.899	75 dokumen	12.250.244
<b>2</b>	<b>14</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>10.007.475.352</b>		<b>10.507.849.120</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>				<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				<b>10.007.475.352</b>		<b>10.507.849.120</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>5.416.766.973</b>	<b>B</b>	<b>5.687.605.322</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>5.768.795</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>6.057.235</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.241.066	1 Dokumen	1.303.120
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.055.319	1 dokumen	2.158.085
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.352.874	1 dokumen	1.420.518
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.119.536	1 laporan	1.175.513
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.892.644.037</b>	<b>95%</b>	<b>4.087.276.239</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	37 orang/bulan	3.890.950.392	37 orang/bulan	4.085.497.912
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.693.645	1 dokumen	1.778.327
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>328.763.050</b>	<b>100%</b>	<b>345.201.203</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	692.576	1 paket	727.205

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	9.819.640	1 paket	10.310.622
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	20 paket	54.059.743	20 paket	56.762.730
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	19.930.952	3 paket	20.927.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	3.500.070	24 dokumen	3.675.073
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	25 laporan	240.760.069	25 laporan	252.798.073
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>253.443.793</b>	<b>100%</b>	<b>266.115.983</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	11.699.938	5 paket	12.284.934
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	13 unit	241.743.855	13 unit	253.831.048
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>529.905.880</b>	<b>100%</b>	<b>556.401.174</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	75.834.843	12 laporan	79.626.585
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	454.071.037	12 laporan	476.774.589
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>406.241.418</b>	<b>100%</b>	<b>426.553.489</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	56 Unit	395.507.871	56 Unit	415.283.265
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	50 Unit	7.000.139	50 Unit	7.350.146
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	9 Unit	3.733.408	9 Unit	3.920.078
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1,75</b>	<b>66.319.028</b>	<b>1,7</b>	<b>69.634.980</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>9.846.377</b>	<b>100%</b>	<b>10.338.695</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	9.846.377	1 dokumen	10.338.695
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>56.472.652</b>	<b>100%</b>	<b>59.296.284</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Palu	1 laporan	5.228.229	1 laporan	5.489.641
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kota Palu	1 dokumen	5.172.325	1 dokumen	5.430.941

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Palu	1 dokumen	46.072.097	1 dokumen	48.375.702
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.143.909.335</b>	<b>100%</b>	<b>2.251.104.802</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>572.003.745</b>	<b>100%</b>	<b>600.603.932</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Palu	4 organisasi	4.253.557	4 organisasi	4.466.235
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	1 Dokumen	24.306.039	1 Dokumen	25.521.341
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Palu	8 dokumen	68.212.469	8 dokumen	71.623.092
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Palu	4 laporan	121.335.748	4 laporan	127.402.536
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Palu	1 laporan	315.006.269	1 laporan	330.756.583
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Palu	8 laporan	38.889.663	8 laporan	40.834.146
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>214.670.939</b>	<b>100%</b>	<b>225.404.486</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Palu	100 kader	214.670.939	100 kader	225.404.486
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.311.767.774</b>	<b>100%</b>	<b>1.377.356.162</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	35 laporan	15.750.313	35 laporan	16.537.829

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Palu	50 orang	628.132.223	50 orang	659.538.835
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	2 dokumen	12.426.706	2 dokumen	13.048.041
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	30 unit	630.800.054	30 unit	662.340.057
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	1 laporan	13.416.934	1 laporan	14.087.780
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Palu	8 laporan	11.241.543	8 laporan	11.803.620
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB</b>	<b>Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>45.466.877</b>	<b>100%</b>	<b>47.740.221</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan BerKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Palu	4 organisasi	6.091.093	4 organisasi	6.395.648
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kota Palu	18 kampung	39.375.784	18 kampung	41.344.573
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>76%</b>	<b>2.380.480.016</b>	<b>77%</b>	<b>2.499.504.016</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>76%</b>	<b>2.380.480.016</b>	<b>77%</b>	<b>2.499.504.016</b>
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	4 laporan	131.135.943	4 laporan	137.692.740
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	100 kader	334.335.647	100 kader	351.052.429
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana( Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Palu	100 kader	1.906.987.432	100 kader	2.002.336.804



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Palu	4 laporan	8.020.993	4 laporan	8.422.043
2	15					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>17.645.839.190</b>		<b>18.528.131.149</b>
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>				<b>Dinas Perhubungan</b>			<b>17.645.839.190</b>		<b>18.528.131.149</b>
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>12.362.277.779</b>	<b>B</b>	<b>12.980.391.668</b>
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>11.623.270</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12.204.433</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.622.694	1 Dokumen	3.803.828
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.825.480	1 dokumen	2.966.754
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.420.711	1 dokumen	2.541.747
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	2.754.385	1 laporan	2.892.104
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>8.601.430.802</b>	<b>95%</b>	<b>9.031.502.342</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	75 orang/bulan	8.580.988.451	75 orang/bulan	9.010.037.874
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	20.442.351	2 laporan	21.464.469
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>143.146.320</b>	<b>100%</b>	<b>150.303.636</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palu	1 paket	51.770.682	1 paket	54.359.217
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	100 orang	24.567.086	100 orang	25.795.440
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	4 orang	66.808.552	4 orang	70.148.979
2	15	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>567.331.774</b>	<b>100%</b>	<b>595.698.363</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	20 paket	1.361.138	20 paket	1.429.195
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	40 paket	34.028.455	40 paket	35.729.878
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	38 paket	56.969.360	38 paket	59.817.828



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	15.926.046	6 paket	16.722.348
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	12.541.916	2 dokumen	13.169.012
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	5.347.329	12 laporan	5.614.695
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	28 laporan	441.157.530	28 laporan	463.215.406
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>98.826.324</b>	<b>100%</b>	<b>103.767.640</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	5 unit	98.826.324	5 unit	103.767.640
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.338.344.816</b>	<b>100%</b>	<b>2.455.262.057</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	126.731.689	12 laporan	133.068.273
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	2.211.613.127	12 laporan	2.322.193.783
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>601.574.473</b>	<b>100%</b>	<b>631.653.196</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	18 unit	270.497.050	18 unit	284.021.903
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	41 unit	315.132.661	41 unit	330.889.294
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	55 unit	6.902.915	55 unit	7.248.061
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	23 unit	9.041.847	23 unit	9.493.939
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>21,04%</b>	<b>5.283.561.411</b>	<b>23,14%</b>	<b>5.547.739.482</b>
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>118.048.113</b>	<b>100%</b>	<b>123.950.519</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	20 unit	53.473.286	20 unit	56.146.951
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Palu	12 unit	64.574.827	12 unit	67.803.568
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>42.456.331</b>	<b>100%</b>	<b>44.579.148</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kota Palu	2 unit	42.456.331	2 unit	44.579.148
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.385.513.269</b>	<b>100%</b>	<b>1.454.788.933</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	1.385.513.269	12 laporan	1.454.788.933

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.988.234.015</b>	<b>100%</b>	<b>2.087.645.715</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Palu	24 unit	1.988.234.015	24 unit	2.087.645.715
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>151.245.302</b>	<b>100%</b>	<b>158.807.567</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Palu	1 paket	125.480.900	1 paket	131.754.945
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	25.764.402	12 laporan	27.052.622
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>23.571.025</b>	<b>100%</b>	<b>24.749.576</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Palu	12 laporan	23.571.025	12 laporan	24.749.576
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>44.034.474</b>	<b>100%</b>	<b>46.236.197</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu	2 laporan	44.034.474	2 laporan	46.236.197
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.214.345.012</b>	<b>100%</b>	<b>1.275.062.262</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	10 unit	1.214.345.012	10 unit	1.275.062.262
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>316.113.871</b>	<b>100%</b>	<b>331.919.565</b>
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	316.113.871	1 dokumen	331.919.565
2	16					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>8.793.535.075</b>		<b>9.233.211.828</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				<b>8.793.535.075</b>		<b>9.233.211.828</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>5.023.458.948</b>	<b>B</b>	<b>5.274.631.896</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>13.677.008</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>14.360.859</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.675.073	1 Dokumen	3.858.827
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.670.212	1 dokumen	3.853.723

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.670.212	1 dokumen	3.853.723
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	2.661.511	1 laporan	2.794.587
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.959.748.157</b>	<b>95%</b>	<b>4.157.735.565</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	39 orang/bulan	3.948.869.552	39 orang/bulan	4.146.313.030
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 laporan	10.878.605	1 laporan	11.422.536
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>353.003.077</b>	<b>100%</b>	<b>370.653.231</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.059.743	1 paket	1.112.730
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	15.555.865	1 paket	16.333.658
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	23.317.552	1 paket	24.483.429
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.984.401	1 paket	8.383.621
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	4.491.756	1 dokumen	4.716.344
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	5.128.574	1 laporan	5.385.003
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	295.465.186	12 laporan	310.238.445
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>379.912.728</b>	<b>100%</b>	<b>398.908.364</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	48.417.630	12 laporan	50.838.512
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	331.495.097	12 laporan	348.069.852
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>317.117.978</b>	<b>100%</b>	<b>332.973.877</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	18 unit	262.505.224	18 unit	275.630.486
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	7 unit	49.216.813	7 unit	51.677.653
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	16 unit	3.645.906	16 unit	3.828.201

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	7 unit	1.750.035	7 unit	1.837.537
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>122.720.352</b>	<b>100%</b>	<b>128.856.370</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>122.720.352</b>	<b>100%</b>	<b>128.856.370</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Palu	4 dokumen	122.720.352	4 dokumen	128.856.370
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.647.355.774</b>	<b>100%</b>	<b>3.829.723.562</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.647.355.774</b>	<b>100%</b>	<b>3.829.723.562</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Palu	4 dokumen	3.534.296.718	4 dokumen	3.711.011.554
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Palu	1 unit	32.302.726	1 unit	33.917.863
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Palu	4 dokumen	67.779.821	4 dokumen	71.168.812
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Palu	1 dokumen	12.976.508	1 dokumen	13.625.334
2	17					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>5.799.387.509</b>		<b>6.089.356.885</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				<b>Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja</b>			<b>5.799.387.509</b>		<b>6.089.356.885</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>5.194.244.773</b>	<b>B</b>	<b>5.453.957.011</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12.402.108</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>13.022.213</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	594.040	1 Dokumen	623.742
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5.721.156	1 dokumen	6.007.213
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5.128.769	1 dokumen	5.385.207
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	958.144	1 laporan	1.006.051
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.131.772.329</b>	<b>95%</b>	<b>4.338.360.946</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/bulan	4.130.101.532	38 orang/bulan	4.336.606.609
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.670.797	1 laporan	1.754.337

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>318.788.726</b>	<b>100%</b>	<b>334.728.162</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	4.184.528	1 paket	4.393.754
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	107.157.549	3 paket	112.515.427
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	37.944.370	3 paket	39.841.588
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	9.170.547	5 paket	9.629.074
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	6.416.794	1 laporan	6.737.634
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	55 laporan	153.914.937	55 laporan	161.610.684
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>414.060.574</b>	<b>100%</b>	<b>434.763.603</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	56.001.115	12 laporan	58.801.170
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	35 laporan	358.059.459	35 laporan	375.962.432
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>317.221.036</b>	<b>100%</b>	<b>333.082.087</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	3 Unit	279.021.664	3 Unit	292.972.747
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	20 Unit	34.553.465	20 Unit	36.281.139
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	29 unit	3.645.906	29 unit	3.828.201
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi aktif</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>88,01%</b>	<b>113.131.949</b>	<b>88,89%</b>	<b>118.788.547</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100 Koperasi</b>	<b>113.131.949</b>	<b>100 Koperasi</b>	<b>118.788.547</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 Koperasi	113.131.949	50 Koperasi	118.788.547
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi sehat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>5,2%</b>	<b>116.526.555</b>	<b>5,2%</b>	<b>122.352.883</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang telah dilaksanakan penilaian</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>41 Koperasi</b>	<b>116.526.555</b>	<b>41 Koperasi</b>	<b>122.352.883</b>
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kota Palu	1 Koperasi	116.526.555	1 Koperasi	122.352.883

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Palu	100%	343.194.145	100%	360.353.852	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Palu	8 Dok	343.194.145	8 Dok	360.353.852	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	20 unit usaha	183.761.597	20 unit usaha	192.949.677
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Palu	3 unit usaha	159.432.548	3 unit usaha	167.404.175
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	Kota Palu	4,8%	32.290.087	4,9%	33.904.591	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Palu	200 UMKM	32.290.087	200 UMKM	33.904.591	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Palu	200 unit usaha	32.290.087	200 unit usaha	33.904.591
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.402.172.633		9.872.281.264	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				6.431.406.929		6.752.977.276	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	5.501.190.383	BB	5.776.249.902	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 Dokumen	3.093.065	4 Dokumen	3.247.718	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	709.736	1 Dokumen	745.223
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	831.267	1 dokumen	872.830
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	831.267	1 dokumen	872.830
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	720.796	1 laporan	756.835
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.952.287.012	95%	4.149.901.363	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/bulan	3.952.043.952	38 orang/bulan	4.149.646.150



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	121.530	1 Laporan	127.607
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	121.530	4 laporan	127.607
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>16.693.388</b>	<b>100%</b>	<b>17.528.057</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	2 Orang	16.693.388	2 Orang	17.528.057
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>328.738.968</b>	<b>100%</b>	<b>345.175.916</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	550.289	2 paket	577.803
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	25.569.710	4 paket	26.848.196
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	43.073.656	7 paket	45.227.339
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	10.226.601	2 paket	10.737.931
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	5.444.553	2 dokumen	5.716.780
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	5.570.944	1 laporan	5.849.491
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	42 laporan	238.303.215	42 laporan	250.218.376
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>266.789.106</b>	<b>100%</b>	<b>280.128.561</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	256.671.279	1 unit	269.504.843
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.438.918	1 paket	1.510.863
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	8.678.909	3 unit	9.112.854
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>642.324.714</b>	<b>100%</b>	<b>674.440.950</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	316.736.859	12 Laporan	332.573.702
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	325.587.855	12 Laporan	341.867.248
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>291.264.130</b>	<b>100%</b>	<b>305.827.337</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	7 unit	262.213.552	7 unit	275.324.230

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 unit	15.458.641	1 unit	16.231.573
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	58 unit	3.937.578	58 unit	4.134.457
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	4.890.375	1 unit	5.134.894
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	14 unit	4.763.984	14 unit	5.002.183
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>5%</b>	<b>117.349.558</b>	<b>5%</b>	<b>123.217.036</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>47.141.563</b>	<b>100%</b>	<b>49.498.641</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu	3 Perda	30.239.143	3 Perda	31.751.101
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kota Palu	2 kegiatan usaha	16.902.420	2 kegiatan usaha	17.747.541
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta dan Peluang Investasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>70.207.995</b>	<b>100%</b>	<b>73.718.394</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Perda	43.471.351	1 Perda	45.644.919
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	26.736.643	1 Dokumen	28.073.475
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>385,9</b>	<b>74.281.687</b>	<b>405,17</b>	<b>77.995.771</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pameran</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>74.281.687</b>	<b>100%</b>	<b>77.995.771</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokuem	30.793.321	1 dokuem	32.332.987
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	43.488.366	2 dokumen	45.662.784
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>83.664.693</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>87.847.928</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>83.664.693</b>	<b>100%</b>	<b>87.847.928</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	58 Pelaku Usaha	48.811.388	58 Pelaku Usaha	51.251.958



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Palu	58 kegiatan usaha	19.760.324	58 kegiatan usaha	20.748.340
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	50 orang	15.092.981	50 orang	15.847.630
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>561.852.785</b>	<b>100%</b>	<b>589.945.424</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>561.852.785</b>	<b>100%</b>	<b>589.945.424</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	58 kegiatan usaha	206.720.317	58 kegiatan usaha	217.056.333
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	58 Pelaku Usaha	222.386.104	58 Pelaku Usaha	233.505.409
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Palu	58 kegiatan usaha	132.746.364	58 kegiatan usaha	139.383.682
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>93.067.824</b>	<b>100%</b>	<b>97.721.216</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>93.067.824</b>	<b>100%</b>	<b>97.721.216</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	12 Laporan	93.067.824	12 Laporan	97.721.216
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00				<b>Administrator Kawasan Ekonomi Khusus</b>				<b>2.970.765.703</b>		<b>3.119.303.989</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>2.557.415.205</b>	<b>B</b>	<b>2.685.285.965</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>972.242</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.020.854</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	243.060	1 Dokumen	255.213
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	243.060	1 dokumen	255.213
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	243.060	1 dokumen	255.213
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	243.060	1 laporan	255.213
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>1.860.816.661</b>	<b>95%</b>	<b>1.953.857.494</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	18 orang/bulan	1.860.330.540	18 orang/bulan	1.953.347.067
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	243.060	1 Laporan	255.213
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	243.060	2 laporan	255.213
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>8.750.174</b>	<b>100%</b>	<b>9.187.683</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu	1 paket	8.750.174	1 paket	9.187.683
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>236.236.716</b>	<b>100%</b>	<b>248.048.551</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	4.375.087	1 paket	4.593.841
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	20.903.194	1 paket	21.948.353
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	13.404.295	1 paket	14.074.509
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.315.830	1 paket	3.481.621
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	3.208.397	12 dokumen	3.368.817
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	7.539.733	1 laporan	7.916.720
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	183.490.180	15 laporan	192.664.689
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>35.972.938</b>	<b>100%</b>	<b>37.771.585</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	35.972.938	1 unit	37.771.585
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>236.459.456</b>	<b>100%</b>	<b>248.282.429</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	52.501.045	12 Laporan	55.126.097
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	183.958.411	12 Laporan	193.156.332
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>178.207.019</b>	<b>100%</b>	<b>187.117.370</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	7 Unit	170.210.332	7 Unit	178.720.849
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	2 unit	2.041.707	2 unit	2.143.793

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	5.954.980	1 unit	6.252.729
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>40 investor</b>	<b>74.228.213</b>	<b>42 investor</b>	<b>77.939.624</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>74.228.213</b>	<b>100%</b>	<b>77.939.624</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	619.804	1 dokumen	650.794
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	73.608.409	1 dokumen	77.288.830
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>232.163.996</b>	<b>Baik</b>	<b>243.772.195</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>232.163.996</b>	<b>100%</b>	<b>243.772.195</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	100 pelaku usaha	141.898.657	100 pelaku usaha	148.993.590
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Palu	1 kegiatan usaha	15.966.832	1 kegiatan usaha	16.765.173
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	100 orang	1.677.360	100 orang	1.761.228
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Palu	1 kegiatan usaha	72.621.147	1 kegiatan usaha	76.252.204
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>19.333.024</b>	<b>100%</b>	<b>20.299.675</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tercapainya Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>19.333.024</b>	<b>100%</b>	<b>20.299.675</b>
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	1 kegiatan usaha	10.937.718	1 kegiatan usaha	11.484.604
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palu	1 pelaku usaha	909.046	1 pelaku usaha	954.498
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Palu	1 kegiatan usaha	7.486.260	1 kegiatan usaha	7.860.573
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>87.625.266</b>	<b>100%</b>	<b>92.006.529</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sistem Pendukung Penanaman Modal	Kota Palu	100%	87.625.266	100%	92.006.529	
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	1 dokumen	87.625.266	1 dokumen	92.006.529
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>12.379.483.114</b>		<b>12.998.457.270</b>	
2	19	<b>2.19.0.00.0.00.01.00</b>			<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>				<b>12.379.483.114</b>		<b>12.998.457.270</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	4.213.130.062	B	4.423.786.565	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	5.670.113	4 dokumen	5.953.618	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.417.528	1 Dokumen	1.488.405
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.417.528	1 dokumen	1.488.405
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.417.528	1 dokumen	1.488.405
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.417.528	1 laporan	1.488.405
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.085.657.421</b>	<b>95%</b>	<b>3.239.940.292</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	32 orang/bulan	3.084.239.893	32 orang/bulan	3.238.451.888
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.417.528	1 Laporan	1.488.405
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>390.982.928</b>	<b>100%</b>	<b>410.532.074</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.679.533	1 paket	2.813.509
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	23.089.453	5 paket	24.243.925
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	38.626.331	12 paket	40.557.648
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	2.454.910	8 paket	2.577.655
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	7 dokumen	5.570.944	7 dokumen	5.849.491
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 laporan	9.565.885	15 laporan	10.044.179
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	26 laporan	308.995.872	26 laporan	324.445.665

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	476.140.823	100%	499.947.865
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	72.334.773	12 laporan	75.951.512
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	403.806.050	12 laporan	423.996.353
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>254.678.777</b>	<b>100%</b>	<b>267.412.716</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	237.810.386	6 unit	249.700.905
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	8 unit	11.375.226	8 unit	11.943.988
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	33 unit	3.159.785	33 unit	3.317.774
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	2.333.380	1 unit	2.450.049
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>178.351.200</b>	<b>100%</b>	<b>187.268.760</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>178.351.200</b>	<b>100%</b>	<b>187.268.760</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kota Palu	69 orang	178.351.200	69 orang	187.268.760
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>7.742.024.734</b>	<b>100%</b>	<b>8.129.125.970</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>122.870.782</b>	<b>100%</b>	<b>129.014.321</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kota Palu	1 dokumen	73.918.418	1 dokumen	77.614.339
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kota Palu	3 paket	48.952.363	3 paket	51.399.981
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>7.143.204.106</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.364.311</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 dokumen	5.042.327.865	4 dokumen	5.294.444.258

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 dokumen	1.248.295.128	4 dokumen	1.310.709.885
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Palu	250 orang	852.581.113	250 orang	895.210.168
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.05		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>475.949.846</b>	<b>100%</b>	<b>499.747.338</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	5 dokumen	475.949.846	5 dokumen	499.747.338
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04			<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>245.977.118</b>	<b>100%</b>	<b>258.275.974</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>245.977.118</b>	<b>100%</b>	<b>258.275.974</b>
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Palu	3 laporan	245.977.118	3 laporan	258.275.974
2	20					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>206.960.188</b>		<b>217.308.198</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>			<b>206.960.188</b>		<b>217.308.198</b>	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase pemenuhan data statistik sektoral</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>206.960.188</b>	<b>100%</b>	<b>217.308.198</b>
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>206.960.188</b>	<b>100%</b>	<b>217.308.198</b>
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Palu	4 dokumen	175.204.348	4 dokumen	183.964.565
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kota Palu	1 dokumen	6.489.712	1 dokumen	6.814.198
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	25.266.128	41 Perangkat Daerah	26.529.434
2	21					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>58.291.230</b>		<b>61.205.791</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>			<b>58.291.230</b>		<b>61.205.791</b>	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>58.291.230</b>	<b>100%</b>	<b>61.205.791</b>
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>58.291.230</b>	<b>100%</b>	<b>61.205.791</b>
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Palu	1 dokumen	2.715.957	1 dokumen	2.851.755
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 laporan	28.977.660	2 laporan	30.426.543
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palu	4 laporan	26.597.613	4 laporan	27.927.493
2	22					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>824.090.609</b>		<b>865.295.139</b>	



Kode Rekening				Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			824.090.609		865.295.139	
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengembangan kebudayaan	Kota Palu	100%	603.858.754	100%	634.051.692
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	termaksudnya penerapan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	266.393.705	100%	279.713.390
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kota Palu	5 objek	266.393.705	5 objek	279.713.390
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	337.465.050	100%	354.338.302
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kota Palu	5 objek	337.465.050	5 objek	354.338.302
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	Kota Palu	100%	164.922.004	100%	173.168.104
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100	164.922.004	100	173.168.104
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Palu	20 orang	89.409.790	20 orang	93.880.279
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Palu	10 lembaga	75.512.214	10 lembaga	79.287.825
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	Kota Palu	100%	12.516.638	100%	13.142.470
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	12.516.638	100%	13.142.470
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kota Palu	4 dokumen	12.516.638	4 dokumen	13.142.470
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Kota Palu	78%	42.793.213	83%	44.932.873
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	78%	42.793.213	83%	44.932.873
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Kota Palu	6 objek	42.793.213	6 objek	44.932.873
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				183.229.033		192.390.484
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				183.229.033		192.390.484
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase capaian pembinaan perpustakaan	Kota Palu	100%	153.057.317	100%	160.710.183
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perpustakaan Yang dapat diakses Ke Masyarakat	Kota Palu	100%	114.758.777	100%	120.496.716
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management )	Kota Palu	1 layanan	25.706.067	1 layanan	26.991.371
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kota Palu	50 perpustakaan	21.727.169	50 perpustakaan	22.813.527

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 perpustakaan	15.787.259	46 perpustakaan	16.576.622
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	25 orang	20.251.063	25 orang	21.263.616
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Palu	192 eksemplar	26.187.327	192 eksemplar	27.496.693
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	5.099.893	1 dokumen	5.354.888
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>38.298.540</b>	<b>100%</b>	<b>40.213.467</b>
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Palu	18 orang	22.857.399	18 orang	24.000.269
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Palu	4 perpustakaan	2.111.709	4 perpustakaan	2.217.294
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	3 orang	13.329.432	3 orang	13.995.904
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>30.171.716</b>	<b>100%</b>	<b>31.680.301</b>
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>30.171.716</b>	<b>100%</b>	<b>31.680.301</b>
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Palu	13 orang	30.171.716	13 orang	31.680.301
<b>2</b>	<b>24</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>			<b>6.565.176.217</b>		<b>6.893.435.028</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>				<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>			<b>6.565.176.217</b>		<b>6.893.435.028</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.444.759.043</b>	<b>B</b>	<b>6.766.996.995</b>
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>3.281.315</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>3.445.381</b>
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.458.362	1 Dokumen	1.531.280
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	364.591	1 dokumen	382.820
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	729.181	1 dokumen	765.640
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	729.181	1 laporan	765.640



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.971.096.019	95%	4.169.650.820
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	39 orang/bulan	3.969.394.596	39 orang/bulan	4.167.864.326
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	486.121	1 Laporan	510.427
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	1.215.302	2 laporan	1.276.067
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.461.418.784	100%	1.534.489.723
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	1 paket	4.802.873	1 paket	5.043.017
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	1 paket	1.028.893.019	1 paket	1.080.337.670
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	1 paket	59.411.048	1 paket	62.381.600
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	1 paket	17.497.918	1 paket	18.372.814
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	3 dokumen	5.172.325	3 dokumen	5.430.941
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	5.502.887	1 laporan	5.778.032
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	340.138.714	12 laporan	357.145.650
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	515.467.314	100%	541.240.680
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 laporan	169.170.034	12 laporan	177.628.535
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 laporan	346.297.281	12 laporan	363.612.145
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	493.495.611	100%	518.170.391
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	7 unit	270.088.709	7 unit	283.593.144
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	3 unit	35.078.476	3 unit	36.832.400
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	1 unit	2.138.931	1 unit	2.245.878
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	6 unit	186.189.495	6 unit	195.498.969
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	Kota Palu	100%	105.152.884	100%	110.410.529

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	35.469.414	100%	37.242.885	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kota Palu	1 berkas	14.666.070	1 berkas	15.399.373
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Palu	45 berkas	20.803.345	45 berkas	21.843.512
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	11.231.821	100%	11.793.412	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kota Palu	1 arsip	5.618.584	1 arsip	5.899.513
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kota Palu	1 arsip	5.613.237	1 arsip	5.893.899
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	58.451.649	100%	61.374.232	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Palu	1 layanan	53.567.594	1 layanan	56.245.974
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	45 laporan	4.884.056	45 laporan	5.128.258
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	Kota Palu	100%	11.910.056	100%	12.505.559	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Kota Palu	100%	5.463.220	100%	5.736.381	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01	01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Palu	45 Arsip	5.463.220	45 Arsip	5.736.381
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	1.299.790	100%	1.364.779	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Palu	8 daftar	1.299.790	8 daftar	1.364.779
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kota	Kota Palu	100%	5.147.047	100%	5.404.399	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Palu	1 arsip	5.147.047	1 arsip	5.404.399
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan perizinan penggunaan arsip	Kota Palu	100%	3.354.233	100%	3.521.945	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	3.354.233	100%	3.521.945	
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Palu	9 SOP	3.354.233	9 SOP	3.521.945
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				37.203.531.589		39.063.708.169	

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.887.658.207		3.032.041.118	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				2.887.658.207		3.032.041.118	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Kota Palu	1090	2.260.729.848	1122	2.373.766.340	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	Kota Palu	100%	2.260.729.848	100%	2.373.766.340	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kota Palu	100 unit	2.260.729.848	100 unit	2.373.766.340
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	Kota Palu	130	477.808.509	134	501.698.935	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan	Kota Palu	100%	477.808.509	100%	501.698.935	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	19 unit	430.431.664	19 unit	451.953.247
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	3 unit	47.376.846	3 unit	49.745.688
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Kota Palu	75,35	149.119.850	76,11	156.575.843	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku dan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kota Palu	100%	149.119.850	100%	156.575.843	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Palu	4 pelaku usaha	149.119.850	4 pelaku usaha	156.575.843
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.222.463.835		5.483.587.027	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00			Dinas Pariwisata				5.222.463.835		5.483.587.027	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	4.750.791.412	B	4.988.330.982	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	6.174.706	4 dokumen	6.483.442	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.528.800	1 Dokumen	2.655.240
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.215.302	1 dokumen	1.276.067
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.215.302	1 dokumen	1.276.067
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.215.302	1 laporan	1.276.067
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.728.409.314	95%	3.914.829.780	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/bulan	3.727.194.012	38 orang/bulan	3.913.553.713

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	18 laporan	1.215.302	18 laporan	1.276.067
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>348.621.241</b>	<b>100%</b>	<b>366.052.303</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	4 paket	38.254.478	4 paket	40.167.202
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu	6 paket	46.246.352	6 paket	48.558.670
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palu	1 paket	11.963.725	1 paket	12.561.911
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu	24 dokumen	4.958.432	24 dokumen	5.206.354
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	10 laporan	5.566.083	10 laporan	5.844.387
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	241.632.170	12 laporan	253.713.779
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>21.389.315</b>	<b>100%</b>	<b>22.458.780</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu	1 unit	21.389.315	1 unit	22.458.780
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>392.405.327</b>	<b>100%</b>	<b>412.025.593</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	12 laporan	81.843.296	12 laporan	85.935.460
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	12 laporan	310.562.032	12 laporan	326.090.133
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>253.791.509</b>	<b>100%</b>	<b>266.481.085</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu	5 unit	201.594.290	5 unit	211.674.004
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu	7 unit	1.944.483	7 unit	2.041.707
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palu	1 unit	48.612.079	1 unit	51.042.683
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu	5 unit	1.640.658	5 unit	1.722.691
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>215.023.313</b>	<b>100%</b>	<b>225.774.479</b>
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>198.106.310</b>	<b>100%</b>	<b>208.011.626</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	137.827.333	1 Dokumen	144.718.699

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	60.278.977	1 laporan	63.292.926
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.04		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>16.917.003</b>	<b>100%</b>	<b>17.762.854</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Palu	1 laporan	16.917.003	1 laporan	17.762.854
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Cakupan pemasaran pariwisata</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>232.343.071</b>	<b>100%</b>	<b>243.960.224</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Promosi Wisata di Luar Negeri</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>232.343.071</b>	<b>100%</b>	<b>243.960.224</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	1 Dokumen	25.306.476	1 Dokumen	26.571.800
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Fasilitasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	4 dokumen	110.177.028	4 dokumen	115.685.880
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	4 dokumen	96.859.567	4 dokumen	101.702.545
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>24.306.039</b>	<b>100%</b>	<b>25.521.341</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>24.306.039</b>	<b>100%</b>	<b>25.521.341</b>
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	20 orang	24.306.039	20 orang	25.521.341
3	27					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>17.791.265.731</b>		<b>18.680.829.017</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>				<b>17.791.265.731</b>		<b>18.680.829.017</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>BB</b>	<b>14.761.727.976</b>	<b>BB</b>	<b>15.499.814.375</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>11.634.037</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12.215.739</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.634.239	1 Dokumen	3.815.951
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.736.860	1 dokumen	2.873.703
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.152.543	1 dokumen	2.260.170
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	3.110.395	1 laporan	3.265.915
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>11.689.150.858</b>	<b>95%</b>	<b>12.273.608.401</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	80 orang/bulan	11.686.744.560	80 orang/bulan	12.271.081.788
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	2 laporan	2.406.298	2 laporan	2.526.613
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>572.352.129</b>	<b>100%</b>	<b>600.969.735</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.263.914	1 paket	1.327.110
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	34.028.455	3 paket	35.729.878
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	67.720.738	1 paket	71.106.775
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	9.916.961	1 paket	10.412.809
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	3.033.394	24 dokumen	3.185.063
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	5.347.329	1 laporan	5.614.695
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	451.041.338	12 laporan	473.593.405
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>5.833.449</b>	<b>100%</b>	<b>6.125.122</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	5.833.449	2 unit	6.125.122
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.812.591.388</b>	<b>100%</b>	<b>1.903.220.957</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	200.281.764	12 laporan	210.295.852
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.612.309.624	12 laporan	1.692.925.105
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>670.166.116</b>	<b>100%</b>	<b>703.674.421</b>
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	60 Unit	574.303.097	60 Unit	603.018.251
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	42 Unit	87.793.414	42 Unit	92.183.085
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	53 Unit	6.902.915	53 Unit	7.248.061
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 Unit	1.166.690	1 Unit	1.225.024
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>5,63</b>	<b>1.356.387.926</b>	<b>5,68</b>	<b>1.424.207.322</b>



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan SDG Tumbuhan</b>	Kota Palu	100%	933.593.462	100%	980.273.136	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kota Palu	2 VUB	45.429.932	2 VUB	47.701.429
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Palu	1 Dokumen	69.574.531	1 Dokumen	73.053.257
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kota Palu	4 dokumen	818.589.000	4 dokumen	859.518.450
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Ternak</b>	Kota Palu	100%	422.794.463	100%	443.934.186	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Palu	100 Ekor	422.794.463	100 Ekor	443.934.186
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>	Kota Palu	100%	643.488.876	100%	675.663.320	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Fasilitas Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani</b>	Kota Palu	100%	643.488.876	100%	675.663.320	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Kota Palu	4 dokumen	639.561.993	4 dokumen	671.540.092
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kota Palu	1 Dokumen	3.926.884	1 Dokumen	4.123.228
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</b>	Kota Palu	-10%	288.238.670	-10%	302.650.603	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan</b>	Kota Palu	100%	99.168.640	100%	104.127.072	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Palu	1 laporan	99.168.640	1 laporan	104.127.072
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Teknis Kesmavet</b>	Kota Palu	100%	189.070.030	100%	198.523.531	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kota Palu	3 laporan	189.070.030	3 laporan	198.523.531
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian</b>	Kota Palu	100%	23.438.897	100%	24.610.842	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</b>	Kota Palu	100%	23.438.897	100%	24.610.842	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kota Palu	2 laporan	23.438.897	2 laporan	24.610.842
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Tani (%)</b>	Kota Palu	15%	717.983.386	20%	753.882.555	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan</b>	Kota Palu	100%	717.983.386	100%	753.882.555	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Palu	46 unit	149.745.716	46 unit	157.233.002

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Palu	50 unit	504.142.644	50 unit	529.349.776
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Palu	47 unit	64.095.026	47 unit	67.299.777
<b>3</b>	<b>30</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>9.519.123.858</b>		<b>9.995.080.051</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>				<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>				<b>9.519.123.858</b>		<b>9.995.080.051</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.049.341.760</b>	<b>B</b>	<b>6.351.808.848</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>5.797.963</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>6.087.861</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.356.763	1 Dokumen	1.424.601
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.509.405	1 dokumen	1.584.875
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.509.405	1 dokumen	1.584.875
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.422.389	1 laporan	1.493.509
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.303.264.717</b>	<b>95%</b>	<b>4.518.427.953</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	42 orang/bulan	4.299.863.816	42 orang/bulan	4.514.857.007
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	12 laporan	3.400.901	12 laporan	3.570.946
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>559.217.519</b>	<b>100%</b>	<b>587.178.395</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	22.567.671	5 paket	23.696.055
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	60 paket	53.688.210	60 paket	56.372.621
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	25.383.920	6 paket	26.653.116
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	5.463.998	12 dokumen	5.737.198
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	9.284.907	11 laporan	9.749.152
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	18 laporan	442.828.813	18 laporan	464.970.254
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>854.390.338</b>	<b>100%</b>	<b>897.109.854</b>



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	179.553.573	12 laporan	188.531.252
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	674.836.764	12 laporan	708.578.602
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>326.671.224</b>	<b>100%</b>	<b>343.004.785</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	5 unit	249.185.515	5 unit	261.644.791
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	80 unit	65.624.362	80 unit	68.905.580
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	11 unit	11.861.347	11 unit	12.454.415
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>92,30%</b>	<b>47.455.111</b>	<b>94,50%</b>	<b>49.827.867</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Tersedianya Rekomendasi Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>22.556.004</b>	<b>100%</b>	<b>23.683.805</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kota Palu	12 dokumen	22.556.004	12 dokumen	23.683.805
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>Tersedianya Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>24.899.107</b>	<b>100%</b>	<b>26.144.062</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	16 dokumen	24.899.107	16 dokumen	26.144.062
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.074.466.730</b>	<b>100%</b>	<b>3.228.190.067</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.997.718.912</b>	<b>100%</b>	<b>2.097.604.857</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	13 unit	718.091.305	13 unit	753.995.871
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	13 unit	1.279.627.606	13 unit	1.343.608.987
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.076.747.818</b>	<b>100%</b>	<b>1.130.585.209</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	1 dokumen	1.076.747.818	1 dokumen	1.130.585.209
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>190.807.270</b>	<b>100%</b>	<b>200.347.633</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.30.3.31.0.00.01.00</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>146.570.278</b>	<b>100%</b>	<b>153.898.792</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Palu	12 laporan	146.570.278	12 laporan	153.898.792
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>44.236.992</b>	<b>100%</b>	<b>46.448.841</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	44.236.992	12 laporan	46.448.841
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>157.052.987</b>	<b>100%</b>	<b>164.905.636</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>157.052.987</b>	<b>100%</b>	<b>164.905.636</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Palu	1985 Unit	136.052.569	1985 Unit	142.855.197
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Palu	50 orang	21.000.418	50 orang	22.050.439
3	31					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			<b>1.783.019.958</b>		<b>1.872.170.956</b>
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00				<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>1.783.019.958</b>		<b>1.872.170.956</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>45%</b>	<b>1.717.734.520</b>	<b>48%</b>	<b>1.803.621.246</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.717.734.520</b>	<b>100%</b>	<b>1.803.621.246</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Palu	20 dokumen	410.611.644	20 dokumen	431.142.226
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Palu	20 dokumen	75.057.049	20 dokumen	78.809.902
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Palu	1 dokumen	828.108.680	1 dokumen	869.514.114
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Palu	12 dokumen	403.957.147	12 dokumen	424.155.004
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1,10%</b>	<b>55.660.247</b>	<b>1,18%</b>	<b>58.443.259</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>55.660.247</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>58.443.259</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kota Palu	12 dokumen	55.660.247	12 dokumen	58.443.259
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>9.625.192</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>10.106.451</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>9.625.192</b>	<b>12 dokumen</b>	<b>10.106.451</b>
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Palu	12 dokumen	9.625.192	12 dokumen	10.106.451
4						<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>87.140.487.818</b>		<b>91.497.512.209</b>
4	01					<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>43.795.911.517</b>		<b>45.985.707.093</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00				<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>43.795.911.517</b>		<b>45.985.707.093</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B (70)</b>	<b>26.422.898.698</b>	<b>BB (72)</b>	<b>27.744.043.632</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>13.779.094</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>14.468.048</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.894.849	1 Dokumen	3.039.592
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.073.692	1 dokumen	4.277.377
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.073.692	1 dokumen	4.277.377
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	2.736.860	1 laporan	2.873.703
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>12.582.615.822</b>	<b>95%</b>	<b>13.211.746.613</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	110 orang/bulan	12.576.867.444	110 orang/bulan	13.205.710.816
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.734.429	1 Laporan	2.871.151
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	3.013.949	4 laporan	3.164.646
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>52.112.308</b>	<b>100%</b>	<b>54.717.923</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	52.112.308	1 dokumen	54.717.923

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>7.564.623</b>	<b>100%</b>	<b>7.942.854</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	3.034 dokumen	7.564.623	3.034 dokumen	7.942.854
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.050.662.236</b>	<b>100%</b>	<b>4.253.195.348</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	16.130.084	1 paket	16.936.588
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	436.379.556	12 paket	458.198.534
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	113.677.401	12 paket	119.361.271
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	79.625 laporan	1.832.152.783	79.625 laporan	1.923.760.422
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	1.652.322.413	15 laporan	1.734.938.533
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>99.654.761</b>	<b>100%</b>	<b>104.637.499</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	12 unit	99.654.761	12 unit	104.637.499
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.153.873.588</b>	<b>100%</b>	<b>3.311.567.268</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	12 laporan	5.833.449	12 laporan	6.125.122
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	649.115.919	12 laporan	681.571.715
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	954.101.975	12 laporan	1.001.807.074
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.544.822.245	12 laporan	1.622.063.358
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.319.123.209</b>	<b>100%</b>	<b>1.385.079.369</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	108 unit	1.031.317.887	108 unit	1.082.883.781
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	180 Unit	24.276.872	180 Unit	25.490.716
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	7 unit	202.712.368	7 unit	212.847.986
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	477 unit	60.816.083	477 unit	63.856.887
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.022.049.327</b>	<b>100%</b>	<b>1.073.151.794</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	2 Orang/bulan	901.151.088	2 Orang/bulan	946.208.642

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	33.396.498	8 paket	35.066.323
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	4 orang	87.501.741	4 orang	91.876.829
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.630.830.011</b>	<b>100%</b>	<b>1.712.371.512</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	765.640.238	12 paket	803.922.250
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	622.720.727	12 paket	653.856.763
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	242.469.046	12 paket	254.592.499
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Organisasi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>946.891.496</b>	<b>100%</b>	<b>994.236.071</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	1 dokumen	97.976.887	1 dokumen	102.875.731
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	1 Laporan	618.911.517	1 Laporan	649.857.093
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	1 dokumen	118.850.699	1 dokumen	124.793.234
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 dokumen	111.152.393	1 dokumen	116.710.012
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.14</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terwujudnya Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.543.742.222</b>	<b>100%</b>	<b>1.620.929.333</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	1 Laporan	528.732.190	1 Laporan	555.168.799
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	1 Laporan	129.308.129	1 Laporan	135.773.536
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	1 Laporan	885.701.903	1 Laporan	929.986.998
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>14.618.753.662</b>	<b>100%</b>	<b>15.349.691.345</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.199.123.573</b>	<b>100%</b>	<b>1.259.079.752</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	22 dokumen	396.542.336	22 dokumen	416.369.453
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	4 dokumen	274.058.274	4 dokumen	287.761.187
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	173 dokumen	528.522.963	173 dokumen	554.949.111
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Indeks kerukunan umat beragama</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>84</b>	<b>12.114.162.803</b>	<b>85</b>	<b>12.719.870.943</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	10 dokumen	3.608.873.271	10 dokumen	3.789.316.934

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	4 dokumen	5.014.700.522	4 dokumen	5.265.435.548
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palu	5 dokumen	1.482.435.351	5 dokumen	1.556.557.118
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	2.500 keluarga	390.595.310	2.500 keluarga	410.125.075
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Palu	4.480 keluarga	1.617.558.350	4.480 keluarga	1.698.436.267
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>78</b>	<b>1.305.467.286</b>	<b>80</b>	<b>1.370.740.650</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Palu	4 dokumen	280.955.897	4 dokumen	295.003.692
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Palu	12 kasus	926.793.154	12 kasus	973.132.811
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Palu	35 dokumen	97.718.235	35 dokumen	102.604.147
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.754.259.158</b>	<b>100%</b>	<b>2.891.972.116</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>73%</b>	<b>180.031.985</b>	<b>75%</b>	<b>189.033.585</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	21 dokumen	123.559.042	21 dokumen	129.736.994
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	5 laporan	56.472.943	5 laporan	59.296.591
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.312.343.361</b>	<b>100%</b>	<b>1.377.960.529</b>
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Palu	41 Dokumen	1.248.941.718	41 Dokumen	1.311.388.804
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Palu	41 laporan	39.945.135	41 laporan	41.942.392
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	41 laporan	23.456.508	41 laporan	24.629.334
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>960.232.155</b>	<b>100%</b>	<b>1.008.243.763</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	187 dokumen	592.827.699	187 dokumen	622.469.084
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	199 dokumen	229.959.466	199 dokumen	241.457.439
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	77 orang	137.444.990	77 orang	144.317.239
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Cakupan terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam</b>	Kota Palu	100%	301.651.656	100%	316.734.239
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Palu	3 dokumen	301.651.656	3 dokumen	316.734.239
4	02					<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				43.344.576.300		45.511.805.115
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00				<b>Sekretariat DPRD</b>				43.344.576.300		45.511.805.115
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	Kota Palu	B	27.659.656.752	B	29.042.639.589
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	4 dokumen	7.697.723	4 dokumen	8.082.609
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.628.505	1 Dokumen	1.709.930
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.299.351	1 dokumen	2.414.319
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.299.351	1 dokumen	2.414.319
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.470.515	1 laporan	1.544.041
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	95%	4.747.280.637	95%	4.984.644.669
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	50 orang/bulan	4.744.830.588	50 orang/bulan	4.982.072.117
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.450.049	1 Laporan	2.572.551
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	100%	73.908.832	100%	77.604.274
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	7 Orang	73.908.832	7 Orang	77.604.274
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	100%	2.349.286.544	100%	2.466.750.871
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	15 paket	6.369.252	15 paket	6.687.714
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	66.515.907	6 paket	69.841.702
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	4.512.173	10 paket	4.737.782



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	107 paket	903.857.600	107 paket	949.050.480
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	86.353.646	13 paket	90.671.328
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	15 dokumen	701.083.397	15 dokumen	736.137.567
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 laporan	371.616.104	15 laporan	390.196.909
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	26 laporan	208.978.465	26 laporan	219.427.388
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>58.132.394</b>	<b>100%</b>	<b>61.039.014</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	35 Unit	58.132.394	35 Unit	61.039.014
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.590.035.951</b>	<b>100%</b>	<b>1.669.537.748</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	4 laporan	29.951.652	4 laporan	31.449.234
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	4 laporan	520.149.241	4 laporan	546.156.703
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.039.935.058	12 laporan	1.091.931.811
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>513.134.421</b>	<b>100%</b>	<b>538.791.142</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	25 Unit	415.404.309	25 Unit	436.174.525
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	4 Unit	40.268.690	4 Unit	42.282.125
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	113 unit	37.917.421	113 unit	39.813.292
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	65 unit	19.544.000	65 unit	20.521.200
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Prima Anggota DPRD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>18.320.180.250</b>	<b>100%</b>	<b>19.236.189.263</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Palu	35 org/bln	17.891.308.937	35 org/bln	18.785.874.384
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Palu	146 paket	234.422.999	146 paket	246.144.149
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Palu	35 Orang	194.448.314	35 Orang	204.170.730
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>15.684.919.549</b>	<b>100%</b>	<b>16.469.165.526</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>534.524.975</b>	<b>100%</b>	<b>561.251.224</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Palu	1 dokumen	534.524.975	1 dokumen	561.251.224
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>21.996.966</b>	<b>100%</b>	<b>23.096.814</b>



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	2 dokumen	4.496.617	2 dokumen	4.721.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Palu	2 dokumen	4.375.087	2 dokumen	4.593.841
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Palu	1 dokumen	4.375.087	1 dokumen	4.593.841
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Palu	1 dokumen	4.375.087	1 dokumen	4.593.841
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Palu	2 dokumen	4.375.087	2 dokumen	4.593.841
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>24.358.297</b>	<b>100%</b>	<b>25.576.212</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Palu	1 dokumen	24.358.297	1 dokumen	25.576.212
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>659.121.451</b>	<b>100%</b>	<b>692.077.524</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Palu	9 dokumen	88.415.649	9 dokumen	92.836.431
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Palu	19 orang	273.199.882	19 orang	286.859.876
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Palu	9 orang	297.505.921	9 orang	312.381.217
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>5.132.948.504</b>	<b>100%</b>	<b>5.389.595.929</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Palu	12 laporan	204.977.691	12 laporan	215.226.575
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Palu	105 dokumen	4.927.970.813	105 dokumen	5.174.369.354
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Cakupan Fasilitasi tugas DPRD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>9.311.969.356</b>	<b>100%</b>	<b>9.777.567.824</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Palu	684 dokumen	9.279.618.017	684 dokumen	9.743.598.918
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kota Palu	19 laporan	32.351.338	19 laporan	33.968.905
5						<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>74.390.397.581</b>		<b>78.109.917.460</b>
5	01					<b>PERENCANAAN</b>				<b>9.044.129.065</b>		<b>9.496.335.518</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>9.044.129.065</b>		<b>9.496.335.518</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>BB</b>	<b>5.598.785.562</b>	<b>BB</b>	<b>5.878.724.840</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4dokumen</b>	<b>31.774.848</b>	<b>4dokumen</b>	<b>33.363.590</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	8.555.823	1 Dokumen	8.983.614
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.133.723	1 dokumen	9.590.410
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.133.723	1 dokumen	9.590.410
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.951.578	1 laporan	5.199.157
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.979.610.938</b>	<b>95%</b>	<b>4.178.591.485</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	34 orang/bulan	3.968.465.088	34 orang/bulan	4.166.888.342
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	3 laporan	11.145.850	3 laporan	11.703.143
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>613.231.513</b>	<b>100%</b>	<b>643.893.089</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.647.122	1 paket	2.779.478
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	11.141.791	1 paket	11.698.881
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	86.488.481	1 paket	90.812.905
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	19.781.665	1 paket	20.770.748
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	14.778.072	1 dokumen	15.516.975
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	19.250.383	1 laporan	20.212.902
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	40 laporan	459.143.999	40 laporan	482.101.199
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>21.389.315</b>	<b>100%</b>	<b>22.458.780</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	21.389.315	1 unit	22.458.780
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>606.392.027</b>	<b>100%</b>	<b>636.711.628</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	34.650.690	12 laporan	36.383.224
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	571.741.337	12 laporan	600.328.404
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>346.386.922</b>	<b>100%</b>	<b>363.706.268</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	17 unit	295.344.239	17 unit	310.111.451
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	17 unit	39.375.784	17 unit	41.344.573
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	21 Unit	11.666.899	21 Unit	12.250.244
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.445.343.503</b>	<b>100%</b>	<b>3.617.610.678</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.077.834.721</b>	<b>100%</b>	<b>1.131.726.457</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Palu	1 dokumen	75.475.599	1 dokumen	79.249.379
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Palu	1 dokumen	44.006.084	1 dokumen	46.206.388
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Palu	1 berita acara	46.672.457	1 berita acara	49.006.079
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palu	1 berita acara	56.284.523	1 berita acara	59.098.749
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 berita acara	331.855.240	2 berita acara	348.448.002
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Palu	758 usulan	20.834.724	758 usulan	21.876.460
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Kota Palu	2 dokumen	502.706.095	2 dokumen	527.841.399
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.248.345.393</b>	<b>100%</b>	<b>1.310.762.663</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	1 Dokumen	401.926.829	1 Dokumen	422.023.171
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	82 orang	511.248.418	82 orang	536.810.839
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	2 buku	335.170.146	2 buku	351.928.654
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.119.163.388</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.121.558</b>
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	13 laporan	252.146.161	13 laporan	264.753.469
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	4 kerjasama	134.698.382	4 kerjasama	141.433.301
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	11 laporan	732.318.846	11 laporan	768.934.788
<b>5</b>	<b>02</b>					<b>KEUANGAN</b>				<b>49.195.408.248</b>		<b>51.655.178.661</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>				<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>				<b>32.242.358.434</b>		<b>33.854.476.355</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>10.965.526.235</b>	<b>B</b>	<b>11.513.802.547</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>26.691.361</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>28.025.929</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.126.950	1 Dokumen	1.183.297
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	18.299.434	1 dokumen	19.214.405

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.195.026	1 dokumen	6.504.777
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.069.952	1 laporan	1.123.449
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>8.197.450.440</b>	<b>95%</b>	<b>8.607.322.962</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	58 orang/bulan	8.195.288.272	58 orang/bulan	8.605.052.686
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.002.867	1 Laporan	1.053.011
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.159.301	1 laporan	1.217.266
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>48.612.079</b>	<b>100%</b>	<b>51.042.683</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	5 orang	48.612.079	5 orang	51.042.683
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>919.332.327</b>	<b>100%</b>	<b>965.298.943</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.057.457	1 paket	3.210.330
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	46.613.445	1 paket	48.944.117
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	176.538.489	1 paket	185.365.413
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	14.864.854	1 paket	15.608.097
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	5.755.670	12 dokumen	6.043.454
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	102.814.546	12 laporan	107.955.274
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	40 laporan	297.413.558	40 laporan	312.284.236
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	1 dokumen	272.274.308	1 dokumen	285.888.023
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.353.567.783</b>	<b>100%</b>	<b>1.421.246.172</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	468.835.109	12 laporan	492.276.864
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	884.732.675	12 laporan	928.969.308

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>419.872.245</b>	<b>100%</b>	<b>440.865.858</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	24 unit	275.144.365	24 unit	288.901.583
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	4 unit	9.236.295	4 unit	9.698.110
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	193 unit	62.719.304	193 unit	65.855.269
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	48.612.079	1 unit	51.042.683
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	14.583.624	1 unit	15.312.805
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	33 unit	9.576.579	33 unit	10.055.408
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>WTP</b>	<b>19.419.589.555</b>	<b>WTP</b>	<b>20.390.569.033</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Terwujudnya penyusunan rencana anggaran yang efektif dan efisien</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.195.725.018</b>	<b>100%</b>	<b>2.305.511.269</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	9.248.448	2 dokumen	9.710.870
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	17.925.704	2 dokumen	18.821.989
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	99.168.640	41 dokumen	104.127.072
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	99.168.640	41 dokumen	104.127.072
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	523.180.029	41 dokumen	549.339.031
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Palu	2 dokumen	63.262.301	2 dokumen	66.425.416
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Palu	2 dokumen	91.475.779	2 dokumen	96.049.568
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Palu	3 dokumen	95.960.243	3 dokumen	100.758.255
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Palu	1 dokumen	263.585.142	1 dokumen	276.764.399
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	932.750.091	2 dokumen	979.387.596
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah yang akuntabel</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.095.970.493</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.769.017</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	1 dokumen	886.684.314	1 dokumen	931.018.529
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	2 dokumen	82.591.922	2 dokumen	86.721.518

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	1 dokumen	99.674.206	1 dokumen	104.657.916
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	1 laporan	9.722.416	1 laporan	10.208.537
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	16 dokumen	8.960.664	16 dokumen	9.408.698
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 orang	8.336.971	41 orang	8.753.820
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.127.894.045</b>		<b>1.184.288.747</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	2 laporan	215.610.124	2 laporan	226.390.631
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Palu	4 dokumen	109.853.089	4 dokumen	115.345.744
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Palu	6 laporan	84.520.363	6 laporan	88.746.381
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	3 laporan	192.968.563	3 laporan	202.616.991
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	90.119.502	2 dokumen	94.625.477
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	1 dokumen	410.540.671	1 dokumen	431.067.704
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 dokumen	12.614.834	1 dokumen	13.245.576
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 dokumen	11.666.899	1 dokumen	12.250.244



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Palu	100%	15.000.000.000	100%	15.750.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Palu	1 laporan	15.000.000.000	1 laporan	15.750.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Cakupan pengelolaan aset daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.857.242.644</b>	<b>100%</b>	<b>1.950.104.776</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.857.242.644	100%	1.950.104.776
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	466.448.450	2 dokumen	489.770.872
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 dokumen	29.191.553	1 dokumen	30.651.131
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	3 dokumen	125.117.768	3 dokumen	131.373.656
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 dokumen	78.258.155	1 dokumen	82.171.062
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	175.975.725	1 laporan	184.774.511
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	125.195.547	1 laporan	131.455.325
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	38 laporan	365.437.631	38 laporan	383.709.512
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	97.005.403	1 laporan	101.855.673
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	33.397.446	1 laporan	35.067.318
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	2 dokumen	222.375.954	2 dokumen	233.494.751
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	109.963.439	1 laporan	115.461.610
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 orang	28.875.575	41 orang	30.319.353
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				<b>Badan Pendapatan Daerah</b>				<b>16.953.049.815</b>		<b>17.800.702.306</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>15.805.407.040</b>	<b>BB</b>	<b>16.595.677.392</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	3.214.231	4 dokumen	3.374.942
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	803.558	1 Dokumen	843.736
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	803.558	1 dokumen	843.736
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	803.558	1 dokumen	843.736
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	803.558	1 laporan	843.736

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	13.761.106.927	95%	14.449.162.273	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	76 orang/bulan	13.758.504.722	76 orang/bulan	14.446.429.958
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.602.205	1 Laporan	2.732.315
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	48.612.079	100%	51.042.683	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	2 Orang	48.612.079	2 Orang	51.042.683
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	646.167.061	100%	678.475.415	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.658.644	1 paket	1.741.576
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	77.779.326	1 paket	81.668.292
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	122.214.898	1 paket	128.325.642
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	38.819.175	1 paket	40.760.134
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	23.644.915	12 dokumen	24.827.161
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	14.850.990	12 laporan	15.593.540
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	367.199.114	35 laporan	385.559.069
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	855.971.290	100%	898.769.854	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	222.837.768	12 laporan	233.979.657
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	633.133.522	12 laporan	664.790.198
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	490.335.453	100%	514.852.226	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	20 unit	370.968.494	20 unit	389.516.919
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	2 unit	16.139.210	2 unit	16.946.171
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	10 unit	95.036.614	10 unit	99.788.444
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	8.191.135	1 unit	8.600.692
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian pemenuhan target PAD	Kota Palu	100%	1.147.642.775	100%	1.205.024.913	



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Palu	100%	1.147.642.775	100%	1.205.024.913	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Palu	1 dokumen	6.235.957	1 dokumen	6.547.755
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Palu	1 laporan	92.683.376	1 laporan	97.317.545
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Palu	1 laporan	55.907.172	1 laporan	58.702.530
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Palu	100 objek pajak	228.330.204	100 objek pajak	239.746.714
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Palu	1 dokumen	73.424.631	1 dokumen	77.095.863
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Palu	100 layanan	318.520.339	100 layanan	334.446.356
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Palu	1 Dokumen	107.505.612	1 Dokumen	112.880.892
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	201.971.034	1 Dokumen	212.069.585
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	9.936.309	1 Dokumen	10.433.124
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	53.128.141	1 Dokumen	55.784.548
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>8.305.166.100</b>		<b>8.720.424.405</b>	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000			<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>				<b>8.305.166.100</b>		<b>8.720.424.405</b>	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.278.942.382</b>	<b>BB</b>	<b>6.592.889.502</b>	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12.272.605</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>12.886.236</b>	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.728.596	1 Dokumen	2.865.026
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.267.654	1 dokumen	4.481.037
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.429.096	1 dokumen	3.600.551
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.847.259	1 laporan	1.939.622
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.093.567.105</b>	<b>95%</b>	<b>4.298.245.460</b>	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	51 orang/ bulan	4.093.080.984	51 orang/ bulan	4.297.735.033

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 dokumen	486.121	4 dokumen	510.427
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>547.737.053</b>	<b>100%</b>	<b>575.123.905</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	10.485.528	7 paket	11.009.805
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	81.961.909	7 paket	86.060.004
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	66.218.567	10 paket	69.529.495
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	15.795.425	6 paket	16.585.197
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	5.930.674	24 dokumen	6.227.207
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	13.144.706	12 laporan	13.801.941
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	354.200.244	35 laporan	371.910.256
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>377.229.730</b>	<b>100%</b>	<b>396.091.216</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	5 unit	377.229.730	5 unit	396.091.216
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>822.225.125</b>	<b>100%</b>	<b>863.336.381</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	316.078.691	12 laporan	331.882.625
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	506.146.435	12 laporan	531.453.756
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>425.910.765</b>	<b>100%</b>	<b>447.206.303</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	16 unit	303.981.050	16 unit	319.180.102
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 unit	26.931.092	1 unit	28.277.646
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	45 unit	10.694.657	45 unit	11.229.390
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	76.793.400	1 unit	80.633.070
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	65 unit	7.510.566	65 unit	7.886.094
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.03.5.04.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.026.223.717</b>	<b>100%</b>	<b>2.127.534.903</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>782.673.225</b>	<b>100%</b>	<b>821.806.886</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Palu	1 dokumen	328.884.434	1 dokumen	345.328.656
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Palu	200 dokumen	163.161.581	200 dokumen	171.319.660
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Palu	10 lembaga	87.055.021	10 lembaga	91.407.772
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Palu	1 dokumen	203.572.189	1 dokumen	213.750.798
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>662.225.157</b>	<b>4 TW</b>	<b>695.336.415</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Palu	200 dokumen	61.097.430	200 dokumen	64.152.301
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Palu	1300 dokumen	292.817.587	1300 dokumen	307.458.467
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Palu	4 dokumen	308.310.140	4 dokumen	323.725.647
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>cakupan Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>511.150.154</b>	<b>100%</b>	<b>536.707.661</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Palu	5 orang	272.398.755	5 orang	286.018.692
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Palu	1 dokumen	238.751.399	1 dokumen	250.688.969
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>70.175.181</b>	<b>100%</b>	<b>73.683.940</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Palu	9 orang	31.518.886	9 orang	33.094.830
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Palu	20 laporan	38.656.296	20 laporan	40.589.111
5	04					<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>2.726.128.811</b>		<b>2.862.435.252</b>
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>				<b>2.726.128.811</b>		<b>2.862.435.252</b>
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.726.128.811</b>	<b>100%</b>	<b>2.862.435.252</b>
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>35 org</b>	<b>502.461.250</b>	<b>35 org</b>	<b>527.584.313</b>
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Palu	35 Org	502.461.250	35 Org	527.584.313
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>70%</b>	<b>2.223.667.561</b>	<b>80%</b>	<b>2.334.850.939</b>
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Palu	1 laporan	2.223.667.561	1 laporan	2.334.850.939
5	05					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>5.119.565.357</b>		<b>5.375.543.624</b>

Kode Rekening				Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00				<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>			<b>5.119.565.357</b>		<b>5.375.543.624</b>	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>BB</b>	<b>4.119.854.728</b>	<b>BB</b>	<b>4.325.847.464</b>
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.385.444</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.454.716</b>
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	243.060	1 Dokumen	255.213
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	486.121	1 dokumen	510.427
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	486.121	1 dokumen	510.427
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	170.142	1 laporan	178.649
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>3.185.653.585</b>	<b>95%</b>	<b>3.344.936.264</b>
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	30 orang/bulan	3.185.021.628	30 orang/bulan	3.344.272.709
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	243.060	1 Laporan	255.213
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	388.897	4 laporan	408.341
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>282.080.239</b>	<b>100%</b>	<b>296.184.251</b>
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	592.095	1 paket	621.700
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	31.983.928	4 paket	33.583.125
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	9.006.651	3 paket	9.456.984
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	1.516.697	1 dokumen	1.592.532
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	6 laporan	2.479.216	6 laporan	2.603.177
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	23 laporan	236.501.651	23 laporan	248.326.734
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.05		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>297.972.383</b>	<b>100%</b>	<b>312.871.002</b>
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.05	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Palu	4 unit	271.838.744	4 unit	285.430.681
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	26.133.640	4 paket	27.440.322

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	212.225.557	100%	222.836.835
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	62.067.902	12 laporan	65.171.297
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	150.157.655	12 laporan	157.665.538
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	140.537.519	100%	147.564.395
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 Unit	128.345.610	22 Unit	134.762.890
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	33 Unit	11.025.219	33 Unit	11.576.480
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	8 Unit	1.166.690	8 Unit	1.225.024
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Kota Palu	80%	999.710.629	87,50%	1.049.696.160
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang dihasilkan	Kota Palu	36%	360.501.414	57%	378.526.485
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Palu	2 laporan	99.574.648	2 laporan	104.553.381
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Ketahanan	Kota Palu	1 laporan	138.735.664	1 laporan	145.672.447
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kota Palu	3 laporan	122.191.102	3 laporan	128.300.657
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palu	31%	322.205.524	54%	338.315.800
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Palu	2 dokumen	140.584.090	2 dokumen	147.613.294
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Palu	1 Dokumen	90.534.163	1 Dokumen	95.060.871
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Palu	1 Dokumen	91.087.271	1 Dokumen	95.641.635
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kota Palu	40%	98.690.686	60%	103.625.221
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Palu	2 dokumen	98.690.686	2 dokumen	103.625.221
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan kelompok usaha baru yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	Kota Palu	5 Inovasi	218.313.005	5 Inovasi	229.228.655
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Palu	5 dokumen	164.985.214	5 dokumen	173.234.475

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Palu	1 laporan	53.327.791	1 laporan	55.994.180
					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>10.567.067.016</b>		<b>11.095.420.367</b>
					<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					<b>10.567.067.016</b>		<b>11.095.420.367</b>
					<b>Inspektorat</b>					<b>10.567.067.016</b>		<b>11.095.420.367</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	9.083.440.985	BB	9.537.613.034
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	3 dokumen	8.750.174	3 dokumen	9.187.683
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	4.375.087	1 Dokumen	4.593.841
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.187.544	1 dokumen	2.296.921
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.187.544	1 dokumen	2.296.921
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	Kota Palu	<b>95%</b>	<b>7.667.879.302</b>	<b>95%</b>	<b>8.051.273.267</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	59 orang/bulan	7.666.566.776	59 orang/bulan	8.049.895.115
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.312.526	1 Laporan	1.378.152
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>112.355.153</b>	<b>100%</b>	<b>117.972.910</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	150 orang	1.822.953	150 orang	1.914.101
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	142 orang	110.532.200	142 orang	116.058.810
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>350.560.098</b>	<b>100%</b>	<b>368.088.103</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.056.291	1 paket	2.159.105
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	64.076.845	1 paket	67.280.687
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	12.427.799	1 paket	13.049.189
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	6.951.527	12 dokumen	7.299.104
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	6.684.161	12 laporan	7.018.369
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	30 laporan	258.363.475	30 laporan	271.281.649
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Kota Palu	<b>100%</b>	<b>295.566.688</b>		<b>310.345.022</b>



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	70.648.906	12 laporan	74.181.351
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	224.917.782	12 laporan	236.163.671
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>648.329.570</b>	<b>100%</b>	<b>680.746.048</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	10 unit	636.370.998	10 unit	668.189.548
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	5 unit	7.000.139	5 unit	7.350.146
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	4.958.432	1 unit	5.206.354
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.383.720.237</b>	<b>100%</b>	<b>1.452.906.249</b>
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.301.361.264</b>	<b>100%</b>	<b>1.366.429.328</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 laporan	346.320.226	1 laporan	363.636.237
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100 laporan	132.128.602	100 laporan	138.735.032
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Palu	1 laporan	43.347.463	1 laporan	45.514.837
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Palu	1 laporan	209.209.858	1 laporan	219.670.351
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Palu	1 kesepakatan	148.601.096	1 kesepakatan	156.031.151
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Palu	100 dokumen	421.754.019	100 dokumen	442.841.720
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>82.358.972</b>	<b>100%</b>	<b>86.476.921</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Palu	1 laporan	82.358.972	1 laporan	86.476.921
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>99.905.794</b>	<b>100%</b>	<b>104.901.084</b>
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.6.01.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Cakupan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>99.905.794</b>	<b>100%</b>	<b>104.901.084</b>
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Palu	1 perangkat daerah	12.347.468	1 perangkat daerah	12.964.841
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Palu	1 kegiatan	87.558.326	1 kegiatan	91.936.242
<b>7</b>						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>101.332.143.991</b>		<b>106.398.751.191</b>
<b>7</b>	<b>01</b>					<b>KECAMATAN</b>				<b>101.332.143.991</b>		<b>106.398.751.191</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>				<b>Kecamatan Palu Selatan</b>				<b>13.304.096.310</b>		<b>13.969.301.125</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>8.424.055.421</b>	<b>B</b>	<b>8.845.258.192</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4dokumen</b>	<b>5.922.410</b>	<b>4dokumen</b>	<b>6.218.530</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.361.138	1 Dokumen	1.429.195
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.581.837	1 dokumen	1.660.929
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.618.296	1 dokumen	1.699.211
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.361.138	1 laporan	1.429.195
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>7.078.143.965</b>	<b>100%</b>	<b>7.432.051.164</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	83 orang/bulan	7.077.102.792	83 orang/bulan	7.430.957.932
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.041.173	1 Laporan	1.093.232
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>300.894.005</b>	<b>100%</b>	<b>315.938.705</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	5.553.736	3 paket	5.831.422
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	61 paket	61.826.883	61 paket	64.918.227
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket%	72.161.438	4 paket%	75.769.510
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	38.154.357	2 paket	40.062.074
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	36 dokumen	12.250.244	36 dokumen	12.862.756
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	6.139.706	12 laporan	6.446.691
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	13 laporan	104.807.641	13 laporan	110.048.024
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>17.986.469</b>	<b>100%</b>	<b>18.885.793</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	17.986.469	5 paket	18.885.793
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>699.379.252</b>	<b>100%</b>	<b>734.348.215</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	100.627.003	12 laporan	105.658.353
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	598.752.250	12 laporan	628.689.862
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>321.729.320</b>	<b>100%</b>	<b>337.815.786</b>



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	8 unit	302.503.243	8 unit	317.628.405
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	49 unit	16.236.434	49 unit	17.048.256
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	16 unit	2.989.643	16 unit	3.139.125
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>13.855.804</b>	<b>Baik</b>	<b>14.548.594</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>1 laporan</b>	<b>13.855.804</b>	<b>1 laporan</b>	<b>14.548.594</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	13.855.804	1 laporan	14.548.594
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.777.759.714</b>	<b>100%</b>	<b>5.016.647.700</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.028.130.351</b>	<b>100%</b>	<b>4.229.536.868</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	26.894.632	30 lembaga kemasyarakatan	28.239.364
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	29 unit	891.870.532	29 unit	936.464.059
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga	3.109.365.186	25 lembaga	3.264.833.445
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>749.629.364</b>	<b>100%</b>	<b>787.110.832</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	749.629.364	25 lembaga kemasyarakatan	787.110.832
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>88.425.371</b>	<b>100%</b>	<b>92.846.640</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>88.425.371</b>	<b>100%</b>	<b>92.846.640</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	88.425.371	54 orang	92.846.640
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00				<b>Kecamatan Mantikulore</b>				<b>17.702.310.708</b>		<b>18.587.426.243</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>10.246.765.441</b>	<b>B</b>	<b>10.759.103.713</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>6.767.676</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>7.106.060</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.084.438	1 Dokumen	1.138.660
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.242.961	1 dokumen	2.355.109

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.242.961	1 dokumen	2.355.109
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.197.315	1 laporan	1.257.181
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>8.514.301.023</b>	<b>95%</b>	<b>8.940.016.075</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	101 orang/bulan	8.513.103.708	101 orang/bulan	8.938.758.893
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.197.315	1 Laporan	1.257.181
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>550.481.690</b>	<b>100%</b>	<b>578.005.775</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.851.924	1 paket	4.044.520
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	61.251.219	5 paket	64.313.780
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.880.071	1 paket	3.024.075
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	259.305.840	5 paket	272.271.132
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	28.730.711	3 paket	30.167.246
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	138 dokumen	19.250.383	138 dokumen	20.212.902
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	29.249.888	11 laporan	30.712.382
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	19 laporan	145.961.655	19 laporan	153.259.738
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>87.730.218</b>	<b>100%</b>	<b>92.116.729</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	24 unit	36.702.119	24 unit	38.537.225
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	50 unit	7.777.933	50 unit	8.166.829
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	14.583.624	1 unit	15.312.805
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	24.306.039	1 unit	25.521.341
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	9 unit	4.360.503	9 unit	4.578.529
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>793.041.117</b>	<b>100%</b>	<b>832.693.172</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	36 laporan	118.372.356	36 laporan	124.290.974

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	48 laporan	674.668.761	48 laporan	708.402.199
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>294.443.716</b>	<b>100%</b>	<b>309.165.902</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	25 unit	270.550.879	25 unit	284.078.423
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	78 unit	20.028.176	78 unit	21.029.585
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	40 unit	3.864.660	40 unit	4.057.893
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>15.106.641</b>	<b>Baik</b>	<b>15.861.973</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>15.106.641</b>	<b>100%</b>	<b>15.861.973</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	15.106.641	1 laporan	15.861.973
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>7.347.735.392</b>	<b>100%</b>	<b>7.715.122.161</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>6.078.938.848</b>	<b>100%</b>	<b>6.382.885.791</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	40 lembaga kemasyarakatan	43.459.198	40 lembaga kemasyarakatan	45.632.158
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	26 unit	1.569.936.801	26 unit	1.648.433.641
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	10 pokmas/ormas	4.465.542.850	10 pokmas/ormas	4.688.819.992
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>1.268.796.543</b>	<b>100%</b>	<b>1.332.236.371</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	40 lembaga kemasyarakatan	1.268.796.543	40 lembaga kemasyarakatan	1.332.236.371
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>92.703.234</b>	<b>100%</b>	<b>97.338.396</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>92.703.234</b>	<b>100%</b>	<b>97.338.396</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	92.703.234	54 orang	97.338.396
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00				<b>Kecamatan Palu Barat</b>				<b>11.861.383.274</b>		<b>12.454.452.438</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.884.889.230</b>	<b>B</b>	<b>7.229.133.692</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	5.013.947	4 dokumen	5.264.644

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.154.926	1 Dokumen	1.212.672
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.584.268	1 dokumen	1.663.481
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.186.232	1 dokumen	1.245.544
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.088.522	1 laporan	1.142.948
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>5.423.590.441</b>	<b>95%</b>	<b>5.694.769.963</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	61 orang/bulan	5.422.462.932	61 orang/bulan	5.693.586.079
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.127.509	1 Laporan	1.183.884
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>464.821.114</b>	<b>100%</b>	<b>488.062.170</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	22 paket	21.955.364	22 paket	23.053.133
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	286.707.010	4 paket	301.042.361
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	23.672.138	3 paket	24.855.745
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	99 dokumen	12.133.575	99 dokumen	12.740.254
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	10.026.241	11 laporan	10.527.553
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	27 laporan	110.326.786	27 laporan	115.843.125
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>41.464.888</b>	<b>100%</b>	<b>43.538.132</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	21.389.315	3 unit	22.458.780
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	10.777.298	5 paket	11.316.163
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	5 unit	9.298.275	5 unit	9.763.189
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>689.572.835</b>	<b>100%</b>	<b>724.051.477</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	69.166.043	12 laporan	72.624.345
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	81 laporan	620.406.792	81 laporan	651.427.131
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>260.426.006</b>	<b>100%</b>	<b>273.447.306</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 unit	246.477.840	22 unit	258.801.732
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	63 unit	10.326.567	63 unit	10.842.895
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	35 unit	3.621.600	35 unit	3.802.680
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>23.349.742</b>	<b>Baik</b>	<b>24.517.230</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>23.349.742</b>	<b>100%</b>	<b>24.517.230</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	23.349.742	1 laporan	24.517.230
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.852.828.416</b>	<b>100%</b>	<b>5.095.469.836</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.147.667.704</b>	<b>100%</b>	<b>4.355.051.090</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	33.345.941	30 lembaga kemasyarakatan	35.013.239
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	646 unit	1.470.853.319	646 unit	1.544.395.985
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas	2.643.468.444	7 pokmas	2.775.641.866
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>705.160.711</b>	<b>100%</b>	<b>740.418.747</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	705.160.711	30 lembaga kemasyarakatan	740.418.747
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>100.315.885</b>	<b>100%</b>	<b>105.331.680</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>100.315.885</b>	<b>100%</b>	<b>105.331.680</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	100.315.885	54 orang	105.331.680
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00				<b>Kecamatan Palu Timur</b>				<b>10.827.125.511</b>		<b>11.368.481.787</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.549.857.299</b>	<b>B</b>	<b>6.877.350.164</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.747.164</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.984.522</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	743.181	1 Dokumen	780.341
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.489.960	1 dokumen	1.564.458

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.489.960	1 dokumen	1.564.458
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.024.062	1 laporan	1.075.265
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>5.452.793.626</b>	<b>95%</b>	<b>5.725.433.307</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	64 orang/bulan	5.450.420.676	64 orang/bulan	5.722.941.710
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.372.950	1 Laporan	2.491.598
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>284.121.876</b>	<b>100%</b>	<b>298.327.970</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	14.726.994	3 paket	15.463.344
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	79.908.340	4 paket	83.903.757
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	17.200.509	4 paket	18.060.534
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	96 dokumen	10.616.878	96 dokumen	11.147.722
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	14.678.417	11 laporan	15.412.338
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	34 laporan	146.990.738	34 laporan	154.340.275
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>27.796.352</b>	<b>100%</b>	<b>29.186.169</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	8 unit	8.852.225	8 unit	9.294.836
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	14.583.624	2 unit	15.312.805
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	4.360.503	1 unit	4.578.529
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>674.846.875</b>	<b>100%</b>	<b>708.589.219</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	95.085.226	12 laporan	99.839.487
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	579.761.650	12 laporan	608.749.732
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>105.551.406</b>	<b>100%</b>	<b>110.828.977</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	79.227.966	12 unit	83.189.364



Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	52 unit	3.159.785	52 unit	3.317.774
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	5 unit	19.444.831	5 unit	20.417.073
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	16 unit	3.718.824	16 unit	3.904.765
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>35.513.651</b>	<b>Baik</b>	<b>37.289.334</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>35.513.651</b>	<b>100%</b>	<b>37.289.334</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	35.513.651	1 laporan	37.289.334
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.149.605.504</b>	<b>100%</b>	<b>4.357.085.780</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>3.472.277.041</b>	<b>100%</b>	<b>3.645.890.893</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	36.657.202	25 lembaga kemasyarakatan	38.490.062
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	32 unit	935.838.709	32 unit	982.630.644
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ormas	2.499.781.130	7 pokmas/ormas	2.624.770.187
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>677.328.464</b>	<b>100%</b>	<b>711.194.887</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	677.328.464	25 lembaga kemasyarakatan	711.194.887
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>92.149.056</b>	<b>100%</b>	<b>96.756.509</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>92.149.056</b>	<b>100%</b>	<b>96.756.509</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 Orang	92.149.056	54 Orang	96.756.509
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00				<b>Kecamatan Tatanga</b>				<b>12.984.014.548</b>		<b>13.633.215.275</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>7.599.946.644</b>	<b>BB</b>	<b>7.979.943.976</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.980.307</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>5.229.323</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.047.979	1 Dokumen	1.100.378
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.417.042	1 dokumen	1.487.894

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.417.042	1 dokumen	1.487.894
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.098.244	1 laporan	1.153.156
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>6.024.851.103</b>	<b>95%</b>	<b>6.326.093.658</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	70 orang/bulan	6.021.804.876	70 orang/bulan	6.322.895.120
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	3.046.227	2 laporan	3.198.539
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>524.651.705</b>	<b>100%</b>	<b>550.884.290</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	9.325.352	1 paket	9.791.620
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	45.665.422	5 paket	47.948.693
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	9 paket	247.826.516	9 paket	260.217.841
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	32.411.131	5 paket	34.031.688
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	12.133.575	24 dokumen	12.740.254
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	10.026.241	11 laporan	10.527.553
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	167.263.468	15 laporan	175.626.641
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>33.357.317</b>	<b>100%</b>	<b>35.025.182</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	33.357.317	10 unit	35.025.182
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>770.435.178</b>	<b>100%</b>	<b>808.956.937</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	68.776.369	12 laporan	72.215.187
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	701.658.809	12 laporan	736.741.749
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>241.671.034</b>	<b>100%</b>	<b>253.754.585</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	11 Unit	226.090.862	11 Unit	237.395.406
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	10 unit	10.937.718	10 unit	11.484.604



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Pendukung Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	5 unit	4.642.454	5 unit	4.874.576
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>26.853.312</b>	<b>Baik</b>	<b>28.195.978</b>
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>26.853.312</b>	<b>100%</b>	<b>28.195.978</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	26.853.312	1 laporan	28.195.978
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>5.251.843.051</b>	<b>100%</b>	<b>5.514.435.203</b>
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.403.608.752</b>	<b>100%</b>	<b>4.623.789.190</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	24 lembaga kemasyarakatan	45.985.082	24 lembaga kemasyarakatan	48.284.336
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	50 unit	1.155.093.062	50 unit	1.212.847.715
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ormas	3.202.530.609	7 pokmas/ormas	3.362.657.139
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>848.234.298</b>	<b>100%</b>	<b>890.646.013</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	24 lembaga kemasyarakatan	848.234.298	24 lembaga kemasyarakatan	890.646.013
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>105.371.542</b>	<b>100%</b>	<b>110.640.119</b>
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.06.00</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>105.371.542</b>	<b>100%</b>	<b>110.640.119</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	105.371.542	54 orang	110.640.119
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>				<b>Kecamatan Tawaeli</b>				<b>11.116.475.408</b>		<b>11.672.299.178</b>
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.065.602.313</b>	<b>B</b>	<b>6.368.882.428</b>
7	01	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.430.797</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.652.336</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	986.825	1 Dokumen	1.036.166
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.270.720	1 dokumen	1.334.256
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.149.190	1 dokumen	1.206.649

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.024.062	1 laporan	1.075.265
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>4.924.131.644</b>	<b>95%</b>	<b>5.170.338.226</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	50 orang/bulan	4.921.903.752	50 orang/bulan	5.167.998.940
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.227.892	1 Laporan	2.339.286
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>409.331.519</b>	<b>100%</b>	<b>429.798.095</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	104.122.402	3 paket	109.328.522
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	143.107.766	5 paket	150.263.155
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	33.486.916	3 paket	35.161.262
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 Dokumen	10.616.878	12 Dokumen	11.147.722
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	8.689.409	11 laporan	9.123.880
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	109.308.148	15 laporan	114.773.555
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>603.321.785</b>	<b>100%</b>	<b>633.487.874</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	39.638.289	12 laporan	41.620.203
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	563.683.496	12 laporan	591.867.671
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>124.386.568</b>	<b>100%</b>	<b>130.605.897</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	5 unit	83.253.046	5 unit	87.415.698
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	20 unit	7.243.200	20 unit	7.605.360
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	4 unit	33.890.323	4 unit	35.584.839
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>18.005.914</b>	<b>Baik</b>	<b>18.906.210</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>18.005.914</b>	<b>100%</b>	<b>18.906.210</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	18.005.914	1 laporan	18.906.210
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.932.697.132</b>	<b>100%</b>	<b>5.179.331.989</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.427.469.505</b>	<b>100%</b>	<b>4.648.842.980</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	31.631.880	25 lembaga kemasyarakatan	33.213.474
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Palu	100 paket	1.293.081.291	100 paket	1.357.735.355
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ormas	3.102.756.335	7 pokmas/ormas	3.257.894.152
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>505.227.627</b>		<b>530.489.009</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Palu	org/Pakmar/Lembaga Masyarakat	505.227.627	org/Pakmar/Lembaga Masyarakat	530.489.009
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>100.170.049</b>	<b>100%</b>	<b>105.178.552</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>100.170.049</b>		<b>105.178.552</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	100.170.049	54 orang	105.178.552
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00				<b>Kecamatan Ulujadi</b>			<b>12.813.131.096</b>		<b>13.453.787.651</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.750.814.832</b>	<b>B</b>	<b>7.088.355.574</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>5.834.811</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>6.126.551</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	1.232.705	1 Dokumen	1.294.340
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.462.737	1 dokumen	1.535.874
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.557.531	1 dokumen	1.635.408
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.581.837	1 laporan	1.660.929
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>5.166.342.831</b>	<b>95%</b>	<b>5.424.659.972</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	60 orang/bulan	5.164.516.572	60 orang/bulan	5.422.742.401

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	1.826.259	2 laporan	1.917.571
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>375.076.545</b>	<b>100%</b>	<b>393.830.373</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	33 paket	213.354.368	33 paket	224.022.087
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	24.904.454	3 paket	26.149.677
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	10.500.209	24 dokumen	11.025.219
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	24.169.925	11 laporan	25.378.422
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	102.147.589	15 laporan	107.254.968
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>53.764.959</b>	<b>100%</b>	<b>56.453.207</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	6 unit	53.764.959	6 unit	56.453.207
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>788.044.043</b>	<b>100%</b>	<b>827.446.245</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	89.966.374	12 laporan	94.464.693
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	698.077.669	12 laporan	732.981.552
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>361.751.644</b>	<b>100%</b>	<b>379.839.226</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	15 unit	353.682.039	15 unit	371.366.141
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	58 unit	8.069.605	58 unit	8.473.085
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>25.169.390</b>	<b>Baik</b>	<b>26.427.859</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>25.169.390</b>	<b>100%</b>	<b>26.427.859</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	25.169.390	1 laporan	26.427.859
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>5.953.096.590</b>	<b>100%</b>	<b>6.250.751.420</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>5.250.094.766</b>	<b>100%</b>	<b>5.512.599.504</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	38.257.706	30 lembaga kemasyarakatan	40.170.591
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	30 unit	1.551.697.549	30 unit	1.629.282.426
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	24 pokmas/ormas	3.660.139.511	24 pokmas/ormas	3.843.146.487
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>703.001.825</b>	<b>100%</b>	<b>738.151.916</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	703.001.825	30 lembaga kemasyarakatan	738.151.916
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>84.050.284</b>	<b>100%</b>	<b>88.252.798</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.00</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>84.050.284</b>	<b>100%</b>	<b>88.252.798</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	84.050.284	54 orang	88.252.798
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>				<b>Kecamatan Palu Utara</b>				<b>10.723.607.136</b>		<b>11.259.787.493</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>6.037.930.836</b>	<b>B</b>	<b>6.339.827.378</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4.765.150</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>5.003.408</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	804.919	1 Dokumen	845.165
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.489.960	1 dokumen	1.564.458
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.489.960	1 dokumen	1.564.458
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	980.311	1 laporan	1.029.327
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.509.811.749</b>	<b>100%</b>	<b>4.735.302.337</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	52 orang/bulan	4.508.552.016	52 orang/bulan	4.733.979.617
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.259.733	1 Laporan	1.322.720
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>425.729.758</b>	<b>100%</b>	<b>447.016.246</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.137.424	1 paket	3.294.295
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	44.597.936	2 paket	46.827.833

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	170.437.837	4 paket	178.959.728
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	30.646.027	3 paket	32.178.328
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	10.616.878	24 dokumen	11.147.722
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	8.689.409	11 laporan	9.123.880
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	16 laporan	157.604.248	16 laporan	165.484.460
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>472.678.963</b>	<b>100%</b>	<b>496.312.911</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	33.357.608	1 unit	35.025.489
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	67 unit	416.570.902	67 unit	437.399.447
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	22.750.453	2 unit	23.887.975
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>528.625.243</b>	<b>100%</b>	<b>555.056.505</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	74.988.992	12 laporan	78.738.442
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	453.636.251	12 laporan	476.318.063
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>96.319.973</b>	<b>100%</b>	<b>101.135.971</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	14 unit	86.694.781	14 unit	91.029.520
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	58 unit	7.000.139	58 unit	7.350.146
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 unit	2.625.052	18 unit	2.756.305
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>Baik</b>	<b>17.002.561</b>	<b>Baik</b>	<b>17.852.689</b>
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pada Masyarakat</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>17.002.561</b>	<b>100%</b>	<b>17.852.689</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	17.002.561	1 laporan	17.852.689
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.582.290.076</b>	<b>100%</b>	<b>4.811.404.580</b>
7	01	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>4.085.096.528</b>	<b>100%</b>	<b>4.289.351.355</b>

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	27.597.077	25 lembaga kemasyarakatan	28.976.931
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	27 unit	1.088.554.669	27 unit	1.142.982.402
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ormas	2.968.944.783	7 pokmas/ormas	3.117.392.022
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>497.193.548</b>	<b>100%</b>	<b>522.053.225</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	497.193.548	25 lembaga kemasyarakatan	522.053.225
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>86.383.664</b>	<b>100%</b>	<b>90.702.847</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.7.01.7.01.01.00</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>86.383.664</b>	<b>100%</b>	<b>90.702.847</b>
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	86.383.664	54 orang	90.702.847
<b>8</b>						<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>12.112.744.892</b>		<b>12.718.382.136</b>
<b>8</b>	<b>01</b>					<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>12.112.744.892</b>		<b>12.718.382.136</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>				<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>12.112.744.892</b>		<b>12.718.382.136</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>B</b>	<b>3.961.789.889</b>	<b>B</b>	<b>4.159.879.384</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>280.169.319</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>294.177.785</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	2.542.412	1 Dokumen	2.669.532
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.264.690	1 dokumen	3.427.924
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.562.245	1 dokumen	2.690.358
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.800.762	1 laporan	1.890.800
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	1 laporan	269.999.210	1 laporan	283.499.170
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi keuangan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>95%</b>	<b>2.623.936.421</b>	<b>95%</b>	<b>2.755.133.242</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	25 orang/bulan	2.621.960.340	25 orang/bulan	2.753.058.357
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.054.396	1 Laporan	1.107.116



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Palu	1 dokumen	921.685	1 dokumen	967.769
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>2.289.872</b>	<b>100%</b>	<b>2.404.366</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	665.013	1 dokumen	698.264
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.169.996	1 Laporan	1.228.495
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	334.354	1 Laporan	351.072
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	120.509	1 Dokumen	126.535
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>49.699.336</b>	<b>100%</b>	<b>52.184.303</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu	45 paket	26.250.522	45 paket	27.563.049
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu	2 Dokumen	947.936	2 Dokumen	995.332
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	12 Dokumen	22.500.878	12 Dokumen	23.625.922
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>285.280.664</b>	<b>100%</b>	<b>299.544.697</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.799.133	1 paket	1.889.090
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	17.337.984	10 paket	18.204.883
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	6.766.024	5 paket	7.104.325
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	3.500.070	24 dokumen	3.675.073
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	10.373.818	11 laporan	10.892.508
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	22 laporan	245.503.636	22 laporan	257.778.818
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>26.367.945</b>	<b>100%</b>	<b>27.686.342</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	2.232.107	1 Unit	2.343.713
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	5 Unit	24.135.838	5 Unit	25.342.630
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>100%</b>	<b>460.236.818</b>	<b>100%</b>	<b>483.248.659</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	59.622.520	12 laporan	62.603.646
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	400.614.298	12 laporan	420.645.013



Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	233.809.514	100%	245.499.990
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	21 unit	219.396.033	21 unit	230.365.835
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	57 Unit	14.413.481	57 Unit	15.134.155
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana</b>	Kota Palu	94%	3.736.038.264	96%	3.922.840.177
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Kota Palu	15 dokumen	3.736.038.264	15 dokumen	3.922.840.177
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Palu	2 Dokumen	2.413.930	2 Dokumen	2.534.626
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Palu	3 Dokumen	6.780.072	3 Dokumen	7.119.076
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	30 orang	2.146.824.344	30 orang	2.254.165.561
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	30 orang	1.573.141.892	30 orang	1.651.798.987
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	2 laporan	6.878.026	2 laporan	7.221.927
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03			<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila</b>	Kota Palu	85%	2.757.803.630	90%	2.895.693.811

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Palu	6 dokumen	2.757.803.630	6 dokumen	2.895.693.811	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	343.274	1 Dokumen	360.438
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	1.465.119	1 Dokumen	1.538.375
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	30 orang	1.990.112.969	30 orang	2.089.618.617
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	30 orang	760.091.062	30 orang	798.095.615
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	1 laporan	5.791.206	1 laporan	6.080.766
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>60%</b>	<b>28.598.948</b>	<b>65%</b>	<b>30.028.895</b>

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>28.598.948</b>		<b>30.028.895</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Palu	2 Dokumen	941.349	2 Dokumen	988.416
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Palu	1 Dokumen	978.172	1 Dokumen	1.027.081
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	50 orang	19.967.168	50 orang	20.965.527
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	17 orang	1.644.644	17 orang	1.726.876
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	1 laporan	5.067.615	1 laporan	5.320.995
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>94%</b>	<b>1.253.909.459</b>	<b>96%</b>	<b>1.316.604.932</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Kota Palu</b>	<b>17 dokumen</b>	<b>1.253.909.459</b>	<b>17 dokumen</b>	<b>1.316.604.932</b>
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Palu	3 Dokumen	10.263.128	3 Dokumen	10.776.284
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Palu	2 Dokumen	6.935.194	2 Dokumen	7.281.953

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
								Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	1866 orang	1.202.262.115	1866 orang	1.262.375.221
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	262 orang	21.595.746	262 orang	22.675.533
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	3 laporan	12.853.277	3 laporan	13.495.940
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kota Palu	7%	374.604.702	8%	393.334.937
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Kota Palu	16 dokumen	374.604.702	16 dokumen	393.334.937
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	6.781.385	3 Dokumen	7.120.454
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	6.754.794	3 Dokumen	7.092.534
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Palu	116 orang	79.041.271	116 orang	82.993.335

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024	
									Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Palu	121 orang	173.539.482	121 orang	182.216.456
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Palu	7 laporan	3.412.568	7 laporan	3.583.196
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	105.075.202	1 Dokumen	110.328.962
<b>Total</b>										<b>1.330.435.837.315</b>		<b>1.396.957.629.181</b>